



ARSIP NASIONAL
ANRI REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KEUANGAN

UNTUK PERIODE YANG
BERAKHIR PADA

31 DESEMBER 2020

(AUDITED)

2020

L A P O R A N

K E U A N G A N

087 BAGIAN
ANGGARAN

BAGIAN ANGGARAN 087



LAPORAN KEUANGAN
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020

(AUDITED)

Jl. Ampera Raya No.7, Cilandak, Jakarta Selatan

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) adalah salah satu Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Arsip Nasional Republik Indonesia untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Diharapkan Laporan Keuangan ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada ANRI. Disamping itu Laporan Keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*).

Jakarta, Mei 2021

Sekretaris Utama,



Imam Gunarto

NIP 19630728 199203 1 001

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Telah Direviu	iii
Pernyataan Tanggung Jawab	iv
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	5
II. Neraca	6
III. Laporan Operasional	8
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	10
V. Catatan Atas Laporan Keuangan	11
A. Penjelasan Umum	11
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	65
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	104
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	143
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	171
F. Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya	176

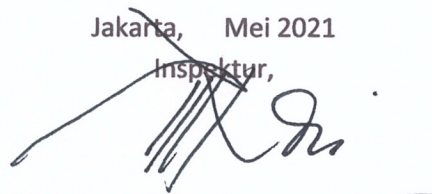
PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KEUANGAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2020 (AUDITED)
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2020 yang terdiri atas: Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan merupakan penyajian manajemen Arsip Nasional Republik Indonesia.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Reviu mempunyai ruang lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang bertujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Jakarta, Mei 2021
Inspektur,



Syaifuddin

NIP. 19641231 199303 1 001



PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 (*Audited*) Arsip Nasional Republik Indonesia yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 sebagaimana terlampir merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, Mei 2021

Plt. Kepala,



M. Taufik

NIP 19600427 198103 1 001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2020 untuk Periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020. Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2020 untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) (netto) sebesar Rp13.664.271.146,00 atau mencapai 115,06 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp11.876.134.000,00.

Realisasi Belanja Negara (bruto) pada TA 2020 untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp156.837.957.366,00 atau mencapai 94,81 persen dengan pengembalian belanja sebesar Rp205.420.524,00, sehingga Realisasi Belanja Negara (netto) sebesar Rp156.632.536.842,00 atau mencapai 94,69 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp165.418.004.000,00.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2020 dan 2019 dapat disajikan sebagai berikut :

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2020 dan 2019

Uraian	TA 2020			TA 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi Netto (Rp)	Real. thd Anggaran (%)	Realisasi (Rp)
Pendapatan Negara	11.876.134.000,00	13.664.271.146,00	115,06%	13.802.999.892,00
Belanja Negara	165.418.004.000,00	156.632.536.842,00	94,69%	309.389.633.258,00

Ringkasan Laporan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2020

AKUN	PAGU	REALISASI BRUTO		PENGEMBALIAN BELANJA (Rp)	REALISASI NETTO	
		(Rp)	(%)		(Rp)	(%)
51	100.000.295.000,00	93.740.969.989,00	93,74	24.001.692,00	93.716.968.297,00	93,72
52	60.504.900.000,00	58.263.700.037,00	96,30	181.418.832,00	58.082.281.205,00	96,00
53	4.912.809.000,00	4.833.287.340,00	98,38	0,00	4.833.287.340,00	98,38
JUMLAH	165.418.004.000,00	156.837.957.366,00	94,81	205.420.524,00	156.632.536.842,00	94,69

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2020. Nilai Aset per tanggal 31 Desember 2020 dicatat dan disajikan sebesar Rp1.218.339.769.820,00 yang terdiri dari : Aset Lancar (netto) sebesar Rp2.450.555.292,00; Aset Tetap (netto) sebesar Rp1.211.182.494.157,00; Aset Lainnya (netto) sebesar Rp4.706.720.371,00. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp717.255.544,00 dan Rp1.217.622.514.276,00.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 dapat disajikan sebagai berikut :

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)	Kenaikan/ (penurunan)	
			(Rp)	(%)
Aset				
Aset Lancar	2.450.555.292,00	1.807.676.408,00	642.878.884,00	35,56
Aset Tetap	1.211.182.494.157,00	1.238.691.478.781,00	(27.508.984.624,00)	(2,22)
Aset Lainnya	4.706.720.371,00	5.985.223.649,00	(1.278.503.278,00)	(21,36)
Jumlah Aset	1.218.339.769.820,00	1.246.484.378.838,00	(28.144.609.018,00)	(2,26)
Kewajiban				
Kewajiban Jangka Pendek	717.255.544,00	784.578.417,00	(67.322.873,00)	(8,58)
Jumlah Kewajiban	717.255.544,00	784.578.417,00	(67.322.873,00)	(8,58)
Ekuitas				
Ekuitas	1.217.622.514.276,00	1.245.699.800.421,00	(28.077.286.145,00)	(2,25)
Jumlah Ekuitas	1.217.622.514.276,00	1.245.699.800.421,00	(28.077.286.145,00)	(2,25)
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	1.218.339.769.820,00	1.246.484.378.838,00	(28.144.609.018,00)	(2,26)

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan Operasional untuk periode sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp12.125.465.966,00, sedangkan jumlah Beban Operasional adalah sebesar Rp187.649.987.391,00 sehingga terdapat defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp175.524.521.425,00. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar Rp1.365.642.323,00 dan Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp174.158.879.102,00.

Ringkasan Laporan Operasional per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 dapat disajikan sebagai berikut :

Ringkasan Laporan Operasional per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)	Kenaikan/ (penurunan)	
			(Rp)	(%)
Pendapatan Operasional	12.125.465.966,00	13.366.513.594,00	(1.241.047.628,00)	(9,28)
Beban Operasional	187.649.987.391,00	243.141.558.641,00	(55.491.571.250,00)	(22,82)
Surplus/defisit dari operasi	(175.524.521.425,00)	(229.775.045.047,00)	54.250.523.622,00	23,61
Kegiatan Non Operasional	1.365.642.323,00	366.398.781,00	999.243.542,00	272,72
Pos-pos Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus/defisit dari non operasi	1.365.642.323,00	366.398.781,00	999.243.542,00	272,72
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(174.158.879.102,00)	(229.408.646.266,00)	55.249.767.164,00	24,08

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2020 adalah sebesar Rp1.245.699.800.421,00 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp174.158.879.102,00 kemudian ditambah dengan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar Rp0,00; Koreksi yang Menambah Ekuitas sebesar Rp136.182.093,00 dengan rincian Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi sebesar Rp136.182.093,00 ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp145.945.410.864,00 sehingga Ekuitas Entitas pada tanggal 31 Desember 2020 adalah senilai Rp1.217.622.514.276,00.

Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 dapat disajikan sebagai berikut :

Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
			(Rp)	(%)
Ekuitas Awal	1.245.699.800.421,00	469.273.762.570,00	776.426.037.851,00	165,45
Surplus / Defisit-LO	(174.158.879.102,00)	(229.408.646.266,00)	55.249.767.164,00	24,08
Dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi/kesalahan mendasar	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi yang menambah/mengurangi Ekuitas	136.182.093,00	710.248.050.751,00	(710.111.868.658,00)	(99,98)
Penyesuaian Nilai Aset	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Atas Reklasifikasi	0,00	25.519.398.478,00	(25.519.398.478,00)	(100,00)
Selisih Revaluasi Aset	0,00	724.611.109.018,00	(724.611.109.018,00)	(100,00)
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	136.182.093,00	(39.898.698.245,00)	40.034.880.338,00	100,34
Lain-lain	0,00	16.241.500,00	(16.241.500,00)	(100,00)
Transaksi Antar Entitas	145.945.410.864,00	295.586.633.366,00	(149.641.222.502,00)	(50,63)
Kenaikan/Penurunan Ekuitas	(28.077.286.145,00)	776.426.037.851,00	(804.503.323.996,00)	(103,62)
Ekuitas Akhir	1.217.622.514.276,00	1.245.699.800.421,00	(28.077.286.145,00)	(2,25)

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2020 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019

(Dalam Rupiah)

KODE AKUN	URAIAN	CATATAN	TAHUN 2020		Thd Angg (%)	TA 2019
			ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
42	PENDAPATAN Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	11.876.134.000,00	13.664.271.146,00	115,06	13.802.999.892,00
	JUMLAH PENDAPATAN		11.876.134.000,00	13.664.271.146,00	115,06	13.802.999.892,00
	BELANJA	B.2				
	Belanja Operasi					
51	Belanja Pegawai	B.3	100.000.295.000,00	93.716.968.297,00	93,72	100.092.865.098,00
52	Belanja Barang	B.4	60.504.900.000,00	58.082.281.205,00	96,00	107.935.972.063,00
53	Belanja Modal	B.5	4.912.809.000,00	4.833.287.340,00	98,38	101.360.796.097,00
57	Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-	0,00	-
	JUMLAH BELANJA		165.418.004.000,00	156.632.536.842,00	94,69	309.389.633.258,00

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

Jakarta, Mei 2021

Pengguna Anggaran,



M. Taufik

NIP 19600427 198103 1 001

II. NERACA

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NERACA UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019

(Dalam Rupiah)

KODE AKUN	URAIAN	CATATAN	2020	2019
1	ASET			
11	ASET LANCAR		2.450.555.292	1.807.676.408
1116	Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	2.720.000,00
1171	Persediaan	C.9	2.450.555.292	1.804.956.408,00
1171	Persediaan yang Belum Diregister	C.9.a	-	-
13	ASET TETAP		1.211.182.494.157	1.238.691.478.781
1311	Tanah	C.12	805.323.718.068	802.566.806.600,00
1321	Peralatan dan Mesin	C.13	219.324.401.371	221.057.763.568,00
1331	Gedung dan Bangunan	C.14	365.362.212.486	364.584.089.636,00
1341	Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.15	62.881.974.526	62.881.974.526,00
1351	Aset Tetap Lainnya	C.16	26.865.394.160	26.865.394.160,00
1361	Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.17	-	-
1371	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	C.18	(189.861.456.321)	(182.723.430.638,00)
1372	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	C.18	(44.859.747.200)	(30.986.612.256,00)
1373	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.18	(33.793.519.833)	(25.494.023.715,00)
1374	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	C.18	(60.483.100)	(60.483.100)
15	PIUTANG JANGKA PANJANG		-	-
1521	Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi		-	-
16	ASET LAINNYA		4.706.720.371	5.985.223.649
1621	Aset Tak Berwujud	C.19	16.541.087.383	15.970.656.383,00
1661	Aset Lain-lain	C.20	10.678.350.353	5.719.311.911,00
1691	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	C.21	(10.629.090.587)	(5.554.278.612)
1693	Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya	C.21	(11.883.626.778)	(10.150.466.033)
JUMLAH ASET			1.218.339.769.820	1.246.484.378.838

2	KEWAJIBAN			
21	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		717.255.544	784.578.417
2121	Utang kepada Pihak Ketiga	C.22	620.664.028	781.858.417,00
2192	Pendapatan Diterima Dimuka	C.23	96.591.516	-
2195	Uang Muka dari KPPN	C.25	-	2.720.000,00
	JUMLAH KEWAJIBAN		717.255.544	784.578.417
3	EKUITAS			
31	EKUITAS		142.968.265.696	295.586.633.366
3131	Due to- Due from	C.27	142.968.265.696	295.586.633.366
3132	Transfer	C.27	-	-
39	EKUITAS		1.248.813.127.682	1.179.521.813.321
3911	Ekuitas	C.27	1.248.813.127.682	1.179.521.813.321
	Defisit-LO		(174.158.879.102)	(229.408.646.266)
	JUMLAH EKUITAS		1.217.622.514.276	1.245.699.800.421
	JUMLAH KEWAJIBAN & EKUITAS		1.218.339.769.820	1.246.484.378.838

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini

Jakarta, Mei 2021

Pengguna Anggaran,



M. Taufik

NIP 19600427 198103 1 001

III. LAPORAN OPERASIONAL

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019

(Dalam Rupiah)

KODE AKUN	URAIAN	CATATAN	2020	2019
	KEGIATAN OPERASIONAL			
	PENDAPATAN OPERASIONAL			
1123	Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	12.125.465.966,00	13.366.513.594,00
	JUMLAH PENDAPATAN		12.125.465.966,00	13.366.513.594,00
	BEBAN OPERASIONAL			
1211	Beban Pegawai	D.2	93.709.117.239,00	98.235.109.047,00
1212	Beban Persediaan	D.3	3.724.064.943,00	5.210.490.065,00
1213	Beban Barang dan Jasa	D.4	38.097.836.669,00	48.446.714.781,00
1214	Beban Pemeliharaan	D.5	8.981.402.239,00	9.110.528.492,00
1215	Beban Perjalanan Dinas	D.6	6.335.944.967,00	42.140.628.136,00
1216	Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.7	4.438.023,00	4.334.256.173,00
1220	Beban Bantuan Sosial	D.8	0,00	0,00
1221	Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	36.797.183.311,00	35.663.831.947,00
1222	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	0,00	0,00
	JUMLAH BEBAN OPERASIONAL		187.649.987.391,00	243.141.558.641,00
	Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(175.524.521.425,00)	(229.775.045.047,00)

KEGIATAN NON OPERASIONAL				
	Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	D.11.1	73.667.428,00	(16.369.904,00)
2111	Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.11.1.1	185.921.000,00	94.999.999,00
2112	Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.11.1.2	112.253.572,00	111.369.903,00
	Surplus/(Defisit) Pelepasan Kewajiban Jangka Panjang	D.11.2	0,00	0,00
2121	Pendapatan Penyel esian Kewajiban Jangka Panjang	D.11.2.1	0,00	0,00
2122	Beban Penyel esian Kewajiban Jangka Panjang	D.11.2.2	0,00	0,00
	Surplus/(Defisit) Pelepasan Keg. Non Operasional Lainnya	D.11.3	1.291.974.895,00	382.768.685,00
2131	Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.11.3.1	1.403.507.702,00	412.360.234,00
2132	Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.11.3.2	111.532.807,00	29.591.549,00
SURPLUS / (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL			1.365.642.323,00	366.398.781,00
	SURPLUS / (DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA		(174.158.879.102,00)	(229.408.646.266,00)
3112	POS LUAR BIASA	D.12		
	Beban Luar Biasa		0,00	0,00
	Surplus (Defisit) dari Pos Luar Biasa		0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT LO			(174.158.879.102,00)	(229.408.646.266,00)

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini

Jakarta, Mei 2021
Pengguna Anggaran,


M. Taufik
NIP 19600427 198103 1 001

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019

(Dalam Rupiah)

KODE AKUN	URAIAN	CATATAN	2020	2019
391111	EKUITAS	E.1	1.245.699.800.421,00	469.273.762.570,00
	SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(174.158.879.102,00)	(229.408.646.266,00)
	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	E.3	0,00	0,00
	KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.4	136.182.093,00	710.248.050.751,00
391114	Revaluasi Aset Tetap	E.4.1	0,00	724.611.109.018,00
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E.4.2	136.182.093,00	(39.836.299.654,00)
391118	Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	E.4.3	0,00	(62.398.591,00)
391121	Ekuitas Transaksi Lainnya	E.4.4	0,00	16.241.500,00
391151	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	E.4.5	0,00	25.519.398.478,00
31	Transaksi Antar Entitas	E.5	145.945.410.864,00	295.586.633.366,00
	KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.6	(28.077.286.145,00)	776.426.037.851,00
	EKUITAS AKHIR	E.7	1.217.622.514.276,00	1.245.699.800.421,00

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini

Jakarta, Mei 2021

Pengguna Anggaran,


M. Taufik
 NIP 19600427 198103 1 001

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Arsip Nasional Republik Indonesia

Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis

Sejarah Lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia

***Landarchief* (1892- 1942)**

Lembaga kearsipan di Indonesia, seperti yang kita kenal sekarang ini, secara de facto sudah ada sejak 28 Januari 1892, ketika Pemerintah Hindia Belanda mendirikan *Landarchief*. Pada tanggal tersebut dikukuhkan pula jabatan *Landarchivaris* yang bertanggungjawab memelihara arsip-arsip pada masa VOC hingga masa pemerintahan Hindia Belanda untuk kepentingan administrasi dan ilmu pengetahuan, serta membantu kelancaran pelaksanaan pemerintahan. Adapun *Landarchivaris* pertama adalah Mr. Jacob Anne van der Chijs yang berlangsung hingga tahun 1905. Pengganti Mr. Jacob Anne van der Chijs adalah Dr. F. de Haan 1905 - 1922 yang hasil karya-karyanya banyak dipakai sebagai referensi bagi ahli-ahli sejarah Indonesia. Pengganti de Haan adalah E.C. Godee Molsbergen, yang menjabat dari tahun 1922 -1937. Pejabat *Landarchivaris* yang terakhir pada masa Pemerintahan Hindia Belanda adalah Dr. Frans Rijndert Johan Verhoeven dari 1937 - 1942. Pada masa pergerakan nasionalisme kebangsaan di Indonesia, terutama pada tahun 1926-1929, Pemerintah Hindia Belanda berusaha menangkis dan menolak tuntutan Indonesia Merdeka. Dalam rangka penolakan tersebut, *Lansarchief* mendapat tugas khusus, yaitu: ikut serta secara aktif dalam pekerjaan ilmiah untuk penulisan sejarah Hindia Belanda, serta mengawasi dan mengamankan peninggalan-peninggalan orang Belanda. Pada tahun 1940-1942 pemerintah Hindia Belanda menerbitkan *Arschief Ordonantie* yang bertujuan menjamin keselamatan arsip-arsip pemerintah Hindia Belanda, yang isinya antara lain :

1. Semua arsip-arsip pemerintah adalah hak milik tunggal pemerintah;
2. Batas arsip baru adalah 40 tahun;
3. Arsip-arsip yang melampaui masa usia 40 tahun diperlakukan secara khusus menurut peraturan-peraturan tertentu diserahkan kepada *Algemeen*

Landarchief di Batavia (Jakarta).

Kobunsjokan (1942-1945)

Masa pendudukan Jepang merupakan masa yang sepi dalam dunia kearsipan, karena pada masa itu hampir tidak mewariskan peninggalan arsip. Oleh karena itu, Arsip Nasional RI tidak memiliki khasanah arsip pada masa pendudukan Jepang. Lembaga Kearsipan yang pada masa Hindia Belanda bernama *Landarchief*, pada masa pendudukan Jepang berganti dengan istilah *Kobunsjokan* yang ditempatkan dibawah *Bunkyojoku*. Sebagaimana pegawai-pegawai Belanda lainnya, sebagian pegawai *Landarchief* pun dimasukkan kamp tawanan Jepang. Meskipun demikian, pada masa tersebut posisi *Landarchief* sangat penting bagi orang-orang Belanda yang ingin mendapatkan keterangan asal-usul keturunannya. Keterangan dari arsip tersebut diperlukan untuk membebaskan diri dari tawanan Jepang, jika mereka dapat menunjukkan bukti turunan orang Indonesia meski bukan dari hasil pernikahan.

Arsip Negeri (1945-1947)

Secara yuridis, keberadaan lembaga kearsipan Indonesia dimulai sejak diproklamasikan kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Namun demikian tidak dipungkiri, bahwa keberadaan dan perkembangan Arsip Nasional RI merupakan hasil dari pengalaman kegiatan dan organisasi kearsipan pada masa pemerintah Kolonial Belanda (*Landarchief*) dan produk-produk kearsipannya. Setelah kemerdekaan Republik Indonesia, lembaga kearsipan (*Landarchief*) diambil oleh pemerintah RI dan ditempatkan dalam lingkungan Kementerian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan, dan diberi nama Arsip Negeri. Keberadaan Arsip Negeri ini berlangsung sampai pertengahan tahun 1947 ketika pemerintah NICA datang ke Indonesia.

Landsarchief (1947-1949)

Sejak Belanda melancarkan agresi militer yang pertama dan berhasil menduduki wilayah Indonesia di tahun 1947, keberadaan Arsip Negeri diambil

alih kembali oleh pemerintah Belanda. Nama Lembaga Arsip Negeri berganti lagi menjadi *Landsarchief* kembali. Sebagai pimpinan *Landsarchief* adalah Prof.W. Ph. Coolhaas yang menjabat hingga berdirinya Republik Indonesia Serikat (RIS) dan diakuinya kedaulatan Pemerintah Republik Indonesia oleh Belanda pada akhir tahun 1949. Setelah itu lembaga kearsipan kembali ketangan Pemerintah Republik Indonesia.

Arsip Negara (1950-1959)

Setelah Konferensi Meja Bundar tanggal 27 Desember 1949, Pemerintah Belanda melaksanakan pengembalian kedaulatan kepada Pemerintah Republik Indonesia, termasuk pengembalian lembaga-lembaga pemerintah. Sebagaimana tahun 1945-1947, *Landsarchief* ditempatkan kembali di bawah Kementerian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan (PP dan K). Pada masa pengambilalihan *Landsarchief* oleh pemerintah Republik Indonesia Serikat, masih diusahakan konsepsi asli tentang statusnya sebagai Arsip Negeri RIS. Hal tersebut dimaksudkan agar arsip-arsip pemerintah pusat dapat disalurkan ke Arsip Negeri RIS. Namun demikian konsep Arsip Negeri itu tidak bertahan lama. Pada tanggal 26 April 1950 melalui SK Menteri PP dan K nomor 9052/B, nama Arsip Negeri berubah menjadi Arsip Negara RIS. Sedangkan sebagai pimpinan lembaga Arsip Negara tersebut adalah Prof. R. Soekanto. Prof. R. Soekanto merupakan orang asli Indonesia yang pertama kalinya memimpin lembaga kearsipan Indonesia. Kepemimpinan Prof. R. Soekanto berlangsung selama enam tahun hingga tahun 1957. Sebagai penggantinya adalah Drs. R. Mohammad Ali, seorang sejarawan yang menulis buku Pengantar Ilmu Sejarah Indonesia. Pergantian ini merupakan awal perubahan dasar dalam kepemimpinan di Arsip Negara, karena untuk pertama kalinya istilah Kepala Arsip Negara dipakai untuk jabatan tersebut. Nama Arsip Negara secara resmi dipakai hingga tahun 1959.

Arsip Nasional (1959-1967)

Arsip Nasional dibawah Kementerian PP dan K (1959-1961)

Pada masa kepemimpinan Drs. R. Mohammad Ali diupayakan berbagai usaha untuk meningkatkan peran dan status lembaga Arsip Negara. Langkah pertama yang diambil adalah memasukkan Arsip Negara dalam Lembaga Sejarah pada Kementerian PP dan K. Perubahan itu ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri nomor 130433/5, tanggal 24 Desember 1957. Berdasarkan SK menteri PP dan K Nomor 69626/a/s nama Arsip Negara berganti menjadi Arsip Nasional. Perubahan ini berlaku surut semenjak 1 Januari 1959.

Arsip Nasional dibawah Kementerian Pertama RI (1961-1962)

Perubahan kelembagaan Arsip Nasional tidak berhenti sampai disitu. Berdasarkan Keputusan Presiden RI nomor 215 tanggal 16 Mei 1961, penyelenggaraan segala urusan Arsip Nasional dipindahkan ke Kementerian Pertama RI, termasuk wewenang, tugas dan kewajiban, perlengkapan materiil dan personalia, serta hak-hak dan kewajiban keuangan dan lain-lain. Tugas dan Fungsi Arsip Nasional mengalami perluasan, sejak keluarnya Peraturan Presiden nomor 19 tanggal 26 Desember 1961 tentang Pokok-pokok Kearsipan Nasional. Berdasarkan Keputusan Presiden tersebut, tugas dan fungsi arsip Nasional tidak hanya menyelenggarakan kearsipan statis saja, akan tetapi juga terlibat dalam penyelenggaraan kearsipan baru (dinamis).

Arsip Nasional dibawah Menteri Pertama Bidang Khusus (1963-1964)

Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 188 tahun 1962, Arsip Nasional RI ditempatkan di bawah Wakil Menteri Pertama Bidang Khusus. Penempatan Arsip Nasional di Bidang Khusus dimaksudkan supaya arsip lebih diperhatikan, karena bidang ini khusus diperuntukkan bagi tujuan penelitian sejarah.

Arsip Nasional dibawah Menko Hubra (1964-1966)

Pada tahun 1964 nama Kementerian Pertama Bidang Khusus berganti menjadi Kementerian Kompartimen Hubungan dengan Rakyat (Menko Hubra). Perubahan tersebut disesuaikan dengan tugas dan fungsinya dalam mengkoordinasi kementerian-kementerian negara. Dengan bergantinya nama

kementerian tersebut, otomatis Arsip Nasional berada di bawah kementerian yang baru tersebut. Di bawah kementerian ini, Arsip Nasional mendapat tugas untuk melakukan pembinaan arsip. Namun demikian, perubahan tersebut tidak mempengaruhi tugas dan fungsi Arsip Nasional sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 19 tahun 1961.

Arsip Nasional dibawah Wakil Perdana Menteri Bidang Lembaga-lembaga Politik (1966-1967)

Berdasarkan Keputusan Wakil Perdana Menteri No.08/WPM/BLLP/KPT/1966, Arsip Nasional ditempatkan di bawah Waperdam RI bidang Lembaga-lembaga Politik. Namun secara fungsional, Arsip Nasional tetap memusatkan kegiatan-kegiatan ilmiah dan kesejarahan.

Arsip Nasional RI (1967- sekarang)

Tahun 1967 merupakan suatu periode yang sangat penting bagi Arsip Nasional, karena berdasarkan Keputusan Presiden 228/1967 tanggal 2 Desember 1967, Arsip Nasional ditetapkan sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Sementara anggaran pembelanjannya dibebankan kepada anggaran Sekretariat Negara. Penetapan Arsip Nasional sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen diperkuat melalui Surat Pimpinan MPRS Nomor A.9/1/24/MPRS/1967 yang menegaskan, bahwa Arsip Nasional sebagai aparat teknis pemerintah tidak bertentangan dengan UUD 1945, bahkan merupakan penyempurnaan pekerjaan di bawah Presidium Kabinet. Dengan status baru tersebut, maka pada tahun 1968 Arsip Nasional berusaha menyusun pengajuan sebagai berikut:

1. Mengajukan usulan perubahan Arsip Nasional menjadi Arsip Nasional RI;
2. Mengajukan usulan perubahan Perpres Nomor 19/1961 menjadi Undang-Undang tentang Pokok-pokok Kearsipan.

Usulan-usulan tersebut hingga masa berakhirnya kepemimpinan Drs. R. Mohammad Ali (1970) belum terlaksana. Oleh karena itu Dra. Sumartini,

wanita pertama yang menjabat sebagai kepala Arsip Nasional, berjuang untuk melanjutkan cita-cita pemimpin sebelumnya. Atas usaha-usaha beliau, serta atas dukungan Menteri Sekretaris Negara Sudharmono, SH, cita-cita dalam memajukan Arsip Nasional tercapai dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1971, yang kemudian dikenal dengan Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan. Tiga tahun kemudian, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1974 secara tegas menyatakan, bahwa Arsip Nasional diubah menjadi Arsip Nasional Republik Indonesia yang berkedudukan di Ibukota RI dan langsung bertanggungjawab kepada Presiden. Dengan keputusan tersebut, maka secara yuridis Arsip Nasional RI sah sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen. Sebagaimana termaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 19 ayat (1) ANRI adalah lembaga kearsipan nasional yang wajib melaksanakan pengelolaan arsip statis yang berskala nasional yang diterima dari lembaga negara, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan serta melaksanakan pembinaan kearsipan secara nasional terhadap pencipta arsip tingkat pusat dan daerah, arsip daerah provinsi, arsip daerah provinsi, arsip daerah kabupaten/kota dan arsip perguruan tinggi yang dilaksanakan secara terkoordinasi dengan lembaga terkait.

VISI ANRI

Sebagaimana diamanatkan dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam rangka mewujudkan kondisi tersebut, maka disusunlah visi pembangunan nasional 2000-2025 yaitu mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur. Guna mewujudkan visi pembangunan jangka panjang tersebut, maka

ditetapkan visi pembangunan nasional 2020-2024 yaitu terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Sejalan dengan visi pembangunan nasional jangka menengah Tahun 2020-2024 tersebut, ANRI telah menetapkan visi perubahan pembangunan kearsipan Tahun 2020-2024, yaitu Menjadikan Arsip Nasional Republik Indonesia yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam melakukan pelayanan tugas- tugas Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Adapun visi Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2000-2025 adalah **“Arsip sebagai Simpul Pemersatu Bangsa dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dicapai pada Tahun 2025”**.

Arsip merupakan bukti dari dinamika sejarah perkembangan perjalanan bangsa. Melalui arsip kita dapat mengetahui keberhasilan dan berbagai kegagalan yang dialami bangsa ini mulai dari Sabang sampai Merauke. Dalam arsip tertuang informasi yang mengandung bukti historis, nilai budaya dan harkat kebangsaan, yang dapat menjalin dan mempertautkan keanekaragaman daerah dalam satu ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

MISI ANRI

Dalam rangka mencapai Visi ANRI tahun 2020-2024, Arsip Nasional Republik Indonesia melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.” dan “Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya”, dengan uraian sebagai berikut :

1. Memberdayakan arsip sebagai tulang punggung manajemen pemerintahan dan pembangunan;
2. Memberdayakan arsip sebagai bukti akuntabilitas kinerja organisasi;
3. Memberdayakan arsip sebagai alat bukti sah;
4. Melestarikan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan

5. Memberikan akses arsip kepada publik untuk kepentingan pemerintahan, pembangunan, penelitian dan ilmu pengetahuan untuk kesejahteraan rakyat sesuai peraturan perundang-undangan dan kaidah-kaidah kearsipan demi kemaslahatan bangsa.

Misi merupakan langkah utama sesuai dengan tugas pokok dan fungsi ANRI. Karena itu, ada 5 (lima) misi atau langkah utama yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai Visi ANRI di tahun 2020-2024. ANRI bertanggung jawab untuk menyelenggarakan kearsipan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, yang dimulai dari daerah hingga tingkat nasional, melibatkan peran serta masyarakat dan dalam rangka terwujudnya penyelenggaraan kearsipan nasional yang komprehensif dan terpadu yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lain. Misi pertama dan kedua tersebut sebagai bagian dari pelaksanaan peran ANRI sebagai pengambil kebijakan (*policy maker*).

Agar sistem akses dan pelayanan arsip dapat dilaksanakan dengan baik dan menghasilkan penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif dan terpadu, maka diperlukan masukan dari hasil kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip. Pemanfaatan arsip sebagai hasil dari pengelolaan arsip yang baik, tidak hanya terbatas sebagai bukti akuntabilitas dalam rangka menjamin transparansi penyelenggaraan pemerintah, tetapi juga dapat melindungi, menyelamatkan, dan melestarikan arsip. Misi ketiga tersebut merupakan pelaksanaan peran sebagai *think tank* yang strategis, mengingat pengelolaan arsip yang andal dapat meningkatkan pemanfaatan arsip. Selain itu, hasil *think tank*, diharapkan dapat meningkatkan mutu penyelenggaraan kearsipan nasional. Jika peran sebagai *think tank* dapat dilaksanakan dengan baik, maka akan meningkatkan citra (*brand image*) ANRI. Karena itu, peningkatan kualitas peran sebagai *think tank* merupakan bagian dari pembangunan citra lembaga (*organizational brand image building*).

Kemudian, agar semua tugas tersebut dapat berjalan efisien dan efektif, maka

diperlukan pelaksanaan koordinasi (peran sebagai koordinator) yang lebih baik, lebih berkualitas dengan pencipta arsip dan lembaga kearsipan baik pusat dan daerah maupun masyarakat pada umumnya. Pelaksanaan koordinasi ini untuk mewujudkan sinergitas berkelanjutan antara ANRI dengan lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan.

Pencapaian Visi dan Misi tersebut dilaksanakan melalui berbagai upaya dengan tanpa meninggalkan nilai-nilai ANRI berikut :

1. Integritas;
2. Profesional;
3. Visioner;
4. Sinergi;
5. Akuntabel.

TUJUAN ANRI

Meningkatnya pemanfaatan arsip untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan ketahanan budaya bangsa yang tangguh dengan indikator Indeks Pemanfaatan Arsip.

Indeks Pemanfaatan Arsip mengukur tingkat pemanfaatan arsip dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan kebudayaan. Indeks bersifat komposit yang terdiri atas dimensi: (a) kepatuhan terhadap kebijakan pemanfaatan arsip, (b) penyediaan arsip untuk pemanfaatan arsip, (c) pelayanan informasi kearsipan.

SASARAN STRATEGIS ANRI

Arah kebijakan ANRI disusun untuk memberikan dampak nyata terhadap upaya perwujudan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis. Dalam menyusun arah kebijakan harus memperhatikan sasaran strategis:

1. Meningkatnya kepatuhan lembaga pemerintah dan lembaga publik terhadap kebijakan kearsipan (S1);
2. Meningkatnya ketersediaan arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya

- secara nasional (S2);
3. Meningkatnya pelayanan informasi kearsipan yang prima (S3); dan
 4. Terwujudnya tata kelola yang baik untuk mendukung pelaksanaan tugas teknis di ANRI (S4).

Keempat sasaran strategis tersebut di atas mempunyai keterkaitan yang sangat erat dalam rangka mencapai tujuan akhir yaitu terwujudnya tertib arsip dinamis dan statis dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan kearsipan nasional. Agar tujuan akhir dapat dicapai secara maksimal, maka harus ditunjang oleh aspek kelembagaan, organisasi, ketatalaksanaan, pengawasan dan SDM yang berkualitas serta didukung oleh sumber daya, sarana dan prasarana serta anggaran yang memadai.

STRATEGI PEMBANGUNAN KEARSIPAN

Dalam rangka mendukung pencapaian Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional serta Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2020-2024 sesuai Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2020-2024, disusun strategi sebagai berikut:

1. Strategi Pencapaian Sasaran Strategis 1 (S1)

Arah kebijakan dari Sasaran Strategis 1 yaitu meningkatnya kepatuhan publik terhadap kebijakan kearsipan meliputi :

- a. Peningkatan Kualitas Kebijakan Kearsipan melalui strategi Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan.

Dalam hal ini perlu dilakukan deregulasi dan debirokratisasi bidang kearsipan melalui revitalisasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kearsipan yang selaras dengan lingkungan digital. Selain itu juga perlu dipastikan bahwa NSPK yang ditetapkan dapat diimplementasikan.

Ruang lingkup kebijakan tidak hanya terbatas pada penyelenggaraan kearsipan oleh pemerintah saja namun juga mencakup peran serta masyarakat di bidang kearsipan. Peran arsip sebagai memori kolektif dan

jati diri bangsa juga harus menjadi objek pengkajian dan pengembangan. Dalam pelaksanaannya dapat dilakukan melalui kegiatan pengkajian yang sifatnya terapan dan penelitian murni yang dapat dikerjasamakan pelaksanaannya dengan perguruan tinggi.

b. Peningkatan Kapabilitas Penyelenggara Kearsipan melalui strategi :

- 1) Pengembangan dan sertifikasi SDM Kearsipan;
- 2) Pembinaan Kearsipan pada lingkup pusat; dan
- 3) Pembinaan Kearsipan pada lingkup daerah.

Peningkatan kapabilitas tidak hanya ditujukan kepada aparatur negara saja melainkan juga kepada masyarakat dan lembaga nonpemerintah termasuk di dalamnya pembinaan arsip desa, arsip keluarga, dan arsip komunitas. Fokus pembinaan diarahkan pada kemampuan mengelola arsip secara digital. Sedangkan pada pengembangan SDM Kearsipan, perlu diupayakan pengembangan kompetensi berbasis kepakaran. Spesialisasi tidak bisa dihindari bila para Arsiparis diharapkan mampu berkontribusi nyata bagi lingkungan kerjanya. Sedangkan terkait dengan pembinaan masyarakat perlu dilakukan sosialisasi dan peningkatan kompetensi masyarakat dalam penciptaan, pelestarian, dan pemanfaatan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa.

c. Peningkatan pelayanan dan fasilitasi kearsipan melalui strategi :

- 1) Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan. Dalam rangka mewujudkan peningkatan dan fasilitasi kearsipan, di era teknologi yang serba canggih ini, unit pelaksana layanan pendidikan dan pelayanan kearsipan menerapkan program pembelajaran jarak jauh (*distance learning*) dengan memanfaatkan TIK atau aplikasi pengelolaan pembelajaran yang tersedia untuk menunjang proses pembelajaran dengan tidak mengurangi kualitas dan pencapaian tujuan pembelajaran; dan
- 2) Pelayanan Jasa Kearsipan. Sasaran pelayanan dan fasilitasi kearsipan harus diperluas kepada masyarakat dan semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan kearsipan nasional. Unit pelaksana

pelayanan jasa kearsipan perlu didorong menjadi Badan Layanan Umum (BLU) agar cakupan pelayanan dan fasilitasi kearsipan bisa lebih luas.

- d. Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan kearsipan melalui strategi : Pengawasan dan akreditasi kearsipan. Fokus pengawasan akan lebih diarahkan pada tindakan/perlakuan secara langsung kepada arsip untuk lebih menjamin tercipta dan tersedianya arsip yang terpercaya dan autentik.

2. Strategi Pencapaian Sasaran Strategis 2 (S2)

Arah kebijakan dari Sasaran Strategis 2 yaitu meningkatnya ketersediaan arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya secara nasional adalah peningkatan ketersediaan arsip melalui strategi :

- a. Akuisisi Arsip Nasional;
- b. Pengolahan Arsip Nasional;
- c. Preservasi Arsip Nasional; dan
- d. Pengelolaan Arsip Tsunami dan Arsip Statis di Daerah.

Tingkat ketersediaan arsip akan sangat dinamis karena pada waktu tertentu akan ada arsip yang baru tercipta dan ada pula arsip yang dimusnahkan sesuai prosedur atau termusnahkan karena bencana atau faktor eksternal lainnya. Untuk itu diperlukan beroperasinya sistem pelaporan terpusat sepanjang waktu atas ketersediaan arsip pada semua jenis dan semua jenjang agar diperoleh kepastian tentang jumlah dan profil arsip pada saat tertentu. Dengan demikian proses penggunaan dan pemanfaatan arsip pada tahap berikutnya dapat dilakukan secara optimal. Semua proses tersebut diharapkan dilakukan secara digital.

Hal lain yang perlu memperoleh perhatian di antaranya :

- 1) Pelindungan dan penyelamatan arsip dari bencana;
- 2) Penyelamatan dan pelestarian arsip negara periode 2014-2019;
- 3) Pembangunan Arsip Kepresidenan;
- 4) Penyelamatan dan pengelolaan arsip bernilai guna berkelanjutan di daerah, diantaranya dilakukan melalui pembangunan depot arsip

berkelanjutan;

5) Pengembangan platform kearsipan di IKN Baru;

6) Pengelolaan arsip kementerian/lembaga yang pindah ke IKN baru, baik untuk arsip di IKN baru maupun lama.

Selain itu juga perlu dilaksanakan kegiatan terkait dengan pelestarian arsip milik masyarakat yang merupakan bagian dari memori kolektif dan jati diri bangsa. Di dunia internasional mulai menguat peran penting komunitas masyarakat dalam pengembangan khazanah arsip peradaban manusia.

3. Strategi Pencapaian Sasaran Strategis 3 (S3)

Arah kebijakan dari Sasaran Strategis 3 yaitu meningkatnya pelayanan informasi kearsipan yang prima adalah peningkatan pelayanan informasi kearsipan melalui strategi :

- a. Pelayanan dan Pemanfaatan Arsip Autentik;
- b. Penyelenggaraan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional;
- c. Pengelolaan Data dan Informasi Kearsipan; dan
- d. Penguatan strategi dan sistem pelayanan.

Perlu dikembangkan secara inovatif metode dan teknik baru dalam pengolahan arsip menjadi informasi serta pelayanan penggunaan dan pemanfaatan arsip. Termasuk di antaranya pelaksanaan *public program* dan *outreach activities* (antara lain pameran, workshop, publikasi dan program pendidikan) dalam rangka pemanfaatan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa yang melibatkan semua komponen bangsa.

Selain itu, pemanfaatan arsip juga perlu didorong secara sungguh- sungguh sebagai bahan ajar oleh lembaga pendidikan. Termasuk upaya mendorong dan memastikan kesetaraan gender dan keberagaman dalam penyediaan layanan berkualitas serta akses informasi kearsipan untuk masyarakat luas tanpa diskriminasi, untuk mengurangi kesenjangan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya informasi kearsipan. Dari sisi akses perlu dilakukan perlindungan secara khusus terhadap arsip yang mengandung data strategis negara.

- a) Memperoleh komitmen dan dukungan positif dari pimpinan lembaga

penyelenggara negara dan pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah;

- b) Menyediakan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang akan mendukung implementasi Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional, baik di pusat jaringan nasional maupun di simpul jaringan;
- c) Menyiapkan sumber daya manusia yang profesional dalam jumlah memadai berdasarkan keahlian untuk mendukung tanggung jawab ANRI sebagai pusat jaringan nasional;
- d) Menyediakan prasarana dan sarana serta sumber daya pendukung lainnya melalui peningkatan peran serta masyarakat;
- e) Melakukan koordinasi yang efektif dengan unit kerja internal dan instansi terkait lainnya serta bekerja sama dengan organisasi kearsipan internasional dan lembaga kearsipan negara lain;
- f) Mengikuti tren perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta kearsipan di dunia internasional dan menerapkan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional.

Pencapaian sasaran tersebut di atas, dilakukan melalui Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional yang bertujuan untuk menata dan menyempurnakan organisasi dan manajemen melalui pengelolaan arsip yang efektif dan efisien serta menyelamatkan dan melestarikan dokumen/arsip negara. Sasaran program ini adalah terkelolanya arsip dinamis dan statis.

4. Strategi Pencapaian Sasaran Strategis 4 (S4)

Arah kebijakan dari Sasaran Strategis S4 yaitu terwujudnya tata kelola yang baik untuk mendukung pelaksanaan tugas teknis di ANRI adalah Penguatan tata kelola ANRI yang efektif dan efisien melalui strategi :

1. Pelayanan Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum;
2. Pelayanan Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi, Kerjasama, Humas dan TU Pimpinan;
3. Pelayanan Umum; dan
4. Pengawasan Internal.

Penciptaan tata kelola yang efektif dan efisien diarahkan untuk meningkatkan kemampuan ANRI baik kelembagaan, ketatalaksanaan, dan SDM dalam menyukseskan tahap transformasi digital penyelenggaraan kearsipan nasional.

PROGRAM ANRI

Keseluruhan tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, dan strategi ANRI harus dijabarkan secara lebih operasional agar dapat dilaksanakan. Rencana strategis tersebut dilaksanakan melalui beberapa program. Program ANRI pada 2020-2024 terdiri atas :

1. Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional

Sasaran program :

a. Peningkatan kualitas kebijakan kearsipan

Sasaran program ini terkait dengan Sasaran Strategis “Meningkatnya kepatuhan publik terhadap kebijakan kearsipan” yang dilaksanakan melalui kegiatan :

Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan dengan sasaran kegiatan: Meningkatkan Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan Nasional.

b. Peningkatan kapabilitas penyelenggara kearsipan

Sasaran program ini terkait dengan Sasaran Strategis “Meningkatnya kepatuhan publik terhadap kebijakan kearsipan” yang dilaksanakan melalui kegiatan :

1) Pembinaan Kearsipan lingkup pusat dengan sasaran kegiatan: Meningkatkan Kapabilitas Penyelenggaraan Kearsipan Unit Kearsipan/ Lembaga Kearsipan Instansi Pusat;

2) Pembinaan kearsipan lingkup daerah wilayah timur dengan sasaran kegiatan: Meningkatkan kapabilitas penyelenggaraan kearsipan unit kearsipan/ lembaga kearsipan instansi daerah wilayah timur;

3) Pembinaan kearsipan lingkup daerah wilayah barat dengan sasaran kegiatan: Meningkatkan kapabilitas penyelenggaraan kearsipan unit kearsipan/ lembaga kearsipan instansi daerah wilayah barat;

- 4) Pengembangan dan sertifikasi SDM Kearsipan dengan sasaran kegiatan: Meningkatnya SDM Kearsipan yang mendapat Sertifikasi dan Penilaian Kinerja.
- c. Peningkatan pelayanan dan fasilitasi kearsipan
- Sasaran program ini terkait dengan Sasaran Strategis “Meningkatnya kepatuhan publik terhadap kebijakan kearsipan” yang dilaksanakan melalui kegiatan :
- 1) Pelayanan Jasa Kearsipan dengan sasaran kegiatan: Meningkatnya Pelayanan Jasa Kearsipan;
 - 2) Pelayanan Pendidikan dan pelatihan kearsipan dengan sasaran kegiatan: Meningkatnya Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan.
- d. Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan kearsipan
- Sasaran program ini terkait dengan Sasaran Strategis “Meningkatnya kepatuhan publik terhadap kebijakan kearsipan” yang dilaksanakan melalui kegiatan Pengawasan dan akreditasi kearsipan dengan sasaran kegiatan: Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan kearsipan instansi yang diawasi dan meningkatnya mutu penyelenggaraan kearsipan pada Unit Kearsipan/Lembaga Kearsipan/Lembaga Penyelenggara Jasa Kearsipan/Lembaga Penyelenggara Diklat Kearsipan yang diakreditasi.
- e. Peningkatan ketersediaan arsip secara nasional
- Sasaran program ini terkait dengan Sasaran Strategis “Meningkatnya ketersediaan arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya secara nasional” yang dilaksanakan melalui kegiatan :
- 1) Akuisisi arsip nasional dengan sasaran kegiatan: Bertambahnya khazanah arsip nasional;
 - 2) Pengolahan arsip nasional dengan sasaran kegiatan: Bertambahnya arsip statis nasional yang diolah;
 - 3) Preservasi arsip nasional dengan sasaran kegiatan: Meningkatnya jumlah arsip terjaga dan arsip statis nasional yang dipreservasi;
 - 4) Pengelolaan arsip tsunami dan arsip statis di daerah dengan sasaran

kegiatan: Meningkatnya pelayanan arsip tsunami dan arsip statis di daerah.

f. Peningkatan Pelayanan Informasi Kearsipan.

Sasaran program ini terkait dengan Sasaran Strategis “Meningkatnya pelayanan informasi kearsipan yang prima” yang dilaksanakan melalui kegiatan :

- 1) Pelayanan dan pemanfaatan arsip dengan sasaran kegiatan: Meningkatnya Pengguna Layanan Arsip secara Nasional;
- 2) Penyelenggaraan sistem dan jaringan informasi kearsipan dengan sasaran kegiatan: Bertambahnya arsip yang dimanfaatkan sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa;
- 3) Pengelolaan data dan informasi kearsipan dengan sasaran kegiatan: Meningkatnya layanan data dan informasi kearsipan.

2. Program Dukungan Manajemen

Sasaran program :

Terwujudnya tata kelola yang baik di ANRI

Sasaran program ini terkait dengan semua Sasaran Strategis ANRI yang dilaksanakan melalui kegiatan :

- a. Pelayanan organisasi, kepegawaian, dan hukum dengan sasaran kegiatan: Meningkatnya layanan organisasi, kepegawaian, dan hukum;
- b. Pelayanan perencanaan, pemantauan dan evaluasi, kerjasama, humas dan tata usaha pimpinan dengan sasaran kegiatan: Meningkatnya layanan perencanaan, pemantauan dan evaluasi, kerjasama, humas dan tata usaha pimpinan;
- c. Pelayanan umum dengan sasaran kegiatan: Meningkatnya layanan umum;
- d. Pengawasan internal dengan sasaran kegiatan: Meningkatnya pengawasan internal.

KERANGKA REGULASI

Di sini peran ANRI dalam penyelenggaraan kearsipan nasional sebagai regulator yang mempunyai tugas merumuskan dan menetapkan norma, standar, pedoman dan kriteria penyelenggaraan kearsipan secara nasional yang akan menjadi acuan dalam perumusan dan penetapan peraturan dan kebijakan kearsipan di lembaga kearsipan daerah provinsi, kabupaten/kota maupun di unit kearsipan kementerian/lembaga serta melakukan pembinaan penyelenggaraan kearsipan kepada lembaga kearsipan daerah provinsi, kabupaten/kota dan unit kearsipan kementerian/lembaga. Namun pembinaan kearsipan masih kurang efektif, karena belum lengkapnya peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan sebagai penjabaran dari Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012. Di samping itu, terus dilakukan upaya perbaikan untuk mencapai keselarasan antara kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip, yang ditunjukkan dengan penyediaan NSPK untuk dapat diterapkan pada pencipta arsip dan lembaga kearsipan dalam pengelolaan arsip. Namun demikian, keselarasan tersebut masih belum sepenuhnya sesuai harapan karena terbatasnya instrumen pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan kearsipan, serta belum optimalnya kualitas sumber daya manusia kearsipan. Masih terdapat ketidakselarasan antara kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip berpotensi menghambat pencapaian tujuan penyelenggaraan kearsipan.

Mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah delapan kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 3 Tahun 2013 dan Peraturan Kepala ANRI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia, ANRI mempunyai tugas pemerintahan di bidang kearsipan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang kearsipan;
- b. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas lembaga;
- c. Fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang kearsipan;
- d. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, kehumasan, hukum, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, persandian dan kearsipan.
- e. Penyelenggaraan pembinaan kearsipan nasional;
- f. Pelindungan, penyelamatan, dan pengelolaan arsip statis berskala nasional; dan
- g. Penyelenggaraan sistem dan jaringan informasi kearsipan nasional.

Untuk lebih jelasnya, pembentukan kerangka regulasi Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya pembinaan penyelenggaraan kearsipan nasional yang komprehensif dan terpadu melalui sistem kearsipan nasional. Kerangka regulasi yang sudah dibentuk adalah tentang desain pembinaan kearsipan daerah, bidang kompetensi, pendidikan dan pelatihan, serta penjaminan sumber daya manusia kearsipan.
2. Terwujudnya pelindungan, penyelamatan, pengolahan, pelestarian dan akses arsip untuk kepentingan pemerintahan. Kerangka regulasi yang sudah dibentuk adalah pedoman pelindungan, pengamanan dan penyelamatan dokumen/arsip vital negara. Adapun kerangka regulasi yang akan dibentuk adalah sistem pengelolaan arsip dinamis dan statis; kriteria tanggung jawab; dan strategi pelindungan dan penyelamatan arsip.
3. Tercapainya peningkatan mutu dan efektifitas NSPK sistem kearsipan. Kerangka regulasi yang sudah dibentuk adalah tentang petunjuk pelaksanaan pembentukan produk hukum di lingkungan ANRI. Sedangkan yang akan dilaksanakan adalah menyusun kebijakan kearsipan nasional dengan melibatkan lembaga negara, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, perguruan tinggi dan BUMN/BUMD

serta semua pihak terkait.

4. Tercapainya peningkatan mutu dan efektivitas penyelenggaraan SIKN dan JIKN. Kerangka regulasi yang sudah dibentuk adalah pedoman penyelenggaraan SIKN dan JIKN serta standar elemen data arsip dinamis dan statis untuk penyelenggaraan SIKN. Sedangkan, kerangka regulasi yang akan dibentuk adalah penyempurnaan pedoman penyelenggaraan SIKN dan JIKN.

KERANGKA KELEMBAGAAN

a. Organisasi

Dari sisi internal adalah revitalisasi organisasi untuk menciptakan organisasi yang efektif dan efisien, kaya fungsi, rasional, dan proporsional. Organisasi disusun berdasarkan visi, misi, dan strategi yang jelas, mengedepankan kompetensi dan profesionalitas dalam pelaksanaan tugas, menerapkan strategi organisasi pembelajaran (*learning organization*) yang cepat beradaptasi dengan berbagai perubahan.

Dalam rangka penyelenggaraan kearsipan nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, organisasi dan tata kerja ANRI telah mengalami tiga kali perubahan dan terakhir dicabut dengan ditetapkan melalui Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020.

Dari sisi eksternal baik dalam sistem administrasi pemerintahan maupun manajemen modern, manajemen kearsipan memiliki posisi dan peran yang sangat penting dan strategis, meskipun selama ini belum mendapat perhatian yang proposional dalam organisasi pemerintahan tingkat pusat dan daerah. Hal tersebut berpangkal dari kesadaran, jika dilihat arsip dari fisiknya bukan dari segi informasinya. Lemahnya urusan kearsipan pada organisasi pemerintahan pusat dan daerah dipengaruhi oleh tingkat kesadaran terhadap masalah arsip. Berpangkal dari Peraturan Pemerintah

Nomor 38 Tahun 2007 bahwa urusan kearsipan menjadi urusan wajib. Implikasinya adalah unit/lembaga kearsipan wajib dibentuk oleh setiap lembaga negara, pemerintahan daerah, perguruan tinggi negeri, BUMN, dan BUMD seperti diamanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Namun sampai saat masih terdapat lembaga negara, pemerintahan daerah, perguruan tinggi negeri, BUMN dan BUMD yang belum mempunyai unit kearsipan.

b. Ketatalaksanaan

Di bidang ketatalaksanaan, arsip menjadi kunci kinerja organisasi. Penyelenggaraan kearsipan memiliki tujuan terlaksananya penciptaan, penggunaan dan pemeliharaan serta penyusutan arsip dinamis secara efektif dan efisien. Dengan demikian penyelenggaraan kearsipan dinamis memungkinkan suatu organisasi melaksanakan kegiatan yang mengarah pada pendokumentasian perumusan kebijakan, pelayanan serta proses pengambilan keputusan. Di samping itu, organisasi juga dapat memberikan perlindungan dan dukungan dalam perkara hukum termasuk manajemen risiko yang berkaitan dengan keberadaan atau penyediaan bukti kegiatan organisasi.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sesuai amanat pasal 3 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan, penyelenggaraan kearsipan bertujuan untuk :

- a. Menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan, serta ANRI sebagai penyelenggaraan kearsipan nasional;
- b. Menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti sah;
- c. Menjamin terwujudnya pengelolaan arsip yang andal dan pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. Menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya;
- e. Mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan nasional sebagai suatu sistem yang komprehensif dan terpadu;
- f. Menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai buktipertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- g. Menjamin keselamatan aset nasional dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan, serta keamanan sebagai identitas dan jati diri bangsa; dan
- h. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya.

Sejalan dengan hal tersebut untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud di atas, sesuai amanat pasal 19 ayat (1) ANRI wajib melaksanakan pengelolaan arsip statis yang berskala nasional yang diterima dari lembaga negara, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan. Disamping itu sesuai pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, ANRI memiliki tugas melaksanakan pembinaan kearsipan secara nasional terhadap pencipta arsip tingkat pusat dan daerah, arsip daerah provinsi, arsip daerah kabupaten/kota, dan arsip perguruan tinggi.

Dalam rangka pelaksanaan tugas seperti diamanatkan Pasal 15 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, bahwa lembaga pemerintah non kementerian berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui menteri yang mengkoordinasikan. Selanjutnya untuk melaksanakan tugas dan fungsi ANRI sebagaimana tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 dan Peraturan Kepala Arsip Nasional

Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Arsip Statis dan Tsunami Aceh, ANRI mempunyai tugas pemerintahan di bidang kearsipan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang kearsipan;
- b. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas lembaga;
- c. Fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang kearsipan;
- d. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, kehumasan, hukum, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, persandian dan kearsipan.

Dalam menyelenggarakan fungsinya, ANRI mempunyai kewenangan:

1. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidang kearsipan;
2. Penetapan dan penyelenggaraan kearsipan nasional untuk mendukung pembangunan secara makro;
3. Penetapan sistem informasi di bidang kearsipan;
4. Kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :
 - a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang kearsipan;
 - b. Penyelamatan serta pelestarian arsip dan pemanfaatan naskah sumber arsip.

Sedangkan Balai Arsip Statis dan Tsunami Aceh sesuai Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan;
- b. Pelaksanaan akuisisi arsip statis lembaga negara tingkat pusat di daerah seluruh Indonesia dan arsip tsunami;

- c. Pelaksanaan pengolahan arsip statis lembaga negara tingkat pusat di daerah seluruh Indonesia dan arsip tsunami;
- d. Pelaksanaan preservasi arsip statis lembaga negara tingkat pusat di daerah seluruh Indonesia dan arsip tsunami;
- e. Pelaksanaan layanan dan pemanfaatan arsip statis lembaga negara tingkat pusat di daerah seluruh Indonesia dan arsip tsunami; dan
- f. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, perencanaan program dan anggaran serta pelaporan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, dan rumah tangga.

ORGANISASI

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia dibantu oleh Sekretariat Utama, Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan, Deputi Bidang Konservasi Arsip, Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan, Pusat Jasa Kearsipan dan Inspektorat. Pelaksanaan tugas ANRI dilaksanakan oleh satuan-satuan organisasi tersebut di atas sesuai Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia yaitu :

1. Sekretariat Utama, melaksanakan tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, pengendalian terhadap program, administrasi, dan sumber daya di lingkungan ANRI. Sekretariat Utama terdiri atas:
 - a. Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat;
 - b. Biro Organisasi, Kepegawaian dan Hukum;
 - c. Biro Umum;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional Ahli Utama.
2. Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan, melaksanakan tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pembinaan kearsipan nasional. Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan terdiri atas :
 - a. Direktorat Kearsipan Pusat;
 - b. Direktorat Kearsipan Daerah I;

- c. Direktorat Kearsipan Daerah II;
 - d. Direktorat SDM Kearsipan dan Sertifikasi;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional Ahli Utama.
3. Deputi Bidang Konservasi Arsip, melaksanakan tugas merumuskan dan melaksanakan Kebijakan di bidang konservasi arsip secara nasional. Deputi Bidang Konservasi Arsip terdiri atas :
- a. Direktorat Akuisisi;
 - b. Direktorat Pengolahan;
 - c. Direktorat Preservasi;
 - d. Direktorat Layanan dan Pemanfaatan;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional Ahli Utama.
4. Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan, melaksanakan tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang informasi dan pengembangan Sistem Kearsipan Nasional. Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan terdiri dari :
- a. Pusat Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional;
 - b. Pusat Data dan Informasi;
 - c. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional Ahli Utama.

Selain itu terdapat empat unit kerja Eselon II yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia yaitu Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan, Pusat Jasa Kearsipan, Inspektorat, dan Pusat Akreditasi Kearsipan dengan tugas sebagai berikut:

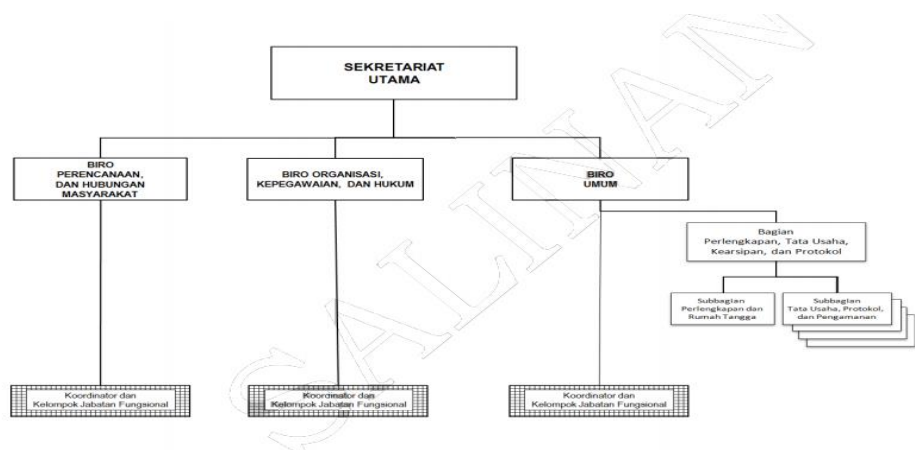
1. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan mempunyai tugas menyusun program dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang kearsipan;
2. Pusat Jasa Kearsipan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program di bidang jasa kearsipan;
3. Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan ANRI;
4. Pusat Akreditasi Kearsipan mempunyai tugas melaksanakan akreditasi kearsipan.

Susunan organisasi dan pejabat pimpinan unit kerja di lingkungan ANRI posisi per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

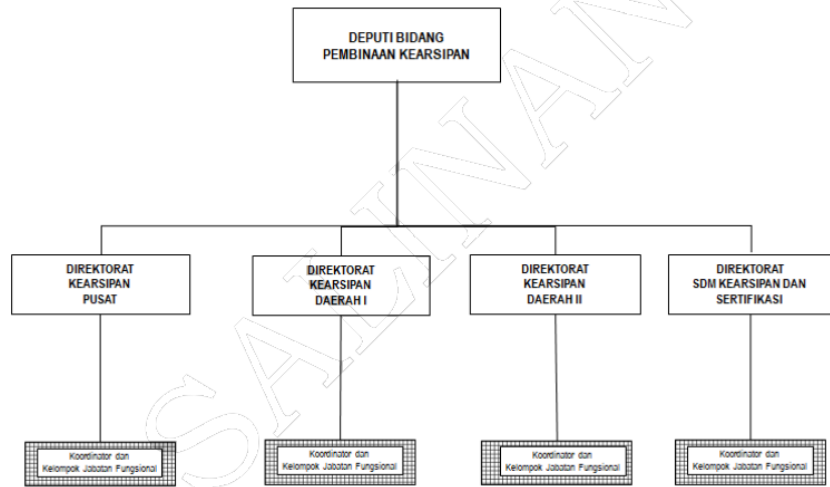
	•Plt. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Dr. M. Taufik, M.Si
	•Sekretaris Utama Drs. Imam Gunarto, M.Hum
	•Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan Drs. Sumrahyadi, MIMS
	• Plt. Deputi Bidang Konservasi Arsip Dra. Multi Siswati, MM
	•Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan (IPSK) Dr. Andi Kasman, SE, MM

Sesuai Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia bahwa struktur organisasi di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia sebagai berikut :

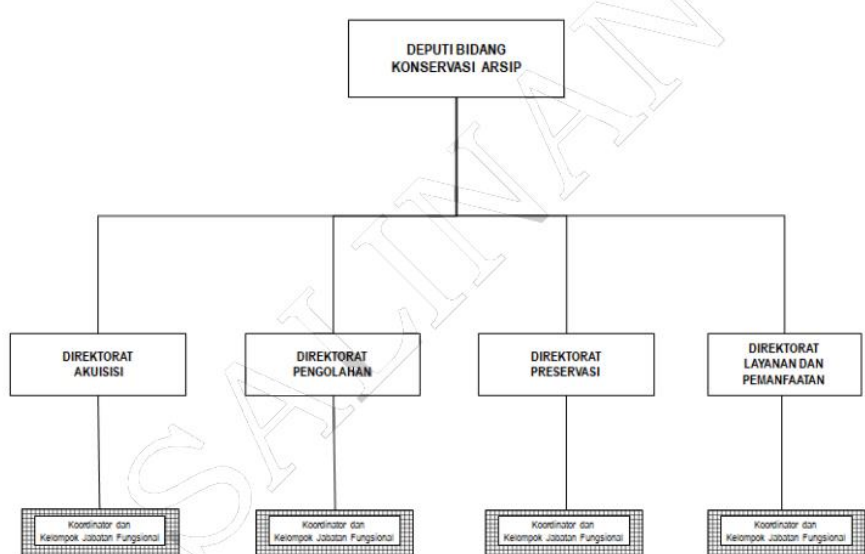
A. STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT UTAMA



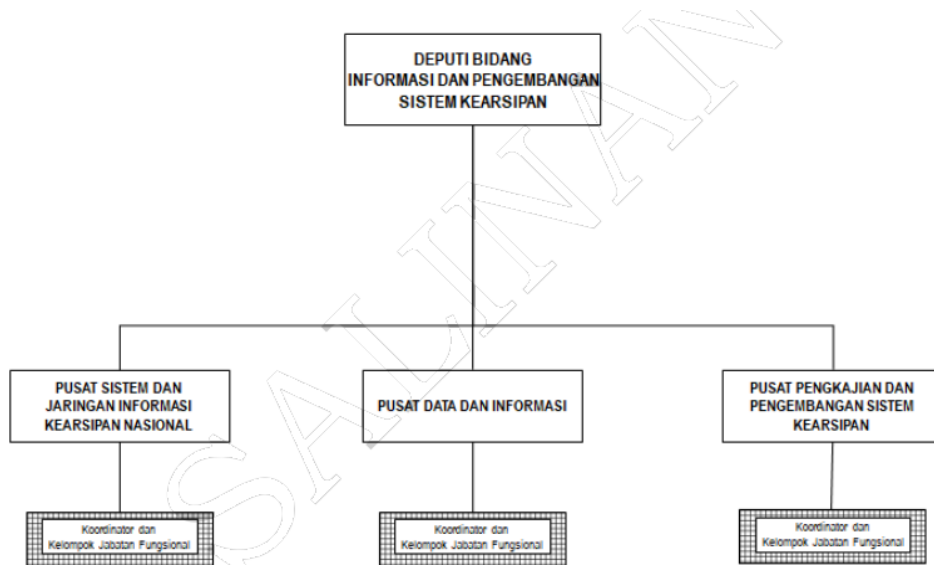
B. STRUKTUR ORGANISASI DEPUTI BIDANG PEMBINAAN KEARSIPAN



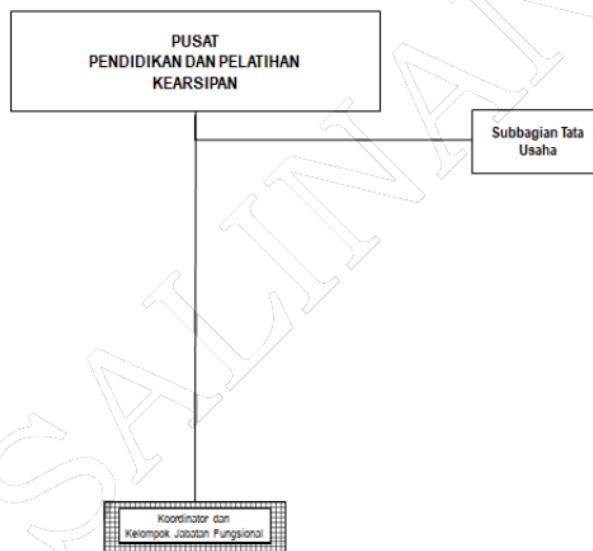
C. STRUKTUR ORGANISASI DEPUTI BIDANG KONSERVASI ARSIP



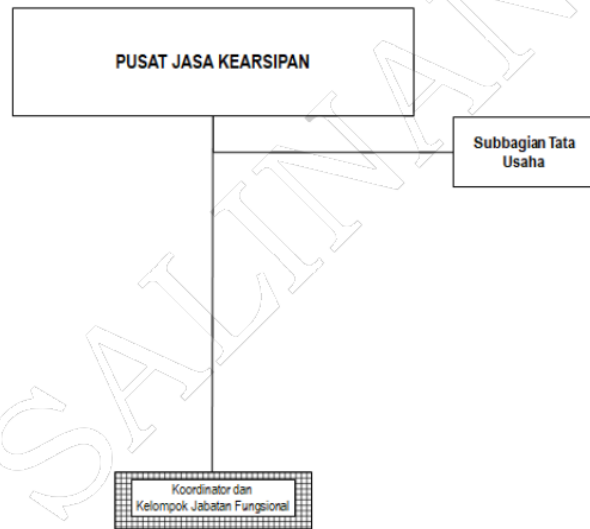
D. STRUKTUR ORGANISASI DEPUTI BIDANG INFORMASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM KEARSIPAN



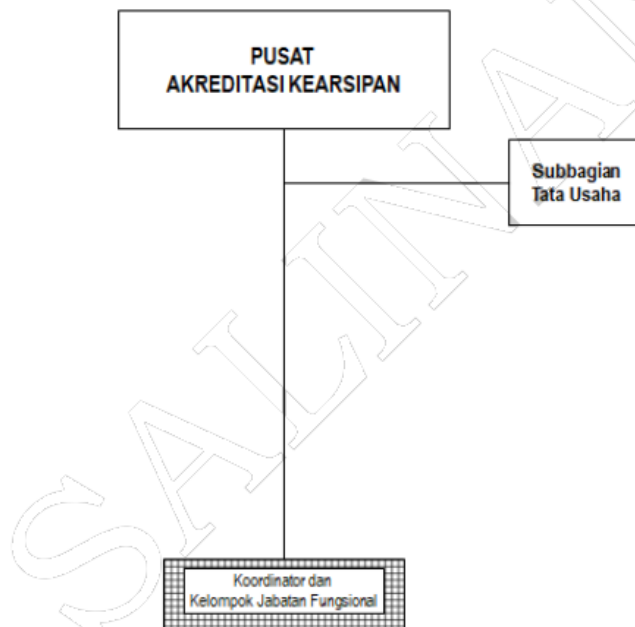
E. STRUKTUR ORGANISASI PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEARSIPAN



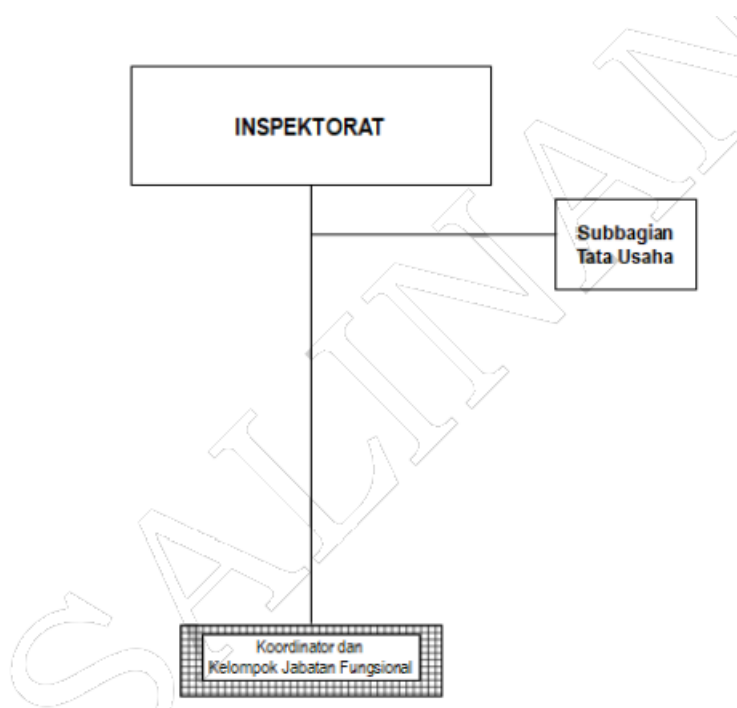
F. STRUKTUR ORGANISASI PUSAT JASA KEARSIPAN



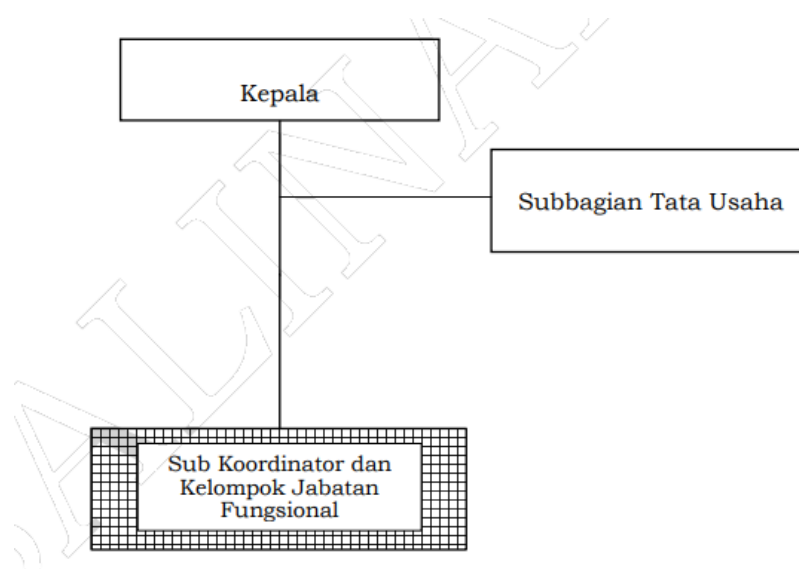
G. STRUKTUR ORGANISASI PUSAT AKREDITASI KEARSIPAN



H. STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT



I. STRUKTUR ORGANISASI BALAI ARSIP STATIS TSUNAMI ACEH



Sumber daya manusia yang tersedia dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada ANRI posisi per 31 Desember 2020 adalah sebanyak 619 orang. Jumlah pegawai secara kualitas dan kuantitas dapat digambarkan

sebagai berikut :

Pegawai ANRI Menurut Penempatan

NO	PENEMPATAN	JUMLAH	%
1.	PNS ANRI PUSAT	529	85,46
2.	PNS Pusdiklat Kearsipan	22	3,55
3.	PNS Pusat Jasa Kearsipan	37	5,98
4.	Balai Arsip Statis Tsunami Aceh	24	3,88
5.	PNS ANRI yang dipekerjakan di luar ANRI	7	1,13
TOTAL		619	100,00

Pegawai ANRI Menurut Jabatan

NO	JABATAN	JUMLAH	%
1.	Jabatan Struktural	33	5,33
2.	Jabatan Fungsional Tertentu	497	80,29
3.	Jabatan Fungsional Umum	80	12,92
4.	CPNS	9	1,45
TOTAL		619	100,00

Pegawai ANRI Menurut Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH	%
1.	Laki-laki	300	48,47
2.	Perempuan	319	51,53
TOTAL		619	100,00

Pegawai ANRI Menurut Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	%
1.	DOKTORAL (S3)	6	0,97
2.	PASCA SARJANA (S2)	143	23,10
3.	SARJANA (S-1)	289	46,69
4.	DIPLOMA IV	23	3,72
5.	DIPLOMA III	114	18,42
6.	DIPLOMA II	0	0,00
7.	Diploma I	7	1,13
7.	SLTA	37	5,98
TOTAL		619	100,00

TARGET KINERJA

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan, secara spesifik dijabarkan dalam tabel Sasaran dan Indikator Kinerja ANRI Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA 2024
Tujuan ANRI: Meningkatnya pemanfaatan arsip untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan ketahanan budaya bangsa yang tangguh	Indeks Pemanfaatan Arsip	60
Sasaran Strategis 1: Meningkatnya kepatuhan publik terhadap kebijakan kearsipan	Indeks Kepatuhan terhadap Kebijakan Kearsipan	73
Sasaran Strategis 2: Meningkatnya ketersediaan arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya secara nasional	Indeks Ketersediaan Arsip	80

Sasaran Strategis 3: Meningkatnya pelayanan informasi kearsipan yang prima	Indeks Pelayanan Informasi Kearsipan	70
Sasaran Strategis 4: Terwujudnya tata kelola yang baik untuk mendukung pelaksanaan tugas teknis di ANRI	Indeks Reformasi Birokrasi	BB

PROGRAM DAN SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA 2024
1. PROGRAM PENYELENGGARAAN KEARSIPAN NASIONAL		
Sasaran Program 1: Peningkatan kualitas kebijakan kearsipan	Indeks Kualitas Kebijakan	75
Sasaran Program 2: Peningkatan kapabilitas penyelenggara kearsipan	Indeks Kapabilitas Penyelenggara Kearsipan	B
Sasaran Program 3: Peningkatan pelayanan dan fasilitasi kearsipan	Indeks Pelayanan dan Fasilitasi Kearsipan	B
Sasaran Program 4: Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan kearsipan	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan	BB
Sasaran Program 5: Peningkatan ketersediaan arsip secara nasional	Indeks Ketersediaan Arsip	80
Sasaran Program 6: Peningkatan pelayanan informasi kearsipan	Indeks Pelayanan Informasi Kearsipan	70
2. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN		
Sasaran Program: Terwujudnya tata kelola yang baik di ANRI	Kategori Nilai SAKIP	BB
	Opini atas Laporan Keuangan	WTP
	Indeks Layanan Publik	A
	Indeks Reformasi Birokrasi	BB
	Indeks Sistem Merit	B
	Indeks SPBE	B

KERANGKA PENDANAAN

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan pendanaan yang bersumber dari APBN, dilakukan penyusunan kerangka pendanaan yang mengacu pada pendekatan penganggaran terpadu (*unified budgeting*), pendekatan penganggaran berbasis kinerja (*performance base budgeting*), dan sistem penganggaran berjangka menengah (*medium term expenditure framework*).

Selain dari rupiah murni, ANRI juga berupaya memperoleh dana dari sumber alternatif di antaranya meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Sedangkan dalam pengelolaan belanja perlu peningkatan kualitas alokasi pendanaan untuk prioritas pembangunan yang dilakukan berdasarkan prinsip *money follows program* dengan pendekatan yang Holistik, Integratif, Terpadu, dan Spasial (HITS). Selain itu juga dilakukan penguatan pengendalian dan sinergi pendanaan agar pemanfaatan sumber pendanaan dapat dilakukan secara terintegrasi untuk mencapai sasaran pembangunan. Hal demikian dapat dilakukan melalui berbagai agenda koordinasi lintas K/L, lintas instansi, dan antar tingkatan pemerintahan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Terkait dengan dana transfer ke daerah dan dana desa, ANRI mendorong adanya Dana Alokasi Khusus (DAK) Kearsipan untuk mewujudkan pencapaian target kegiatan prioritas nasional di bidang kearsipan dan mengupayakan agar sebagian dana desa digunakan untuk mendorong tertib arsip desa

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2020 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Arsip Nasional Republik Indonesia. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Adapun jumlah Satker selaku Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) dilingkup ANRI adalah 4 (empat) satker yang terdiri atas 3 (tiga) satker Kantor Pusat/KP dan 1 (satu) satker Kantor Daerah/KD.

Rekapitulasi Jumlah Satker UAKPA

Kode BA	Kode Es I	Uraian	Jumlah Jenis Kewenangan				Jumlah Satker
			KP	KD	DK	TP	
087	01	Arsip Nasional RI	3	1	-	-	4
Jumlah			3	1	-	-	4

Basis

Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Arsip Nasional Republik Indonesia menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar

Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Arsip Nasional Republik Indonesia dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau

sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2020 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Arsip Nasional Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan yang dikelola oleh Arsip Nasional Republik Indonesia berupa penerimaan yang berasal dari :

- a) Penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana pemerintah yang bersifat umum meliputi :
 - 1) Penerimaan Kembali Belanja yang berasal dari pengembalian

belanja (pegawai, barang dan modal) dari tahun anggaran yang lalu;

- 2) Jasa Giro yang berasal dari jasa lembaga keuangan (perbankan) pada tahun berjalan;
 - 3) Hasil penjualan aset lainnya yang berlebih, rusak maupun dihapuskan dengan cara dijual melalui lelang;
 - 4) Pelunasan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara (TP/TGR) yang berasal dari kewajiban oleh Bendahara maupun pegawai yang ditetapkan berdasarkan SK Penetapan.
- b) Penerimaan dari kegiatan pelayanan ANRI yang bersifat Fungsional pada:
- 1) Pusat Jasa Kearsipan menyelenggarakan pemberian jasa berupa:
 - 1.1. Jasa pemeliharaan dan perawatan arsip meliputi menghilangkan asam, laminasi arsip (*leaf casting/lining system,encapsulation*), *rewashing film/micro film, recleaning video cassette* dan alih media;
 - 1.2. Jasa Konsultasi/tenaga Ahli Kearsipan meliputi penataan kearsipan, layanan penataan *record centre* pusat dan pembuatan pedoman manual kearsipan untuk organisasi atau lembaga;
 - 1.3. Jasa Penyimpanan arsip meliputi program aplikasi *storage* Sistem Kearsipan, Penyimpanan Arsip di *Record Centre* dan Pelayanan Peminjaman Arsip di *Record* Arsip.
 - 2) Direktorat Pemanfaatan memberikan layanan jasa berupa:
 - 2.1 Jasa penggandaan dan alih media meliputi *foto copy* arsip, foto copy referensi/Buku, Foto, *Print Out* mikrofilm ukuran A4, film, *scanning* arsip, alih media arsip kertas ke mikrofilm, reproduksi rekaman suara;
 - 2.2 Naskah Sumber Arsip dan sumber-sumber Sejarah meliputi penerbitan naskah sumber periode sebelum Republik Indonesia (VOC-Belanda), Penerbitan Naskah Sumber Periode

Republik Indonesia (1945-sekarang), bentuk elektronik;

2.3 Jasa Konsultasi/tenaga Ahli Kearsipan berupa penelusuran arsip dan penggandaan arsip.

- 3) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan yang memberikan layanan jasa berupa penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kearsipan meliputi diklat fungsional arsiparis dan diklat teknis kearsipan.
- 4) Biro Umum yang menyediakan layanan berupa jasa sewa ruangan pusdiklat dan jasa sewa gedung Gajah Mada.

Pendapatan-LO (2) **Pendapatan- LO**

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan yang disajikan pada Laporan Operasional terdiri dari:

2.1 Pendapatan Operasional

Pendapatan yang diperoleh ANRI berasal dari kelompok PNBP Lainnya antara lain :

- a) Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN (pemanfaatan) dan Iuran Badan (4251). Tahun Anggaran 2020 ANRI diperoleh pendapatan yang berasal dari :
 - Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya (425119) yang merupakan pendapatan hasil tugas fungsi pada direktorat pemanfaatan;
 - Pendapatan dari sewa Tanah, Gedung dan Bagunan (425131) yang diperoleh dari persewaan gedung Arsip Gajah Mada yang merupakan pendapatan hasil tugas fungsi Biro Umum dan

persewaan gedung dan kamar Pusdiklat Kearsipan Bogor.

- Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi (425151) yang berasal dari pembayaran PNBPN di satker Pusdiklat Kearsipan Bogor diantaranya Sewa Kamar Dalam Rangka Diklat.
- b) Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi (4254), pendapatan ini berasal dari Satker Pusdiklat Kearsipan ANRI Bogor yang menjalankan tugas dan fungsi pendidikan dan pelatihan kearsipan dengan rincian sebagai berikut :
- Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan (425421) merupakan jasa tenaga pendidikan dan pelatihan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing KL yang diberikan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan kepada pengguna/konsumen.
- c) Pendapatan Jasa Lainnya (4256) dengan rincian sebagai berikut :
- Pendapatan Jasa Tenaga Kerja, Pekerjaan dan Informasi, ANRI merupakan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing KL (425692) yang diberikan oleh Pusat Jasa Kearsipan kepada pengguna/konsumen berupa jasa pemeliharaan dan perawatan arsip meliputi menghilangkan asam, laminasi arsip (*leaf casting/lining system, encapsulation*), *rewashing film/micro film, recleaning video cassette* dan alih media, jasa penyimpanan arsip meliputi program aplikasi *storage* Sistem Kearsipan, Penyimpanan Arsip di *Record Centre* dan Pelayanan Peminjaman Arsip di *Record* Arsip dan Direktorat Pemanfaatan dan Layanan Kearsipan berupa Jasa Penggandaan, Fotocopy dan Transkripsi.
- d) Pendapatan Denda (4258) dengan rincian sebagai berikut :
- Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah (425811) merupakan pendapatan yang berasal dari setoran rekanan pemerintah, berupa denda penyelesaian pekerjaan

pemerintah yang biasa (umum) ada pada semua Kementerian/Lembaga

2.2 Pendapatan Non Operasional

- a) Pendapatan dari Pengelolaan BMN yang berasal dari pendapatan dari pemindahtanganan BMN Lainnya (425129) merupakan pendapatan hasil penjualan lelang Barang Milik Negara yang sudah tidak digunakan dalam operasional pemerintah;
- b) Pendapatan lain-lain (4259) yang berasal dari pendapatan penerimaan kembali belanja pegawai TAYL (425911), penerimaan kembali belanja barang TAYL (425912) dan penerimaan kembali belanja modal TAYL (425913) merupakan pengembalian atas Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal yang telah dilakukan di Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) namun akibat alasan dan kondisi tertentu menyebabkan pengembalian uang ke kas negara baru terjadi di Tahun Anggaran Berjalan (TAB).

Belanja

(3) Belanja

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN;
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN);
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja yakni belanja pegawai (51), belanja barang (52) dan belanja modal (53). Selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa;
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja meliputi :
 - a) Beban Operasional yang terdiri dari beban pegawai, beban persediaan, beban barang dan jasa, beban pemeliharaan, beban perjalanan dinas, beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat, beban penyusutan dan amortisasi serta beban penyisihan piutang tak tertagih;
 - b) Beban Non Operasional meliputi beban pelepasan aset non lancar dan beban dari kegiatan non operasional lainnya.
- Selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

5.1 Aset Lancar

- a. Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- b. Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- c. Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk

penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut :

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- d. Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA;
- e. Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

5.2 Aset Tetap

- a. Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar;
- b. Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut :
 - Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai beban kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi /jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- c. Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya;
- d. Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan
Aset Tetap*

5.3 Penyusutan Aset Tetap

- a. Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap;
- b. Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - Tanah;
 - Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- c. Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu;
- d. Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat;
- e. Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 Tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 Tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

5.4 Piutang Jangka Panjang

- a. Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan;
- b. Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan

Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

5.5 Aset Lainnya

- a. Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya;
- b. Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi;
- c. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi;
- d. Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan;
- e. Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 620/KM.6/2018 tentang masa manfaat dalam rangka amortisasi barang milik negara berupa aset tetap tak berwujud pada entitas Pemerintah Pusat disajikan sebagai berikut :

Masa Manfaat Aset Tetap Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak	50

Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

Kewajiban

(6) Kewajiban

- a. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - **Kewajiban Jangka Pendek**
 Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

 Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - **Kewajiban Jangka Panjang**
 Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- b. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Penerapan

(8) Penerapan SAP Pada Masa Pandemi Covid-19

SAP

Kegiatan penanganan Pandemi Covid-19 tidak disajikan dalam pos luar biasa karena pengaruh Pandemi Covid-19 hampir menyebar di seluruh pos laporan keuangan. Untuk itu dampak Pandemi Covid-19 akan dijelaskan pada

pengungkapan pos-pos laporan keuangan yang terdampak signifikan. Pos-pos laporan keuangan yang berdampak signifikan atas Pandemi Covid-19 menjelaskan perubahan pos-pos tersebut sebagai dampak dari realokasi atau *refocussing* anggaran misalnya: belanja tak terduga, belanja barang, dan belanja modal. Dampak penurunan aktivitas ekonomi yang berdampak pada pendapatan dan beberapa kebijakan pemerintah yang berdampak pada peningkatan utang, penundaan proyek pemerintah yang berdampak pada konstruksi pada penyelesaian dan persediaan.

Pandemi Covid-19 merupakan kejadian luar biasa. Namun penanganan Pandemi Covid-19 tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan penganggaran yang sepenuhnya di bawah kendali Pemerintah. Dampak penanganan Pandemi Covid-19 mempengaruhi kebijakan fiskal pemerintah dan berdampak pada makro ekonomi sehingga mempengaruhi hampir seluruh pos dalam laporan keuangan. Untuk itu tidak diperlukan penyajian pos khusus dalam Laporan Operasional dan penambahan pos baru dalam Laporan Keuangan, kecuali tambahan informasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) seperti sebagaimana yang telah dijelaskan dalam poin sebelumnya.

*Informasi
Umum
Pandemi
Covid-19*

A.6. Informasi Umum dan Langkah-Langkah Pemerintah dalam Rangka Menghadapi Pandemi Covid-19

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) menjadi wabah yang menyebar luas ke seluruh dunia. Bermula dari Wuhan, ibukota Provinsi Hubei, China. Wabah COVID-19 memerlukan upaya penanggulangan dan pencegahan penyebaran, yang pada akhirnya menimbulkan dampak sosial yang sangat besar. Kegiatan sterilisasi dilakukan secara masif dengan penyemprotan disinfektan pada fasilitas-fasilitas umum. Perilaku individu juga mendorong gerakan cuci tangan, *physical distancing*, dan memakai masker sebagai pelindung diri agar tidak tersebar dan menyebarkan COVID-19 ini.

Dampak pandemi COVID-19 terasa pada seluruh aspek kehidupan, tak

terkecuali perekonomian. Dampak pandemi COVID-19 terhadap sektor keuangan khususnya APBN juga tidak dapat dihindari oleh Pemerintah. Berbagai kebijakan pemerintah diambil untuk mengatasi pandemi COVID-19, yang terbesar adalah terbitnya Perpu Nomor 1 Tahun 2020. Selanjutnya, Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tersebut telah disahkan menjadi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Kebijakan lain yang ditetapkan untuk memitigasi pengaruh COVID-19 terhadap APBN adalah Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

Selanjutnya, sesuai amanat Perpu Nomor 1 Tahun 2020 pasal 2 ayat (2), diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Selain itu, dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan anggaran, Menteri Keuangan juga menerbitkan PMK Nomor 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dalam Penanganan Pandemi COVID-19, yang memiliki pengaturan khusus mengenai penggunaan akun dalam rangka penanganan pandemi COVID-19. Pasal 6 PMK Nomor 38/PMK.02/2020 dan Pasal 2 ayat (3) PMK Nomor 43/PMK.05/2020 menyatakan bahwa seluruh belanja dalam rangka penanganan COVID-19 dilakukan berdasarkan klasifikasi akun khusus COVID-19. Amanat tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-369/PB/2020 tanggal 27 April 2020 tentang Pemutakhiran Akun Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19). Dalam upaya melaksanakan ketentuan tersebut, Arsip

Nasional RI memutuskan dan menetapkan Keputusan Kepala ANRI Nomor 159.A Tahun 2020 tentang Biaya/Belanja Fasilitas Kerja yang Dibebankan Pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Arsip Nasional Republik Indonesia dalam Masa Darurat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia yang kemudian sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala ANRI Nomor 277 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala ANRI Nomor 159.A Tahun 2020. Keputusan Kepala ini menjadi salah satu dari beberapa dasar pertimbangan ditetapkannya Keputusan Kepala ANRI Nomor 336 Tahun 2020 tentang Pemberian Biaya Paket Data dan Komunikasi bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia dalam Tata Normal Baru pada tanggal 21 Oktober 2020.

Amanat Instruksi Presiden RI melalui Inpres Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19 dilaksanakan oleh Arsip Nasional RI melalui penerbitan Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 334.A Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan dan Realokasi Anggaran Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia. Regulasi ini menetapkan penggunaan alokasi anggaran pada kegiatan yang bersifat mendukung percepatan penanganan COVID-19 (*refocussing* kegiatan dan realokasi anggaran) berdasarkan Daftar Identifikasi Kebutuhan Barang/Jasa yang terlampir dalam Keputusan Kepala ANRI terkait.

Refocussing kegiatan dan realokasi anggaran dilakukan berdasarkan pada kerangka acuan kegiatan dan petunjuk operasional kegiatan. Pendanaan kegiatan dilakukan melalui mekanisme revisi anggaran oleh unit kerja terkait dan dilaksanakan secara cepat, sederhana, akuntabel serta berdasarkan pada ketentuan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-6/MK.02/2020 tentang *Refocussing* Kegiatan dan Realokasi Anggaran K/L dalam Rangka Penanganan COVID-19. Surat edaran ini kemudian diterjemahkan secara lebih teknis melalui Nota Dinas Direktur Pelaksanaan Anggaran (a.n. Direktur Jenderal

Perbendaharaan) Nomor ND-270/PB/2020 tanggal 28 Maret 2020 tentang Pedoman Pengesahan Revisi Anggaran *Refocussing* dan Realokasi Kegiatan Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19.

Instrumen kebijakan ini pada intinya mendorong Arsip Nasional RI untuk menyisir kembali kegiatan-kegiatan dan/atau belanja-belanja yang tidak menjadi prioritas di masa pandemi sekarang ini. Alokasi dana pada kegiatan/belanja tersebut kemudian dialihkan untuk kegiatan/belanja dalam rangka penanganan pandemi COVID-19.

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran penanganan pandemi COVID-19, Pasal 14 PMK Nomor 43/PMK.05/2020 mengatur bahwa akuntansi dan pelaporan keuangan transaksi belanja atas beban APBN dalam penanganan pandemi COVID-19 menjadi bagian dari laporan keuangan yang disusun oleh entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan menggunakan sistem aplikasi pelaporan, dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan PMK mengenai Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Selain itu, Pasal 15 PMK Nomor 43/PMK.05/2020 menyatakan bahwa entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan melakukan pengungkapan transaksi belanja atas beban APBN dalam penanganan pandemi COVID-19 secara memadai dalam CaLK sebagai bagian dari peristiwa luar biasa.

*Refocussing,
Realokasi,
dan Capaian
Output*

A.7. Refocussing Kegiatan/Realokasi Anggaran, Capaian Output Strategis, dan Output Penanganan COVID-19

Refocussing kegiatan dan/atau realokasi anggaran di Arsip Nasional RI dilaksanakan dengan berdasarkan pada Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 334.A Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan dan Realokasi Anggaran Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia. Instrumen kebijakan ini kemudian menjadi dasar dilakukannya revisi DIPA yang beberapa di antaranya terkait dengan *refocussing* kegiatan dan realokasi anggaran. Informasi mengenai hal ini akan dijelaskan lebih detail dalam bagian

Pengungkapan Lainnya (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran).

Dalam kerangka penganggaran berbasis kinerja, capaian output merupakan salah satu ukuran untuk menilai bagaimana setiap anggaran yang dikelola dapat dipertanggungjawabkan. Ruang lingkup output meliputi output strategis dan non output strategis. Output strategis merupakan output yang dikelola oleh Satker Kementerian Negara/Lembaga yang merupakan bagian dari pencapaian sasaran strategis pemerintah sesuai Rencana Kerja Pemerintah dan dipantau perkembangannya secara berkelanjutan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. Non output strategis merupakan output yang dikelola oleh Satker Kementerian Negara/Lembaga yang tidak termasuk kategori output strategis.

Pada menu capaian output aplikasi SAS 2020, Arsip Nasional RI mengelola 48 output yang terbagi atas 47 non output strategis dan 1 output strategis (*highlight* berwarna) dengan tampilan sebagai berikut :

Kategori	Sub-Struktur	Target Kinerja/Kuantitas	Capaian Kinerja/Volume (D)	Keterangan								
Kode	Uraian	Papir	Realisasi (DPS)	Penyerapan Anggaran (%)	Volume	Stasiun	Realisasi Target (Volume)	Capaian Target (%)	Realisasi Target (Volume)	Total Progress (%)	Capaian (%)	Ket
002-004	Indeks Penemuan yang Mempunyai Arsip?	82.019.000	78.700.000	95,96	38	Indeks	0	82,00	38	100,00	0,04	Ket
002-007	Indeks Penemuan yang Mempunyai Perencanaan	302.710.000	345.300.000	98,91	19	Indeks perantara	1	100,00	19	100,00	0,36	Ket
002-008	Perencanaan Hasil Pengawasan Strategis yang	69.200.000	69.200.000	100,00	20	Perencanaan	1	100,00	20	100,00	1,00	Ket
002-009	Pembinaan Arsip	551.118.000	362.379.821	65,75	1		1	100,00	7,73	100,00	98,03	Ket
002-010	Layanan/Pembinaan Arsip/Organisasi Negara/PI	289.504.000	36.822.000	12,71	5.108	Kelembagaan	1	100,00	1	100,00	0,01	Ket
002-011	Pengawasan Strategis Arsip Kelengkapan Material Ar	289.100.000	295.566.821	102,23	24.618	Pengawasan	9	10,00	242.976	100,00	1,00	Ket
002-012	Pembinaan Arsip Statis	471.648.000	479.244.949	101,61	7	INDUKSTRIPRODAM	3	75,28	7	99,98	0,01	Ket
002-013	Barang Sedia Tera Diak Arsip Terpadu dan Arsi	171.646.000	172.204.000	100,34	7	INDUKSTRIPRODAM	3	75,28	7	99,98	0,01	Ket
002-014	Pembinaan Kelembagaan	1.148.680.000	1.148.687.989	99,98	1		1	100,00	1	100,00	1,00	Ket
002-015	Pembinaan Arsip Terpadu dan Arsip Statis Keloga	1.148.680.000	1.154.627.800	100,48	122.881	Kelembagaan	9	75,08	122.888	100,00	0,16	Ket
002-016	Pembinaan/Pengakuan dan Pemertahanan	598.898.000	498.152.889	83,19	4	Kelembagaan	3	87,02	4	100,00	0,10	Ket
002-017	Pembinaan Kelembagaan yang Berkaitan dan se	300.000.000	446.122.889	148,71	4	Kelembagaan	3	87,02	4	100,00	0,10	Ket
002-018	Pembinaan Kelembagaan	1.483.714.000	1.483.979.989	99,98	1		1	100,00	1	100,00	1,00	Ket
0306-002	Pembinaan Arsip dan Lembaga Keuangan yang da	1.483.714.000	1.483.979.000	99,99	127	Indeks	3	75,07	98	100,00	0,42	Ket
0307-001	Pembinaan Kelembagaan BSM Kelembagaan dan	289.700.000	287.867.941	99,38	1		1	100,00	1	100,00	1,00	Ket
0307-002	BSM Kelembagaan yang Mempunyai Perbaikan, Pem	65.000.000	65.000.000	100,00	279	Orang	1	100,00	400	100,00	0,74	Ket
0307-003	BSM Kelembagaan yang Mempunyai Sertifikasi dan P	264.700.000	264.700.000	100,00	239	Orang	1	100,00	238	100,00	0,85	Ket
0000	Pembinaan Kelembagaan (Total)	457.588.000	420.824.819	91,99								

Output strategis Arsip Nasional RI juga termuat dalam Referensi Output Strategis 2020 sebagaimana disampaikan KPPN Jakarta V pada saat sosialisasi capaian output tanggal 10 Juni 2020 :

Referensi_OS_2020_26052020_2 - Microsoft Excel

Daftar Output Strategis (OS) 2020
Jumlah: 808 Output

No.	Kode BA	Nama BA	Kode Program	Nama Program	Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Output	Nama Output
471	454	079	06	Program Penelitian, Pengusahan, dan Pemanfaatan	3394	Pemanfaatan dan Inovasi Iptek	002	Hasil Pembinaan Perusahaan Pintisan Terdepan
472	455	079	06	Program Penelitian, Pengusahan, dan Pemanfaatan	3394	Pemanfaatan dan Inovasi Iptek	006	Infrastruktur Produktif Chimeng Science and Technology
473	456	079	06	Program Penelitian, Pengusahan, dan Pemanfaatan	3394	Pemanfaatan dan Inovasi Iptek	007	Infrastruktur Pusat Data Hight dan Keluasan Intelektual
474	457	079	06	Program Penelitian, Pengusahan, dan Pemanfaatan	3394	Pemanfaatan dan Inovasi Iptek	008	Infrastruktur Fasilitas laboratorium proses pangan tradic
475	458	079	06	Program Penelitian, Pengusahan, dan Pemanfaatan	3394	Pemanfaatan dan Inovasi Iptek	009	Infrastruktur Fasilitas Genomic Biodiversitas Tropika dan
476	459	081	06	Program Pengkajian dan Penerapan Teknolog	3473	Pengkajian dan Penerapan Teknolog	007	Inovasi Sistem dan Teknolog Dan T&ES
477	470	081	06	Program Pengkajian dan Penerapan Teknolog	2490	Pengkajian dan Penerapan Teknolog	003	Inovasi Teknologi Puna Male Kombatan
478	471	081	06	Program Pengkajian dan Penerapan Teknolog	5855	Pengkajian dan Penerapan Teknolog	005	Inovasi Teknologi Pilot Project Gawan Terintegrasi
479	472	085	06	Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional	5356	Pelaksanaan Akreditasi Kearsipan	002	Pencipta Arsip dan Lembaga Kearsipan yang diawasi
480	473	092	06	Program Kepemudaan dan Keolahragaan	3806	Pengembangan Kewirasahaan Pem	001	Pemuda yang dilatih sebagai leader kewirasaahaan
481	474	092	06	Program Kepemudaan dan Keolahragaan	3820	Pengembangan Olahraga Tradisional	011	Kampanye olahraga tradisional, usia dini dan Lansia, olah
482	475	092	06	Program Kepemudaan dan Keolahragaan	3822	Pengembangan Olahraga Pelreasi	013	Fasilitas Penyelenggaraan dan Keikutsertaan dalam keju
483	476	092	06	Program Kepemudaan dan Keolahragaan	3824	Peningkatan Standarisasi dan Infra	011	Fasilitas Prasarana Olahraga Pendidikan, Olahraga Pelre
484	477	092	06	Program Kepemudaan dan Keolahragaan	3824	Peningkatan Standarisasi dan Infra	012	Sarana Olahraga Pendidikan, Olahraga Pelreasi dan Olat
485	478	103	06	Program Penanggulangan Bencana	3891	Tanggap Darurat di Daerah Terlesta	002	Operasi Penanganan Darurat
486	479	103	06	Program Penanggulangan Bencana	3882	Kesiapsiagaan dalam Menghadapi B	001	Sistem Peringatan Dini Bencana
487	480	103	06	Program Penanggulangan Bencana	3882	Kesiapsiagaan dalam Menghadapi B	003	Rambu Evakuasi, Papan Peringatan Dan Informasi Bencana
488	481	103	06	Program Penanggulangan Bencana	3882	Kesiapsiagaan dalam Menghadapi B	002	Bencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana
489	482	023	01	Program Dukung Manajemen dan Pelaksanaan	1984	Peningkatan Pelayanan Prima dalam	001	Bencana Daruratwara PI
490	483	023	01	Program Dukung Manajemen dan Pelaksanaan	1984	Peningkatan Pelayanan Prima dalam	002	Bencana Unggulan
491	484	033	01	Program Dukung Manajemen dan Pelaksanaan	3881	Peningkatan Pelayanan Prima dalam	001	Sarana Berhubungan Dengan Penyelenggaraan

Output strategis Arsip Nasional RI berada dalam Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional (kode 06) dengan nama kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Kearsipan (kode 5356) dan nama output Pencipta Arsip dan Lembaga Kearsipan yang Diawasi (kode 002). Berikut ini disajikan informasi capaian output strategis Arsip Nasional RI TA. 2020 :

No.	Kode Output Strategis	Uraian Output	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Persentase Penyerapan	Target Keluaran	Realisasi Volume Keluaran	Progres Capaian Output
1	002	Pencipta Arsip dan Lembaga Kearsipan yang Diawasi	1.469.784.000	1.463.578.500	99,58%	68 Instansi	68 Instansi	100%

Pelaksanaan Akreditasi Kearsipan dilakukan melalui kegiatan pengawasan kearsipan tingkat pusat dan daerah serta pengelolaan layanan ketatausahaan berupa bimbingan teknis, sosialisasi dan rapat koordinasi pengawasan kearsipan, sosialisasi dan bimbingan teknis tim, bimbingan teknis pengawasan kearsipan, dan penyusunan pedoman pengawasan kearsipan. Sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan, realisasi anggaran dari kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Kearsipan mencapai Rp1.463.578.500,00 atau 99,58% dari pagu anggaran sebesar Rp1.469.784.000,00. Target keluaran dari kegiatan ini berupa satuan instansi yakni sebanyak 68 instansi dengan rincian masing-masing: 34 Kementerian Lembaga (K/L) dan 34 Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) yang tersebar pada tiap-tiap provinsi di Indonesia. Realisasi volume keluaran tercapai sebanyak 68 instansi (34 K/L & 34 LKD) atau sebesar 100% dari target keluaran yang ditetapkan.

Dalam Surat Pernyataan Nomor: PR.04.02/58/2020 tanggal 22 April 2020 disebutkan bahwa output strategis ANRI (5356.002) mengalami penyesuaian volume dari semula 127 instansi menjadi 41 instansi. Penyesuaian volume ini merupakan hasil *Trilateral Meeting* atas rencana target sebelumnya. Target output strategis ANRI kemudian berubah menjadi 68 instansi yang terbagi atas 34 K/L dan 34 LKD berdasarkan dengan Revisi Anggaran.

Kegiatan penanganan COVID-19 di lingkungan Arsip Nasional RI dilaksanakan oleh tiap satker di bawah Arsip Nasional RI di antaranya yakni ANRI Jakarta, Balai Arsip Statis dan Tsunami (BAST), Pusat Jasa Kearsipan, dan Pusdiklat Kearsipan melalui program dan/atau kegiatan yang sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja terkait. Informasi realisasi belanja dalam rangka penanganan COVID-19 akan ditampilkan detail dalam bagian pos-pos LRA dan Catatan Penting Lainnya atas LRA.

Berikut merupakan kegiatan penanganan COVID-19 di lingkungan Arsip Nasional RI secara garis besar :

No.	Belanja Barang	Belanja Modal
1	Kegiatan transport bagi petugas piket pada periode awal pandemi covid-19	Kegiatan pengadaan ambulans
2	Penyemprotan disinfektan secara rutin menyeluruh dan parsial di ANRI baik Gedung Pusat (Jl. Ampera Raya), Pusdiklat Bogor, Gedung Warung Buncit, dan Gedung Gajah Mada	Peralatan dan mesin klinik/crisis center ANRI (berupa alat pengukur suhu, server, telepon seluler bagi call center, peralatan klinik, laptop, dll)
3	Pengadaan <i>handsanitizer</i> , masker sekali pakai dan <i>washable</i> , sabun cuci tangan, tisu basah, kain lap <i>microfiber</i>	Pengadaan kanopi pos I serta penambah nilai gedung berupa pembuatan ruang tunggu dan ruang perawatan darurat
4	Pulsa bagi pegawai yang melaksanakan WFH & penambah daya tahan tubuh bagi pegawai yang melaksanakan WFO	Ruang penyimpanan obat pada klinik
5	Persediaan <i>Covid Kit</i> bagi pegawai ANRI dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 di lingkungan Arsip Nasional RI	

Kegiatan **Penanganan COVID-19** di lingkungan Arsip Nasional RI dalam upaya membantu Pemerintah memutus rantai penyebaran *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* akan diuraikan lebih lanjut dalam bagian Pengungkapan Lain-Lain (F.2.7) sebagai bagian dari bentuk pelaksanaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara yang tidak terpisah dari Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) ini.

Satuan Kerja **A.8 Satuan Kerja Dana Dekosentrasi**

Dana

Dekosentrasi

Satuan Kerja Dana Dekosentrasi Bidang Kearsipan berjumlah 33 satuan kerja (tersebar di tiap provinsi di Indonesia) per 31 Desember 2019, kemudian telah berubah statusnya menjadi Satuan Kerja Tidak Aktif, Tidak Bersaldo dalam aplikasi e-Rekon&LK per 1 Januari 2020. Atas hal tersebut, satuan kerja terkait sudah tidak mendapat pengalokasian anggaran dan tidak memiliki kewajiban pertanggungjawaban pelaporan keuangan di Tahun Anggaran 2020.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan Arsip Nasional Republik Indonesia telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebanyak lima kali dari DIPA awal, pagu awal sebesar Rp190.757.216.000,00 setelah revisi terakhir menjadi sebesar Rp165.418.004.000,00. Pagu anggaran terlihat sebagai berikut :

Kode Akun	Uraian	Pagu Anggaran Semula	Pagu Anggaran Setelah Revisi
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	11.876.134.000	11.876.134.000
4251	Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha	355.810.000	355.810.000
4254	Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	3.191.484.000	3.191.484.000
4256	Pendapatan Jasa Lainnya	8.328.840.000	8.328.840.000
4259	Pendapatan Lain-Lain	0	0
TOTAL PENDAPATAN		11.876.134.000	11.876.134.000
51	BELANJA PEGAWAI	102.269.147.000	100.000.295.000
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	49.606.785.000	49.151.781.000
5122	Belanja Lembur	140.325.000	222.000.000
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito	52.522.037.000	50.626.514.000
52	BELANJA BARANG	85.536.767.000	60.504.900.000
5211	Belanja Barang Operasional	13.811.235.000	17.277.698.000
5212	Belanja Barang Non Operasional	17.277.799.000	8.200.935.000
5218	Belanja Barang Persediaan	4.328.772.000	4.317.751.000
5221	Belanja Jasa	17.964.320.000	14.537.140.000
5231	Belanja Pemeliharaan	9.238.730.000	9.414.101.000
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	20.489.465.000	6.648.140.000
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri	2.152.906.000	109.135.000
5261	Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	273.540.000	0
53	BELANJA MODAL	2.951.302.000	4.912.809.000
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.002.071.000	4.112.859.000
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	125.000.000	195.000.000
5361	Belanja Modal Lainnya	824.231.000	604.950.000
TOTAL BELANJA (51 + 52 + 53)		190.757.216.000	165.418.004.000

Berikut disajikan data historis perubahan dan/atau pergeseran (realokasi) pagu anggaran Arsip Nasional Republik Indonesia selama Tahun Anggaran 2020 :

Data Historis Pagu
Anggaran ANRI 2020

KODE AKUN	URAIAN	Apr-20	Jun-20	Jul-20	Agu-20
51	BELANJA PEGAWAI	3.665.069.000	0	0	0
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	3.665.069.000	-	-1.789.586.000	-
5122	Belanja Lembur	-	-	88.250.000	-
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito	-	-	1.701.336.000	-
52	BELANJA BARANG	-28.087.051.000	0	-304.988.000	0
5211	Belanja Barang Operasional	-5.511.183.000	-4.840.000	7.760.171.000	41.050.000
5212	Belanja Barang Non Operasional	-8.688.202.000	-	-484.180.000	654.564.000
5218	Belanja Barang Persediaan	-130.868.000	7.340.000	-120.610.000	185.489.000
5221	Belanja Jasa	1.026.356.000	-	-5.661.416.000	96.208.000
5231	Belanja Pemeliharaan	78.952.000	-2.500.000	-1.290.823.000	600.000
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	-14.071.241.000	-	-508.130.000	503.635.000
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri	-517.325.000	-	-	-1.481.546.000
5261	Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	-273.540.000	-	-	-
53	BELANJA MODAL	-917.230.000	0	304.988.000	0
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-464.604.000	-	271.643.000	-
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-125.000.000	-	-	-
5361	Belanja Modal Lainnya	-327.626.000	-	33.345.000	-
	PERUBAHAN ANGGARAN (MINUS)	-30.109.589.000			
	PERUBAHAN ANGGARAN (PLUS)	4.770.377.000			
	TOTAL PEMOTONGAN ANGGARAN	-25.339.212.000			
	PERGESERAN ANGGARAN (MINUS)		-7.340.000	-9.854.745.000	-1.481.546.000
	PERGESERAN ANGGARAN (PLUS)		7.340.000	9.854.745.000	1.481.546.000
	CHECKS & BALANCES		0	0	0

KODE AKUN	URAIAN	Agu-20	Okt-20	Nov-20	Des-20
51	BELANJA PEGAWAI	0	0	-5.933.921.000	0
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	-	-	-2.330.487.000	-
5122	Belanja Lembur	-	-	-109.367.000	102.792.000
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito	-	-	-3.494.067.000	-102.792.000
52	BELANJA BARANG	0	13.546.000	3.346.626.000	0
5211	Belanja Barang Operasional	41.050.000	-1.232.400.000	2.380.057.000	33.608.000
5212	Belanja Barang Non Operasional	654.564.000	-264.220.000	-85.839.000	-208.987.000
5218	Belanja Barang Persediaan	185.489.000	-337.739.000	404.802.000	-19.435.000
5221	Belanja Jasa	96.208.000	718.323.000	363.058.000	30.291.000
5231	Belanja Pemeliharaan	600.000	1.062.682.000	162.660.000	163.800.000
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	503.635.000	66.900.000	166.788.000	723.000
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri	-1.481.546.000	-	-44.900.000	-
5261	Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	-	-	-	-
53	BELANJA MODAL	0	-13.546.000	2.587.295.000	0
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-13.546.000	2.317.295.000	-
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	195.000.000	-
5361	Belanja Modal Lainnya	-	-	75.000.000	-
	PERUBAHAN ANGGARAN (MINUS)				
	PERUBAHAN ANGGARAN (PLUS)				
	TOTAL PEMOTONGAN ANGGARAN				
	PERGESERAN ANGGARAN (MINUS)	-1.481.546.000	-1.847.905.000	-6.064.660.000	-331.214.000
	PERGESERAN ANGGARAN (PLUS)	1.481.546.000	1.847.905.000	6.064.660.000	331.214.000
	CHECKS & BALANCES	0	0	0	0

Realisasi Pendapatan
Rp13.664.271.146,00

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp13.664.271.146,00 atau mencapai 115,06 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp11.876.134.000,00. Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi Pendapatan Arsip Nasional RI adalah sebagai berikut :

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2020

Kode Akun	Uraian	31 Desember 2020		
		Estimasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi Anggaran (%)
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	355.810.000,00	940.773.032,00	264,40
4254	Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	3.191.484.000,00	3.087.750.000,00	96,75
4256	Pendapatan Jasa Lainnya	8.328.840.000,00	8.379.455.450,00	100,61
4257	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	-	3.000.000,00	-
4258	Pendapatan Denda	-	-	-
4259	Pendapatan Lain-Lain	-	1.253.292.664,00	-
	Jumlah	11.876.134.000,00	13.664.271.146,00	115,06

Realisasi Pendapatan 31 Desember 2020 untuk Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN mencapai 264,40 persen dari realisasi. Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi mencapai 96,75 persen dari estimasi. Pendapatan Jasa Lainnya mencapai 100,61 persen dari estimasi. Pendapatan Lain-Lain dan Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan tidak tercatat estimasi sehingga belum terukur terhadap realisasi pendapatannya. Selanjutnya, Realisasi Pendapatan untuk periode 31 Desember 2020 dibandingkan dengan 31 Desember 2019 secara keseluruhan terdapat penurunan sebesar -1,01 persen.

Penurunan pendapatan ini disebabkan adanya penurunan estimasi pendapatan pada tahun 2020 di bandingkan dengan tahun 2019. Selain itu adanya pandemi *Covid-19* yang ditindaklanjuti dengan penerapan Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di

Lingkungan Arsip Nasional RI) melalui Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah kerja satker selama 3 bulan, yaitu sejak bulan Maret - Mei 2020 dan PSBB transisi yang berlangsung selama beberapa pekan selama bulan Juni - Desember 2020 yang mempengaruhi penurunan pendapatan. PSBB tersebut berdampak pada menurunnya pengguna jasa layanan arsip dan persewaan gedung Gajah Mada ANRI.

*Perbandingan Realisasi Pendapatan (netto)
31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019*

Uraian	Realisasi Pendapatan		Kenaikan/Penurunan	
	2020 (Rp)	2019 (Rp)	(Rp)	(%)
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	940.773.032,00	1.789.257.999,00	(848.484.967,00)	(47,42)
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	3.087.750.000,00	1.868.797.000,00	1.218.953.000,00	65,23
Pendapatan Jasa Lainnya	8.379.455.450,00	9.534.055.200,00	(1.154.599.750,00)	(12,11)
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	3.000.000,00	-	3.000.000,00	0,00
Pendapatan Denda	-	269.307.604,00	(269.307.604,00)	(100,00)
Pendapatan Lain-Lain	1.253.292.664,00	341.582.089,00	911.710.575,00	266,91
Jumlah	13.664.271.146,00	13.802.999.892,00	(138.728.746,00)	(1,01)

B.1.1 Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN dan Iuran Badan Usaha

Kode Akun	Uraian	Realisasi Pendapatan		Kenaikan/Penurunan	
		2020	2019	(Rp)	(%)
425119	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	4.895.000,00	15.615.000,00	(10.720.000,00)	(68,65)
	ANRI Jakarta	4.895.000,00	15.615.000,00	(10.720.000,00)	(68,65)
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	185.921.000,00	94.999.999,00	90.921.001,00	95,71
	ANRI Jakarta	185.921.000,00	94.999.999,00	90.921.001,00	95,71
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	716.057.032,00	1.412.243.000,00	(696.185.968,00)	(49,30)
	ANRI Jakarta	716.057.032,00	1.412.243.000,00	(696.185.968,00)	(49,30)
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	33.900.000,00	266.400.000,00	(232.500.000,00)	(87,27)
	Pusdiklat Kearsipan Bogor	33.900.000,00	266.400.000,00	(232.500.000,00)	(87,27)
	Jumlah	940.773.032,00	1.789.257.999,00	(848.484.967,00)	(47,42)

Realisasi dari Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya ; Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya ; Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan ; Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp940.773.032,00 atau mencapai 264,40 persen dari estimasi pendapatannya sebesar

Rp355.810.000,00. Bila dibandingkan dengan 31 Desember 2019 secara keseluruhan mengalami penurunan sebesar (Rp848.484.967,00) atau -47,42 persen. Adapun rincian realisasi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Terdapat penurunan Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya sebesar (Rp10.720.000,00) atau -68,65 persen yang berasal dari Penjualan hasil penerbitan Naskah Sumber Periode Sebelum RI (VOC – Belanda) dan Periode RI (1945 – Sekarang);
2. Terdapat kenaikan Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya sebesar Rp90.921.001,00 atau 95,71 persen yang berasal dari adanya proses Penjualan kendaraan perorangan dinas sesuai BAST No. PL.02.03/79/2020 tgl 24 Maret 2020; serta Hasil Bersih Lelang RL 484/29/2020 dan RL 557/29/2020 Arsip Nasional Republik Indonesia Pelelang Anice Kasim;
3. Terdapat penurunan Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan sebesar (Rp696.185.968,00) atau -49,30 persen yang berasal dari sewa ruang utama bawah dan halaman taman Gedung Gajah Mada. Penurunan pendapatan disebabkan oleh menurunnya jasa persewaan gedung selama pandemi COVID-19;
4. Terdapat penurunan Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi sebesar (Rp232.500.000,00) atau -87,27 persen yang berasal dari Pembayaran PNBPN di satker Pusdiklat Kearsipan Bogor diantaranya Sewa Kamar Dalam Rangka Diklat. Penurunan pendapatan disebabkan oleh menurunnya jasa persewaan gedung selama pandemi COVID-19.

B.1.2 Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi

Kode Akun	Uraian	Realisasi Pendapatan		Kenaikan/Penurunan	
		2020	2019	(Rp)	(%)
425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	3.087.750.000,00	1.868.797.000,00	1.218.953.000,00	65,23
	Pusdiklat Kearsipan Bogor	3.087.750.000,00	1.868.797.000,00	1.218.953.000,00	65,23
	Jumlah	3.087.750.000,00	1.868.797.000,00	1.218.953.000,00	65,23

Realisasi dari Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp3.087.750.000,00 atau mencapai 96,75 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp3.191.484.000,00. Bila dibandingkan dengan 31 Desember 2019 secara keseluruhan mengalami kenaikan sebesar Rp1.218.953.000,00 atau 65,23 persen. Rincian realisasi tersebut berupa kenaikan Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan sebesar Rp1.218.953.000,00 atau 65,23 persen yang berasal dari PNBPN atas pelaksanaan diklat teknis dan diklat lainnya pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan Bogor.

B.1.3 Pendapatan Jasa Lainnya

Kode Akun	Uraian	Realisasi Pendapatan		Kenaikan/Penurunan	
		2020	2019	(Rp)	(%)
425692	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi	8.379.455.450,00	9.534.055.200,00	(1.154.599.750,00)	(12,11)
	ANRI Jakarta	182.446.150,00	431.031.500,00	(248.585.350,00)	(57,67)
	BAST Aceh	2.545.500,00	7.851.000,00	(5.305.500,00)	(67,58)
	Pusat Jasa Kearsipan	8.194.463.800,00	9.095.172.700,00	(900.708.900,00)	(9,90)
	Jumlah	8.379.455.450,00	9.534.055.200,00	(1.154.599.750,00)	(12,11)

Realisasi dari Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp8.379.455.450,00 atau mencapai 100,61 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp8.328.840.000,00. Bila dibandingkan dengan 31 Desember 2019 secara keseluruhan mengalami penurunan sebesar (Rp1.154.599.750,00) atau -12,11 persen. Adapun rincian realisasi tersebut adalah sebagai berikut : Pendapatan Jasa Lainnya berasal dari Jasa Penggandaan, Reproduksi dan Transkripsi pada Kantor Pusat ANRI Jakarta dan Balai Arsip Statis Tsunami Aceh. Jasa Penyimpanan, Pemeliharaan, Perawatan, dan Pembinaan Arsip serta Jasa Pembuatan Pedoman dan Pembuatan Sistem Aplikasi Kearsipan pada Pusat Jasa Kearsipan.

B.1.4 Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan

Kode Akun	Uraian	Realisasi Pendapatan		Kenaikan/Penurunan	
		2020	2019	(Rp)	(%)
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai	3.000.000,00	-	3.000.000,00	0,00
	ANRI Jakarta	3.000.000,00	-	3.000.000,00	0,00
	Jumlah	3.000.000,00	-	3.000.000,00	0,00

Realisasi dari Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp3.000.000,00 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp0,00. Bila dibandingkan dengan 31 Desember 2019 secara keseluruhan mengalami kenaikan sebesar Rp3.000.000,00 atau 0,00 persen. Adapun rincian realisasi tersebut adalah berupa penyelesaian ganti rugi terhadap pegawai a.n. Mira Puspita Rini sesuai LHA atas pengelolaan BMN tahun 2019 sesuai Surat Keterangan Nomor PW.00/1016/2020. Keterangan lebih lanjut akan diuraikan dalam pos Neraca – Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR).

B.1.5 Pendapatan Denda

Kode Akun	Uraian	Realisasi Pendapatan		Kenaikan/Penurunan	
		2020	2019	(Rp)	(%)
425811	Pendapatan Penyelesaian Denda Pekerjaan	0,00	269.307.604,00	(269.307.604,00)	(100,00)
	ANRI Jakarta	-	212.534.183,00	(212.534.183,00)	(100,00)
	Pusdiklat Kearsipan Bogor	-	56.773.421,00	(56.773.421,00)	(100,00)
	Pusat Jasa Kearsipan	-	-	0,00	0,00
	BAST Aceh	-	-	0,00	0,00
	Jumlah	-	269.307.604,00	(269.307.604,00)	(100,00)

Realisasi dari Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp0,00 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp0,00. Bila dibandingkan dengan 31 Desember 2019 secara keseluruhan mengalami penurunan sebesar (Rp269.307.604,00) atau -100,00 persen.

B.1.6 Pendapatan Lain-Lain

Kode Akun	Uraian	Realisasi Pendapatan		Kenaikan/Penurunan	
		2020	2019	(Rp)	(%)
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang	26.852.475,00	140.255.542,00	(113.403.067,00)	(80,85)
	ANRI Jakarta	20.999.175,00	115.963.042,00	(94.963.867,00)	(81,89)
	Pusdiklat Kearsipan Bogor	5.853.300,00	-	5.853.300,00	0,00
	Pusat Jasa Kearsipan	-	8.047.500,00	(8.047.500,00)	(100,00)
	BAST Aceh	-	16.245.000,00	(16.245.000,00)	(100,00)
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	1.226.440.189,00	200.619.057,00	1.025.821.132,00	511,33
	ANRI Jakarta	959.273.555,00	200.619.057,00	758.654.498,00	378,16
	BAST Aceh	267.166.634,00	-	267.166.634,00	0,00
425931	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	-	611.700,00	(611.700,00)	(100,00)
	ANRI Jakarta	-	611.700,00	(611.700,00)	(100,00)
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0,00	95.790,00	(95.790,00)	(100,00)
	ANRI Jakarta	-	95.790,00	(95.790,00)	(100,00)
	Jumlah	1.253.292.664,00	341.582.089,00	911.710.575,00	266,91

Realisasi dari Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu dan Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.253.292.664,00 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp0,00. Bila dibandingkan dengan 31 Desember 2019 secara keseluruhan mengalami kenaikan sebesar Rp911.710.575,00 atau 266,91 persen. Adapun rincian realisasi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penurunan atas Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu pada satker Arsip Nasional RI Jakarta dan Pusdiklat Kearsipan berupa perjadi dan honorarium dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal Setor	Uraian	No. NTPN	MAK	Nominal (Rp)
1	01/06/2020	Pengembalian perjadi an lyos dkk (6org) TA 2019 sesuai SPM 3652	235267QLTJF2NLNI	425912	1.543.775,00
2	01/06/2020	Pengembalian honor an Siti Hasanah dkk (2org) TA 2019 sesuai SPM 2851	25BF861QTUA9T9UK	425912	1.800.000,00
3	01/06/2020	Pengembalian honor an Bambang PW TA 2019 sesuai SPM 2910	3F66A3CIEEJ4M94J	425912	255.000,00
4	01/06/2020	Pengembalian kekurangan volume pekerjaan pemeliharaan	79F292G4UK008MCI	425912	9.544.400,00
5	01/06/2020	Pengembalian akomodasi an Irma Karimaton tgl 23-26 Juli 2019	B499A48VU95H2ITC	425912	200.000,00
6	16/1/2020	Pengembalian honor an Zweta M sesuai SPM 3410 tgl 5/12/2019	7AF8461QTUAJLAFK	425912	1.500.000,00
7	21/1/2020	Pengembalian honor tim an Sumitro sesuai SPM 3424 tgl 10/12/2019	2313A6U8DOT469J1	425912	382.500,00
8	21/1/2020	Pengembalian honor tim an Sumitro sesuai SPM 3441 tgl 6/12/2019	60E2461QTUANPA2A	425912	382.500,00
9	21/1/2020	Pengembalian honor tim an Sumitro sesuai SPM 3440 tgl 9/12/2019	CPSKVUJO96C4A13CI	425912	382.500,00
10	16/3/2020	Pengembalian perjadi an TAYL an Tuti dkk (15org) sesuai SPM 2716 tgl 18/10/2019	FA71B48VU9BLR8AO	425912	5.008.500,00
		Jumlah			20.999.175,00

No.	Tanggal Setor	Uraian	No. NTPN	MAK	Nominal (Rp)
1	15/01/2020	Pengembalian belanja barang TAYL uang tiket a.n Ola	F6E7F2G4UK0VRBTE	425912	5.853.300,00
Jumlah					5.853.300,00

2. Kenaikan atas Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran yang Lalu pada satker Arsip Nasional RI Jakarta dan Balai Arsip Statis dan Tsunami Aceh dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal Setor	Uraian	No. NTPN	MAK	Nominal (Rp)
1	26/03/2020	Pembayaran kekurangan volume pekerjaan pek. pembangunan ged. Arsip Kepresidengan Tahun 2018	E8FF66U8DP36CNE3	425913	178.944.754,00
2	10/07/2020	Kelebihan pembayaran pekerjaan pelaksanaan pembangunan interior gedung arsip kepresidenan di gajah mada	8D14161QTUSA83SG	425913	300.000.000,00
3	10/07/2020	Kekurangan denda keterlambatan pekerjaan pelaksanaan pembangunan interior gedung arsip kepresidenan di Gajah Mada	5B30561QTUSA7V06	425913	129.698.306,00
4	28/12/2020	Kelebihan pembayaran pekerjaan pelaksanaan pembangunan interior Gedung Arsip Kepresidenan di Gajah Mada tahun 2019	E4CC661QTVBO1LD4	425913	350.630.495,00
Jumlah					959.273.555,00

No.	Tanggal Setor	Uraian	No. NTPN	MAK	Nominal (Rp)
1	24/03/2020	Setoran Kelebihan Pembayaran Pembangunan Gedung Depot Arsip Balai Arsip Statis dan Tsunami TA 2019 sesuai dengan Surat Rekomendasi BPK RI Nomor:30/S/V-XVI.I/01/2020 tanggal 20 Januari 2020	003D16U8DP359BL7	425913	267.166.634,00
Jumlah					267.166.634,00

3. Pada LKKL ANRI TA. 2020 (*Unaudited*) terdapat Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS sebesar Rp24.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

TGL DOK	NTPN	KETERANGAN	JUMLAH (Rp)
12/10/2020	9DFA62G4UKRL3KEQ	Setoran Kas Negara Non KAI Oktober 2020	500.000,00
10/11/2020	75FC28N3DEVCIKA1	Setoran Kas Negara Non KAI November 2020	500.000,00
10/12/2020	88DA855DE4OOSTIP	Setoran Kas Negara Non KAI Desember 2020	23.000.000,00
Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL			24.000.000,00

Pendapatan tersebut merupakan setoran kas negara yang berasal dari PT. Taspem (Persero) atas pemotongan secara rutin/berkala terhadap pegawai yang telah pensiun namun diketahui memiliki utang kepada negara yang dibuktikan dengan dokumen sumber SKPP (Surat Keterangan Penghentian Pembayaran) Gaji atas sejumlah hak yang masih diterima sebagaimana halnya pegawai yang masih aktif bekerja.

Atas Pendapatan tersebut dilakukan koreksi/ralat dokumen dari semula SSBP (Surat Setoran Bukan Pajak) menjadi SSPB (Surat Setoran Pengembalian Belanja) sebagaimana hasil kesepakatan bersama (Tripartit) atas usulan jurnal koreksi BPK-RI terhadap LKKL ANRI TA. 2020 (*Unaudited*) dengan dasar pertimbangan bahwa pendapatan yang diterima di tahun bersangkutan tersebut pada dasarnya merupakan pengembalian Belanja Pegawai di tahun anggaran berjalan yang ditimbulkan akibat kelebihan pembayaran gaji terhadap 2 (dua) orang pegawai yang telah memasuki usia pensiun. Adapun penyebab terjadinya hal ini dikarenakan oleh keterlambatan penyampaian SK Pensiun kepada PPABP (Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai) sehingga penerbitan SKPP (Surat Keterangan Penghentian Pembayaran) Gaji baru dapat dilakukan beberapa bulan setelah penetapan tanggal pemberhentian pegawai secara hormat.

Dampak yang ditimbulkan dari proses koreksi/ralat dokumen tersebut adalah pengeliminasian Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS (425931) sebesar Rp24.000.000,00 dari komponen Pendapatan Lain-Lain (4259) dan pergeseran kepada pengembalian Belanja Pegawai (51) komponen Belanja Gaji dan Tunjangan PNS (5111) dengan rincian nilai yang akan disajikan selanjutnya dalam pos LRA – Belanja Gaji dan Tunjangan PNS.

Realisasi Belanja
Rp156.632.536.842,00

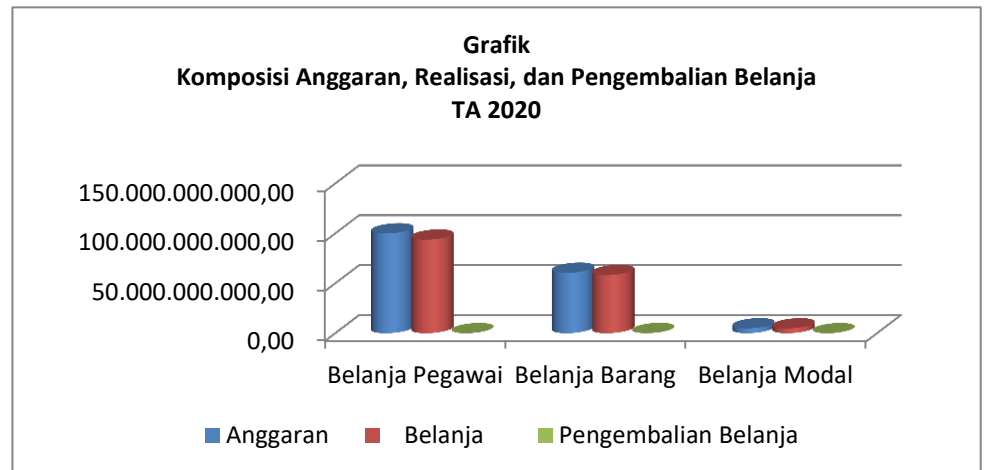
B.2. BELANJA

Realisasi Belanja Negara (neto) sebesar Rp156.632.536.842,00 atau mencapai 94,69 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp165.418.004.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2020 tersaji sebagai berikut :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2020

Kode Akun	Uraian	31 Desember 2020		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi Anggaran (%)
51	Belanja Pegawai	100.000.295.000,00	93.716.968.297,00	93,72
52	Belanja Barang	60.504.900.000,00	58.082.281.205,00	96,00
53	Belanja Modal	4.912.809.000,00	4.833.287.340,00	98,38
	Jumlah	165.418.004.000,00	156.632.536.842,00	94,69

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini :



Realisasi Belanja TA 2020 secara keseluruhan mengalami penurunan sebesar -49,37 persen dibandingkan pada TA 2019 dengan rincian sebagai berikut :

1. Realisasi Belanja Pegawai mengalami penurunan sebesar (Rp6.375.896.801,00) atau -6,37 persen;
2. Realisasi Belanja Barang mengalami penurunan sebesar (Rp49.853.690.858,00) atau -46,19 persen;
3. Realisasi Belanja Modal mengalami penurunan sebesar (Rp96.527.508.757,00) atau -95,23 persen.

Perbandingan Realisasi Belanja (netto) TA 2020 dan 2019

Uraian	Realisasi Belanja		Kenaikan/Penurunan	
	2020 (Rp)	2019 (Rp)	(Rp)	(%)
Belanja Pegawai	93.716.968.297,00	100.092.865.098,00	(6.375.896.801,00)	(6,37)
Belanja Barang	58.082.281.205,00	107.935.972.063,00	(49.853.690.858,00)	(46,19)
Belanja Modal	4.833.287.340,00	101.360.796.097,00	(96.527.508.757,00)	(95,23)
Jumlah	156.632.536.842,00	309.389.633.258,00	(152.757.096.416,00)	(49,37)

*Belanja Pegawai
Rp93.716.968.297,00*

B.3. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai (neto) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 adalah Rp93.716.968.297,00 atau sebesar 93,72 persen dari pagu anggaran Rp100.000.295.000,00. Bila dibandingkan dengan per 31 Desember 2019 mengalami penurunan sebesar (Rp6.375.896.801,00) atau -6,37 persen. Anggaran Belanja Pegawai hanya terdapat pada Satker ANRI Jakarta. Rincian realisasi Belanja Pegawai TA 31 Desember 2020 dan perbandingan Belanja Pegawai 31 Desember 2020 dengan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 31 Desember 2020

Kode Akun	Uraian	31 Desember 2020		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi Anggaran (%)
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	49.151.781.000,00	48.624.771.116,00	98,93
5122	Belanja Lembur	222.000.000,00	172.680.000,00	77,78
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito	50.626.514.000,00	44.943.518.873,00	88,77
Jumlah Belanja Pegawai Bruto		100.000.295.000,00	93.740.969.989,00	
Pengembalian Belanja Pegawai			(24.001.692,00)	
Jumlah Belanja Pegawai Netto		100.000.295.000,00	93.716.968.297,00	93,72

Perbandingan Belanja Pegawai (netto) TA 31 Desember 2020 dan 2019

Kode Akun	Uraian	Realisasi Belanja		Kenaikan/Penurunan	
		2020 (Rp)	2019 (Rp)	(Rp)	(%)
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	48.600.769.424,00	47.245.569.817,00	1.355.199.607,00	2,87
5122	Belanja Lembur	172.680.000,00	113.381.000,00	59.299.000,00	52,30
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito	44.943.518.873,00	52.733.914.281,00	(7.790.395.408,00)	(14,77)
Jumlah Belanja Pegawai Netto		93.716.968.297,00	100.092.865.098,00	(6.375.896.801,00)	(6,37)

B.3.1 Belanja Gaji dan Tunjangan PNS

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan PNS (neto) per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp48.600.769.424,00 atau 98,88 persen dari anggaran sebesar Rp49.151.781.000,00. Bila dibandingkan dengan 31 Desember 2019 secara keseluruhan mengalami kenaikan sebesar Rp1.355.199.607,00 atau 2,87 persen. Hal ini disebabkan oleh pengangkatan CPNS menjadi PNS sebanyak 86 pegawai dan penerimaan CPNS yang berasal dari PKN-STAN sebanyak 9 pegawai, selain itu naiknya realisasi tunjangan jabatan atas PNS yang baru diangkat dari jabatan fungsional umum menjadi fungsional tertentu.

Kode Akun	Uraian	Realisasi Belanja		Kenaikan/Penurunan	
		2020	2019	(Rp)	(%)
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	30.000.904.900,00	29.604.416.740,00	396.488.160,00	1,34
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	433.469,00	461.934,00	(28.465,00)	(6,16)
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	2.036.392.738,00	1.989.621.494,00	46.771.244,00	2,35
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	521.264.402,00	528.987.428,00	(7.723.026,00)	(1,46)
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	2.020.840.000,00	2.210.860.000,00	(190.020.000,00)	(8,59)
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	3.399.122.000,00	2.850.509.000,00	548.613.000,00	19,25
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	309.790.267,00	333.353.627,00	(23.563.360,00)	(7,07)
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	1.359.830.340,00	1.359.613.080,00	217.260,00	0,02
511129	Belanja Uang Makan PNS	5.115.243.000,00	4.248.272.000,00	866.971.000,00	20,41
511134	Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS	3.404.480.000,00	3.533.788.000,00	(129.308.000,00)	(3,66)
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	456.470.000,00	589.245.000,00	(132.775.000,00)	(22,53)
Jumlah Belanja Bruto		48.624.771.116,00	47.249.128.303,00	1.375.642.813,00	2,91
Pengembalian Belanja		(24.001.692,00)	(3.558.486,00)	(20.443.206,00)	574,49
Jumlah		48.600.769.424,00	47.245.569.817,00	1.355.199.607,00	2,87

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan PNS (neto) per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp48.600.769.424,00 sedangkan Beban Gaji dan Tunjangan PNS (neto) pada Laporan Operasional Tahun 2020 sebesar Rp48.600.769.424,00 tidak terdapat selisih Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :

Kode Akun	Uraian Jenis Belanja/Beban	Laporan Realisasi Anggaran (Rp)	Laporan Operasional (Rp)	Selisih LRA dan LO (Rp)
Belanja/Beban Gaji dan Tunjangan PNS		48.624.771.116,00	48.624.771.116,00	-
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	30.000.904.900,00	30.000.904.900,00	-
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	433.469,00	433.469,00	-
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	2.036.392.738,00	2.036.392.738,00	-
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	521.264.402,00	521.264.402,00	-

511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	2.020.840.000,00	2.020.840.000,00	-
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	3.399.122.000,00	3.399.122.000,00	-
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	309.790.267,00	309.790.267,00	-
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	1.359.830.340,00	1.359.830.340,00	-
511129	Belanja Uang Makan PNS	5.115.243.000,00	5.115.243.000,00	-
511134	Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS	3.404.480.000,00	3.404.480.000,00	-
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	456.470.000,00	456.470.000,00	-
Pengembalian Belanja/Beban		(24.001.692,00)	(24.001.692,00)	-
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	(16.127.071,00)	(16.127.071,00)	-
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	(1.788,00)	(1.788,00)	-
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	(1.612.707,00)	(1.612.707,00)	-
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	(303.103,00)	(303.103,00)	-
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	(3.006.068,00)	(3.006.068,00)	-
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	(242.382,00)	(242.382,00)	-
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	(629.877,00)	(629.877,00)	-
511134	Belanja Tunj. Kompensasi Kerja P	(2.078.696,00)	(2.078.696,00)	-
Jumlah Belanja/Beban Neto		48.600.769.424,00	48.600.769.424,00	-

B.3.2 Belanja Lembur

Realisasi Belanja Lembur (neto) per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp172.680.000,00 atau 77,78 persen dari anggaran sebesar Rp222.000.000,00. Bila dibandingkan dengan 31 Desember 2019 secara keseluruhan mengalami kenaikan sebesar Rp59.299.000,00 atau 52,30 persen.

Kode Akun	Uraian	Realisasi Belanja		Kenaikan/Penurunan	
		2020	2019	(Rp)	(%)
512211	Belanja Uang Lembur	172.680.000,00	113.381.000,00	59.299.000,00	52,30
Jumlah Belanja Bruto		172.680.000,00	113.381.000,00	59.299.000,00	52,30
Pengembalian Belanja		-	-	0,00	0,00
Jumlah		172.680.000,00	113.381.000,00	59.299.000,00	52,30

Realisasi Belanja Lembur (neto) per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp172.680.000,00 sedangkan Beban Lembur (neto) pada Laporan Operasional Tahun 2020 sebesar Rp172.680.000,00 tidak terdapat selisih Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :

Kode Akun	Uraian Jenis Belanja/Beban	Laporan Realisasi Anggaran (Rp)	Laporan Operasional (Rp)	Selisih LRA dan LO (Rp)
Belanja/Beban Lembur		172.680.000,00	172.680.000,00	-
512211	Belanja Uang Lembur	172.680.000,00	172.680.000,00	-
Pengembalian Belanja/Beban		-	-	-
512211	Belanja Uang Lembur	-	-	-
Jumlah Belanja/Beban Neto		172.680.000,00	172.680.000,00	-

B.3.3 Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito

Realisasi Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito (neto) per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp44.943.518.873,00 atau 88,77 persen dari anggaran sebesar Rp50.626.514.000,00. Bila dibandingkan dengan 31 Desember 2019 secara keseluruhan mengalami penurunan sebesar (Rp7.790.395.408,00) atau -14,77 persen. Hal ini disebabkan oleh tidak dibayarkannya tunjangan K-13 di bulan Juni dan tunjangan hari raya untuk pejabat struktural eselon I, II, dan fungsional madya.

Kode Akun	Uraian	Realisasi Belanja		Kenaikan/Penurunan	
		2020	2019	(Rp)	(%)
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	44.943.518.873,00	52.733.914.281,00	(7.790.395.408,00)	(14,77)
	Jumlah Belanja Bruto	44.943.518.873,00	52.733.914.281,00	(7.790.395.408,00)	(14,77)
	Pengembalian Belanja	-	-	0,00	0,00
	Jumlah	44.943.518.873,00	52.733.914.281,00	(7.790.395.408,00)	(14,77)

Realisasi Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito (neto) per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp44.943.518.873,00 sedangkan Beban Tunj. Khusus & Beban Pegawai Transito (neto) pada Laporan Operasional Tahun 2020 sebesar Rp44.935.667.815,00 terdapat selisih Rp7.851.058,00 dengan rincian sebagai berikut :

Kode Akun	Uraian Jenis Belanja/Beban	Laporan Realisasi Anggaran (Rp)	Laporan Operasional (Rp)	Selisih LRA dan LO (Rp)
	Belanja/Beban Tunj. Khusus & Pegawai Transito	44.943.518.873,00	44.935.667.815,00	7.851.058,00
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	44.943.518.873,00	44.935.667.815,00	7.851.058,00
	Pengembalian Belanja/Beban	-	-	-
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	-	-	-
	Jumlah Belanja/Beban Neto	44.943.518.873,00	44.935.667.815,00	7.851.058,00

Selisih Belanja/Beban Tunj. Khusus & Pegawai Transito sebesar Rp7.851.058,00 antara Laporan Realisasi Anggaran dengan Laporan Operasional disebabkan adanya jurnal penyesuaian dengan penjelasan sebagai berikut :

Nomor Jurnal	Keterangan	Nilai (Rp)
Beban Tunjangan Khusus		
202001450448011	Kekurangan tunjangan kinerja pegawai ANRI bulan Sep 2019	7.851.058,00
	Jumlah	7.851.058,00
	Jumlah Selisih Beban/Belanja Gaji dan Tunjangan PNS antara LO dengan LRA	7.851.058,00

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang (neto) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 adalah Rp58.082.281.205,00 atau sebesar 96,00 persen dari pagu anggaran Rp60.504.900.000,00. Bila dibandingkan dengan per 31 Desember 2019 mengalami penurunan sebesar (Rp49.853.690.858,00) atau -46,19 persen. Hal ini disebabkan antara lain adanya penurunan anggaran Belanja Barang yang dialihkan untuk penanganan dampak pandemi virus *Covid-19* dan proses penyerapan anggaran Belanja Barang yang menjadi terkendala akibat pandemi virus *Covid-19* terutama Belanja Barang Non Operasional, Belanja Jasa, dan Belanja Perjalanan Dinas.

Rincian realisasi Belanja Barang TA 2020 dan perbandingan Belanja Barang per 31 Desember 2020 dengan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2020

Kode Akun	Uraian	31 Desember 2020		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi Anggaran (%)
5211	Belanja Barang Operasional	17.277.698.000,00	16.709.431.903,00	96,71
5212	Belanja Barang Non Operasional	8.200.935.000,00	7.560.282.894,00	92,19
5218	Belanja Barang Persediaan	4.317.751.000,00	4.283.935.849,00	99,22
5221	Belanja Jasa	14.537.140.000,00	13.966.543.603,00	96,07
5231	Belanja Pemeliharaan	9.414.101.000,00	9.237.859.489,00	98,13
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	6.648.140.000,00	6.505.646.299,00	97,86
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri	109.135.000,00	0,00	0,00
5261	Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	-	-	-
Jumlah Belanja Barang Bruto		60.504.900.000,00	58.263.700.037,00	96,30
Pengembalian Belanja Barang			(181.418.832,00)	
Jumlah Belanja Barang Netto		60.504.900.000,00	58.082.281.205,00	96,00

Perbandingan Belanja Barang (neto) per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Kode Akun	Uraian	Realisasi Belanja		Kenaikan/ Penurunan	
		2020 (Rp)	2019 (Rp)	(Rp)	(%)
5211	Belanja Barang Operasional	16.704.984.403,00	13.062.619.741,00	3.642.364.662,00	27,88
5212	Belanja Barang Non Operasional	7.557.347.894,00	20.161.637.237,00	(12.604.289.343,00)	(62,52)
5218	Belanja Barang Persediaan	4.283.935.849,00	4.035.387.513,00	248.548.336,00	6,16
5221	Belanja Jasa	13.962.208.603,00	14.756.219.376,00	(794.010.773,00)	(5,38)
5231	Belanja Pemeliharaan	9.237.859.489,00	9.987.353.132,00	(749.493.643,00)	(7,50)
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	6.335.944.967,00	38.471.529.167,00	(32.135.584.200,00)	(83,53)
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri	-	3.143.615.897,00	(3.143.615.897,00)	(100,00)
5261	Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	-	4.317.610.000,00	(4.317.610.000,00)	(100,00)
Jumlah Belanja Barang Netto		58.082.281.205,00	107.935.972.063,00	(49.853.690.858,00)	(46,19)

B.4.1 Belanja Barang Operasional

Realisasi Belanja Barang Operasional (neto) per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp16.704.984.403,00 atau 96,69 persen dari anggaran sebesar Rp17.277.698.000,00. Bila dibandingkan dengan 31 Desember 2019 secara keseluruhan mengalami kenaikan sebesar Rp3.642.364.662,00 atau 27,88 persen. Hal ini disebabkan oleh adanya pengalihan akun Belanja Honorarium PPPNP ke akun 521111 sehingga mengakibatkan peningkatan realisasi Belanja Keperluan Perkantoran, kemudian kenaikan terjadi pada akun 521113 atas Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh untuk kebutuhan pegawai ANRI, BAST Aceh dan Pusdiklat Kearsipan Bogor. Selain itu adanya pengalihan akun Belanja ke akun 521131 Belanja Barang Operasional Penanggulangan Pandemi Covid19.

Kode Akun	Uraian	Realisasi Belanja		Kenaikan/Penurunan	
		2020	2019	(Rp)	(%)
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	12.202.250.668,00	9.629.596.896,00	2.572.653.772,00	26,72
	ANRI Jakarta (KP)	10.232.186.411,00	8.900.472.389,00	1.331.714.022,00	14,96
	BAST Aceh (KD)	1.009.801.003,00	550.882.840,00	458.918.163,00	83,31
	Pusat Jasa Kearsipan (KP)	884.868.400,00	151.113.267,00	733.755.133,00	485,57
	Pusdiklat Kearsipan Bogor (KP)	75.394.854,00	27.128.400,00	48.266.454,00	177,92
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	751.411.021,00	742.984.000,00	8.427.021,00	1,13
	ANRI Jakarta (KP)	650.133.000,00	679.505.000,00	(29.372.000,00)	(4,32)
	BAST Aceh (KD)	93.423.000,00	63.479.000,00	29.944.000,00	47,17
	Pusdiklat Kearsipan Bogor (KP)	7.855.021,00	-	7.855.021,00	0,00
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	80.094.965,00	126.107.425,00	(46.012.460,00)	(36,49)
	ANRI Jakarta (KP)	56.903.465,00	112.879.525,00	(55.976.060,00)	(49,59)
	BAST Aceh (KD)	696.000,00	2.350.000,00	(1.654.000,00)	(70,38)
	Pusat Jasa Kearsipan (KP)	4.324.500,00	5.281.900,00	(957.400,00)	(18,13)
	Pusdiklat Kearsipan Bogor (KP)	18.171.000,00	2.591.000,00	15.580.000,00	601,31
	Dinas/Kantor (D/K)	-	3.005.000,00	(3.005.000,00)	(100,00)
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	776.340.000,00	2.049.290.000,00	(1.272.950.000,00)	(62,12)
	ANRI Jakarta (KP)	527.500.000,00	648.300.000,00	(120.800.000,00)	(18,63)
	BAST Aceh (KD)	81.600.000,00	159.640.000,00	(78.040.000,00)	(48,88)
	Pusat Jasa Kearsipan (KP)	124.320.000,00	117.480.000,00	6.840.000,00	5,82
	Pusdiklat Kearsipan Bogor (KP)	42.920.000,00	-	42.920.000,00	0,00
	Dinas/Kantor (D/K)	-	1.123.870.000,00	(1.123.870.000,00)	(100,00)
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	201.972.650,00	520.851.200,00	(318.878.550,00)	(61,22)
	ANRI Jakarta (KP)	200.284.650,00	520.851.200,00	(320.566.550,00)	(61,55)
	Pusdiklat Kearsipan Bogor (KP)	1.688.000,00	-	1.688.000,00	0,00
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi Covid-19	2.697.362.599,00	-	2.697.362.599,00	0,00
	ANRI Jakarta (KP)	2.540.249.621,00	-	2.540.249.621,00	0,00
	BAST Aceh (KD)	117.815.000,00	-	117.815.000,00	0,00
	Pusat Jasa Kearsipan (KP)	18.923.953,00	-	18.923.953,00	0,00
	Pusdiklat Kearsipan Bogor (KP)	20.374.025,00	-	20.374.025,00	0,00
	Jumlah Belanja Bruto	16.709.431.903,00	13.068.829.521,00	3.640.602.382,00	27,86
	Pengembalian Belanja	(4.447.500,00)	(6.209.780,00)	1.762.280,00	(28,38)
	Jumlah	16.704.984.403,00	13.062.619.741,00	3.642.364.662,00	27,88

Realisasi Belanja Barang Operasional (neto) per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp16.704.984.403,00 sedangkan Beban Barang Operasional (neto) pada Laporan Operasional Tahun 2020 sebesar Rp16.705.199.403,00 terdapat selisih (Rp215.000,00) dengan rincian sebagai berikut :

Kode Akun	Uraian Jenis Belanja/Beban	Laporan Realisasi Anggaran (Rp)	Laporan Operasional (Rp)	Selisih LRA dan LO (Rp)
Belanja/Beban Barang Operasional		16.709.431.903,00	16.709.646.903,00	(215.000,00)
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	12.202.250.668,00	12.202.465.668,00	(215.000,00)
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	751.411.021,00	751.411.021,00	-
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	80.094.965,00	80.094.965,00	-
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	776.340.000,00	776.340.000,00	-
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	201.972.650,00	201.972.650,00	-
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi Covid-19	2.697.362.599,00	2.697.362.599,00	-
Pengembalian Belanja/Beban		(4.447.500,00)	(4.447.500,00)	-
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	(4.447.500,00)	(4.447.500,00)	-
Jumlah Belanja/Beban Neto		16.704.984.403,00	16.705.199.403,00	(215.000,00)

Selisih Belanja/Beban Barang sebesar Rp215.000,00 antara Laporan Operasional dengan Laporan Realisasi Anggaran disebabkan adanya jurnal penyesuaian dengan penjelasan sebagai berikut :

Nomor Jurnal	Keterangan	Nilai (Rp)
Beban/Belanja Barang Keperluan Perkantoran		
Beban/Belanja Langganan Air (521111)		
202012418934/06	Tagihan langganan koran Pusdiklat Kearsipan bulan Januari 2021 (beban bulan Desember 2020)	215.000,00
Jumlah		215.000,00
Jumlah selisih Beban/Belanja Barang Keperluan Perkantoran antara LRA dengan LO		215.000,00

Satuan kerja Arsip Nasional RI Jakarta dan Pusat Jasa Kearsipan telah melakukan proses ralat/revisi akun pada SPM/SP2D atas realisasi belanja yang sebelumnya tidak menggunakan akun-akun sesuai dengan ketentuan dalam Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-369/PB/2020 tanggal 27 April 2020 , dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nomor SPM	Tgl SPM	Nomor SP2D	Tgl. SP2D	AKUN SEMULA	AKUN KOREKSI	Nilai (Rp)*	Keterangan
1	00049	21/04/2020	201391302010802	22/04/2020	521113	521131	8.018.795	Pengadaan obat-obatan dan multivitamin
2	00536	28/04/2020	201391303016440	05/05/2020	521111	521131	4.784.414	Pengadaan APD
3	00537	28/04/2020	201391302011577	04/05/2020	521111	521131	2.602.191	Kebutuhan alat kesehatan poliklinik

4	00713	19/06/2020	201391304019125	22/06/2020	521111	521131	19.834.319	Pengadaan APD
5	00881	22/07/2020	201391701000342	24/07/2020	521113	521131	71.790.000	Pengadaan multivitamin penambah daya tahan tubuh bagi pegawai di ANRI
TOTAL NILAI							107.029.719	
		*) Tidak ada penambahan atau pengurangan nilai total pengeluaran/total penerimaan						
Nomor Surat Tanggapan Koreksi KPPN		S-3679/WPB.12/KP.05/2020 Tanggal 22 Desember 2020 Hal : Tanggapan koreksi (450448) S-1857/WPB.12/KP.05/2020 Tanggal 13 Agustus 2020 Hal : Tanggapan koreksi (418929)						

Arsip Nasional Republik Indonesia mengalokasikan Belanja Barang Operasional untuk penanganan pandemi *Covid-19* sebesar Rp 2.960.992.000,00 dengan penyerapan anggaran sebesar Rp2.697.362.599,00 atau sebesar 91,10% dari alokasi anggaran, dengan sisa anggaran sebesar Rp263.629.401,00.

B.4.2 Belanja Barang Non Operasional

Realisasi Belanja Barang Non Operasional (neto) per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp7.557.347.894,00 atau 92,15 persen dari anggaran sebesar Rp8.200.935.000,00. Bila dibandingkan dengan 31 Desember 2019 secara keseluruhan mengalami penurunan sebesar (Rp12.604.289.343,00) atau -62,52 persen. Hal ini disebabkan oleh terhambatnya penyerapan anggaran khususnya Belanja Barang Non Operasional akibat dampak pandemi virus *Covid-19*.

Kode Akun	Uraian	Realisasi Belanja		Kenaikan/Penurunan	
		2020	2019	(Rp)	(%)
521211	Belanja Bahan	3.280.024.444,00	11.118.081.826,00	(7.838.057.382,00)	(70,50)
	ANRI Jakarta (KP)	1.959.940.802,00	7.008.576.339,00	(5.048.635.537,00)	(72,04)
	BAST Aceh (KD)	7.991.000,00	27.271.000,00	(19.280.000,00)	(70,70)
	Pusat Jasa Kearsipan (KP)	709.499.642,00	873.779.500,00	(164.279.858,00)	(18,80)
	Pusidklat Kearsipan Bogor (KP)	602.593.000,00	2.222.244.000,00	(1.619.651.000,00)	(72,88)
	Dinas/Kantor (D/K)	-	986.210.987,00	(986.210.987,00)	(100,00)
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	3.301.020.000,00	6.485.205.000,00	(3.184.185.000,00)	(49,10)
	ANRI Jakarta (KP)	1.050.870.000,00	2.752.280.000,00	(1.701.410.000,00)	(61,82)
	BAST Aceh (KD)	-	10.200.000,00	(10.200.000,00)	(100,00)
	Pusat Jasa Kearsipan (KP)	2.191.700.000,00	2.608.400.000,00	(416.700.000,00)	(15,98)
	Pusidklat Kearsipan Bogor (KP)	58.450.000,00	49.225.000,00	9.225.000,00	18,74
	Dinas/Kantor (D/K)	-	1.065.100.000,00	(1.065.100.000,00)	(100,00)
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	829.563.450,00	1.974.270.911,00	(1.144.707.461,00)	(57,98)
	ANRI Jakarta (KP)	704.749.000,00	1.887.070.511,00	(1.182.321.511,00)	(62,65)
	Pusat Jasa Kearsipan (KP)	120.751.450,00	87.200.400,00	33.551.050,00	38,48
	Pusidklat Kearsipan Bogor (KP)	4.063.000,00			

Belanja Barang Pemberian					
521231 Penghargaan dalam bentuk uang	-	603.000.000,00	(603.000.000,00)	(100,00)	
ANRI Jakarta (KP)	-	603.000.000,00	(603.000.000,00)	(100,00)	
521241 Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi Covid-19	149.675.000,00	-	149.675.000,00	0,00	
Pusidklat Kearsipan Bogor (KP)	149.675.000,00	-	149.675.000,00	0,00	
Jumlah Belanja Bruto	7.560.282.894,00	20.180.557.737,00	(12.620.274.843,00)	(62,54)	
Pengembalian Belanja	(2.935.000,00)	(18.920.500,00)	15.985.500,00	(84,49)	
Jumlah	7.557.347.894,00	20.161.637.237,00	(12.604.289.343,00)	(62,52)	

Realisasi Belanja Barang Non Operasional (neto) per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp7.557.347.894,00 sedangkan Beban Barang Non Operasional (neto) pada Laporan Operasional Tahun 2020 sebesar Rp7.557.347.894,00 sehingga tidak terdapat selisih Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :

Kode Akun	Uraian Jenis Belanja/Beban	Laporan Realisasi Anggaran (Rp)	Laporan Operasional (Rp)	Selisih LRA dan LO (Rp)
Belanja/Beban Barang Non Operasional		7.560.282.894,00	7.560.282.894,00	-
521211	Belanja Bahan	3.280.024.444,00	3.280.024.444,00	-
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	3.301.020.000,00	3.301.020.000,00	-
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	829.563.450,00	829.563.450,00	-
521231	Belanja Barang Pemberian Penghargaan dalam bentuk uang	-	-	-
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi Covid-19	149.675.000,00	149.675.000,00	-
Pengembalian Belanja/Beban		(2.935.000,00)	(2.935.000,00)	-
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	(2.935.000,00)	(2.935.000,00)	-
Jumlah Belanja/Beban Neto		7.557.347.894,00	7.557.347.894,00	-

Satuan kerja Arsip Nasional RI Jakarta telah melakukan proses ralat/revisi akun pada SPM/SP2D atas realisasi belanja yang sebelumnya tidak menggunakan akun-akun sesuai dengan ketentuan dalam Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-369/PB/2020 tanggal 27 April 2020, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nomor SPM	Tgl SPM	Nomor SP2D	Tgl. SP2D	AKUN SEMULA	AKUN KOREKSI	Nilai (Rp)*	Keterangan
1	00875	22/07/2020	201391303026668	24/07/2020	521219	522192	16.163.440	Uji kesehatan PCR (Covid-19) pemindahan pegawai ke BAST Aceh, Pemeriksaan lanjutan uji kesehatan pegawai ANRI sebagai tindak lanjut hasil rapid test pegawai tanggal 22-24 Juni 2020, Pembelian obat-obatan bagi pegawai ANRI terdampak Covid-19

2	00886	22/07/2020	201391701000347	24/07/2020	521219	522192	81.833.000	Uji kesehatan tes serologi pegawai ANRI tanggal 22-24 Juni 2020
3	01077	10/09/2020	201391701000995	14/09/2020	521219	522192	76.966.000	Pengadaan PCR/Swab Test bagi pegawai ANRI sejumlah 58 orang
4	01122	25/09/2020	201391301000730	28/09/2020	521219	522192	14.305.060	Pengadaan PCR/Swab Test bagi pegawai ANRI sejumlah 11 orang
TOTAL NILAI							189.267.500	
*)		Tidak ada penambahan atau pengurangan nilai total pengeluaran/total penerimaan						
Nomor Surat Tanggapan Koreksi KPPN		S-3679/WPB.12/KP.05/2020 Tanggal 22 Desember 2020 Hal : Tanggapan koreksi (450448)						

Arsip Nasional Republik Indonesia mengalokasikan Belanja Barang Non Operasional untuk penanganan pandemi *Covid-19* sebesar Rp 254.110.000,00 dengan penyerapan anggaran sebesar Rp149.675.000,00 atau sebesar 58,90% dari alokasi anggaran, dengan sisa anggaran sebesar Rp104.435.000,00.

B.4.3 Belanja Barang Persediaan

Realisasi Belanja Barang Persediaan (neto) per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp4.283.935.849,00 atau 99,22 persen dari anggaran sebesar Rp4.317.751.000,00. Bila dibandingkan dengan 31 Desember 2019 secara keseluruhan mengalami kenaikan sebesar Rp248.548.336,00 atau 6,16 persen. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya anggaran Belanja Barang Persediaan dan tingginya realisasi atas Belanja Barang Persediaan Konsumsi pada Tahun Anggaran 2020 yang salah satu diantaranya terkait dengan kebutuhan penanganan COVID-19.

Kode Akun	Uraian	Realisasi Belanja		Kenaikan/Penurunan	
		2020	2019	(Rp)	(%)
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	3.674.524.247,00	4.035.387.513,00	(360.863.266,00)	(8,94)
	ANRI Jakarta (KP)	3.278.100.647,00	3.349.283.163,00	(71.182.516,00)	(2,13)
	BAST Aceh (KD)	62.471.600,00	80.259.250,00	(17.787.650,00)	(22,16)
	Pusat Jasa Kearsipan (KP)	275.763.000,00	524.032.600,00	(248.269.600,00)	(47,38)
	Pusidklat Kearsipan Bogor (KP)	58.189.000,00	81.812.500,00	(23.623.500,00)	(28,88)
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi Covid-19	609.411.602,00	-	609.411.602,00	0,00
	ANRI Jakarta (KP)	559.627.602,00	0,00	559.627.602,00	0,00
	BAST Aceh (KD)	13.520.000,00	0,00	13.520.000,00	0,00
	Pusat Jasa Kearsipan (KP)	36.264.000,00	0,00	36.264.000,00	0,00
	Jumlah Belanja Bruto	4.283.935.849,00	4.035.387.513,00	248.548.336,00	6,16
	Pengembalian Belanja	-	-	0,00	0,00
	Jumlah	4.283.935.849,00	4.035.387.513,00	248.548.336,00	6,16

Realisasi Belanja Barang Persediaan (neto) per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp4.283.935.849,00 sedangkan Beban Persediaan (neto) pada Laporan Operasional Tahun 2020 sebesar Rp3.724.114.943,00 terdapat selisih Rp559.820.906,00 dengan rincian sebagai berikut :

Kode Akun	Uraian Jenis Belanja/Beban	Laporan Realisasi Anggaran (Rp)	Laporan Operasional (Rp)	Selisih LRA dan LO (Rp)
Belanja/Beban Barang Persediaan		4.283.935.849,00	3.724.114.943,00	559.820.906,00
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	3.674.524.247,00	0,00	3.674.524.247,00
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi Covid-19	609.411.602,00	0,00	609.411.602,00
593111	Beban Persediaan konsumsi	0,00	3.694.570.513,00	(3.694.570.513,00)
593131	Beban Persediaan bahan baku	0,00	6.014.100,00	(6.014.100,00)
593149	Beban Persediaan Lainnya	0,00	23.530.330,00	(23.530.330,00)
Pengembalian Belanja/Beban		-	-	-
Jumlah Belanja/Beban Neto		4.283.935.849,00	3.724.114.943,00	559.820.906,00

Selisih Belanja/Beban Barang Persediaan sebesar Rp559.820.906,00 antara Laporan Realisasi Anggaran dengan Laporan Operasional disebabkan adanya perbedaan pengakuan mengenai belanja pada LRA dan beban pada LO.

Satuan kerja Arsip Nasional RI Jakarta dan Pusat Jasa Kearsipan telah melakukan proses ralat/revisi akun pada SPM/SP2D atas realisasi belanja yang sebelumnya tidak menggunakan akun-akun sesuai dengan ketentuan dalam Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-369/PB/2020 tanggal 27 April 2020 , dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nomor SPM	Tgl SPM	Nomor SP2D	Tgl. SP2D	AKUN SEMULA	AKUN KOREKSI	Nilai (Rp)*	Keterangan
1	00048	21/04/2020	201391302010843	22/04/2020	521811	521841	24.010.719	Pengadaan bahan untuk kegiatan penanganan Covid-19 di lingkungan Pusat Jasa Kearsipan
2	00572	18/05/2020	201391304016569	26/05/2020	521811	521131	8.358.620	Pengadaan bahan pembuatan <i>hand sanitizer</i>
3	00642	19/05/2020	201391303019438	26/05/2020	521811	521841	49.128.377	Pengadaan obat-obatan untuk kegiatan layanan poliklinik di Bagian Kepegawaian ANRI
4	00715	15/06/2020	201391302016976	18/06/2020	521811	521131	1.790.909	Pengadaan masker medis
5	01049	07/09/2020	201391304028243	08/09/2020	521811	521841	14.987.223	Pengadaan APD
6	00993	19/08/2020	201391303030642	25/08/2020	521811	521841	229.000	Pembelian obat-obatan lanjutan bagi pegawai ANRI terdampak Covid-19
7	01123	28/09/2020	201391304031251	29/09/2020	521811	521131	7.253.181	Pengadaan masker
TOTAL NILAI							105.758.029	
*)		Tidak ada penambahan atau pengurangan nilai total pengeluaran/total penerimaan						
Nomor Surat Tanggapan Koreksi KPPN		S-3679/WPB.12/KP.05/2020 Tanggal 22 Desember 2020 Hal : Tanggapan koreksi (450448) S-1857/WPB.12/KP.05/2020 Tanggal 13 Agustus 2020 Hal : Tanggapan koreksi (418929)						

Arsip Nasional Republik Indonesia mengalokasikan Belanja Barang Persediaan untuk penanganan pandemi *Covid-19* sebesar Rp611.997.000,00 dengan penyerapan anggaran sebesar Rp609.411.602,00 atau sebesar 99,58% dari alokasi anggaran, dengan sisa anggaran sebesar Rp2.585.398,00.

B.4.4 Belanja Jasa

Realisasi Belanja Jasa (neto) per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp13.962.208.603,00 atau 96,05 persen dari anggaran sebesar Rp14.537.140.000,00. Bila dibandingkan dengan 31 Desember 2019 secara keseluruhan mengalami penurunan sebesar (Rp794.010.773,00) atau -5,38 persen. Hal ini disebabkan oleh menurunnya belanja atas penggunaan jasa pihak ke tiga terutama belanja rutin dan Belanja Jasa Lainnya akibat dampak pandemi virus *Covid-19*.

Kode Akun	Uraian	Realisasi Belanja		Kenaikan/Penurunan	
		2020	2019	(Rp)	(%)
522111	Belanja Langganan Listrik	7.773.543.904,00	7.143.397.898,00	630.146.006,00	8,82
	ANRI Jakarta (KP)	7.257.587.329,00	6.864.461.889,00	393.125.440,00	5,73
	BAST Aceh (KD)	481.947.996,00	278.936.009,00	203.011.987,00	72,78
	Pusidklat Kearsipan Bogor (KP)	34.008.579,00	0,00	34.008.579,00	0,00
522112	Belanja Langganan Telepon	59.677.415,00	83.629.850,00	(23.952.435,00)	(28,64)
	ANRI Jakarta (KP)	40.686.847,00	57.162.853,00	(16.476.006,00)	(28,82)
	BAST Aceh (KD)	18.274.002,00	26.466.997,00	(8.192.995,00)	(30,96)
	Pusidklat Kearsipan Bogor (KP)	716.566,00	0,00	716.566,00	0,00
522113	Belanja Langganan Air	105.122.520,00	84.427.710,00	20.694.810,00	24,51
	ANRI Jakarta (KP)	98.199.520,00	81.518.140,00	16.681.380,00	20,46
	BAST Aceh (KD)	1.818.300,00	2.909.570,00	(1.091.270,00)	(37,51)
	Pusidklat Kearsipan Bogor (KP)	5.104.700,00	0,00	5.104.700,00	0,00
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	3.307.781,00	0,00	3.307.781,00	0,00
	Pusat Jasa Kearsipan (KP)	3.307.781,00	0,00	3.307.781,00	0,00
522121	Belanja Jasa Pos dan Giro	3.247.000,00	17.098.000,00	(13.851.000,00)	(81,01)
	ANRI Jakarta (KP)	3.247.000,00	17.098.000,00	(13.851.000,00)	(81,01)
522131	Belanja Jasa Konsultan	196.000.000,00	158.950.000,00	37.050.000,00	23,31
	ANRI Jakarta (KP)	196.000.000,00	158.950.000,00	37.050.000,00	23,31
522141	Belanja Sewa	1.320.426.750,00	1.547.560.400,00	(227.133.650,00)	(14,68)
	ANRI Jakarta (KP)	1.196.953.150,00	1.380.740.400,00	(183.787.250,00)	(13,31)
	BAST Aceh (KD)	30.000.000,00	127.820.000,00	(97.820.000,00)	(76,53)
	Pusat Jasa Kearsipan (KP)	89.073.600,00	-	89.073.600,00	0,00
	Pusidklat Kearsipan Bogor (KP)	4.400.000,00	39.000.000,00	(34.600.000,00)	(88,72)
522151	Belanja Jasa Profesi	1.436.050.000,00	3.468.355.000,00	(2.032.305.000,00)	(58,60)
	ANRI Jakarta (KP)	1.148.050.000,00	2.579.055.000,00	(1.431.005.000,00)	(55,49)
	Pusat Jasa Kearsipan (KP)	42.600.000,00	68.400.000,00	(25.800.000,00)	(37,72)
	Pusidklat Kearsipan Bogor (KP)	240.700.000,00	747.800.000,00	(507.100.000,00)	(67,81)
	BAST Aceh (KD)	4.700.000,00	-	4.700.000,00	0,00
	Dinas/Kantor (D/K)	-	73.100.000,00	(73.100.000,00)	(100,00)

522191	Belanja Jasa Lainnya	594.046.500,00	2.255.383.018,00	(1.661.336.518,00)	(73,66)
	ANRI Jakarta (KP)	268.000.000,00	1.486.782.750,00	(1.218.782.750,00)	(81,97)
	Pusat Jasa Kearsipan (KP)	308.246.000,00	532.735.600,00	(224.489.600,00)	(42,14)
	Pusidklat Kearsipan Bogor (KP)	17.800.500,00	116.331.668,00	(98.531.168,00)	(84,70)
	BAST Aceh (KD)	-	114.533.000,00	(114.533.000,00)	(100,00)
	Dinas/Kantor (D/K)	-	5.000.000,00	(5.000.000,00)	(100,00)
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi Covid-19	2.475.121.733,00	-	2.475.121.733,00	0,00
	ANRI Jakarta (KP)	1.618.341.733,00	0,00	1.618.341.733,00	0,00
	BAST Aceh (KD)	44.100.000,00	0,00	44.100.000,00	0,00
	Pusat Jasa Kearsipan (KP)	9.280.000,00	0,00	9.280.000,00	0,00
	Pusidklat Kearsipan Bogor (KP)	803.400.000,00	0,00	803.400.000,00	0,00
	Jumlah Belanja Bruto	13.966.543.603,00	14.758.801.876,00	(792.258.273,00)	(5,37)
	Pengembalian Belanja	(4.335.000,00)	(2.582.500,00)	(1.752.500,00)	67,86
	Jumlah	13.962.208.603,00	14.756.219.376,00	(794.010.773,00)	(5,38)

Realisasi Belanja Jasa (neto) per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp13.962.208.603,00 sedangkan Beban Jasa (neto) pada Laporan Operasional Tahun 2020 sebesar Rp13.808.650.272,00 terdapat selisih Rp153.558.331,00 dengan rincian sebagai berikut :

Kode Akun	Uraian Jenis Belanja/Beban	Laporan Realisasi Anggaran (Rp)	Laporan Operasional (Rp)	Selisih LRA dan LO (Rp)
Belanja/Beban Jasa		13.966.543.603,00	13.812.985.272,00	153.558.331,00
522111	Belanja Langganan Listrik	7.773.543.904,00	7.625.568.883,00	147.975.021,00
522112	Belanja Langganan Telepon	59.677.415,00	60.475.995,00	(798.580,00)
522113	Belanja Langganan Air	105.122.520,00	98.440.630,00	6.681.890,00
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	3.307.781,00	3.307.781,00	-
522121	Belanja Jasa Pos dan Giro	3.247.000,00	3.247.000,00	-
522131	Belanja Jasa Konsultan	196.000.000,00	196.000.000,00	-
522141	Belanja Sewa	1.320.426.750,00	1.320.426.750,00	-
522151	Belanja Jasa Profesi	1.436.050.000,00	1.436.050.000,00	-
522191	Belanja Jasa Lainnya	594.046.500,00	594.346.500,00	(300.000,00)
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi Covid-19	2.475.121.733,00	2.475.121.733,00	-
Pengembalian Belanja/Beban		(4.335.000,00)	(4.335.000,00)	-
522151	Belanja Jasa Profesi	(4.335.000,00)	(4.335.000,00)	-
Jumlah Belanja/Beban Neto		13.962.208.603,00	13.808.650.272,00	153.558.331,00

Selisih Belanja/Beban Jasa sebesar Rp153.558.331,00 antara Laporan Realisasi Anggaran dengan Laporan Operasional disebabkan adanya jurnal penyesuaian yang dilakukan oleh satker dengan rincian sebagai berikut :

ANRI JAKARTA		
Nomor Jurnal	Keterangan	Nilai (Rp)
Beban/Belanja Jasa		
Beban/Belanja Langganan Listrik (522111)		
202001450448001	Tagihan Jasa Langganan Listrik Gd. ANRI Bulan Januari 2020 Pemakaian bulan Desember 2019	(680.628.563,00)
202001450448002	Tagihan Jasa Langganan Listrik Rumah Dinas ANRI bulan Januari 2020 Pemakaian bulan Desember 2019	(5.973.691,00)
202001450448003	Tagihan Jasa Langganan Listrik Gd. Gajah Mada ANRI bulan Januari 2020 Pemakaian bulan Desember 2019	(10.884.453,00)
202001450448004	Tagihan Jasa Langganan Listrik Gd. Gajah Mada ANRI bulan Januari 2020 Pemakaian bulan Desember 2019	(24.102.553,00)
202001450448005	Tagihan Jasa Telekomunikasi bulan Januari 2020 pemakaian Desember 2019 (beban Desember 2018) ID Pel.538310070881 sesuai SPM/SP2D No.00013 /191391303000204	(2.760.639,00)
202001450448008	Tagihan Jasa Langganan Listrik Pusdiklat Bogor ANRI bulan Januari 2020 Pemakaian bulan Desember 2019	(10.933.715,00)
202009450448020	Tagihan Jasa Langganan Listrik ANRI bulan Oktober 2020 Pemakaian bulan September 2020	551.529.416,00
202009450448021	Tagihan Jasa Langganan Listrik Gd Gajah Mada bulan Oktober 2020 Pemakaian bulan September 2020	39.981.750,00
202009450448022	Tagihan Jasa Langganan Listrik Rumah Dinas ANRI bulan Oktober 2020 Pemakaian bulan September 2020	7.052.075,00
202009450448023	Tagihan Jasa Langganan Listrik Gd Gajah Mada bulan Oktober 2020 Pemakaian bulan September 2020	10.364.295,00
202009450448027	Tagihan Jasa Langganan Listrik ANRI bulan Oktober 2020 Pemakaian bulan September 2020	(551.529.416,00)
202009450448028	Tagihan Jasa Langganan Listrik Gd Gajah Mada bulan Oktober 2020 Pemakaian bulan September 2020	(39.981.750,00)
202009450448029	Tagihan Jasa Langganan Listrik Rumah Dinas ANRI bulan Oktober 2020 Pemakaian bulan September 2020	(7.052.075,00)
202009450448030	Tagihan Jasa Langganan Listrik Gd Gajah Mada bulan Oktober 2020 Pemakaian bulan September 2020	(10.364.295,00)
202009450448037	Pembayaran Tagihan Listrik Arsip Nasional ID Pel. 543100226856 dan ID Pel. 543800172044 penggunaan bulan Desember 2020	506.664.165,00
202009450448038	Pembayaran Tagihan Listrik Rumah Dinas Arsip Nasional ID Pel. 543104288535, ID Pel. 543100272725 dan ID Pel. 543100544670 penggunaan bulan Desember 2020	7.116.304,00
202009450448039	Pembayaran Tagihan Listrik Gedung Gajah Mada ID Pel. 542103415633 penggunaan bulan Desember 2020	35.874.678,00
202009450448040	Pembayaran Tagihan Listrik Gedung Gajah Mada ID Pel. 542100101176 penggunaan bulan Desember 2020	10.364.295,00
Jumlah		(175.264.172,00)
Beban/Belanja Langganan Telepon (522112)		
202001450448009	Tagihan Jasa Telekomunikasi Pusdiklat ANRI Bogor bulan Januari 2020 pemakaian bulan Desember 2019	(208.879,00)
202001450448010	Tagihan jasa telekomunikasi ANRI Warung Buncit bln Juli 2019 sesuai kuitansi no. 129-01 Tgl. 22-07-2019	(1.141.500,00)
202009450448024	Tagihan Jasa Telekomunikasi ANRI bulan Oktober 2020 Pemakaian bulan September 2020	1.949.468,00
202009450448031	Tagihan Jasa Telekomunikasi ANRI bulan Oktober 2020 Pemakaian bulan September 2020	(1.949.468,00)
202009450448042	Tagihan Jasa Telekomunikasi sesuai dengan tagihan bulan Januari 2021 atas penggunaan bulan Desember 2020	2.012.975,00
202012450448044	Pembayaran Tagihan Jasa Telekomunikasi Gedung Warung Buncit Bulan Januari 2021 untuk penggunaan bulan Desember 2020	1.154.679,00
Jumlah		1.817.275,00
Beban/Belanja Langganan Air (522113)		
202001450448006	Tagihan Jasa Langganan Air PAM Gd. Gajah Mada bulan Januari 2020 Pemakaian bulan Desember 2019	(10.582.520,00)
202001450448007	Tagihan Jasa Langganan Air PAM Pusdiklat Bogor bulan Januari 2020 Pemakaian bulan Desember 2019	(1.363.600,00)
202009450448025	Tagihan Jasa Langganan Air Gd Gajah Mada bulan Oktober 2020 Pemakaian bulan September 2020	3.438.320,00
202009450448032	Tagihan Jasa Langganan Air Gd Gajah Mada bulan Oktober 2020 Pemakaian bulan September 2020	(3.438.320,00)
202009450448041	Pembayaran Tagihan PDAM Gedung Gajah Mada No. Meter 18735398 penggunaan bulan Desember 2020	2.820.920,00
Jumlah		(9.125.200,00)
Jumlah selisih Beban/Belanja Jasa antara LRA dengan LO		(182.572.097,00)

BALAI ARSIP STATIS DAN TSUNAMI		
Nomor Jurnal	Keterangan	Nilai (Rp)
Beban/Belanja Jasa		
Beban/Belanja Langganan Listrik (522111)		
202001681464001	Pencatatan pembayaran pemakaian listrik bulan Desember 2019	(23.000.316,00)
202009681464004	Untuk menyesuaikan tagihan listrik beban September 2020	40.164.833,00
202009681464010	Untuk menyesuaikan tagihan listrik beban September 2020	(40.164.833,00)
202009681464007	Untuk menyesuaikan tagihan listrik beban Desember 2020	40.164.833,00
Jumlah		17.164.517,00
Beban/Belanja Langganan Telepon (522112)		
202002681464002	Pencatatan pembayaran pemakaian telepon bulan Desember 2019.	(2.196.530,00)
202009681464005	Untuk menyesuaikan tagihan telepon beban September 2020	1.091.635,00
202009681464008	Untuk menyesuaikan tagihan telepon beban September 2020	(1.091.635,00)
202009681464011	Untuk menyesuaikan tagihan telepon beban Desember 2020	1.047.903,00
Jumlah		(1.148.627,00)
Beban/Belanja Langganan Air (522113)		
202002681464003	Pencatatan pembayaran pemakaian air bulan Desember 2019.	(230.400,00)
202009681464006	Untuk menyesuaikan tagihan air beban September 2020	78.960,00
202009681464009	Untuk menyesuaikan tagihan air beban September 2020	(78.960,00)
202009681464012	Untuk menyesuaikan tagihan PDAM beban Desember 2020	173.610,00
Jumlah		(56.790,00)
Jumlah selisih Beban/Belanja Jasa antara LRA dengan LO		15.959.100,00

PUSDIKLAT KEARSIPAN BOGOR		
Nomor Jurnal	Keterangan	Nilai (Rp)
Beban/Belanja Jasa		
Beban/Belanja Langganan Listrik (522111)		
202012418934/03	Tagihan Jasa langganan Listrik Pusdiklat Kearsipan bulan Januari 2021	10.124.634,00
Jumlah		10.124.634,00
Beban/Belanja Langganan Telepon (522112)		
202012418934/04	Tagihan jasa langganan telekomunikasi Pusdiklat Kearsipan bulan Januari	129.932,00
Jumlah		129.932,00
Beban/Belanja Langganan Air (522113)		
202012418934/05	Tagihan jasa langganan Air Pusdiklat Kearsipan bulan Januari 2021 (beban	2.500.100,00
Jumlah		2.500.100,00
Beban/Belanja Jasa Lainnya (522191)		
202012418934/07	Tagihan jasa langganan pembuangan sampah Pusdiklat Kearsipan bulan	300.000,00
Jumlah		300.000,00
Jumlah selisih Beban/Belanja Jasa antara LRA dengan LO		13.054.666,00

Satuan kerja Arsip Nasional RI Jakarta telah melakukan proses ralat/revisi akun pada SPM/SP2D atas realisasi belanja yang sebelumnya tidak menggunakan akun-akun sesuai dengan ketentuan dalam Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-369/PB/2020 tanggal 27 April 2020, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nomor SPM	Tgl SPM	Nomor SP2D	Tgl. SP2D	AKUN SEMULA	AKUN KOREKSI	Nilai (Rp)*	Keterangan
1	00882	22/07/2020	201391701000343	24/07/2020	522191	522192	71.977.400	Penyemprotan disinfektan
2	00909	30/07/2020	201391304023308	03/08/2020	522191	522192	44.338.140	Penyemprotan disinfektan
3	00966	18/08/2020	201391304025570	19/08/2020	522191	522192	8.033.256	Penyemprotan disinfektan di lingkungan Pusdiklat ANRI
4	00982	19/08/2020	201391701000749	25/08/2020	522191	522192	69.777.400	Pengadaan tes seroloi antibodi SARS-Cov-2 bagi pegawai ANRI

5	01028	01/09/2020	201391304027680	03/09/2020	522191	522192	44.338.140	Penyemprotan disinfektan di lingkungan Arsip Nasional RI
6	01162	07/10/2020	201391303038052	12/10/2020	522191	522192	12.977.160	Penyemprotan disinfektan di Gedung Pusdiklat ANRI dan Gedung Warung Buncit
TOTAL NILAI							251.441.496	
*)		Tidak ada penambahan atau pengurangan nilai total pengeluaran/total penerimaan						
Nomor Surat Tanggapan		S-3679/WPB.12/KP.05/2020 Tanggal 22 Desember 2020 Hal : Tanggapan koreksi (450448)						

Arsip Nasional Republik Indonesia mengalokasikan Belanja Jasa untuk penanganan pandemi *Covid-19* sebesar Rp2.873.646.000,00 dengan penyerapan anggaran sebesar Rp2.475.121.733,00 atau sebesar 86,13% dari alokasi anggaran, dengan sisa anggaran sebesar Rp398.524.267,00.

B.4.5 Belanja Pemeliharaan

Realisasi Belanja Pemeliharaan (neto) per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp9.237.859.489,00 atau 98,13 persen dari anggaran sebesar Rp9.414.101.000,00. Bila dibandingkan dengan 31 Desember 2019 secara keseluruhan mengalami penurunan sebesar (Rp749.493.643,00) atau -7,50 persen.

Kode Akun	Uraian	Realisasi Belanja		Kenaikan/Penurunan	
		2020	2019	(Rp)	(%)
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.245.188.921,00	5.265.085.378,00	(1.019.896.457,00)	(19,37)
	ANRI Jakarta (KP)	3.888.959.354,00	5.209.790.580,00	(1.320.831.226,00)	(25,35)
	BAST Aceh (KD)	64.192.567,00	55.294.798,00	8.897.769,00	16,09
	Pusdiklat Kearsipan Bogor (KP)	292.037.000,00	0,00	292.037.000,00	0,00
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	497.696.750,00	381.612.700,00	116.084.050,00	30,42
	ANRI Jakarta (KP)	407.585.800,00	370.886.400,00	36.699.400,00	9,90
	BAST Aceh (KD)	11.960.950,00	10.726.300,00	1.234.650,00	11,51
	Pusdiklat Kearsipan Bogor (KP)	78.150.000,00	0,00	78.150.000,00	0,00
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	126.346.780,00	255.841.800,00	(129.495.020,00)	(50,62)
	ANRI Jakarta (KP)	126.346.780,00	255.841.800,00	(129.495.020,00)	(50,62)
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.716.042.697,00	1.461.287.704,00	254.754.993,00	17,43
	ANRI Jakarta (KP)	1.392.278.272,00	1.350.529.610,00	41.748.662,00	3,09
	BAST Aceh (KD)	106.533.525,00	109.623.594,00	(3.090.069,00)	(2,82)
	Pusat Jasa Kearsipan (KP)	153.403.400,00	1.134.500,00	152.268.900,00	13.421,67
	Pusdiklat Kearsipan Bogor (KP)	63.827.500,00	-	63.827.500,00	0,00
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	711.550.000,00	708.600.000,00	2.950.000,00	0,42
	ANRI Jakarta (KP)	699.750.000,00	708.600.000,00	(8.850.000,00)	(1,25)
	Pusdiklat Kearsipan Bogor (KP)	11.800.000,00	0,00	11.800.000,00	0,00

523129	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.720.820.541,00	1.464.971.100,00	255.849.441,00	17,46
	ANRI Jakarta (KP)	1.691.791.041,00	1.464.971.100,00	226.819.941,00	15,48
	Pusat Jasa Kearsipan (KP)	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
	Pusidklat Kearsipan Bogor (KP)	28.429.500,00	0,00	28.429.500,00	0,00
523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya	220.213.800,00	449.954.450,00	(229.740.650,00)	(51,06)
	ANRI Jakarta (KP)	188.713.800,00	449.954.450,00	(261.240.650,00)	(58,06)
	Pusidklat Kearsipan Bogor (KP)	31.500.000,00	0,00	31.500.000,00	0,00
	Jumlah Belanja Bruto	9.237.859.489,00	9.987.353.132,00	(749.493.643,00)	(7,50)
	Pengembalian Belanja	-	-	0,00	0,00
	Jumlah	9.237.859.489,00	9.987.353.132,00	(749.493.643,00)	(7,50)

Realisasi Belanja Pemeliharaan (neto) per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp9.237.859.489,00 sedangkan Beban Pemeliharaan (neto) pada Laporan Operasional Tahun 2020 sebesar Rp8.981.402.239,00 terdapat selisih Rp256.457.250,00 dengan rincian sebagai berikut :

Kode Akun	Uraian Jenis Belanja/Beban	Laporan Realisasi Anggaran (Rp)	Laporan Operasional (Rp)	Selisih LRA dan LO (Rp)
	Belanja/Beban Pemeliharaan	9.237.859.489,00	8.981.402.239,00	256.457.250,00
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.245.188.921,00	3.998.695.541,00	246.493.380,00
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	497.696.750,00	0,00	497.696.750,00
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	126.346.780,00	126.346.780,00	-
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.716.042.697,00	1.716.042.697,00	-
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	711.550.000,00	0,00	711.550.000,00
523129	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.720.820.541,00	1.706.135.541,00	14.685.000,00
523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya	220.213.800,00	220.213.800,00	-
593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	0,00	1.154.762.980,00	(1.154.762.980,00)
595113	Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	0,00	59.204.900,00	(59.204.900,00)
	Pengembalian Belanja/Beban	-	-	-
	Jumlah Belanja/Beban Neto	9.237.859.489,00	8.981.402.239,00	256.457.250,00

Selisih Belanja/Beban Pemeliharaan sebesar Rp54.483.770,00 antara Laporan Realisasi Anggaran dengan Laporan Operasional merupakan selisih Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp497.696.750,00, Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp711.550.000,00, dan Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan sebesar (Rp1.154.762.980,00) yang akan dijelaskan selanjutnya pada CaLK Neraca mengenai Persediaan.

Sedangkan selisih Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

sebesar Rp10.835.000,00 disebabkan adanya jurnal penyesuaian sebagai berikut :

Nomor Jurnal	Keterangan	Nilai (Rp)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
202006450448016	Reklasifikasi Beban menjadi aset atas sarana pendukung pemeliharaan sesuai dengan SPM/SP2D No. 00745/201391302017585 tgl. 25/06/2020	2.695.000,00
202006450448017	Reklasifikasi Beban menjadi aset atas sarana pendukung pemeliharaan sesuai dengan SPM/SP2D No. 00730/201391304019347 tgl. 25/06/2020	8.140.000,00
Jumlah		10.835.000,00
Jumlah Selisih Beban/Belanja antara LO dengan LRA		10.835.000,00

B.4.6 Belanja Perjalanan Dalam Negeri

Realisasi Belanja Perjalanan Dalam Negeri (neto) per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp6.335.944.967,00 atau 95,3 persen dari anggaran sebesar Rp6.648.140.000,00. Bila dibandingkan dengan 31 Desember 2019 secara keseluruhan mengalami penurunan sebesar (Rp32.135.584.200,00) atau -83,53 persen. Hal ini disebabkan oleh pengalihan anggaran untuk menangani pandemi virus *Covid-19* dan mengurangi kegiatan perjalanan dinas dalam rangka mengantisipasi penyebaran virus *Covid-19*.

Kode Akun	Uraian	Realisasi Belanja		Kenaikan/Penurunan	
		2020	2019	(Rp)	(%)
524111	Belanja Perjalanan Biasa	2.829.978.299,00	21.982.826.929,00	(19.152.848.630,00)	(87,13)
	ANRI Jakarta (KP)	2.561.853.457,00	14.077.816.993,00	(11.515.963.536,00)	(81,80)
	BAST Aceh (KD)	151.489.642,00	289.934.837,00	(138.445.195,00)	(47,75)
	Pusat Jasa Kearsipan (KP)	64.735.200,00	277.162.106,00	(212.426.906,00)	(76,64)
	Pusdiklat Kearsipan Bogor (KP)	51.900.000,00	439.696.302,00	(387.796.302,00)	(88,20)
	Dinas/Kantor (D/K)	-	6.898.216.691,00	(6.898.216.691,00)	(100,00)
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	262.275.000,00	1.362.848.000,00	(1.100.573.000,00)	(80,76)
	ANRI Jakarta (KP)	235.500.000,00	1.118.480.000,00	(882.980.000,00)	(78,94)
	BAST Aceh (KD)	2.700.000,00	14.550.000,00	(11.850.000,00)	(81,44)
	Pusat Jasa Kearsipan (KP)	24.075.000,00	38.750.000,00	(14.675.000,00)	(37,87)
	Pusdiklat Kearsipan Bogor (KP)	-	2.400.000,00	(2.400.000,00)	(100,00)
	Dinas/Kantor (D/K)	-	188.668.000,00	(188.668.000,00)	(100,00)
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	934.019.000,00	5.845.588.000,00	(4.911.569.000,00)	(84,02)
	ANRI Jakarta (KP)	796.997.000,00	4.381.033.000,00	(3.584.036.000,00)	(81,81)
	Pusat Jasa Kearsipan (KP)	137.022.000,00	186.040.000,00	(49.018.000,00)	(26,35)
	Pusdiklat Kearsipan Bogor (KP)	-	176.400.000,00	(176.400.000,00)	(100,00)
	Dinas/Kantor (D/K)	-	1.102.115.000,00	(1.102.115.000,00)	(100,00)
524115	Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi Covid-19	192.300.000,00	-	192.300.000,00	0,00
	ANRI Jakarta (KP)	168.300.000,00	0,00	168.300.000,00	0,00
	Pusat Jasa Kearsipan (KP)	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	0,00

524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	2.287.074.000,00	10.129.197.000,00	(7.842.123.000,00)	(77,42)
	ANRI Jakarta (KP)	1.852.950.000,00	9.250.111.000,00	(7.397.161.000,00)	(79,97)
	Pusat Jasa Kearsipan (KP)	434.124.000,00	276.032.000,00	158.092.000,00	57,27
	Pusidklat Kearsipan Bogor (KP)	-	550.296.000,00	(550.296.000,00)	(100,00)
	Dinas/Kantor (D/K)	-	52.758.000,00	(52.758.000,00)	(100,00)
	Jumlah Belanja Bruto	6.505.646.299,00	39.320.459.929,00	(32.814.813.630,00)	(83,45)
	Pengembalian Belanja	(169.701.332,00)	(848.930.762,00)	679.229.430,00	(80,01)
	Jumlah	6.335.944.967,00	38.471.529.167,00	(32.135.584.200,00)	(83,53)

Realisasi Belanja Perjalanan Dalam Negeri (neto) per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp6.335.944.967,00 sedangkan Beban Perjalanan Dalam Negeri (neto) pada Laporan Operasional Tahun 2020 sebesar Rp6.335.944.967,00 tidak terdapat selisih Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :

Kode Akun	Uraian Jenis Belanja/Beban	Laporan Realisasi Anggaran (Rp)	Laporan Operasional (Rp)	Selisih LRA dan LO (Rp)
Belanja/Beban Perjalanan Dalam Negeri		6.505.646.299,00	6.505.646.299,00	-
524111	Belanja Perjalanan Biasa	2.829.978.299,00	2.829.978.299,00	-
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	262.275.000,00	262.275.000,00	-
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	934.019.000,00	934.019.000,00	-
524115	Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi Covid-19	192.300.000,00	192.300.000,00	-
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	2.287.074.000,00	2.287.074.000,00	-
Pengembalian Belanja/Beban		(169.701.332,00)	(169.701.332,00)	-
524111	Belanja Perjalanan Biasa	(144.826.632,00)	(144.826.632,00)	-
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	(2.396.400,00)	(2.396.400,00)	-
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	(2.977.500,00)	(2.977.500,00)	-
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	(19.500.800,00)	(19.500.800,00)	-
Jumlah Belanja/Beban Neto		6.335.944.967,00	6.335.944.967,00	-

Satuan kerja Arsip Nasional RI Jakarta telah melakukan proses ralat/revisi akun pada SPM/SP2D atas realisasi belanja yang sebelumnya tidak menggunakan akun-akun sesuai dengan ketentuan dalam Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-369/PB/2020 tanggal 27 April 2020, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nomor SPM	Tgl SPM	Nomor SP2D	Tgl. SP2D	AKUN SEMULA	AKUN KOREKSI	Nilai (Rp)*	Keterangan
1	00597	11/05/2020	201391303018792	19/05/2020	524113	524115	54.450.000	Pembayaran translok melaksanakan piket di kantor selama WFH (77 orang)
2	00598	11/05/2020	201391303018793	19/05/2020	524113	524115	35.250.000	Pembayaran translok melaksanakan piket di kantor selama WFH (74 orang)

3	00659	02/06/2020	201391303020484	03/06/2020	524113	524115	3.900.000	Pembayaran translok melaksanakan piket di kantor selama WFH tanggal 26 Maret - 12 Mei 2020 (6 orang)
4	00662	02/06/2020	201391303020485	03/06/2020	524113	524115	8.550.000	Pembayaran translok melaksanakan piket di kantor selama WFH (17 orang)
5	00629	11/06/2020	201391303021947	16/06/2020	524113	524115	52.650.000	Pembayaran translok melaksanakan piket di kantor selama WFH (69 orang)
6	00705	15/06/2020	201391303022175	17/06/2020	524113	524115	1.650.000	Pembayaran translok melaksanakan piket di kantor selama WFH tanggal 6 April - 1 Juni 2020 (1 orang)
7	01112	21/09/2020	201391303035215	22/09/2020	524113	524115	3.300.000	Pembayaran translok melaksanakan piket di kantor selama WFH tanggal 27 April - 13 Mei 2020 (16 orang)
8	01113	21/09/2020	201391303035216	22/09/2020	524113	524115	4.200.000	Pembayaran translok melaksanakan piket di kantor selama WFH tanggal 1 - 21 April 2020 (17 orang)
9	01114	21/09/2020	201391303035217	22/09/2020	524113	524115	2.850.000	Pembayaran translok melaksanakan piket di kantor selama WFH tanggal 14 - 29 Mei 2020 (17 orang)
10	01115	21/09/2020	201391303035218	22/09/2020	524113	524115	1.500.000	Pembayaran translok melaksanakan piket di kantor selama WFH tanggal 24 - 31 Maret 2020 (10 orang)
TOTAL NILAI							168.300.000	
*)		Tidak ada penambahan atau pengurangan nilai total pengeluaran/total penerimaan						
Nomor Surat Tanggapan Koreksi KPPN		S-3679/WPB.12/KP.05/2020 Tanggal 22 Desember 2020 Hal : Tanggapan koreksi (450448)						

Arsip Nasional Republik Indonesia mengalokasikan Belanja Perjalanan Dinas untuk penanganan pandemi *Covid-19* sebesar Rp245.850.000,00 dengan penyerapan anggaran sebesar Rp192.300.000,00 atau sebesar 78,22% dari alokasi anggaran, dengan sisa anggaran sebesar Rp53.550.000,00.

B.4.7 Belanja Perjalanan Luar Negeri

Realisasi Belanja Perjalanan Luar Negeri (neto) per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp0,00 atau 0,00 persen dari anggaran sebesar Rp109.135.000,00. Bila dibandingkan dengan 31 Desember 2019 secara keseluruhan mengalami penurunan sebesar (Rp3.143.615.897,00) atau -100,00 persen. Hal ini disebabkan oleh pengalihan anggaran untuk menangani pandemi virus *Covid-19* dan mengurangi kegiatan perjalanan

dinas dalam rangka mengantisipasi penyebaran virus *Covid-19*.

Kode Akun	Uraian	Realisasi Belanja		Kenaikan/Penurunan	
		2020	2019	(Rp)	(%)
524211	Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri	-	2.249.152.682,00	(2.249.152.682,00)	(100,00)
	ANRI Jakarta (KP)	-	1.436.934.682,00	(1.436.934.682,00)	(100,00)
	Pusidkat Kearsipan Bogor (KP)	-	812.218.000,00	(812.218.000,00)	(100,00)
524219	Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	-	1.036.820.455,00	(1.036.820.455,00)	(100,00)
	ANRI Jakarta (KP)	-	1.036.820.455,00	(1.036.820.455,00)	(100,00)
	Jumlah Belanja Bruto	-	3.285.973.137,00	(3.285.973.137,00)	(100,00)
	Pengembalian Belanja	-	(142.357.240,00)	142.357.240,00	(100,00)
	Jumlah	-	3.143.615.897,00	(3.143.615.897,00)	(100,00)

Realisasi Belanja Perjalanan Luar Negeri (neto) per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp0,00 sedangkan Beban Perjalanan Luar Negeri (neto) pada Laporan Operasional Tahun 2020 sebesar Rp0,00 tidak terdapat selisih Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :

Kode Akun	Uraian Jenis Belanja/Beban	Laporan Realisasi Anggaran (Rp)	Laporan Operasional (Rp)	Selisih LRA dan LO (Rp)
	Belanja/Beban Perjalanan Luar Negeri	-	-	-
524211	Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri	-	-	-
524219	Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	-	-	-
	Pengembalian Belanja/Beban	-	-	-
524211	Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri	-	-	-
524219	Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	-	-	-
	Jumlah Belanja/Beban Neto	-	-	-

B.4.8 Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda

Realisasi Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (neto) per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp0,00 atau 0,00 persen dari anggaran sebesar Rp0,00. Bila dibandingkan dengan 31 Desember 2019 secara keseluruhan mengalami penurunan sebesar (Rp4.317.610.000,00) atau -100,00 persen dengan rincian sebagai berikut :

Kode Akun	Uraian	Realisasi Belanja		Kenaikan/Penurunan	
		2020	2019	(Rp)	(%)
526112	Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	-	4.317.610.000,00	(4.317.610.000,00)	(100,00)
	ANRI Jakarta (KP)	-	4.317.610.000,00	(4.317.610.000,00)	(100,00)
	Jumlah	-	4.317.610.000,00	(4.317.610.000,00)	(100,00)

Realisasi Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (neto) per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp0,00 sedangkan Beban Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (neto) pada Laporan Operasional Tahun 2020 sebesar Rp0,00. Penjelasan mengenai Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda akan dijelaskan selanjutnya pada CaLK Neraca mengenai Persediaan.

Kode Akun	Uraian Jenis Belanja/Beban	Laporan Realisasi Anggaran (Rp)	Laporan Operasional (Rp)	Selisih LRA dan LO (Rp)
Belanja/Beban Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda		-	-	-
526112	Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	-	-	-
Jumlah		-	-	0,00 0,00

Belanja Modal
Rp4.833.287.340,00

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal (neto) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 adalah Rp4.833.287.340,00 atau sebesar 98,38 persen dari pagu anggaran Rp4.912.809.000,00. Bila dibandingkan dengan per 31 Desember 2019 mengalami penurunan sebesar (Rp96.527.508.757,00) atau -95,23 persen. Hal ini disebabkan oleh pengurangan anggaran Belanja Modal di tahun 2020 akibat pandemi virus *Covid-19*.

Rincian realisasi Belanja Modal TA 31 Desember 2020 dan perbandingan Belanja Modal (neto) 31 Desember 2020 dengan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 31 Desember 2020

Kode Akun	Uraian	31 Desember 2020		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi Anggaran (%)
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.112.859.000,00	4.070.994.670,00	98,98
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	195.000.000,00	191.861.670,00	98,39
5361	Belanja Modal Lainnya	604.950.000,00	570.431.000,00	94,29
Jumlah Belanja Modal Bruto		4.912.809.000,00	4.833.287.340,00	
Pengembalian Belanja Modal			-	
Jumlah Belanja Modal Netto		4.912.809.000,00	4.833.287.340,00	98,38

Perbandingan Belanja Modal (neto) TA 31 Desember 2020 dan 2019

Kode Akun	Uraian	Realisasi Belanja		Kenaikan/Penurunan	
		2020 (Rp)	2019 (Rp)	(Rp)	(%)
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.070.994.670,00	12.990.421.023,00	(8.919.426.353,00)	(68,66)
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	191.861.670,00	85.068.727.594,00	(84.876.865.924,00)	(99,77)
5361	Belanja Modal Lainnya	570.431.000,00	3.301.647.480,00	(2.731.216.480,00)	(82,72)
Jumlah Belanja Modal Netto		4.833.287.340,00	101.360.796.097,00	(96.527.508.757,00)	(95,23)

B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin (neto) per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp4.070.994.670,00 atau 98,98 persen dari anggaran sebesar Rp4.112.859.000,00. Bila dibandingkan dengan 31 Desember 2019 secara keseluruhan mengalami penurunan sebesar (Rp8.919.426.353,00) atau -68,66 persen. Hal ini disebabkan oleh pengurangan anggaran Belanja Modal di tahun 2020 akibat pandemi virus *Covid-19*.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

TA 2020 dan 2019

Kode Akun	Uraian	Realisasi Belanja		Kenaikan/Penurunan	
		2020	2019	(Rp)	(%)
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.108.112.170,00	12.950.421.023,00	(10.842.308.853,00)	(83,72)
	ANRI Jakarta (KP)	795.167.810,00	7.868.046.383,00	(7.072.878.573,00)	(89,89)
	Pusat Jasa Kearsipan (KP)	940.085.000,00	2.224.569.880,00	(1.284.484.880,00)	(57,74)
	Pusidklat Kearsipan Bogor (KP)	366.419.360,00	30.000.000,00	336.419.360,00	1.121,40
	BAST Aceh (KD)	6.440.000,00	2.827.804.760,00	(2.821.364.760,00)	(99,77)
532115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Peralatan dan Mesin	0,00	40.000.000,00	(40.000.000,00)	(100,00)
	Pusat Jasa Kearsipan (KP)	-	40.000.000,00	(40.000.000,00)	(100,00)
532119	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi Covid-19	1.962.882.500,00	-	1.962.882.500,00	0,00
	ANRI Jakarta (KP)	1.814.182.500,00	-	1.814.182.500,00	0,00
	BAST Aceh (KD)	148.700.000,00	-	148.700.000,00	0,00
Jumlah Belanja Bruto		4.070.994.670,00	12.990.421.023,00	(8.919.426.353,00)	(68,66)
Pengembalian Belanja		-	-	0,00	0,00
Jumlah		4.070.994.670,00	12.990.421.023,00	(8.919.426.353,00)	(68,66)

Arsip Nasional Republik Indonesia mengalokasikan Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk penanganan pandemi *Covid-19* sebesar Rp1.965.294.000,00 dengan penyerapan anggaran sebesar Rp1.962.882.500,00 atau sebesar 99,88% dari alokasi anggaran dengan sisa anggaran sebesar Rp2.411.500,00. Pengadaan yang berasal dari

realisasi belanja ini berupa peralatan mitigasi penanganan COVID-19 yang akan disajikan lebih lanjut dalam lampiran Daftar Aset Tetap COVID-19.

B.5.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan (neto) per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp191.861.670,00 atau 98,39 persen dari anggaran sebesar Rp195.000.000,00. Bila dibandingkan dengan 31 Desember 2019 secara keseluruhan mengalami penurunan sebesar (Rp84.876.865.924,00) atau -99,77 persen. Hal ini disebabkan oleh pengurangan anggaran Belanja Modal di tahun 2020 akibat pandemi virus *Covid-19*.

Rincian dan perbandingan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung Bangunan TA 2020 dan 2019

Kode Akun	Uraian	Realisasi Belanja		Kenaikan/Penurunan	
		2020	2019	(Rp)	(%)
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	85.228.099.161,00	(85.228.099.161,00)	(100,00)
	ANRI Jakarta (KP)	-	34.999.212.609,00	(34.999.212.609,00)	(100,00)
	BAST Aceh (KD)	-	50.228.886.552,00	(50.228.886.552,00)	(100,00)
533119	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi Covid-19	191.861.670,00	-	191.861.670,00	100,00
	ANRI Jakarta (KP)	191.861.670,00	-	191.861.670,00	100,00
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0,00	197.314.000,00	(197.314.000,00)	(100,00)
	ANRI Jakarta (KP)	-	197.314.000,00	(197.314.000,00)	(100,00)
	Jumlah Belanja Bruto	191.861.670,00	85.425.413.161,00	(85.233.551.491,00)	(99,78)
	Pengembalian Belanja	-	(356.685.567,00)	356.685.567,00	(100,00)
	Jumlah	191.861.670,00	85.068.727.594,00	(84.876.865.924,00)	(99,77)

Arsip Nasional Republik Indonesia mengalokasikan Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk penanganan pandemi *Covid-19* sebesar Rp195.000.000,00 dengan penyerapan anggaran sebesar Rp191.861.670,00 atau sebesar 98,39% dari alokasi anggaran dengan sisa anggaran sebesar Rp3.138.330,00. Pengadaan yang berasal dari realisasi belanja ini berupa bangunan dan gedung mitigasi penanganan COVID-19 yang akan disajikan lebih lanjut dalam lampiran Daftar Aset Tetap COVID-19.

B.5.4 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya (neto) per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp570.431.000,00 atau 94,29 persen dari anggaran sebesar Rp604.950.000,00. Bila dibandingkan dengan 31 Desember 2019 secara keseluruhan mengalami penurunan sebesar (Rp2.731.216.480,00) atau - 82,72 persen. Hal ini disebabkan oleh adanya penyesuaian belanja Kementerian/Lembaga TA 2020 akibat pandemi virus Covid-19, sesuai Surat Menteri Keuangan RI Nomor S-302/MK.02/2020 hal Langkah-langkah Penyesuaian Belanja Kementerian/Lembaga TA 2020.

Rincian dan perbandingan realisasi Belanja Modal Lainnya adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2020 dan 2019

Kode Akun	Uraian	Realisasi Belanja		Kenaikan/Penurunan	
		2020	2019	(Rp)	(%)
536111	Belanja Modal Lainnya	451.435.500,00	3.301.647.480,00	(2.850.211.980,00)	(86,33)
	ANRI Jakarta (KP)	451.435.500,00	3.282.797.480,00	(2.831.361.980,00)	(86,25)
	Pusidklat Kearsipan Bogor (KP)	-	18.850.000,00	(18.850.000,00)	(100,00)
536118	Belanja Modal Lainnya - Penanganan Pandemi Covid-19	74.000.000,00	-	74.000.000,00	0,00
	ANRI Jakarta (KP)	74.000.000,00	0,00	74.000.000,00	0,00
536121	Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya	44.995.500,00	-	44.995.500,00	0,00
	ANRI Jakarta (KP)	44.995.500,00	0,00	44.995.500,00	0,00
	Jumlah Belanja Bruto	570.431.000,00	3.301.647.480,00	(2.731.216.480,00)	(82,72)
	Pengembalian Belanja	-	-	0,00	0,00
	Jumlah	570.431.000,00	3.301.647.480,00	(2.731.216.480,00)	(82,72)

Arsip Nasional Republik Indonesia mengalokasikan Belanja Modal Lainnya untuk penanganan pandemi *Covid-19* sebesar Rp75.000.000,00 dengan penyerapan anggaran sebesar Rp74.000.000,00 atau sebesar 98,67% dari alokasi anggaran dengan sisa anggaran sebesar Rp1.000.000,00. Pengadaan yang berasal dari realisasi belanja ini berupa pembuatan aplikasi monitoring kesehatan pegawai untuk kegiatan di Biro Organisasi, Kepegawaian dan Hukum.

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Belanja Bantuan Sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk menghindari terjadinya resiko sosial dan bersifat selektif. Pada Arsip Nasional RI tidak terdapat Belanja Bantuan Sosial.

Catatan Penting Lainnya atas LRA

A. Belanja Akun Penanganan Pandemi COVID-19

KODE AKUN	URAIAN AKUN KHUSUS COVID-19	ARSIP NASIONAL RI			
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Anggaran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(4) / (3)	(3) - (4)
52	Belanja Barang - Penanganan Pandemi COVID-19	6.946.595.000	6.123.870.934	88,16%	822.724.066
521131	Belanja Barang Operasional	2.960.992.000	2.697.362.599	91,10%	263.629.401
521241	Belanja Barang Non Operasional	254.110.000	149.675.000	58,90%	104.435.000
521841	Belanja Barang Persediaan	611.997.000	609.411.602	99,58%	2.585.398
522192	Belanja Jasa	2.873.646.000	2.475.121.733	86,13%	398.524.267
524115	Belanja Perjalanan Dinas	245.850.000	192.300.000	78,22%	53.550.000
53	Belanja Modal - Penanganan Pandemi COVID-19	2.235.294.000	2.228.744.170	99,71%	6.549.830
532119	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.965.294.000	1.962.882.500	99,88%	2.411.500
533119	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	195.000.000	191.861.670	98,39%	3.138.330
536118	Belanja Modal Lainnya	75.000.000	74.000.000	98,67%	1.000.000
TOTAL BELANJA (52 + 53)		9.181.889.000	8.352.615.104	90,97%	829.273.896

Arsip Nasional RI mengalokasikan anggaran sebesar Rp6.946.595.000,00 untuk **Belanja Barang – Penanganan Pandemi COVID-19** dengan realisasi anggaran sebesar Rp6.123.870.934,00 atau 88,16% dari pagu anggaran dan Rp2.235.294.000,00 untuk **Belanja Modal – Penanganan Pandemi COVID-19** dengan realisasi anggaran sebesar Rp2.228.744.170,00 atau 99,71% dari pagu anggaran.

Secara keseluruhan, realisasi belanja penanganan pandemi COVID-19 di lingkungan Arsip Nasional RI sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020 mencapai Rp8.352.615.104,00 atau sebesar 90,97% dari pagu anggaran senilai Rp9.181.889.000,00. Berikut disajikan data realisasi belanja penanganan COVID-19 untuk masing-masing satker di bawah Arsip Nasional RI :

KODE AKUN	ANRI Jakarta		BAST		Pusat Jasa Kearsipan		Pusdiklat Bogor	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
52	5.187.831.000	4.886.518.956	175.435.000	175.435.000	88.619.000	88.467.953	1.494.710.000	973.449.025
521131	2.783.822.000	2.540.249.621	117.815.000	117.815.000	18.955.000	18.923.953	40.400.000	20.374.025
521241	100.000	-	-	-	-	-	254.010.000	149.675.000
521841	562.213.000	559.627.602	13.520.000	13.520.000	36.264.000	36.264.000	-	-
522192	1.619.846.000	1.618.341.733	44.100.000	44.100.000	9.400.000	9.280.000	1.200.300.000	803.400.000
524115	221.850.000	168.300.000	-	-	24.000.000	24.000.000	-	-
53	2.086.594.000	2.080.044.170	148.700.000	148.700.000	-	-	-	-
532119	1.816.594.000	1.814.182.500	148.700.000	148.700.000	-	-	-	-
533119	195.000.000	191.861.670	-	-	-	-	-	-
536118	75.000.000	74.000.000	-	-	-	-	-	-
TOTAL BELANJA (52 + 53)	7.274.425.000	6.966.563.126	324.135.000	324.135.000	88.619.000	88.467.953	1.494.710.000	973.449.025
TOTAL REAL. ANGGARAN (%)		95,77%		100,00%		99,83%		65,13%
TOTAL SISA ANGGARAN (Rp)		307.861.874				151.047		521.260.975

Satker **ANRI Jakarta** dan **Pusat Jasa Kearsipan** telah melakukan ralat/revisi akun pada SPM/SP2D dengan jumlah masing-masing 30 SPM/SP2D dan 2 SPM/SP2D untuk penggunaan akun-akun yang sebelumnya tidak mengikuti ketentuan dalam Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-369/PB/2020 tanggal 27 April 2020. Revisi SPM untuk akun-akun tersebut telah disetujui oleh KPPN dengan diterbitkannya Surat Tanggapan Koreksi KPPN No. **S-3679/WPB.12/KP.05/2020** Tanggal 22 Desember 2020 Hal : Tanggapan koreksi (450448) dan Surat Tanggapan Koreksi KPPN No. **S-1857/WPB.12/KP.05/2020** Tanggal 13 Agustus 2020 Hal : Tanggapan Koreksi (418929).

Satker **Pusdiklat Kearsipan** dalam realisasi belanja penanganan pandemi COVID-19 telah menggunakan akun-akun yang sesuai dengan ketentuan dalam Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-369/PB/2020 tanggal 27 April 2020 sehingga tidak perlu melaporkan atau melakukan ralat/revisi akun pada SPM/SP2D terkait kepada KPPN setempat. Informasi realisasi belanja lebih detail untuk masing-masing satker telah dijelaskan dalam bagian pos LRA sebelumnya.

Satker **BAST** dalam realisasi belanja penanganan pandemi COVID-19 masih terdapat satu penggunaan akun yang belum sesuai dengan ketentuan dalam Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-369/PB/2020 tanggal 27 April 2020 dengan rincian sebagai berikut :

Akun	Uraian	Pagu	Realisasi	Keterangan	No. SPM	No. SP2D/Tgl
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.440.000	4.040.000	Tempat cuci tangan	00089	200011701000777 Tgl. 18/08/2020
			2.400.000	Pembelian thermometer digital suhu badan		

Ralat/revisi akun pada SPM/SP2D terkait tidak dilakukan disebabkan oleh keterlambatan satuan kerja dalam menindaklanjuti 1 (satu) dokumen

pertanggungjawaban belanja saat Tahun Anggaran Berjalan (TAB) telah berakhir sehingga tidak memungkinkan bagi satuan kerja untuk melakukan proses revisi anggaran dan ralat/revisi akun SPM/SP2D.

B. Belanja Barang Satuan Kerja

Pada satuan kerja **BAST**, terdapat pembelian Belanja Barang Operasional – Penanganan Pandemi COVID-19 berdasarkan SPM No. 00104 tanggal 11 November 2020 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Barang	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1	Timbangan digital	5	565.000	2.825.000
2	Alat semprot gedung	5	693.000	3.465.000
3	Oximeter	3	970.000	2.910.000
4	Tensi digital	3	910.000	2.730.000
5	Tempat sampah	15	950.000	14.250.000
6	Stetoskop	2	370.000	740.000
7	Paket vitamin berkala bagi pegawai ANRI	147	250.000	36.750.000
8	Pulse oxymeter finger	49	245.000	12.005.000
9	Termometer digital	49	76.000	3.724.000
10	Faceshield	98	37.000	3.626.000
11	Masker bedah	49	270.000	13.230.000
12	Masker dengan filter udara	49	115.000	5.635.000
13	Hand sanitizer	343	15.000	5.145.000
14	Desinfektan spray	98	105.000	10.290.000
15	Tas spunbond	49	10.000	490.000
Total Nilai				117.815.000

Terdapat barang operasional untuk penanganan pandemi COVID-19 berupa : timbangan digital, alat semprot gedung, oximeter, tensi digital, dan stetoskop dengan total nilai Rp12.670.000,00 yang **belum dicatat** sebagai aset ekstrakomptabel.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di Bendahara

Pengeluaran

Rp0,00

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca.

Kas di Bendahara Pengeluaran Periode Desember 2020

KODE SATKER	NAMA SATKER	Jumlah (Rp)
087.01.450448	ANRI Jakarta (KP)	-
087.01.681464	BAST Aceh (KD)	-
087.01.418929	Pusat Jasa Kearsipan (KP)	-
087.01.418934	Pusidklat Kearsipan Bogor (KP)	-
JUMLAH		-

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Arsip Nasional Republik Indonesia untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp2.720.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Perbandingan Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2020 dan 2019

KODE SATKER	NAMA SATKER	2020 (Rp)	2019 (Rp)
087.01.020036	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat	-	-
087.01.030089	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah	-	-
087.01.040018	Badan Perpustakaan Dan Arsip Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	-	-
087.01.050015	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur	-	-
087.01.060073	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh	-	-
087.01.070069	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Provinsi Sumatera Utara	-	-
087.01.080026	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat	-	-
087.01.090084	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau	-	-
087.01.100023	Kantor Arsip Provinsi Jambi	-	-
087.01.110030	Kantor Arsip Daerah Provinsi Sumatera Selatan	-	-
087.01.120030	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung	-	-
087.01.130077	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat	-	-
087.01.140087	Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah	-	-
087.01.150086	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan	-	-
087.01.160029	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Timur	-	-
087.01.170030	Kantor Kearsipan Provinsi Sulawesi Utara	-	-
087.01.180025	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah	-	-
087.01.190067	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan	-	-
087.01.200033	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tenggara	-	-
087.01.210026	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Maluku	-	-
087.01.220030	Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi Bali	-	-
087.01.230028	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat	-	-
087.01.240022	Dinas Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Timur	-	-
087.01.250038	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua	-	-

087.01.260032	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu	-	-
087.01.280066	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Maluku Utara	-	-
087.01.290021	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten	-	-
087.01.300065	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	-	-
087.01.310066	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo	-	2.720.000,00
087.01.320068	Kantor Arsip Daerah Prov. Kepulauan Riau	-	-
087.01.330069	Kantor Arsip Daerah Provinsi Papua Barat	-	-
087.01.340086	Kantor Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Barat	-	-
087.01.350092	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara	-	-
087.01.450448	ANRI Jakarta (KP)	-	-
087.01.681464	BAST Aceh (KD)	-	-
087.01.418929	Pusat Jasa Kearsipan (KP)	-	-
087.01.418934	Pusidklat Kearsipan Bogor (KP)	-	-
JUMLAH		-	2.720.000,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Arsip Nasional Republik Indonesia untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 sebesar Rp2.720.000,00 merupakan Kas di Bendahara Pengeluaran pada satker Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo yang telah disetorkan ke rekening kas negara pada tanggal 20 Januari 2020 pukul 08:23:01 waktu setempat dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN): 336E58N3DE1ST6HD dan nama wajib bayar BP Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo.

*Kas di Bendahara
Penerimaan Rp0,00*

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan untuk periode tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar masing-masing Rp0,00 dan Rp0,00 yang meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

*Kas Lainnya dan Setara
Kas Rp0,00*

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada Bendahara Pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, yaitu LS Bendahara Pengeluaran yang belum didistribusikan kepada para pihak ketiga.

*Pendapatan yang Masih
Harus Diterima Rp0,00*

C.4 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diterima tagihannya.

*Piutang Bukan Pajak
Rp0,00*

C.5 Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Piutang bukan pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Piutang Bukan Pajak mencatat piutang yang berasal dari PNBP, meliputi seluruh penerimaan pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan dan hibah. Piutang Bukan Pajak terdiri dari Piutang PNBP dan Piutang Lainnya.

*Penyisihan Piutang Tidak
Tertagih – Piutang
Bukan Pajak Rp0,00*

C.6 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak

Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Penyisihan piutang tak tertagih – Piutang Bukan Pajak adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Piutang Bukan Pajak yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur.

*Bagian Lancar Tagihan
TP/TGR Rp0,00*

C.7 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Bagian Lancar Piutang TP/TGR Rp0,00

C.8 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Bagian Lancar Piutang TP/TGR

Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang TP/TGR untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Penyisihan piutang tak tertagih – Piutang adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Piutang Jangka Pendek yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur.

Persediaan Rp2.450.555.292,00

C.9 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp2.450.555.292,00 dan Rp1.804.956.408,00 dengan rincian sebagai berikut :

Perbandingan Rincian Persediaan TA 2020 dan 2019

Uraian	2020 (Rp)	2019 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	
			(Rp)	(%)
Barang Konsumsi (117111)	1.814.072.223,00	1.250.425.270,00	563.646.953,00	45,08
ANRI Jakarta (KP)	1.428.652.533,00	813.000.880,00	615.651.653,00	75,73
Balai Arsip Tsunami Aceh (KD)	73.032.690,00	79.648.790,00	(6.616.100,00)	(8,31)
Pusat Jasa Kearsipan (KP)	250.276.000,00	316.916.600,00	(66.640.600,00)	(21,03)
Pusdiklat Kearsipan Bogor (KP)	62.111.000,00	40.859.000,00	21.252.000,00	52,01
Barang untuk Pemeliharaan (117113)	170.556.890,00	55.137.840,00	115.419.050,00	209,33
ANRI Jakarta (KP)	84.914.890,00	51.811.340,00	33.103.550,00	63,89
Balai Arsip Tsunami Aceh (KD)	13.686.000,00	3.326.500,00	10.359.500,00	311,42
Pusat Jasa Kearsipan (KP)	0,00	0,00	0,00	0,00
Pusdiklat Kearsipan Bogor (KP)	71.956.000,00	0,00	71.956.000,00	0,00
Barang Persediaan lainnya untuk dijual/ diserahkan ke Masyarakat (117128)	455.641.363,00	469.091.175,00	(13.449.812,00)	(2,87)
ANRI Jakarta (KP)	455.641.363,00	469.091.175,00	(13.449.812,00)	(2,87)
Bahan Baku (117131)	288.000,00	676.000,00	(388.000,00)	(57,40)
ANRI Jakarta (KP)	0,00	490.000,00	(490.000,00)	(100,00)
Balai Arsip Tsunami Aceh (KD)	288.000,00	186.000,00	102.000,00	54,84
Persediaan Lainnya (117199)	9.996.816,00	29.626.123,00	(19.629.307,00)	(66,26)
ANRI Jakarta (KP)	9.514.316,00	28.827.423,00	(19.313.107,00)	(67,00)
Balai Arsip Tsunami Aceh (KD)	482.500,00	798.700,00	(316.200,00)	(39,59)
Jumlah Persediaan	2.450.555.292,00	1.804.956.408,00	645.598.884,00	35,77

Catatan :

- Barang persediaan lainnya untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat merupakan buku-buku koleksi layanan arsip di Satker Arsip Nasional RI Jakarta sebesar **Rp455.641.363,00**;

Terdapat kenaikan Persediaan sebesar Rp645.598.884,00 dengan rincian mutasi Persediaan sebagai berikut :

- a. Pembelian sebesar Rp5.493.182.599,00 berasal dari Belanja Barang Persediaan Konsumsi sebesar Rp3.674.524.247,00, Belanja Barang Persediaan Penanganan Pandemi Covid-19 sebesar Rp609.411.602,00, Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp497.696.750,00, dan Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp711.550.000,00;
- b. Beban Persediaan sebesar Rp3.724.064.943,00 berasal dari Pemakaian Barang Konsumsi sebesar Rp3.692.557.513,00; Pemakaian Bahan Baku sebesar Rp6.014.100,00; Pemakaian Persediaan Lainnya sebesar Rp23.530.330,00; dan Pengurangan Persediaan dikarenakan hasil opname fisik Barang Konsumsi sebesar Rp1.963.000,00;
- c. Beban Pemeliharaan sebesar Rp1.154.762.980,00 berasal dari Pemakaian Bahan Untuk Pemeliharaan sebesar Rp1.154.562.980,00 dan Pengurangan Persediaan dikarenakan hasil opname fisik Bahan untuk Pemeliharaan sebesar Rp200.000,00;
- d. Pemakaian Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat (117128) sebesar Rp3.859.592,00 dan Pengurangan Persediaan dikarenakan hasil opname fisik sebesar Rp578.431,00; serta Pengurangan Persediaan Lainnya (117199) sebesar Rp593.852,00 yang merupakan Persediaan Usang/Rusak;
- e. Penyesuaian nilai persediaan yang disebabkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat menggunakan metode penilaian persediaan harga perolehan terakhir yaitu sebesar Rp36.276.083,00 yang berasal dari Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan Barang Konsumsi sebesar Rp43.333.942,00; Bahan Untuk Pemeliharaan sebesar

Rp2.129.530,00; Persediaan Lainnya sebesar Rp50.000,00; dan Beban Penyesuaian Nilai Persediaan Bahan Baku sebesar Rp225.600,00; Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat sebesar Rp9.011.789,00.

Mutasi Persediaan Tahun 2020

No	Persediaan	Saldo Awal (Rp)	Pembelian (Rp)	Pemakaian (Rp)	Penyerahan/Dijual Kepada Masyarakat (Rp)	Opname Fisik (Rp)	Penyesuaian Nilai Persediaan (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
117111	Barang Konsumsi	1.250.425.270,00	4.214.833.524,00	(3.692.557.513,00)	-	(1.963.000,00)	43.333.942,00	1.814.072.223,00
450448	Arsip Nasional RI Jakarta	813.000.880,00	3.814.517.874,00	(3.238.334.423,00)	-	(2.013.000,00)	41.481.202,00	1.428.652.533,00
681464	BAST Aceh	79.648.790,00	51.059.650,00	(59.868.490,00)	-	-	2.192.740,00	73.032.690,00
418934	Pusdiklat Kearsipan	40.859.000,00	58.189.000,00	(37.027.000,00)	-	50.000,00	40.000,00	62.111.000,00
418929	Pusat Jasa Kearsipan	316.916.600,00	291.067.000,00	(357.327.600,00)	-	-	(380.000,00)	250.276.000,00
117113	Bahan Untuk Pemeliharaan	55.137.840,00	1.268.052.500,00	(1.154.562.980,00)	-	(200.000,00)	2.129.530,00	170.556.890,00
450448	Arsip Nasional RI Jakarta	51.811.340,00	1.122.543.800,00	(1.091.222.230,00)	-	(200.000,00)	1.981.980,00	84.914.890,00
681464	BAST Aceh	3.326.500,00	34.598.700,00	(24.386.750,00)	-	-	147.550,00	13.686.000,00
418934	Pusdiklat Kearsipan	-	89.950.000,00	(17.994.000,00)	-	-	-	71.956.000,00
418929	Pusat Jasa Kearsipan	-	20.960.000,00	(20.960.000,00)	-	-	-	-
117128	Barang persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	469.091.175,00	-	(3.859.592,00)	-	(578.431,00)	(9.011.789,00)	455.641.363,00
450448	Arsip Nasional RI Jakarta	469.091.175,00	-	(3.859.592,00)	-	(578.431,00)	(9.011.789,00)	455.641.363,00
117131	Bahan Baku	676.000,00	5.851.700,00	(6.014.100,00)	-	-	(225.600,00)	288.000,00
450448	Arsip Nasional RI Jakarta	490.000,00	4.480.500,00	(4.725.500,00)	-	-	(245.000,00)	-
681464	BAST Aceh	186.000,00	1.371.200,00	(1.288.600,00)	-	-	19.400,00	288.000,00
117199	Persediaan Lainnya	29.626.123,00	4.444.875,00	(23.530.330,00)	-	(593.852,00)	50.000,00	9.996.816,00
450448	Arsip Nasional RI Jakarta	28.827.423,00	3.521.875,00	(22.281.130,00)	-	(593.852,00)	40.000,00	9.514.316,00
681464	BAST Aceh	798.700,00	923.000,00	(1.249.200,00)	-	-	10.000,00	482.500,00
	Jumlah	1.804.956.408,00	5.493.182.599,00	(4.880.524.515,00)	-	(3.335.283,00)	36.276.083,00	2.450.555.292,00

Terdapat Opname Fisik Kurang pada **Barang Konsumsi** di Arsip Nasional RI Jakarta sebesar **Rp1.963.000,00** berdasarkan Berita Acara Hasil Opname Fisik Semester I Nomor: BA.06/VI/2020 Tanggal 30 Juni 2020 dan Semester II Nomor: BA.28/XII/2020 Tanggal 31 Desember 2020 dengan rincian sebagai berikut :

HASIL OPNAME FISIK (KURANG)

KODE	URAIAN	KUANTITAS	RUPIAH
117111	BARANG KONSUMSI		
1010301005	Buku Tulis	-1	-27.000
000008	- Kwitansi UP	-1	-27.000
1010301007	Penggaris	-1	-11.000
000002	- Penggaris Besi Kecil	-1	-11.000
1010301010	Alat Perekat	-3	-38.000
000016	- Double Tape Sedang (1 cm)	-2	-26.000
000023	- LAKBAN BENING (ROLL)	-1	-12.000
1010304004	Tinta/Toner Printer	-3	-1.937.000
000023	- Toner HP LJ 35A/ HP P1006/1005	-1	-1.377.000
000157	- Tinta Canon IP 100 PGI 35 (black)	-1	-191.000
000196	- Tinta HP CD972AA - 920 XL cyan	-1	-369.000
	KOREKSI KURANG CATAT	10	50.000
1010301006	Ordner dan Map	10	50.000
000003	- Folder	10	50.000
	JUMLAH	2	(1.963.000)

Telah dilakukan koreksi hasil kesepakatan bersama (Tripartit) atas usulan jurnal koreksi BPK-RI berupa Koreksi kurang catat Persediaan berdasarkan hasil *stock opname* pada Satker Pusdiklat Kearsipan sebesar Rp50.000,00. Koreksi tersebut berdampak pada perubahan nilai kolom Opname Fisik Persediaan dalam LKKL ANRI TA. 2020 (*Unaudited*) dari semula sebesar (Rp2.013.000,00) menjadi (Rp1.963.000,00) atau terjadi penurunan sebesar Rp50.000,00.

Terdapat Opname Fisik Kurang pada **Bahan Untuk Pemeliharaan** di Arsip Nasional RI Jakarta sebesar **Rp200.000,00** berdasarkan Berita Acara Hasil Opname Fisik Semester I Nomor: BA.06/VI/2020 Tanggal 30 Juni 2020 dengan rincian sebagai berikut :

HASIL OPNAME FISIK (KURANG)

KODE	URAIAN	KUANTITAS	RUPIAH
117113	BAHAN UNTUK PEMELIHARAAN		
1010305004	Keset Dan Tempat Sampah	2	130.000
000007	- Cangkul kecil	2	130.000
1010305008	Bahan Kimia Untuk Pembersih	1	70.000
000072	- Proclin Pemutih	1	70.000
JUMLAH		3	200.000

Terdapat Opname Fisik Kurang pada **Barang Lainnya untuk Dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat** di Arsip Nasional RI Jakarta sebesar **Rp578.431,00** berdasarkan Berita Acara Hasil Opname Fisik Semester II Nomor : BA.28/XII/2020 Tanggal 31 Desember 2020 dengan rincian sebagai berikut :

HASIL OPNAME FISIK (KURANG)

KODE	URAIAN	KUANTITAS	RUPIAH
117128	BARANG LAINNYA UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT		
1010501008	Barang Persediaan	-13	-539.664
000029	- Inventaris Arsip Perkebunan 1816-1900	-1	-20.267
000031	- Kembalinya Irian Barat	-1	-28.033
000044	- Memori Serah Jabatan Jawa Barat Tengah 1921-1930	-3	-141.399
000045	- Memori Serah Jabatan Jawa Timur dan Tanah Kerajaan 1921-1930	-3	-142.599
000049	- Otonomi Daerah hindia belanda 1903-1940	-2	-45.600
000050	- PDRI (Pemerintah Darurat RI) dalam khasanah Kearsipan	-1	-40.833
000062	- Sarekat Islam Lokal	-1	-57.633
000067	- Surat-surat perjanjian antara kerajaan Bali/Lombok dengan Pemerintah	-1	-63.300

KOREKSI KURANG CATAT		3	104.900
000062	- Sarekat Islam Lokal	1	57.633
000059	- Perjuangan Mempertahankan Jakarta Masa Awal Proklamasi	1	24.467
000049	- Otonomi Daerah hindia belanda 1903-1940	1	22.800
KOREKSI LEBIH CATAT		-4	-143.667
000066	- Surat-surat perjanjian antara kesultanan Banjarmasin dengan	-1	-50.700
000061	- Reflection on tsunami an oral history	-1	-21.900
000051	- PDRI (pemerintah Darurat RI) dikaji ulang MSI	-1	-44.067
000024	- Gerakan Separatis di Indonesia	-1	-27.000
JUMLAH		(14)	(578.431)

Telah dilakukan koreksi hasil kesepakatan bersama (Tripartit) atas usulan jurnal koreksi BPK-RI berupa Koreksi kurang catat Persediaan sebesar Rp104.900,00 dan lebih catat Persediaan sebesar Rp143.667,00 berdasarkan hasil *stock opname* pada Satker ANRI Jakarta. Koreksi tersebut berdampak pada perubahan nilai kolom Opname Fisik Persediaan dalam LKKL ANRI TA. 2020 (*Unaudited*) dari semula sebesar (Rp539.664,00) menjadi (Rp578.431,00) atau terjadi kenaikan sebesar Rp38.767,00.

Terdapat Penghapusan Persediaan Usang/Rusak dalam **Barang Lainnya untuk Dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat** pada Satker ANRI Jakarta berdasarkan Berita Acara No. BA-28/BU/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 yang merupakan koreksi atas kesepakatan bersama usulan jurnal koreksi BPK-RI berupa Koreksi Penghapusan Persediaan Usang/Rusak Satker ANRI Jakarta sebesar Rp9.011.789,00. Koreksi tersebut berdampak pada kolom Penyesuaian Nilai Persediaan (117128) dalam LKKL ANRI TA. 2020 (*Unaudited*) dari semula sebesar Rp0,00 menjadi (Rp9.011.789,00) atau terjadi penurunan sebesar Rp9.011.789,00. Adapun rincian penghapusan persediaan usang/rusak tersebut adalah sebagai berikut :

DAFTAR PENGHAPUSAN PERSEDIAAN USANG/RUSAK

KODE	URAIAN	KUANTITAS	RUPIAH
117128 BARANG LAINNYA UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT			
1010501008	Barang Persediaan	177	9.011.789
000016	- Ambonsche Landsbechrijving	2	87.934
000020	- Biro Perjalanan Haji di Indonesia Masa Kolonial	2	90.266
000026	- Ikhtisar Keadaan Politik Hindia Belanda 839-1848	2	121.600

000029	- Inventaris Arsip Perkebunan 1816-1900	2	40.534
000038	- Laporan-laporan Desa (Desa Rapporten)	2	47.534
000039	- Laporan-Laporan tentang Gerakan protes di Jawa pada Abad	2	101.066
000042	- Memori Serah Jabatan Jawa Barat 1921-1930	9	399.897
000043	- Memori Serah Jabatan Jawa Barat I 1931-1940	10	467.000
000044	- Memori Serah Jabatan Jawa Barat Tengah 1921-1930	1	47.133
000045	- Memori Serah Jabatan Jawa Timur dan Tanah Kerajaan	5	237.665
000049	- Otonomi Daerah hindia belanda 1903-1940	2	45.600
000051	- PDRI (pemerintah Darurat RI) dikaji ulang MSI	1	44.067
000057	- Perdagangan Candu 1930- Perang Kemerdekaan RI	1	24.000
000059	- Perjuangan Mempertahankan Jakarta Masa Awal Proklamasi	1	24.467
000062	- Sarekat Islam Lokal	19	1.095.027
000065	- Surat-surat perjanjian antara kesultanan Riau dengan VOC	3	170.199
000066	- Surat-Surat perjanjian antara kesultanan Banjarmasin dengan	93	4.715.100
000067	- Surat-surat perjanjian antara kerajaan Bali/Lombok dengan	19	1.202.700
000072	- Laporan Politik 1837	1	50.000
JUMLAH		177	9.011.789

Terdapat Opname Fisik Kurang pada **Persediaan Lainnya** berupa persediaan usang sebesar **Rp593.852,00** dengan rincian sebagai berikut :

DAFTAR PERSEDIAAN USANG

KODE	URAIAN	KUANTITAS	RUPIAH
117199 PERSEDIAAN LAINNYA			
1010401001	Obat Cair (Persediaan Lainnya)	27	402.750
10	- Ephineprine inj	9	123.750
38	- Caladine Lotion 60ml	18	279.000
1010401002	Obat Padat (Persediaan Lainnya)	144	49.000
6	- Captoprill 25 mg	124	31.000
60	- Aspilet	20	18.000
1010401005	Obat Gel/Salep (Persediaan Lainnya)	2	12.502
14	- Ketorolac	2	12.502
1010401007	Non Alat/Obat Kontrasepsi Keluarga Berencana (Persediaan Lainnya)	8	129.600
2	- Jarum Catch Infus No 20	3	54.600
3	- Jarum Catch Infus No 22	5	75.000
Jumlah		181	593.852

Saldo Persediaan Akun Khusus Covid-19 Arsip Nasional RI per 31 Desember 2020 sebesar Rp333.058.727,00, jumlah tersebut terdiri dari pembelian sebesar Rp609.411.602,00 dan pemakaian sebesar Rp276.352.875,00 dengan rincian sebagai berikut :

KODE	URAIAN	PEMBELIAN	PEMAKAIAN	NILAI S/D 31 DESEMBER 2020
117111	Barang Konsumsi	595.891.602	271.187.875	324.703.727
450448	Arsip Nasional RI Jakarta	559.627.602	234.923.875	324.703.727
418929	Pusat Jasa Kearsipan	36.264.000	36.264.000	0
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	13.520.000	5.165.000	8.355.000
681464	BAST Aceh	13.520.000	5.165.000	8.355.000
JUMLAH		609.411.602	276.352.875	333.058.727

Pengungkapan Lainnya:

Perolehan Aset Lancar berupa Persediaan dalam rangka penanganan COVID-19 disajikan dalam lampiran Barang Persediaan Akun Khusus Covid yang menjadi bagian tidak terpisah dari segmen CaLK Neraca ini.

*Persediaan yang Belum
Diregister Rp0,0*

C.9.a Persediaan Yang Belum Diregister

Tagihan Persediaan Yang Belum Diregister untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Persediaan yang belum diregister merupakan akun korolari yang terbentuk dari realisasi Belanja Barang Persediaan di Aplikasi SAIBA dan pencatatan Persediaan Masuk dari transaksi Pembelian dan transaksi Hibah di Aplikasi Persediaan.

*Piutang Tagihan
Tuntutan
Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti Rugi
Rp0,00*

C.10 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Tagihan Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tagihan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Pada bulan Oktober 2020 terdapat Tagihan Tuntutan Ganti Rugi didukung dengan bukti berupa SKTJM/Surat Keterangan Nomor: PW.00/1016/2020 atas kejadian yang mengakibatkan kerusakan Barang Milik Negara (BMN) berupa kendaraan dinas (mobil operasional) dengan nomor polisi B 1933

GQ. Menindaklanjuti peristiwa tersebut, pihak terkait telah bertanggungjawab secara penuh melakukan penggantian atas kerusakan BMN dengan cara menyetor uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke Kas Negara melalui rekening Bendahara Penerimaan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) pada tanggal 09 Oktober 2020 dengan nomor NTB: 098951257365 dan nomor NTPN: 2B41E1JNEQ99NJMJ pukul 16:44:03 WIB.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Rp0,00

C.11 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Penyisihan Piutang Tak Tertagih- Piutang Jangka Panjang untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dan Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Tanah

Rp805.323.718.068,00

C.12 Tanah

Tanah yang dimiliki Arsip Nasional RI untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp805.323.718.068,00 dan Rp802.566.806.600,00. Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2	37.016 m²	Rp 802.566.806.600,00
Mutasi tambah:	13.184 m²	Rp 54.033.789.068,00
Hibah (Masuk) -1		Rp 340.200.000,00
Hibah (Masuk) -2		Rp 2.416.711.468,00
Transfer Masuk		Rp 51.276.877.600,00
Mutasi kurang:	3.659 m²	Rp 51.276.877.600,00
Penghapusan		Rp -
Transfer Keluar		Rp 51.276.877.600,00
Saldo per 31 Desember 2020	46.541 m²	Rp 805.323.718.068,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2020		Rp -
Nilai Buku per 31 Desember 2020		Rp 805.323.718.068,00

Terdapat mutasi tambah sebesar 13.184 m² atau senilai Rp54.033.789.068,00 dan mutasi kurang Tanah sebesar 3.659 m² atau senilai Rp51.276.877.600,00 sampai dengan periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2020. Rincian mutasi tambah adalah sebagai berikut :

- Transaksi Hibah (Masuk)-1 sebesar Rp340.200.000,00 merupakan Hibah (Masuk) ke Arsip Nasional Republik Indonesia dari Pemda Provinsi Jawa Barat berupa Tanah seluas 1.400 m² di Jalan Derwati Kelurahan Margasari Kecamatan Buahbatu, Bandung, Jawa Barat dengan kode barang 2010104001 NUP 3 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 032/32/BPKAD dan PL.01.02/106/2020 Tanggal 27 Mei 2020 dengan Nomor Register 2HSQ286A.
- Transaksi Hibah (Masuk)-2 sebesar Rp2.416.711.468,00 merupakan Hibah (Masuk) ke Arsip Nasional Republik Indonesia dari Pemerintah Provinsi Riau berupa Tanah seluas 8.125 m² di Jalan Adi Sucipto Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Siak Hulu, Kab. Kampar, Riau dengan kode barang 2010104001 NUP 4 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 221/BA/2020 dan BA.16A/BU/VII/2020 Tanggal 06 Juli 2020 dengan Nomor Register 24SMNH3A.
- Transaksi Transfer Masuk berupa Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan seluas 3.659 m² dengan kode 2.01.01.04.002 sebesar Rp51.276.877.600,00 merupakan transfer ke Pusat Pendidikan dan Pelatihan ANRI dari Arsip Nasional Republik Indonesia berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor BA.04/BU/VIII/2020 Tanggal 31 Agustus 2020.

Adapun rincian aset Arsip Nasional RI berupa Tanah sebagai berikut :

NO.	Keterangan	Luas (m ²)	Nilai (Rp)
1	Tanah di jalan Gajah Mada	9.340	418.163.400.000,00
2	Tanah di Jalan Ampera Raya	18.245	303.848.960.000,00
3	Tanah di Pusdiklat Kearsipan ANRI di Bogor	3.659	51.276.877.600,00
4	Tanah rumah negara golongan II di Ragunan	979	14.806.072.000,00
5	Tanah jalan khusus kompleks rumah negara	793	12.310.597.000,00
6	Tanah di BAST di Banda Aceh	4.000	2.160.900.000,00
7	Tanah Hibah (Pemerintah Kota Bandung)	1.400	340.200.000,00
8	Tanah Hibah (Pemerintah Provinsi Riau)	8.125	2.416.711.468,00
Total			805.323.718.068,00

Mutasi kurang berasal dari Transaksi Transfer Keluar berupa Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan seluas 3.659 m² dengan kode 2.01.01.04.002 sebesar Rp51.276.877.600,00 merupakan transfer dari Arsip Nasional Republik Indonesia ke Pusat Pendidikan dan Pelatihan ANRI berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor: BA.04/BU/VIII/2020 Tanggal 31 Agustus 2020.

Peralatan dan Mesin

Rp219.324.401.371,00

C.13 Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp219.324.401.371,00 dan Rp221.057.763.568,00. Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019		18.091 Unit	Rp 221.057.763.568,00
Mutasi tambah:		1.548 Unit	Rp 13.562.269.666,00
Pembelian Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp	4.059.040.570,00	
Transfer Masuk	Rp	9.503.229.096,00	
Mutasi kurang:		1.889 Unit	Rp 15.295.631.863,00
Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya -1	Rp	466.000.000,00	
Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya -2	Rp	5.326.402.767,00	
Transfer Keluar	Rp	9.503.229.096,00	
Saldo per 31 Desember 2020		17.750 Unit	Rp 219.324.401.371,00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2020			Rp (189.861.456.321,00)
Nilai Buku per 31 Desember 2020			Rp 29.462.945.050,00

Terdapat mutasi tambah Peralatan dan Mesin sebanyak 1.548 unit (intrakomptabel) atau senilai Rp13.562.269.666,00 berasal dari :

- Pembelian Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp4.059.040.570,00 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Satker	Akun	Kode Bidang	Uraian Bidang	Intrakomptabel	
					Kuantitas	Nilai
1	Pusat Jasa Kearsipan	132111	308	Alat Laboratorium	3	45.000.000
2	Pusat Jasa Kearsipan	132111	305	Alat Kantor & Rumah Tangga	136	499.310.000
3	Pusat Jasa Kearsipan	132111	309	Alat Persenjataan	2	33.880.000
4	Pusat Jasa Kearsipan	132111	302	Alat Angkutan	1	27.000.000
5	Pusat Jasa Kearsipan	132111	310	Komputer	14	200.470.000
6	Pusat Jasa Kearsipan	132111	303	Alat Bengkel Dan Alat Ukur	1	98.425.000
7	Pusat Jasa Kearsipan	132111	306	Alat Studio Komunikasi Dan Pemancar	2	28.000.000
8	Pusat Jasa Kearsipan	132111	311	Alat Eksplorasi	1	8.000.000
9	Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Kearsipan	132111	310	Komputer	21	183.219.360
10	Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Kearsipan	132111	308	Alat Laboratorium	2	2.000.000
11	Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Kearsipan	132111	306	Alat Studio Komunikasi Dan Pemancar	1	5.000.000
12	Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Kearsipan	132111	317	Peralatan Proses/Produksi	3	10.500.000
13	Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Kearsipan	132111	307	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	1	1.180.000
14	Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Kearsipan	132111	305	Alat Kantor & Rumah Tangga	25	152.150.000
15	Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Kearsipan	132111	302	Alat Angkutan	2	2.400.000
16	Arsip Nasional R I Jakarta	132111	317	Peralatan Proses/Produksi	1	7.350.000
17	Arsip Nasional R I Jakarta	132111	303	Alat Bengkel Dan Alat Ukur	1	3.900.000
18	Arsip Nasional R I Jakarta	132111	308	Alat Laboratorium	79	407.767.500
19	Arsip Nasional R I Jakarta	132111	319	Peralatan Olah Raga	4	13.421.000
20	Arsip Nasional R I Jakarta	132111	310	Komputer	65	849.519.220
21	Arsip Nasional R I Jakarta	132111	307	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	27	199.828.000
22	Arsip Nasional R I Jakarta	132111	305	Alat Kantor & Rumah Tangga	63	288.250.000
23	Arsip Nasional R I Jakarta	132111	302	Alat Angkutan	3	630.795.000
24	Arsip Nasional R I Jakarta	132111	309	Alat Persenjataan	2	6.700.000
25	Arsip Nasional R I Jakarta	132111	304	Alat Pertanian	3	19.250.000
26	Arsip Nasional R I Jakarta	132111	306	Alat Studio Komunikasi Dan Pemancar	12	180.585.490
27	Balai Arsip Statis Dan Tsunami	132111	304	Alat Pertanian	1	2.201.000
28	Balai Arsip Statis Dan Tsunami	132111	307	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	4	5.199.000
29	Balai Arsip Statis Dan Tsunami	132111	308	Alat Laboratorium	19	147.740.000
Jumlah					499	4.059.040.570

Catatan :

- Terdapat ketidaksesuaian kode akun yang digunakan untuk 2 transaksi pembelian Belanja Modal yaitu :
 1. Gerobak Tarik dengan kode aset 3020201001 senilai **Rp2.695.000,00** sejumlah 2 buah @Rp1.347.500,00 dengan NUP 2–3 SP2D NO 201391302017585 TGL 25/06/2020;
 2. Switch dengan kode aset 3100204024 senilai **Rp8.140.000,00** sejumlah 2 buah @Rp4.070.000,00 dengan NUP 32-33 SP2D NO 201391304019347 TGL 25/06/2020. Adapun akun yang digunakan 523111 (belanja pemeliharaan gedung dan bangunan), seharusnya 532111 (belanja modal peralatan dan mesin).

- Perbedaan nilai pembelian Peralatan dan Mesin antara mutasi tambah Neraca sebesar Rp4.059.040.570,00 dan LRA Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp4.070.994.670,00 disebabkan adanya penyesuaian reklasifikasi dengan rincian sebagai berikut :

SATKER	BELANJA AWAL	PENYESUAIAN	BELANJA AKHIR
ANRI JKT	2.609.350.310	-1.984.100	2.607.366.210
PUSDIKLAT	366.419.360	-9.970.000	356.449.360
BAST	155.140.000	-	155.140.000
PUSAT JASA	940.085.000	-	940.085.000
TOTAL	4.070.994.670	-11.954.100	4.059.040.570

PUSDIKLAT ANRI BOGOR		
Nomor Jurnal	Keterangan	Nilai (Rp)
Belanja Peralatan dan Mesin		
202010418934/01	Reklasifikasi atas belanja modal pengadaan peralatan dan mesin sesuai dengan SPM/SP2D No.0094/200231303013603	(6.770.000,00)
202011418934/02	Reklasifikasi atas belanja modal pengadaan peralatan dan mesin sesuai dengan SPM/SP2D No.00122/200231303015203	(3.200.000,00)
Jumlah		(9.970.000,00)
Jumlah Penyesuaian Belanja		(9.970.000,00)

ANRI JAKARTA		
Nomor Jurnal	Keterangan	Nilai (Rp)
Belanja Peralatan dan Mesin		
202002450448012	Reklasifikasi Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran di ANRI Jakarta sesuai kuitansi No 043-01 tgl 31/01/2020 Sesuai SPP Nomor 00042 Tanggal 4	(3.938.000,00)
202002450448013	Reklasifikasi belanja modal pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran sesuai kuitansi No. 050-01 tgl. 05/02/2020 Sesuai SPP Nomor 00054 Tanggal 5 Pebruari	(2.835.000,00)
202002450448014	Reklasifikasi belanja modal pengadaan peralatan & mesin utk keg. pusdatin sesuai kuitansi No. 005-16 tgl. 04/02/2020 Sesuai SPP Nomor 00137 Tanggal 12 Pebruari 2020	(999.100,00)
202006450448016	Reklasifikasi Beban menjadi aset atas sarana pendukung pemeliharaan sesuai dengan SPM/SP2D No. 00745/201391302017585 tgl. 25/06/2020	2.695.000,00
202006450448017	Reklasifikasi Beban menjadi aset atas sarana pendukung pemeliharaan sesuai dengan SPM/SP2D No. 00730/201391304019347 tgl. 25/06/2020	8.140.000,00
202007450448018	Reklasifikasi atas belanja modal pengadaan peralatan dan mesin sesuai dengan SPM/SP2D No.	(1.750.000,00)
202008450448019	Reklasifikasi atas belanja modal pengadaan Peralatan dan Mesin sesuai SPM nomor 01019T pada tanggal 31 Agustus	(1.686.000,00)
202010450448026	Reklasifikasi atas belanja modal pengadaan peralatan dan mesin sesuai dengan SPM/SP2D No.	(2.818.000,00)
202011450448033	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran di Lingkungan Arsip Nasional RI, sesuai dengan No. PL.01/679.06/2020 tanggal 16 November 2020	(1.648.000,00)
202012450448036	Reklasifikasi Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran di ANRI Jakarta sesuai SPM no. 1568 tgl 11/12/2020 dan SP2D 201391302043156 tgl 17/12/2020	(995.000,00)
202012450448045	Reklasifikasi Beban menjadi aset atas sarana pendukung pemeliharaan peralatan dan mesin sesuai dengan SPM/SP2D No. 00729/201391304019553 tgl. 29/06/2020	3.850.000,00
Jumlah		(1.984.100,00)
Jumlah Penyesuaian Belanja		(1.984.100,00)

- Transfer Masuk sebesar Rp9.503.229.096,00 merupakan transfer ke Pusat Pendidikan dan Pelatihan ANRI Bogor dari Arsip Nasional Republik Indonesia berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor BA.04/BU/VIII/2020 Tanggal 31 Agustus 2020. Berikut daftar rincian

Transfer Masuk yang terjadi :

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SATUAN	INTRAKOMPABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5
132111	PERALATAN DAN MESIN		1,049	9,503,229,096
3.01.03.07.010	Mesin Diesel	Unit	1	3,460,065,895
3.02.01.02.003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Unit	4	612,367,000
3.02.01.04.001	Sepeda Motor	Unit	1	6,349,400
3.03.02.11.008	Cermin Besar	Buah	7	3,850,000
3.05.01.02.003	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	Buah	1	1,250,000
3.05.01.02.007	Mesin Penghitung Uang	Buah	1	3,125,000
3.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal	Buah	9	109,065,803
3.05.01.04.002	Lemari Kayu	Buah	54	275,346,371
3.05.01.04.003	Rak Besi	Buah	5	13,897,957
3.05.01.04.004	Rak Kayu	Buah	8	36,951,878
3.05.01.04.005	Filing Cabinet Besi	Buah	14	36,524,596
3.05.01.04.007	Brandkas	Buah	1	12,100,000
3.05.01.04.016	Roll Opek	Buah	1	20,493,902
3.05.01.04.999	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor Lainnya		1	1,200,000
3.05.01.05.002	Hydrant	Buah	1	1,206,356,250
3.05.01.05.007	CCTV - Camera Control Television System	Buah	3	47,162,392
3.05.01.05.010	White Board	Buah	18	17,798,641
3.05.01.05.013	Copy Board/Elektrik White Board	Buah	1	19,803,096
3.05.01.05.015	Alat Penghancur Kertas	Buah	2	6,720,000
3.05.01.05.017	Mesin Absensi	Buah	1	29,975,000
3.05.01.05.048	LCD Projector/Infocus	Buah	4	69,092,500
3.05.01.05.058	Focusing Screen/Layar LCD Projector	Buah	6	34,400,000
3.05.01.05.999	Perkakas Kantor Lainnya		5	11,634,472
3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	Buah	155	469,274,919
3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	Buah	179	179,196,377
3.05.02.01.004	Kursi Kayu	Buah	192	231,887,540
3.05.02.01.005	Sice	Buah	7	57,202,987
3.05.02.01.008	Meja Rapat	Buah	6	84,442,099
3.05.02.01.011	Tempat Tidur Kayu	Buah	34	216,125,396
3.05.02.01.014	Meja Resepsionis	Buah	1	23,000,000
3.05.02.01.016	Kasur/Spring Bed	Buah	41	193,912,500
3.05.02.01.019	Meja Makan Kayu	Buah	16	49,114,749
3.05.02.01.022	Partisi	Buah	1	148,110,600
3.05.02.01.026	Nakas	Buah	33	66,932,316
3.05.02.02.003	Jam Elektronik	Buah	3	1,027,950
3.05.02.03.001	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	Buah	1	3,300,000
3.05.02.04.001	Lemari Es	Buah	2	6,502,586
3.05.02.04.004	A.C. Split	Buah	56	560,523,291
3.05.02.04.007	Exhause Fan	Buah	1	2,200,000
3.05.02.05.002	Kompor Gas (Alat Dapur)	Buah	1	611,593
3.05.02.05.008	Kitchen Set	Buah	1	17,133,005
3.05.02.05.014	Alat Pemanggang Roti/Sate	Buah	1	3,437,369

3.05.02.05.015	Rak Piring Alumunium	Buah	1	376,506
3.05.02.05.019	Mixer	Buah	2	21,094,000
3.05.02.06.002	Televisi	Buah	17	110,376,775
3.05.02.06.004	Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use))	Buah	2	5,321,662
3.05.02.06.006	Equalizer	Buah	2	13,117,200
3.05.02.06.007	Loudspeaker	Buah	12	48,569,955
3.05.02.06.008	Sound System	Buah	2	112,749,600
3.05.02.06.012	Wireless	Buah	3	32,799,958
3.05.02.06.014	Microphone	Buah	3	22,152,177
3.05.02.06.030	Tiang Bendera	Buah	2	5,141,706
3.05.02.06.034	Tangga Aluminium	Buah	1	1,650,000
3.05.02.06.035	Kaca Hias	Buah	0	0
3.05.02.06.036	Dispenser	Buah	12	39,420,000
3.05.02.06.037	Mimbar/Podium	Buah	2	8,371,890
3.05.02.06.057	Vertikal Blind	Buah	20	6,621,943
3.05.02.06.068	DVD Player	Buah	1	10,199,200
3.05.02.06.080	Bracket Standing Peralatan	Buah	3	1,399,700
3.05.02.06.999	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)		7	14,245,000
3.06.01.01.048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Buah	1	4,653,000
3.06.01.01.060	Power Amplifier	Buah	1	9,862,500
3.06.01.02.057	Slide Projector	Buah	1	7,700,000
3.06.01.02.086	Alat Pemanas Prosesing (Water Heater)	Buah	1	2,200,000
3.06.01.02.099	Automatic Emergency Light	Buah	2	1,200,000
3.06.02.01.003	Pesawat Telephone	Buah	13	3,339,105
3.06.02.01.010	Facsimile	Buah	1	1,750,000
3.10.01.02.001	P.C Unit	Buah	21	253,131,613
3.10.01.02.003	Note Book	Buah	7	95,779,800
3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	9	31,489,000
3.10.02.04.001	Server	Buah	4	159,250,000
3.10.02.04.002	Router	Buah	1	812,500
3.10.02.04.003	Hub	Buah	1	13,036,776
3.10.02.04.024	Switch	Buah	1	1,600,000
3.11.02.01.009	Decoder/DE 200	Buah	1	35,300,000
3.17.01.19.004	Jet Pump	Buah	5	20,025,000
3.19.01.02.001	Alat Tennis Meja	Buah	2	3,532,100
3.19.01.03.005	Peralatan Fitnes	Buah	5	55,495,000
Jumlah				9,503,229,096

Terdapat mutasi kurang Peralatan dan Mesin sebanyak 1.889 unit (intrakomptabel) atau senilai Rp15.295.631.863,00 berasal dari :

- Transaksi Reklasifikasi dari Aset tetap ke Aset Lainnya berupa 1 unit sedan sebesar Rp466.000.000,00 yang merupakan penghentian penggunaan aktif BMN dengan kodefikasi 3020101001 NUP 4. Hal ini

berdasarkan berita acara penetapan kondisi BMN dan penghentian penggunaan operasional pemerintah dengan nomor BA-10/BU/V/2020 Tanggal 5 Mei 2020;

- Transaksi Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya sebesar Rp5.326.402.767,00 yang merupakan penghentian penggunaan aktif BMN. Hal ini berdasarkan Berita Acara Penetapan Kondisi BMN dan Penghentian Penggunaan Operasional Pemerintah Nomor: BA-15/BU/XI/2020 Tanggal 13 November 2020. Berikut daftar Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya :

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SATUAN	INTRAKOMPABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5
166112	ASET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN DALAM		839	5.326.402.767
3.05.01.01.008	Mesin Ketik Elektronik/Selektrik	Buah	3	12.775.000
3.05.01.02.001	Mesin Hitung Manual	Buah	1	1.650.000
3.05.01.02.003	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	Buah	7	3.850.000
3.05.01.02.007	Mesin Penghitung Uang	Buah	1	14.470.970
3.05.01.03.007	Mesin Fotocopy Folio	Buah	1	17.629.363
3.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal	Buah	18	9.486.779
3.05.01.04.002	Lemari Kayu	Buah	15	23.277.812
3.05.01.04.003	Rak Besi	Buah	1	361.586
3.05.01.04.004	Rak Kayu	Buah	20	23.650.600
3.05.01.04.005	Filing Cabinet Besi	Buah	10	1.986.301
3.05.01.04.006	Filing Cabinet Kayu	Buah	10	361.731
3.05.01.04.009	Kardex Besi	Buah	3	2.117.860
3.05.01.04.010	Kardex Kayu	Buah	1	18.087
3.05.01.04.013	Buffet	Buah	4	171.678
3.05.01.05.007	CCTV - Camera Control Television System	Buah	10	110.475.240
3.05.01.05.008	Papan Visual/Papan Nama	Buah	8	19.891.983
3.05.01.05.010	White Board	Buah	10	1.578.788
3.05.01.05.015	Alat Penghancur Kertas	Buah	6	23.320.000
3.05.01.05.024	Alat Pemotong Kertas	Buah	3	11.431.835
3.05.01.05.026	Perforator Besar	Buah	1	1.157.538
3.05.01.05.028	Overhead Projector	Buah	1	217.419
3.05.01.05.048	LCD Projector/Infocus	Buah	10	163.323.160
3.05.01.05.999	Perkakas Kantor Lainnya		11	252.334.687
3.05.02.01.001	Meja Kerja Besi/Metal	Buah	7	4.302.549
3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	Buah	10	588.976
3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	Buah	15	876.984
3.05.02.01.004	Kursi Kayu	Buah	16	834.730
3.05.02.01.005	Sice	Buah	8	46.577.375
3.05.02.01.009	Meja Komputer	Buah	10	1.616.360
3.05.02.01.012	Meja Ketik	Buah	7	236.795

3.05.02.01.013	Meja Telepon	Buah	3	829.425
3.05.02.01.015	Meja Marmer	Buah	1	49.445.000
3.05.02.01.016	Kasur/Spring Bed	Buah	8	47.200.000
3.05.02.01.017	Sketsel	Buah	1	4.200.000
3.05.02.01.021	Pot Bunga	Buah	3	803.310
3.05.02.01.026	Nakas	Buah	5	18.332.984
3.05.02.02.003	Jam Elektronik	Buah	52	20.089.850
3.05.02.04.001	Lemari Es	Buah	1	1.948.136
3.05.02.04.004	A.C. Split	Buah	15	76.767.009
3.05.02.04.006	Kipas Angin	Buah	2	1.639.000
3.05.02.04.007	Exhause Fan	Buah	2	1.938.876
3.05.02.05.002	Kompore Gas (Alat Dapur)	Buah	1	593.609
3.05.02.05.009	Tabung Gas	Buah	2	361.730
3.05.02.06.002	Televisi	Buah	13	116.146.308
3.05.02.06.004	Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use))	Buah	14	36.076.237
3.05.02.06.005	Amplifier	Buah	2	2.463.241
3.05.02.06.007	Loudspeaker	Buah	6	3.775.080
3.05.02.06.010	Laser Disc	Buah	2	2.406.522
3.05.02.06.016	Mic Conference	Buah	15	52.493.970
3.05.02.06.021	Tustel	Buah	1	1.121.114
3.05.02.06.026	Lambang Garuda Pancasila	Buah	4	1.496.544
3.05.02.06.027	Gambar Presiden/Wakil Presiden	Buah	8	14.740.000
3.05.02.06.030	Tiang Bendera	Buah	2	419.338
3.05.02.06.035	Kaca Hias	Buah	1	112.860
3.05.02.06.036	Dispenser	Buah	2	6.000.000
3.06.01.01.003	Audio Mixing Stationer	Buah	1	17.417.570
3.06.01.01.016	Compact Disc Player (Peralatan Studio Audio)	Buah	2	10.406.802
3.06.01.01.040	Power Supply Microphone	Buah	1	4.987.293
3.06.01.01.056	Battery Charger (Peralatan Studio Audio)	Buah	2	357.948
3.06.01.01.060	Power Amplifier	Buah	1	4.424.451
3.06.02.01.003	Pesawat Telephone	Buah	39	8.404.947
3.10.01.02.001	P.C Unit	Buah	72	1.152.073.635
3.10.01.02.003	Note Book	Buah	180	2.316.769.450
3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	106	536.091.442
3.10.02.03.007	External	Buah	41	63.496.900
Jumlah				5.326.402.767

- Transfer Keluar sebesar Rp9.503.229.096,00 merupakan transfer dari Arsip Nasional Republik Indonesia ke Pusat Pendidikan dan Pelatihan ANRI Bogor berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor BA.04/BU/VIII/2020 Tanggal 31 Agustus 2020. Rincian Transfer Keluar disajikan sebagaimana rincian Transfer Masuk sebelumnya.

Pengungkapan Lainnya:

Perolehan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin dalam rangka

penangaan COVID-19 disajikan dalam lampiran Daftar Aset Tetap COVID-19 yang menjadi bagian tidak terpisah dari segmen CaLK Neraca ini.

Gedung dan Bangunan
Rp365.362.212.486,00

C.14 Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah Rp365.362.212.486,00 dan Rp364.584.089.636,00. Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019	47 Unit	Rp	364.584.089.636,00
Mutasi tambah:	20 Unit	Rp	9.066.070.850,00
Pembelian	Rp	49.341.380,00	
Transfer Masuk	Rp	8.287.948.000,00	
Pengembangan dengan Nilai Aset	Rp	389.013.670,00	
Hibah (Masuk)	Rp	161.028.800,00	
Koreksi Barang Berlebih Hasil Inventarisasi	Rp	178.739.000,00	
Mutasi kurang:	13 Unit	Rp	8.287.948.000,00
Transfer Keluar	Rp	8.287.948.000,00	
Saldo per 31 Desember 2020	54 Unit	Rp	365.362.212.486,00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2020		Rp	(44.859.747.200,00)
Nilai Buku per 31 Desember 2020		Rp	320.502.465.286,00

Saldo awal Gedung dan Bangunan per 01 Januari 2020 adalah sebanyak 47 unit (intrakomptabel) atau senilai Rp364.584.089.636,00. Pada Tahun Anggaran 2020 terdapat mutasi tambah sebanyak 20 unit atau senilai Rp9.125.275.750,00 dan mutasi kurang sebanyak 13 unit atau senilai Rp8.347.152.900,00 sehingga saldo Gedung dan Bangunan ANRI pada Tahun Anggaran 2020 sebanyak 54 unit atau senilai Rp365.362.212.486,00.

Mutasi tambah Gedung dan Bangunan sebanyak 20 unit (intrakomptabel) atau senilai Rp9.066.070.850,00 berasal dari :

- Pembelian Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp49.341.380,00 merupakan pembuatan 1 unit pos jaga belakang dengan kode 4.01.01.13.001 yang telah diperbaiki dengan NUP 6 sesuai SP2D No. 201391304020896 tanggal 09 Juli 2020 dan SPM No. 756 tanggal 07 Juli 2020, hal ini berdasarkan notulen rapat tanggal 10 Februari 2020 tentang Pembahasan Pencatatan Belanja Pemeliharaan.

- Transaksi Transfer Masuk sebesar Rp8.287.948.000,00 yang merupakan transfer dari Arsip Nasional Republik Indonesia ke Pusat Pendidikan dan Pelatihan ANRI, Bogor dengan NUP terlampir. Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor BA.04/BU/VIII/2020 Tanggal 31 Agustus 2020.

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SATUAN	INTRAKOMPABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5
133111	GEDUNG DAN BANGUNAN		13	8.287.948.000
4.01.01.10.001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	Unit	12	7.956.024.000
4.04.01.04.001	Pagar Permanen	Unit	1	331.924.000
Jumlah				8.287.948.000

- Transaksi Pengembangan Nilai Aset sebesar Rp389.013.670,00 yang merupakan pengembangan langsung yang digunakan untuk penanganan pandemi *Covid-19* berupa:
 - (a) Perbaikan ruangan *Crisis Center* dengan kodefikasi 4010101001 untuk NUP 12 SP2D No. 201391304046807 Tgl. 17/12/2020 senilai Rp16.678.200,00 dan SP2D No. 201391303054747 Tgl. 17/12/2020 senilai Rp48.662.570,00;
 - (b) Pekerjaan pemasangan atap Pos I *Crisis Center* di lingkungan ANRI dengan kodefikasi 40110113001 untuk NUP 2 SP2D No. 201391304043926 Tgl. 10/12/2020 senilai Rp126.520.900,00; dan
 - (c) Pekerjaan revitalisasi selasar penghubung dari Gedung G ke C dan O dengan kodefikasi 4010101001 untuk NUP 9 SP2D No. 201391303007359 Tgl. 06/03/2020 senilai Rp197.152.000,00. Nilai tersebut merupakan koreksi atas kesepakatan bersama usulan jurnal koreksi BPK-RI berupa Koreksi atas Kapitalisasi Aset dari Belanja Pemeliharaan dalam rangka Revitalisasi Selasar di Satker ANRI Jakarta. Koreksi tersebut berdampak pada perubahan nilai Pengembangan Aset Gedung dan Bangunan dalam LKKL ANRI TA.

2020 (*Unaudited*) dari semula sebesar Rp191.861.670,00 menjadi Rp389.013.670,00 atau terjadi kenaikan sebesar Rp197.152.000,00.

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SATUAN	INTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5
133111	GEDUNG DAN BANGUNAN		0	389.013.670
4.01.01.01.001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Unit	0	262.492.770
4.01.01.13.001	Gedung Pos Jaga Permanen	Unit	0	126.520.900
Jumlah				389.013.670

- Transaksi Hibah (masuk) sebesar Rp161.028.800,00 yang merupakan Hibah (masuk) ke Arsip Nasional Republik Indonesia dari Pemerintah Provinsi Riau berupa Gedung dan Bangunan sebanyak 7 unit di Jalan Adi Sucipto Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Siak Hulu, Kab. Kampar, Riau dengan NUP terlampir. Berdasarkan surat perjanjian hibah nomor 221/BA/2020 dan BA.16A/BU/VII/2020 Tanggal 06 Juli 2020 dengan nomor register 24SMNH3A.

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SATUAN	INTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5
133111	GEDUNG DAN BANGUNAN		3	161.028.800
4.01.01.01.001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Unit	2	101.228.800
4.01.01.06.010	Bangunan Klinik/Puskesmas	Unit	0	0
4.01.01.08.001	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	Unit	0	0
4.01.02.05.001	Asrama Permanen	Unit	1	59.800.000
Jumlah				161.028.800

Terdapat Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas sebesar Rp59.204.900,00 yang merupakan koreksi atas kesepakatan bersama usulan jurnal koreksi BPK-RI berupa Koreksi atas Aset Ekstrakomptabel Gedung dan Bangunan yang berasal dari Hibah (masuk) Pemerintah Provinsi Riau dengan nilai semula sebesar Rp220.233.700,00 menjadi sebesar Rp161.028.800,00.

- Transaksi Koreksi Barang Berlebih Hasil Inventarisasi sebesar Rp178.739.000,00 yang merupakan hasil koreksi revaluasi untuk Gardu Induk dengan kodefikasi barang 4010104999 NUP 2 dan Pos Jaga sebanyak 2 unit dengan kodefikasi barang 4010113001 NUP 4 dan 5 sesuai dengan Laporan Hasil Inventaris dan Penilaian Nomor LHP-038/WKN.07.KNL.05/2020 Tanggal 26 November 2020.

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SATUAN	INTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5
133111	GEDUNG DAN BANGUNAN		3	178.739.000
4.01.01.04.999	Bangunan Gedung Instalasi Lainnya		1	71.551.000
4.01.01.13.001	Gedung Pos Jaga Permanen	Unit	2	107.188.000
Jumlah				178.739.000

Mutasi kurang sebanyak 13 unit (intrakomptabel) atau senilai Rp8.287.948.000,00 berasal dari :

- Transaksi Transfer Keluar sebesar Rp8.287.948.000,00 yang merupakan transaksi Transfer Keluar dari Arsip Nasional Republik Indonesia ke Pusat Pendidikan dan Pelatihan ANRI Bogor berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor BA.04/BU/VIII/2020 Tanggal 31 Agustus 2020.

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SATUAN	INTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5
133111	GEDUNG DAN BANGUNAN		13	8.287.948.000
4.01.01.10.001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	Unit	12	7.956.024.000
4.01.01.13.001	Pagar Permanen	Unit	1	331.924.000
Jumlah				8.287.948.000

Berikut rincian Gedung dan Bangunan ANRI (6 unit ekstrakomptabel dan 54 intrakomptabel) :

No.	Nama Gedung dan Bangunan	Alamat	Lokasi	Nilai Perolehan (Rp)
INTRAKOMPTABEL				
1	Gedung Utama Gajah Mada	JL. Gajah Mada	Jakarta	3.478.646.000
2	Gedung Depo Gajah Mada	JL. Gajah Mada	Jakarta	3.125.166.000
3	Gedung E	JL. Ampera Raya	Jakarta	11.804.508.000
4	Gedung A	JL. Ampera Raya	Jakarta	10.938.073.000
5	Gedung B	JL. Ampera Raya	Jakarta	6.512.921.000
6	Gedung D	JL. Ampera Raya	Jakarta	5.195.532.000
7	Gedung J	JL. Ampera Raya	Jakarta	380.780.000
8	Gedung F	JL. Ampera Raya	Jakarta	23.136.716.000
9	Gedung G	JL. Ampera Raya	Jakarta	45.146.799.000
10	Gedung C	JL. Ampera Raya	Jakarta	47.777.626.000
11	Gedung O	JL. Ampera Raya	Jakarta	39.515.175.750
12	Gedung I	JL. Ampera Raya	Jakarta	2.135.848.770
13	Selasar Penghubung Gd. O dan Gd. F	JL. Ampera Raya	Jakarta	48.360.000
14	Selasar Penghubung	JL. Ampera Raya	Jakarta	140.244.000
15	Gedung Inventaris	JL. Ampera Raya	Jakarta	1.453.711.000
16	Gedung P	JL. Ampera Raya	Jakarta	24.597.024.600
17	Gedung Gajah Mada (Revaluasi)	JL. Gajah Mada	Jakarta	256.549.000
18	Gedung Gajah Mada (Revaluasi)	JL. Gajah Mada	Jakarta	249.637.000
19	Gedung Gajah Mada (Revaluasi)	JL. Gajah Mada	Jakarta	3.314.664.000
20	Gedung Buncit KPK	JL. Warung Buncit Raya	Jakarta	24.737.064.000
21	Gedung H	JL. Ampera Raya	Jakarta	1.562.853.000
22	Gedung Kantor Riau	JL. Adi Sucipto	Riau	54.313.800
23	Gedung Kantor Riau	JL. Adi Sucipto	Riau	46.915.000
24	Gardu Induk (Revaluasi)	JL. Ampera Raya	Jakarta	71.551.000
25	Pos Jaga (Revaluasi)	JL. Ampera Raya	Jakarta	14.677.000
26	Pos Jaga (Revaluasi)	JL. Ampera Raya	Jakarta	92.511.000
27	Asrama Permanen	JL. Adi Sucipto	Riau	59.800.000
28	Pos Jaga	JL. Ampera Raya	Jakarta	97.412.000
29	Pos Jaga Rumah Negara	JL. Ampera Raya	Jakarta	133.095.900
30	Gedung Parkir/pool permanen	JL. Ampera Raya	Jakarta	418.613.000
31	Gapura Kanan	JL. Ampera Raya	Jakarta	215.704.000
32	Gapura Kiri	JL. Ampera Raya	Jakarta	212.978.000
33	Rumah Dinas Kepala ANRI	JL. Ampera Raya	Jakarta	704.919.000
34	Rumah Dinas Deputi Pembinaan	JL. Ampera Raya	Jakarta	504.868.000
35	Rumah Dinas Deputi Konservasi	JL. Ampera Raya	Jakarta	484.553.500
36	Gedung Arsip Kepresidenan	JL. Gajah Mada	Jakarta	36.566.960.873
37	Pagar (koreksi Reval)	JL. Gajah Mada	Jakarta	758.629.000
38	Bangunan Gedung Kantor Permanen	JL.T.Nyak Arief No.122	Banda Aceh	9.192.984.000
39	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Jl. Inspeksi Kr. Aceh	Aceh Besar	50.869.613.913
40	Pagar Semi Permanen	Jl. Inspeksi Kr. Aceh	Aceh Besar	1.016.926.000
41	Gedung Kelas Utama Pusdiklat	JL. Ir.H.Juanda	Bogor	527.113.000
42	Gedung Laboratorium Pusdiklat	JL. Ir.H.Juanda	Bogor	433.074.000
43	Kantor Pusdiklat	JL. Ir.H.Juanda	Bogor	425.822.000
44	Asrama 1 Pusdiklat	JL. Ir.H.Juanda	Bogor	1.295.545.000
45	Ground Reservoir Pusdiklat	JL. Ir.H.Juanda	Bogor	103.658.000
46	WC Pusdiklat	JL. Ir.H.Juanda	Bogor	45.249.000

47	Asrama 2 Pusklat	JL. Ir.H.Juanda	Bogor	1.716.036.000
48	Wisma Janus Pusklat	JL. Ir.H.Juanda	Bogor	516.188.000
49	Pos Jaga	JL. Ir.H.Juanda	Bogor	6.955.000
50	Pos Jaga	JL. Ir.H.Juanda	Bogor	96.398.000
51	Hydrant Pusklat	JL. Ir.H.Juanda	Bogor	17.108.000
52	Gedung Kantor Pusklat	JL. Ir.H.Juanda	Bogor	2.772.878.000
53	Pagar Pusklat	JL. Ir.H.Juanda	Bogor	331.924.000
54	Gedung Pos Jaga Permanen (Belakang)	JL. Ampera Raya	Jakarta	49.341.380
Total				365.362.212.486
EKSTRAKOMPTABEL				
1	Gedung Kantor Riau	JL. Adi Sucipto	Riau	23.667.400
2	Gedung Kantor Riau	JL. Adi Sucipto	Riau	23.659.500
3	Poliklinik Riau	JL. Adi Sucipto	Riau	6.293.000
4	Mushola Riau	JL. Adi Sucipto	Riau	5.585.000
5	Bangunan Genset Gajah Mada	JL. Gajah Mada	Jakarta	2.714.000
6	Bangunan Pos Jaga Darurat	JL. Gajah Mada	Jakarta	3.202.000
Total				65.120.900
Total (Intrakomptabel & Ekstrakomptabel)				365.427.333.386

Pengungkapan Lainnya:

Perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan dalam rangka penanganan COVID-19 disajikan dalam lampiran Daftar Aset Tetap COVID-19 yang menjadi bagian tidak terpisah dari segmen CaLK Neraca ini.

Jalan, Irigasi dan Jaringan
Rp62.881.974.526,00

C.15 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp62.881.974.526,00 dan Rp62.881.974.526,00. Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019	4.064 m²	Rp	62.881.974.526,00
Mutasi tambah:	1.580 m²	Rp	1.638.814.530,00
Transfer Masuk (Jalan)	Rp	256.618.000,00	
Transfer Masuk (Jaringan)	Rp	1.382.196.530,00	
Mutasi kurang:	1.580 m²	Rp	1.638.814.530,00
Transfer Keluar (Jalan)	Rp	256.618.000,00	
Transfer Keluar (Jaringan)	Rp	1.382.196.530,00	
Saldo per 31 Desember 2020	4.064 m²	Rp	62.881.974.526,00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2020		Rp	(33.793.519.833,00)
Nilai Buku per 31 Desember 2020		Rp	29.088.454.693,00

Saldo awal Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 01 Januari 2020 sebesar 4.064 m² atau senilai Rp62.881.974.526,00. Pada Tahun Anggaran 2020 terdapat mutasi tambah sebesar Rp1.638.814.530,00 (intrakomptabel) dan mutasi kurang sebesar Rp1.638.814.530,00 (intrakomptabel) sehingga saldo per 31 Desember 2020 adalah sebesar 4.064 m² atau senilai Rp 62.881.974.526,00.

Mutasi tambah tersebut berasal dari :

- Transaksi Transfer Masuk (Jalan) berupa Jalan Khusus Komplek seluas 1.580 m² dengan kode 5.01.01.09.002 sebesar Rp256.618.000,00 yang merupakan transfer ke Pusat Pendidikan dan Pelatihan ANRI dari Arsip Nasional Republik Indonesia berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor BA.04/BU/VIII/2020 Tanggal 31 Agustus 2020;
- Transaksi Transfer Masuk (Jaringan) sebesar Rp1.382.196.530,00 yang merupakan transfer ke Pusat Pendidikan dan Pelatihan ANRI dari Arsip Nasional Republik Indonesia berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor BA.04/BU/VIII/2020 Tanggal 31 Agustus 2020.

Berikut daftar rincian Transfer Masuk yang terjadi :

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SATUAN	INTRAKOMPABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5
134113	JARINGAN		4	1,382,196,530
5.03.01.02.003	Instalasi Air Sumber / Mata Air Kapasitas Besar	Unit	1	454,684,340
5.04.02.01.002	Jaringan Transmisi Tegangan 100 S/D 300 KVA	Unit	1	664,544,575
5.04.02.99.999	Jaringan Listrik Lainnya		1	218,417,615
5.04.03.01.002	Jaringan Telepon Diatas Tanah Kapasitas Sedang	Unit	1	44,550,000
JUMLAH NILAI			4	1.382.196.530

Mutasi kurang tersebut berasal dari :

- Transaksi Transfer Keluar (Jalan) berupa Jalan Khusus Komplek seluas 1.580 m² dengan kode 5.01.01.09.002 sebesar Rp256.618.000,00 yang merupakan transfer dari Arsip Nasional Republik Indonesia ke Pusat Pendidikan dan Pelatihan ANRI berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor BA.04/BU/VIII/2020 Tanggal 31 Agustus 2020;
- Transaksi Transfer Keluar (Jaringan) sebesar Rp1.382.196.530,00 yang merupakan transfer dari Arsip Nasional Republik Indonesia ke Pusat Pendidikan dan Pelatihan ANRI berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor BA.04/BU/VIII/2020 Tanggal 31 Agustus 2020. Rincian Transfer Keluar disajikan sebagaimana rincian Transfer Masuk sebelumnya.

Aset Tetap Lainnya

Rp26.865.394.160,00

C.16 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah Rp26.865.394.160,00 dan Rp26.865.394.160,00. Mutasi Aset Tetap Lainnya adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019	2.847 Unit	Rp	26.865.394.160,00
Mutasi tambah:	1 Unit	Rp	19.863.100,00
Transfer Masuk	Rp	19.863.100,00	
Hibah	Rp	-	
Mutasi kurang:	1 Unit	Rp	19.863.100,00
Transfer Keluar	Rp	19.863.100,00	
Saldo per 31 Desember 2020	2.847 Unit	Rp	26.865.394.160,00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2020		Rp	(60.483.100,00)
Nilai Buku per 31 Desember 2020		Rp	26.804.911.060,00

Saldo awal Aset Tetap Lainnya per 01 Januari 2020 sebanyak 2.847 unit (intrakomptabel) atau sebesar Rp26.865.394.160,00. Pada Tahun Anggaran 2020 terdapat mutasi tambah sebanyak 1 unit atau sebesar Rp19.863.100,00 (intrakomptabel) dan mutasi kurang sebanyak 1 unit sebesar Rp19.863.100,00 (intrakomptabel) sehingga Saldo Aset Tetap Lainnya pada Arsip Nasional Republik Indonesia per 31 Desember 2020 adalah sebanyak 2.847 unit atau sebesar Rp26.865.394.160,00.

Mutasi tambah berasal dari transaksi Transfer Masuk berupa alat musik modern/band senilai Rp19.863.100,00 (kodefikasi 6.02.01.01.002) ke Pusat Pendidikan dan Pelatihan ANRI Bogor dari Arsip Nasional Republik Indonesia berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor BA.04/BU/VIII/2020 Tanggal 31 Agustus 2020.

Mutasi kurang berasal dari transaksi Transfer Keluar berupa alat musik modern/band senilai Rp19.863.100,00 (kodefikasi 6.02.01.01.002) dari Arsip Nasional Republik Indonesia ke Pusat Pendidikan dan Pelatihan ANRI Bogor berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor BA.04/BU/VIII/2020 Tanggal 31 Agustus 2020.

*Konstruksi Dalam
Pengerjaan
Rp0,00*

C.17 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019		0 Unit	Rp	-
Mutasi tambah:		0 Unit	Rp	-
Perolehan/Penambahan	Rp	-		
Mutasi kurang:		0 Unit	Rp	-
Aset Definitif	Rp	-		
Saldo per 30 September 2020		0 Unit	Rp	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 September 2020			Rp	-
Nilai Buku per 30 September 2020			Rp	-

Saldo awal Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 01 Januari 2020 sebanyak 0 unit atau Rp0,00. Pada Tahun Anggaran 2020 tidak terdapat mutasi tambah maupun mutasi kurang sehingga saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) ANRI per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp0,00.

*Akumulasi Penyusutan
Aset Tetap
Rp268.575.206.454,00*

C.18 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp268.575.206.454,00 dan sebesar Rp239.264.549.709,00. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 :

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	219.324.401.371,00	189.861.456.321,00	29.462.945.050,00
2	Gedung dan Bangunan	365.362.212.486,00	44.859.747.200,00	320.502.465.286,00
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	62.881.974.526,00	33.793.519.833,00	29.088.454.693,00
	Jalan dan Jembatan	52.918.334.000,00	28.403.977.651,00	24.514.356.349,00
	Irigasi	158.137.000,00	20.289.206,00	137.847.794,00
	Jaringan	9.805.503.526,00	5.369.252.976,00	4.436.250.550,00
4	Aset Tetap Lainnya	26.865.394.160,00	60.483.100,00	26.804.911.060,00
	Total	674.433.982.543,00	268.575.206.454,00	405.858.776.089,00

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020 terdapat penambahan penyusutan Aset Tetap senilai Rp34.792.810.178,00 dan

pengurangan akibat koreksi nilai sebesar Rp5.482.153.433,00 sebagaimana dijelaskan sebagai berikut :

No	Aset Tetap	Akumulasi Penyusutan Awal (Rp)	Penyusutan Tahun 2020 (Rp)	Koreksi Nilai (Rp)	Penghentian Aset dari Penggunaan (Rp)	Transfer Masuk (Rp)	Transfer Keluar (Rp)	Akumulasi Penyusutan Akhir (Rp)
1	Peralatan & Mesin	182.723.430.638,00	12.839.282.990,00	(5.701.257.307,00)	-	-	-	189.861.456.321,00
2	Gedung & Bangunan	30.986.612.256,00	13.718.691.648,00	154.443.296,00	0	-	-	44.859.747.200,00
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	25.494.023.715,00	8.234.835.540,00	64.660.578,00	-	-	-	33.793.519.833,00
	Jalan & Jembatan	20.313.147.363,00	8.048.060.622,00	42.769.666,00	-	-	-	28.403.977.651,00
	Irigasi	14.492.290,00	5.796.916,00	-	-	-	-	20.289.206,00
	Jaringan	5.166.384.062,00	180.978.002,00	21.890.912,00	-	-	-	5.369.252.976,00
4	Aset Tetap Lainnya	60.483.100,00	-	-	-	-	-	60.483.100,00
	Jumlah	239.264.549.709,00	34.792.810.178,00	(5.482.153.433,00)	-	-	-	268.575.206.454,00

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

- Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp189.861.456.321,00 memiliki nilai rincian :

No	Kelompok Barang	AK Penyusutan Awal	Beban Penyusutan	Koreksi	AK Penyusutan Akhir
		(Rupiah)	(buah)	(Rupiah)	(Rupiah)
Barang Intrakomptable		182.723.430.638	12.839.282.990	(5.701.257.307)	189.861.456.321
132111	Peralatan dan Mesin				
3.01.03	Alat Bantu	7.489.206.229	133.986.398	-	7.623.192.627
3.02.01	Alat Angkutan Darat Bermotor	14.295.524.332	670.790.843	(466.000.000)	14.500.315.175
3.02.02	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	94.048.826	1.947.500	-	95.996.326
3.02.05	Alat Angkutan Bermotor Udara	416.475	1.507.950	-	1.924.425
3.03.01	Alat Bengkel Bermesin	25.829.733	11.683.925	-	37.513.658
3.03.02	Alat Bengkel Tak Bermesin	157.170.887	27.960.078	-	185.130.965
3.03.03	Alat Ukur	524.075.850	32.935.600	-	557.011.450
3.04.01	Alat Pengolahan	24.837.894	6.762.681	-	31.600.575
3.05.01	Alat Kantor	49.037.766.949	2.175.584.589	(676.689.929)	50.536.661.609
3.05.02	Alat Rumah Tangga	30.918.622.774	1.737.359.493	(473.327.102)	32.182.655.165
3.06.01	Alat Studio	20.220.362.539	892.023.545	(37.128.764)	21.075.257.320
3.06.02	Alat Komunikasi	686.776.460	32.109.600	(8.404.947)	710.481.113
3.06.03	Peralatan Pemancar	6.038.742.467	145.982.780	-	6.184.725.247
3.07.01	Alat Kedokteran	200.973.301	71.658.040	-	272.631.341
3.08.01	Unit Alat Laboratorium	2.351.888.183	143.586.758	-	2.495.474.941
3.08.02	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	35.585.162	4.937.668	-	40.522.830
3.08.03	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	7.461.806.616	650.935.158	-	8.112.741.774
3.08.04	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	-	3.375.000	-	3.375.000
3.08.06	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	41.597.714	35.650.557	-	77.248.271
3.08.07	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	494.629.110	45.508.910	-	540.138.020
3.08.08	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi & Instrumentasi	20.545.500	29.941.300	-	50.486.800
3.09.01	Senjata Api	1.444.800.000	-	-	1.444.800.000
3.09.02	Persenjataan Non Senjata Api	14.120.000	1.350.000	-	15.470.000
3.09.04	Alat Khusus Kepolisian	321.460.138	21.180.300	-	342.640.438
3.10.01	Komputer Unit	13.935.580.577	1.692.284.619	(3.444.561.535)	12.183.303.661
3.10.02	Peralatan Komputer	25.911.455.921	4.034.330.007	(598.161.592)	29.347.624.336
3.11.01	Alat Eksplorasi Topografi	5.205.000	1.640.000	-	6.845.000
3.11.02	Alat Eksplorasi Geofisika	7.540.000	3.415.000	1.765.000	12.720.000
3.15.01	Alat Deteksi	32.520.000	-	-	32.520.000
3.15.02	Alat Pelindung	21.252.000	6.072.000	-	27.324.000
3.15.03	Alat Sarung	14.000.000	-	-	14.000.000
3.15.04	Alat Kerja Penerbangan	522.248.805	179.623.387	-	701.872.192
3.17.01	Unit Peralatan Proses/Produksi	248.030.346	37.537.470	1.251.562	286.819.378
3.19.01	Peralatan Olah Raga	124.810.850	5.621.834	-	130.432.684
	Total	182.723.430.638	12.839.282.990	(5.701.257.307)	189.861.456.321

- Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp44.859.747.200,00 memiliki nilai rincian :

No	Kelompok Barang	AK Penyusutan Awal	Beban Penyusutan	Koreksi	AK Penyusutan Akhir
		(Rupiah)	(buah)	(Rupiah)	(Rupiah)
Barang Intrakomptable		30.986.612.256	13.718.691.648	154.443.296	44.859.747.200
4.01.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	30.377.065.146	13.486.361.688	150.491.820	44.013.918.654
4.01.02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	445.879.080	178.949.632	-	624.828.712
4.04.01	Tugu/Tanda Batas	163.668.030	53.380.328	3.951.476	220.999.834
Total		30.986.612.256	13.718.691.648	154.443.296	44.859.747.200

Telah dilakukan koreksi hasil kesepakatan bersama (Tripartit) atas usulan jurnal koreksi BPK-RI yang menambah nilai Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan berupa Koreksi atas Kapitalisasi Aset dari Belanja Pemeliharaan dalam rangka Revitalisasi Selasar di Satker ANRI Jakarta sebesar Rp8.961.456,00; Koreksi atas Penyusutan Gedung dan Bangunan (Intrakomptabel) yang berasal dari Hibah Pemerintah Provinsi Riau sebesar Rp1.610.288,00; Koreksi atas Rekalkulasi Revaluasi pada Satker ANRI Jakarta sebesar Rp37.237.295,00; dan yang mengurangi nilai Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan berupa Koreksi atas Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan yang berasal dari Hibah Pemerintah Provinsi Riau senilai Rp220.233.700,00.

Koreksi tersebut berdampak pada perubahan nilai Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan secara keseluruhan dalam LKKL ANRI TA. 2020 (*Unaudited*) dari semula sebesar Rp45.032.171.861,00 menjadi Rp44.859.747.200,00 atau terjadi penurunan sebesar Rp172.424.661,00.

- Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp33.793.519.833,00 memiliki nilai rincian :

No	Kelompok Barang	AK Penyusutan Awal	Beban Penyusutan	Koreksi	AK Penyusutan Akhir
		(Rupiah)	(buah)	(Rupiah)	(Rupiah)
Barang Intrakomptable		25.494.023.715	8.234.835.540	64.660.578	33.793.519.833
137311	Akumulasi Penyusutan Jalan	20.313.147.363	8.048.060.622	42.769.666	28.403.977.651
5.01.01	Jalan	20.313.147.363	8.048.060.622	42.769.666	28.403.977.651
137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	14.492.290	5.796.916	-	20.289.206
5.02.05	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Tanah	730.555	292.222	-	1.022.777
5.02.06	Bangunan Air Bersih/Air Baku	13.578.750	5.431.500	-	19.010.250
5.02.07	Bangunan Air Kotor	182.985	73.194	-	256.179

137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	5.166.384.062	180.978.002	21.890.912	5.369.252.976
5.03.01	Instalasi Air Bersih/Air Baku	240.026.941	9.592.697	7.578.072	257.197.710
5.03.05	Instalasi Pembangkit Listrik	541.860.000	72.248.000	-	614.108.000
5.03.06	Instalasi Gardu Listrik	1.143.329.307	17.197.053	-	1.160.526.360
5.03.09	Instalasi Pengaman	28.165.750	2.437.500	-	30.603.250
5.03.10	Instalasi Lain	2.287.748.984	-	-	2.287.748.984
5.04.02	Jaringan Listrik	670.225.463	53.612.058	12.680.620	736.518.141
5.04.03	Jaringan Telepon	255.027.617	25.890.694	1.632.220	282.550.531
	Total	25.494.023.715	8.234.835.540	64.660.578	33.793.519.833

- Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp60.483.100,00 memiliki nilai rincian :

No	Uraian	AK Penyusutan Awal	Beban Penyusutan	AK Penyusutan Periode ini	AK Penyusutan Akhir
		(Rupiah)	(buah)	(Rupiah)	(Rupiah)
	Aset Tetap Lainnya	60.483.100	-	-	60.483.100
6.02.01	Barang Bercorak Kesenian	60.483.100	-	-	60.483.100
	Total	60.483.100	-	-	60.483.100

Aset Tak Berwujud
Rp16.541.087.383,00

C.19 Aset Tak Berwujud

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah Rp16.541.087.383,00 dan Rp15.970.656.383,00 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Software Komputer	16.541.087.383,00
2	ATB Lainnya	0,00
Jumlah Nilai Perolehan per 31 Desember 2020		16.541.087.383,00

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Adapun mutasi Aset Tak Berwujud pada Arsip Nasional RI adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019	468 Unit	Rp 15.970.656.383,00
Mutasi tambah:	10 Unit	Rp 570.431.000,00
Pembelian	Rp 525.435.500,00	
Penyelesaian Dengan KDP	Rp -	
Pengembangan Nilai Aset	Rp 44.995.500,00	
Mutasi kurang:	0 Unit	Rp -
Penghentian aset dari penggunaan	Rp -	
Koreksi Pencatatan	Rp -	
Saldo per 31 Desember 2020	478 Unit	Rp 16.541.087.383,00
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2020		Rp (11.883.626.778,00)
Nilai Buku per 31 Desember 2020		Rp 4.657.460.605,00

Saldo awal Aset Tak Berwujud per 01 Januari 2020 sebanyak 468 unit atau sebesar Rp15.970.656.383. Pada Tahun Anggaran 2020 terdapat mutasi

tambah sebanyak 10 unit atau sebesar Rp570.431.000,00 dan tidak terdapat mutasi kurang sehingga saldo Aset Tak Berwujud pada Tahun Anggaran sebanyak 478 unit atau senilai Rp16.541.087.383,00.

Mutasi tambah sebesar Rp570.431.000,00 berasal dari :

- Pembelian *software* (kode akun 162151) dengan uraian bidang Aset Tak Berwujud (kode bidang 801) sebanyak 10 unit atau sebesar Rp525.435.500,00 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Software	NUP	SP2D	Tanggal	Nilai
1	Aplikasi Catatan Kinerja Pegawai	973	201391302020128	16/07/2020	49.350.000
2	Aplikasi Sistem Informasi Penyelamatan Arsip Negara (Simpan)	974	201391302029812	06/10/2020	40.128.000
3	Aplikasi Survei Mandiri	975	201391303043017	11/11/2020	24.250.000
4	Aplikasi Whistle Blowing System	976	201391304037381	11/11/2020	14.500.000
5	Aplikasi Pengukur Suhu Dan Kelembaban Jarak Jauh	977	201391303042948	11/11/2020	29.470.000
6	Aplikasi Arsip Inaktif Untuk Bast Aceh	978	201391302035192	13/11/2020	49.500.000
7	Aplikasi Jra Online	979	201391302037889	02/12/2020	24.250.000
8	Aplikasi Dashboard Kearsipan Nasional	980	201391302037830	02/12/2020	99.400.000
9	Aplikasi Pengawasan Kearsipan	981	201391302039599	10/12/2020	120.587.500
10	Aplikasi Monitoring Kesehatan	982	201391302043264	16/12/2020	74.000.000
Total					525.435.500

- Pengembangan nilai aset *software* berupa aplikasi e-Pengolahan senilai Rp44.995.500,00 dengan NUP 762 SP2D No. 201391303035089 Tanggal 18/09/2020.

Aset Lain-Lain

Rp10.678.350.353,00

C.20 Aset Lain-Lain

Aset Lain-lain untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah Rp10.678.350.353,00 dan Rp5.719.311.911,00. Aset Lain-lain berupa Barang Milik Negara (BMN) yang tidak digunakan dalam operasional Pemerintahan. Adapun mutasi aset lain-lain aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019	14 Unit	Rp	5.719.311.911,00
Mutasi tambah :	840 Unit	Rp	5.792.402.767,00
Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya -1	Rp	466.000.000,00	
Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya -2	Rp	5.326.402.767,00	
Koreksi perubahan kondisi	Rp	-	
Mutasi kurang :	11 Unit	Rp	833.364.325,00
Penghapusan (BMN yang dihentikan)	Rp	833.364.325,00	
Saldo per 31 Desember 2020	843 Unit	Rp	10.678.350.353,00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2020		Rp	(10.629.090.587,00)
Nilai Buku per 31 Desember 2020		Rp	49.259.766,00

Terdapat mutasi tambah 840 unit (intrakomptabel) BMN yang dihentikan penggunaannya dari operasional pemerintah senilai sebesar Rp5.792.402.767,00 berasal dari :

- Transaksi Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya sebesar Rp466.000.000,00 yang merupakan penghentian penggunaan aktif BMN dengan kodefikasi 3020101001 NUP 4 berdasarkan Berita Acara Penetapan Kondisi BMN dan Penghentian Penggunaan Operasional Pemerintah Nomor BA-10/BU/V/2020 Tanggal 5 Mei 2020.
- Transaksi Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya sebesar Rp5.326.402.767,00 yang merupakan penghentian penggunaan aktif BMN berdasarkan Berita Acara Penetapan Kondisi BMN dan Penghentian Penggunaan Operasional Pemerintah Nomor BA-15/BU/XI/2020 Tanggal 13 November 2020. Daftar reklasifikasi telah terlampir sebelumnya pada pos Peralatan dan Mesin bagian mutasi kurang.

Terdapat mutasi kurang 11 unit (intrakomptabel) BMN yang dihentikan penggunaannya dari operasional pemerintah senilai Rp833.364.325,00 dengan rincian sebagai berikut :

- Transaksi penghapusan sebesar Rp523.850.000,00 berupa penghapusan mobil kendaraan perorangan dinas dengan tindak lanjut penjualan tanpa melalui lelang, dengan kodefikasi 3020101001 NUP 6. Hal ini berdasarkan Kepka ANRI Nomor 184 Tahun 2020 Tanggal 22 Juni 2020;
- Transaksi penghapusan sebesar Rp167.245.500,00 berupa

penghapusan mini bus (penumpang 14 orang ke bawah) sebanyak 2 unit dengan kodefikasi barang 3020102003 NUP 11 dan 32 dengan tindak lanjut lelang berdasarkan Kepka ANRI Nomor 373 Tahun 2020 Tanggal 25 November 2020;

- Transaksi penghapusan sebesar Rp60.556.325,00 berupa sepeda motor sebanyak :
 - 2 (dua) unit dengan kodefikasi barang 3020104001 NUP 5 dan 22 dengan tindak lanjut lelang berdasarkan Kepka ANRI Nomor 373 Tahun 2020 Tanggal 25 November 2020; dan
 - 5 (lima) unit dengan kodefikasi barang 3020104001 NUP 3, 10, 21, 33, 42 dengan tindak lanjut lelang berdasarkan Kepka ANRI Nomor 386 Tahun 2020 Tanggal 15 Desember 2020
- Transaksi penghapusan sebesar Rp81.712.500,00 berupa *pick up* sebanyak 1 unit dengan kodefikasi barang 3020103002 NUP 3 dengan tindak lanjut lelang berdasarkan Kepka ANRI Nomor 386 Tahun 2020 Tanggal 15 Desember 2020.

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Rp22.512.717.365,00

C.21 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp22.512.717.365,00 dan Rp15.704.744.645,00. Rincian akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya adalah sebagai berikut :

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan (Rp)	Akm. Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
A	Aset Tak Berwujud			
1	<i>Software</i> Komputer	16.541.087.383,00	(11.883.626.778,00)	4.657.460.605,00
2	Aset Tak Berwujud Lainnya	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	16.541.087.383,00	(11.883.626.778,00)	4.657.460.605,00
B	Aset Lain-lain	10.678.350.353,00	(10.629.090.587,00)	49.259.766,00
	Jumlah	10.678.350.353,00	(10.629.090.587,00)	49.259.766,00
	Total	27.219.437.736,00	(22.512.717.365,00)	4.706.720.371,00

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2020 terdapat mutasi penambahan beban penyusutan (amortisasi) *Software* senilai Rp1.733.160.745,00 dan beban penyusutan Aset Lainnya senilai Rp8.209.961,00 dengan Koreksi senilai Rp5.066.602.014,00. Mutasi

perubahan penyusutan sebagai berikut :

No	Aset Lainnya	Akumulasi Penyusutan Awal (Rp)	Penyusutan Tahun 2020 (Rp)	Koreks (Rp)	Penghapusan BMN Yang Dihentikan (Rp)	Akumulasi Penyusutan Akhir (Rp)
1	Software Komputer	10.166.707.533,00	1.733.160.745,00	-	-	11.899.868.278,00
2	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	-	-	-	-	-
3	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	5.554.278.612,00	8.209.961,00	5.066.602.014,00	-	10.629.090.587,00
Jumlah		15.720.986.145,00	1.741.370.706,00	5.066.602.014,00	-	22.528.958.865,00

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

- Akumulasi Amortisasi Aset Aset Tak Berwujud (*Software*) sebesar Rp11.899.868.278,00 memiliki nilai rincian :

No.	Uraian	AK Penyusutan Awal (Rupiah)	Beban Penyusutan (buah)	Koreksi (Rupiah)	AK Penyusutan Akhir (Rupiah)
<i>Software</i>		10.166.707.533	1.733.160.745	-	11.899.868.278
8.01.01	Aset Tak Berwujud (Software)	10.166.707.533	1.733.160.745	-	11.899.868.278
Total		10.166.707.533	1.733.160.745	-	11.899.868.278

Catatan :

Hasil akumulasi tersebut adalah hasil rekonsiliasi SIMAK dengan SAIBA, dikarenakan terdapat data tidak tepat yaitu amortisasi pada e-Rekon sebesar Rp16.241.500,00 dengan penjelasan dibawah ini :

- Penjelasan Saldo Tidak Normal pada *Software* satker BAST

Tahun 2017 :

Tidak terjadi penyusutan, nilai *software* masih sama dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp54.967.000,00 namun tidak terdeteksi pada saat proses rekonsiliasi.

Tahun 2019 :

Tidak terjadi penyusutan dan terjadi masalah pada saat proses rekonsiliasi semester II 2019 yaitu terdapat selisih angka pada akumulasi amortisasi aset lainnya antara aplikasi SAIBA dan eRekon sebesar Rp16.241.500,00, sedangkan data pada aplikasi SAIBA dan SIMAK tidak terdapat selisih angka. Oleh karena itu untuk menyesuaikan nilai yang selisih tersebut maka dilakukan jurnal

penyesuaian di SAIBA pada tanggal 1 Juli 2020, yang merupakan rekomendasi dari CSO KPPN Banda Aceh. Jurnal tersebut adalah :

169315 Akumulasi Amortisasi Software	Rp16.241.500
391121 Ekuitas Transaksi Lainnya	Rp16.241.500

Tahun 2020 :

Berdasarkan data hasil monitoring pada aplikasi e-Rekon terdapat saldo tidak normal pada beban amortisasi software sebesar Rp1.878.500,00 nilai tersebut muncul dikarenakan adanya selisih penyusutan amortisasi transaksional (SO3) dari NUP 1 sebesar Rp4.999.500,00 dan NUP 2 sebesar Rp3.121.250,00 (pada kedua aset tersebut tidak mendapatkan amortisasi sejak tahun 2017 s/d 2019). Kemudian dilakukan normalisasi atas NUP 1 dan NUP 2 yang berakibat selisih beban amortisasi sebesar Rp1.878.500,00 tidak lagi tercatat di dalam SIMAK pada tahun 2020. Agar diperoleh nilai yang baru maka SIMAK memproses reklasifikasi masuk NUP 3 dan NUP 4 dengan jumlah beban penyusutan yang baru. Nilai sebesar beban amortisasi Rp1.878.500,00 masih muncul dikarenakan NUP 1 belum dilakukan penghapusan dari aplikasi SIMAK pada tahun 2020.

- Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya (Aset Tetap yang Tidak Digunakan) sebesar Rp10.629.090.587,00 berasal dari :

No	Uraian	AK Penyusutan Awal	Beban Penyusutan	Koreksi	AK Penyusutan Akhir
		(Rupiah)	(buah)	(Rupiah)	(Rupiah)
Aset Lain-Lain		5.554.278.612	8.209.961	5.066.602.014	10.629.090.587
30201	Alat Angkutan Darat Bermotor	721.110.753	-	(255.110.753)	466.000.000,00
30202	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	-	-	-	-
30301	Alat Bengkel Bermesin	-	-	-	-
30302	Alat Bengkel Tak Bermesin	-	-	-	-
30501	Alat Kantor	385.048.980	-	695.538.417	1.080.587.397,00
30502	Alat Rumah Tangga	54.758.730	670.000	511.743.912	567.172.642,00
30601	Alat Studio	627.000.000	-	37.594.064	664.594.064,00
30602	Alat Komunikasi	-	-	8.404.947	8.404.947,00
30603	Peralatan Pemancar	-	-	-	-
30701	Alat Kedokteran	-	-	-	-
30801	Unit Alat Laboratorium	2.112.818.000	-	-	2.112.818.000,00
30802	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	-	-	-	-
31001	Komputer Unit	-	-	3.468.843.085	3.468.843.085,00
31002	Peralatan Komputer	1.583.968.876	-	599.588.342	2.183.557.218,00
31701	Unit Peralatan Proses/Produksi	-	-	-	-
50205	Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah	69.573.273	7.539.961	-	77.113.234,00
Total		5.554.278.612	8.209.961	5.066.602.014	10.629.090.587

*Utang kepada Pihak
Ketiga
Rp620.664.028,00*

C.22 Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing senilai Rp620.664.028,00 dan Rp781.858.417,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 bulan berupa tagihan listrik, air, dan telepon bulan Desember 2020.

*Hibah yang Belum
Disahkan Rp0,00*

C.23 Hibah yang Belum Disahkan

Hibah yang Belum Disahkan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00. Hibah langsung adalah Hibah yang diterima langsung oleh KL/SKPD tanpa melalui entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan (BUN/BUD). Untuk memastikan agar hibah berikut belanja yang bersumber dari hibah langsung tersebut dapat tercatat, maka dilakukan proses pengesahan pengakuan pendapatan hibah serta belanja yang bersumber dari hibah dimaksud. Proses pengesahan ini diajukan oleh K/L penerima kepada Kuasa BUN.

*Pendapatan Diterima di
Muka Rp96.591.516,00*

C.24 Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp96.591.516,00 dan Rp0,00. Pendapatan Diterima di Muka adalah pendapatan PNBPN yang telah diterima tetapi belum menjadi hak sepenuhnya karena masih melekat kewajiban untuk memberikan barang/jasa.

Pada Tahun Anggaran 2020 terdapat Perjanjian Sewa Barang Milik Negara (BMN) antara Arsip Nasional Republik Indonesia dengan PT. Putri Nilam Puspitasari Nomor: PL.02/24/2020 tanggal 12 Maret 2020 berupa sewa sebagian Tanah dan Bangunan Kantor Pemerintah di Jalan Gajah Mada Nomor 111 Jakarta Barat selama 2 (dua) tahun yang dihitung mulai bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Desember 2021 dengan nilai perjanjian

sebesar Rp193.183.032,00 dilakukan melalui mekanisme pembayaran sekaligus secara tunai setelah penandatanganan perjanjian.

Uang Muka dari KPPN

Rp0,00

C.25 Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp2.720.000,00. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran. Berikut rincian Uang Muka dari KPPN pada TA 2020 dan TA 2019 :

KODE SATKER	NAMA SATKER	2020 (Rp)	2019 (Rp)
087.01.020036	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat	-	-
087.01.030089	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah	-	-
087.01.040018	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah Provinsi Daerah Istimewa	-	-
087.01.050015	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur	-	-
087.01.060073	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh	-	-
087.01.070069	Dinas Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Provinsi Sumatera Utara	-	-
087.01.080026	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat	-	-
087.01.090084	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau	-	-
087.01.100023	Kantor Arsip Provinsi Jambi	-	-
087.01.110030	Kantor Arsip Daerah Provinsi Sumatera Selatan	-	-
087.01.120030	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung	-	-
087.01.130077	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat	-	-
087.01.140087	Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah	-	-
087.01.150086	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan	-	-
087.01.160029	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Timur	-	-
087.01.170030	Kantor Kearsipan Provinsi Sulawesi Utara	-	-
087.01.180025	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah	-	-
087.01.190067	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan	-	-
087.01.200033	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tenggara	-	-
087.01.210026	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Maluku	-	-
087.01.220030	Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Bali	-	-
087.01.230028	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat	-	-
087.01.240022	Dinas Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Timur	-	-
087.01.250038	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua	-	-
087.01.260032	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu	-	-
087.01.280066	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Maluku Utara	-	-
087.01.290021	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten	-	-
087.01.300065	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	-	-
087.01.310066	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo	-	2.720.000,00
087.01.320068	Kantor Arsip Daerah Prov. Kepulauan Riau	-	-
087.01.330069	Kantor Arsip Daerah Provinsi Papua Barat	-	-
087.01.340086	Kantor Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Barat	-	-
087.01.350092	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara	-	-
087.01.450448	ANRI Jakarta (KP)	-	-
087.01.681464	BAST Aceh (KD)	-	-
087.01.418929	Pusat Jasa Kearsipan (KP)	-	-
087.01.418934	Pusidklat Kearsipan Bogor (KP)	-	-
	JUMLAH	-	2.720.000,00

Saldo Uang Muka dari KPPN pada Arsip Nasional Republik Indonesia untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 sebesar Rp2.720.000,00 merupakan Uang Muka dari KPPN pada satker Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo yang telah disetorkan ke rekening kas

negara pada tanggal 20 Januari 2020 pukul 08:23:01 waktu setempat dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN): 336E58N3DE1ST6HD dan nama wajib bayar BP Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo.

*Utang Jangka Pendek
Lainnya Rp0,00*

C.26 Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

*Ekuitas
Rp1.217.622.514.276,00*

C.27 Ekuitas

Ekuitas untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp1.217.622.514.276,00 dan Rp1.245.699.800.421,00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

*Catatan Penting Lainnya
atas Neraca*

Catatan Penting Lainnya atas Neraca

Per 31 Desember 2020, satuan kerja ANRI Jakarta memiliki tanggung jawab berupa hak tagih kepada negara atas kelebihan pembayaran gaji pegawai terhadap 2 (dua) pegawai yang telah pensiun dan 1 (satu) pegawai yang mengundurkan diri dengan nilai sisa pembayaran berdasarkan SKPP Gaji sebesar Rp26.828.000,00 dan pembayaran tunjangan arsip statis dan tunjangan fungsional yang melewati periode TMT dengan nilai sisa pembayaran sebesar Rp2.300.000,00 terhadap 2 (dua) pegawai yang mutasi K/L.

Atas hal tersebut, telah tercapai kesepakatan bersama dalam forum Tripartit yakni berupa perlakuan nilai sisa pembayaran yang tidak diakui sebagai Piutang Lainnya dalam Neraca dan memasukannya ke dalam bagian Catatan Pemeriksaan BPK-RI dengan dasar pertimbangan waktu dan kebutuhan proses tindak lanjut berjenjang dalam rentang waktu jadwal penyampaian LKKL yang terbatas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNBP
Rp12.125.465.966,00

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp12.125.465.966,00 dan Rp13.366.513.594,00 mengalami penurunan sebesar (Rp1.241.047.628,00) atau -9,28 persen dari periode sebelumnya. Penurunan pendapatan ini disebabkan adanya penurunan estimasi pendapatan pada tahun 2020 di bandingkan dengan tahun 2019. Selain itu adanya pandemi *Covid-19* yang ditindaklanjuti dengan penerapan Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Lingkungan Arsip Nasional RI) melalui Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah kerja satker selama 3 bulan, yaitu sejak bulan Maret - Mei 2020 dan PSBB transisi yang berlangsung selama beberapa pekan selama bulan Juni - Desember 2020 yang mempengaruhi penurunan pendapatan. Adanya PSBB dan masa transisi PSBB di antaranya berakibat pada pembatasan calon pengguna pada layanan arsip, gedung gajah mada, dan perubahan kegiatan pembelajaran (diklat) tatap muka menjadi daring. Pendapatan tersebut terdiri atas :

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Berdasarkan Akun per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Pendapatan		Kenaikan/Penurunan	
	2020 (Rp)	2019 (Rp)	(Rp)	(%)
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya				
425119 Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	4.895.000,00	15.615.000,00	(10.720.000,00)	(68,65)
425131 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	619.465.516,00	1.412.243.000,00	(792.777.484,00)	(56,14)
425151 Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	33.900.000,00	266.400.000,00	(232.500.000,00)	(87,27)
425421 Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	3.087.750.000,00	1.868.797.000,00	1.218.953.000,00	65,23
425692 Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi	8.379.455.450,00	9.534.055.200,00	(1.154.599.750,00)	(12,11)
425811 Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0,00	269.307.604,00	(269.307.604,00)	(100,00)
425999 Pendapatan Anggaran Lain-lain	0,00	95.790,00	(95.790,00)	(100,00)
Jumlah	12.125.465.966,00	13.366.513.594,00	(1.241.047.628,00)	(9,28)

*Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Berdasarkan Satuan Kerja
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019*

Satuan Kerja	Pendapatan		Kenaikan/Penurunan	
	2020	2019	(Rp)	(%)
ANRI Jakarta (KP)	806.806.666,00	2.071.519.473,00	(1.264.712.807,00)	(61,05)
BAST Aceh (KD)	2.545.500,00	64.624.421,00	(62.078.921,00)	(96,06)
Pusat Jasa Kearsipan (KP)	8.194.463.800,00	9.095.172.700,00	(900.708.900,00)	(9,90)
Pusdiklat Kearsipan Bogor (KP)	3.121.650.000,00	2.135.197.000,00	986.453.000,00	46,20
Jumlah	12.125.465.966,00	13.366.513.594,00	(1.241.047.628,00)	(9,28)

Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya adalah merupakan Pendapatan-LO yang diperoleh dari :

1. Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya sebesar Rp4.895.000,00 berasal dari Penjualan hasil penerbitan Naskah Sumber Periode Sebelum RI (VOC – Belanda) dan Periode RI (1945 – Sekarang);
2. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan sebesar Rp619.465.516,00 berasal dari sewa ruang utama bawah dan halaman taman Gedung Gajah Mada;
3. Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi sebesar Rp33.900.000,00 berasal dari Pembayaran PNBPN di satker Pusdiklat Kearsipan Bogor diantaranya Sewa Kamar Dalam Rangka Diklat;
4. Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan sebesar Rp3.087.750.000,00 berasal dari satker Pusdiklat Kearsipan ANRI berupa pendapatan layanan diklat teknis dan diklat lainnya;
5. Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi sebesar Rp8.379.455.450,00 berasal dari jasa penyimpanan arsip, jasa pembuatan pedoman kearsipan, jasa pemeliharaan dan perawatan arsip, jasa pembenahan arsip, dan jasa pembuatan sistem aplikasi kearsipan dengan rincian pendapatan satker ANRI Jakarta sebesar Rp182.446.150,00; satker BAST Aceh sebesar Rp2.545.500,00; dan satker Pusat Jasa Kearsipan sebesar Rp8.194.463.800,00.

Pendapatan Negara Bukan Pajak pada Laporan Operasional Tahun 2020 dibandingkan dengan Pendapatan Negara Bukan Pajak pada Laporan

Realisasi Anggaran Tahun 2020 memiliki rincian sebagai berikut :

Kode Akun	Uraian Jenis Belanja/Beban	Laporan Operasional (Rp)	Laporan Realisasi Anggaran (Rp)	Selisih LO dan LRA (Rp)
425119	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	4.895.000,00	4.895.000,00	-
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0,00	185.921.000,00	(185.921.000,00)
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	619.465.516,00	716.057.032,00	(96.591.516,00)
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	33.900.000,00	33.900.000,00	-
425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	3.087.750.000,00	3.087.750.000,00	-
425692	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi	8.379.455.450,00	8.379.455.450,00	-
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai	0,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	26.852.475,00	(26.852.475,00)
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	1.226.440.189,00	(1.226.440.189,00)
Jumlah Pendapatan PNPB Lainnya		12.125.465.966,00	13.664.271.146,00	(1.538.805.180,00)

Terdapat perbedaan realisasi pendapatan menurut Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran. Pendapatan menurut Laporan Operasional sebesar Rp12.125.465.966,00 sedangkan menurut Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp13.664.271.146,00 sehingga terdapat selisih sebesar (Rp1.538.805.180,00) dengan penjelasan sebagai berikut :

Uraian	Selisih (Rp)
425129 Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	(185.921.000,00)
425912 Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	(26.852.475,00)
425913 Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	(1.226.440.189,00)
425791 Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai	(3.000.000,00)
425131 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	(96.591.516,00)
Total	(1.538.805.180,00)

Perbedaan realisasi Pendapatan (425129; 425912; 425913; dan 425791) menurut Laporan Operasional dengan menurut Laporan Realisasi Anggaran dikarenakan adanya perbedaan klasifikasi sumber pendapatan dan ekonomi atau fungsi/program. Pendapatan Lain-Lain pada Laporan Realisasi Anggaran merupakan klasifikasi pendapatan di luar fungsi dan program institusi dan bukan merupakan klasifikasi Pendapatan Negara Bukan Pajak pada Laporan Operasional.

Sedangkan perbedaan realisasi Pendapatan (425131) menurut Laporan Operasional dengan menurut Laporan Realisasi Anggaran merupakan nilai koreksi yang muncul atas kesepakatan bersama usulan jurnal koreksi BPK-RI terhadap perlakuan Perjanjian Sewa Barang Milik Negara (BMN) antara Arsip Nasional Republik Indonesia dengan Pihak Ketiga Nomor: PL.02/24/2020 tanggal 12 Maret 2020 berupa sewa sebagian Tanah dan Bangunan Kantor Pemerintah di Jalan Gajah Mada Nomor 111 Jakarta Barat selama 2 (dua) tahun melalui mekanisme pembayaran yang dilakukan secara sekaligus sebesar Rp193.183.032,00 setelah penandatanganan perjanjian.

Beban Pegawai
Rp93.709.117.239,00

D.2 Beban Pegawai

Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp93.709.117.239,00 dan Rp98.235.109.047,00 mengalami penurunan sebesar (Rp4.525.991.808,00) atau -4,61 persen dari periode sebelumnya. Beban Pegawai memiliki rincian sebagai berikut :

Rincian Beban Pegawai per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Beban Pegawai		Kenaikan/Penurunan	
	2020 (Rp)	2019 (Rp)	(Rp)	(%)
Beban Gaji dan Tunjangan PNS	48.624.771.116,00	47.248.715.779,00	1.376.055.337,00	2,91
511111 Beban Gaji Pokok PNS	30.000.904.900,00	29.604.039.640,00	396.865.260,00	1,34
511119 Beban Pembulatan Gaji PNS	433.469,00	461.934,00	(28.465,00)	-6,16
511121 Beban Tunj. Suami/Istri PNS	2.036.392.738,00	1.989.604.784,00	46.787.954,00	2,35
511122 Beban Tunj. Anak PNS	521.264.402,00	528.987.428,00	(7.723.026,00)	-1,46
511123 Beban Tunj. Struktural PNS	2.020.840.000,00	2.210.860.000,00	(190.020.000,00)	-8,59
511124 Beban Tunj. Fungsional PNS	3.399.122.000,00	2.850.509.000,00	548.613.000,00	19,25
511125 Beban Tunj. PPh PNS	309.790.267,00	333.334.913,00	(23.544.646,00)	-7,06
511126 Beban Tunj. Beras PNS	1.359.830.340,00	1.359.613.080,00	217.260,00	0,02
511129 Beban Uang Makan PNS	5.115.243.000,00	4.248.272.000,00	866.971.000,00	20,41
511134 Beban Tunj. Kompensasi Kerja PNS	3.404.480.000,00	3.533.788.000,00	(129.308.000,00)	-3,66
511151 Beban Tunjangan Umum PNS	456.470.000,00	589.245.000,00	(132.775.000,00)	-22,53
Beban Honorarium/Lembur/Tunjangan Khusus & Beban Pegawai Transito	45.108.347.815,00	50.989.951.754,00	(5.881.603.939,00)	-11,53
512211 Beban Uang Lembur	172.680.000,00	113.381.000,00	59.299.000,00	52,30
512411 Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	44.935.667.815,00	50.876.570.754,00	(5.940.902.939,00)	-11,68
Pengembalian Beban	(24.001.692,00)	(3.558.486,00)	(20.443.206,00)	574,49
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS	(1.788,00)	(43.486,00)	41.698,00	-95,89
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS	-	(3.515.000,00)	3.515.000,00	-100,00

511111	Belanja Gaji Pokok PNS	(16.127.071,00)	-	(16.127.071,00)	0,00
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	(1.612.707,00)	-	(1.612.707,00)	0,00
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	(303.103,00)	-	(303.103,00)	0,00
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	(3.006.068,00)	-	(3.006.068,00)	0,00
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	(242.382,00)	-	(242.382,00)	0,00
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	(629.877,00)	-	(629.877,00)	0,00
511134	Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PN	(2.078.696,00)	-	(2.078.696,00)	0,00
Jumlah Beban Pegawai		93.709.117.239,00	98.235.109.047,00	(4.525.991.808,00)	-4,61

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Beban Pegawai hanya berada pada ANRI Jakarta yang terdiri dari :

1. Beban Gaji dan Tunjangan PNS sebesar Rp48.624.771.116,00 secara keseluruhan mengalami kenaikan sebesar Rp1.376.055.337,00 atau 2,91 persen dibanding 31 Desember 2019;
2. Beban Honorarium/Lembur/Tunjangan Khusus & Beban Pegawai Transito sebesar Rp45.108.347.815,00 secara keseluruhan mengalami penurunan sebesar (Rp5.881.603.939,00) atau -11,53 persen dibanding 31 Desember 2019;
3. Pengembalian Beban sebesar (Rp24.001.692,00) secara keseluruhan mengalami kenaikan sebesar Rp20.443.206,00 atau 574,49 persen dibanding 31 Desember 2019.

Beban Pegawai (neto) pada Laporan Operasional Tahun 2020 sebesar Rp93.709.117.239,00 sedangkan realisasi Belanja Pegawai (neto) pada Laporan Realisasi Anggaran tahun 2020 sebesar Rp93.716.968.297,00 sehingga terdapat selisih sebesar (Rp7.851.058,00) dengan rincian sebagai berikut :

Kode Akun	Uraian Jenis Beban/Belanja	Laporan Operasional (Rp)	Laporan Realisasi Anggaran (Rp)	Selisih LO dan LRA (Rp)
Beban/Belanja Gaji dan Tunjangan PNS		48.624.771.116,00	48.624.771.116,00	-
511111	Beban Gaji Pokok PNS	30.000.904.900,00	30.000.904.900,00	-
511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	433.469,00	433.469,00	-
511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	2.036.392.738,00	2.036.392.738,00	-
511122	Beban Tunj. Anak PNS	521.264.402,00	521.264.402,00	-
511123	Beban Tunj. Struktural PNS	2.020.840.000,00	2.020.840.000,00	-
511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	3.399.122.000,00	3.399.122.000,00	-
511125	Beban Tunj. PPh PNS	309.790.267,00	309.790.267,00	-
511126	Beban Tunj. Beras PNS	1.359.830.340,00	1.359.830.340,00	-
511129	Beban Uang Makan PNS	5.115.243.000,00	5.115.243.000,00	-
511134	Beban Tunj. Kompensasi Kerja PNS	3.404.480.000,00	3.404.480.000,00	-
511151	Beban Tunjangan Umum PNS	456.470.000,00	456.470.000,00	-
Beban/Belanja Honorarium / Lembur/ Tunjangan Khusus & Beban Pegawai Transito		45.108.347.815,00	45.116.198.873,00	(7.851.058,00)
512211	Beban Uang Lembur	172.680.000,00	172.680.000,00	-
512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	44.935.667.815,00	44.943.518.873,00	(7.851.058,00)
Pengembalian Beban/Belanja		(24.001.692,00)	(24.001.692,00)	-
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	(1.788,00)	(1.788,00)	-
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	(16.127.071,00)	(16.127.071,00)	-
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	(1.612.707,00)	(1.612.707,00)	-
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	(303.103,00)	(303.103,00)	-
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	(3.006.068,00)	(3.006.068,00)	-
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	(242.382,00)	(242.382,00)	-
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	(629.877,00)	(629.877,00)	-
511134	Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PN	(2.078.696,00)	(2.078.696,00)	-
Jumlah Beban/Belanja Neto		93.709.117.239,00	93.716.968.297,00	(7.851.058,00)

Selisih Beban/Belanja Pegawai sebesar (Rp7.851.058,00) antara Laporan Operasional dengan Laporan Realisasi Anggaran disebabkan adanya jurnal penyesuaian dengan penjelasan sebagai berikut :

Nomor Jurnal	Keterangan	Nilai (Rp)
Beban Tunjangan Khusus		
202001450448011	Kekurangan tunjangan kinerja pegawai ANRI bulan Sep 2019	7.851.058,00
Jumlah		7.851.058,00
Jumlah Selisih Beban/Belanja Gaji dan Tunjangan PNS antara LO dengan LRA		7.851.058,00

Telah dilakukan koreksi hasil kesepakatan bersama (Tripartit) atas usulan jurnal koreksi BPK-RI terhadap akun 425931 – Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS sebesar Rp24.000.000,00 yang sebelumnya diakui sebagai Pendapatan Lain-Lain kemudian diakui sebagai Pengembalian Belanja Gaji dan Tunjangan PNS di tahun anggaran berjalan

dengan mekanisme koreksi/ralat dokumen SSBP (Surat Setoran Bukan Pajak) menjadi SSPB (Surat Setoran Pengembalian Belanja). Koreksi tersebut berdampak pada perubahan nilai Beban Pegawai dalam LKKL ANRI TA. 2020 (*Unaudited*) dari semula sebesar Rp93.733.117.239,00 menjadi Rp93.709.117.239,00 atau terjadi penurunan sebesar Rp24.000.0000,00.

Selanjutnya, dalam Catatan Pemeriksaan BPK-RI diuraikan bahwa terdapat kelebihan Belanja Pegawai di TA. 2020 sebesar Rp9.614.300,00 atas 2 (dua) pegawai mutasi K/L yang menerima Tunjangan Fungsional dan Tunjangan Arsip Statis dan 1 (satu) pegawai mengundurkan diri yang menerima Gaji dan Tunjangan. Atas kondisi tersebut, Beban Pegawai dalam LKKL ANRI TA. 2020 (*Audited*) disajikan secara lebih sebesar Rp9.614.300,00 yang kemudian lebih saji tersebut akan dinormalisasi dengan akun Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL di Tahun Anggaran 2021 saat terjadinya setoran ke kas negara dari pegawai berkenaan.

*Beban Persediaan
Rp3.724.064.943,00*

D.3 Beban Persediaan

Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp3.724.064.943,00 dan Rp5.210.490.065,00 mengalami penurunan sebesar (Rp1.486.425.122,00) atau -28,53 persen dari periode sebelumnya. Beban Persediaan berdasarkan akun memiliki rincian sebagai berikut :

*Rincian Beban Persediaan Berdasarkan Akun
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019*

Uraian	Beban Persediaan		Kenaikan/Penurunan	
	2020 (Rp)	2019 (Rp)	(Rp)	(%)
Beban Persediaan	3.724.064.943,00	5.210.490.065,00	(1.486.425.122,00)	-28,53
593111 Beban Persediaan konsumsi	3.694.520.513,00	4.256.888.560,00	(562.368.047,00)	-13,21
593131 Beban Persediaan bahan baku	6.014.100,00	866.939.050,00	(860.924.950,00)	-99,31
593149 Beban Persediaan Lainnya	23.530.330,00	86.662.455,00	(63.132.125,00)	-72,85
Pengembalian Beban	-	-	0,00	0,00
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	-	-	0,00	0,00
Jumlah Beban Persediaan	3.724.064.943,00	5.210.490.065,00	(1.486.425.122,00)	-28,53

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban Persediaan berdasarkan satuan kerja memiliki rincian sebagai berikut :

*Rincian Beban Persediaan Berdasarkan Satuan Kerja
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019*

Satuan Kerja	Beban Persediaan		Kenaikan/Penurunan	
	2020	2019	(Rp)	(%)
ANRI Jakarta (KP)	3.267.354.053,00	4.726.496.750,00	(1.459.142.697,00)	(30,87)
BAST Aceh (KD)	62.406.290,00	109.601.415,00	(47.195.125,00)	(43,06)
Pusat Jasa Kearsipan (KP)	357.327.600,00	330.237.000,00	27.090.600,00	8,20
Pusidklat Kearsipan Bogor (KP)	36.977.000,00	44.154.900,00	(7.177.900,00)	(16,26)
Jumlah	3.724.064.943,00	5.210.490.065,00	(1.486.425.122,00)	(28,53)

Beban Persediaan (neto) pada Laporan Operasional Tahun 2020 sebesar Rp3.724.064.943,00 sedangkan realisasi Belanja Barang Persediaan (neto) pada Laporan Realisasi Anggaran tahun 2020 sebesar Rp4.283.935.849,00 sehingga terdapat selisih sebesar (Rp559.870.906,00) dengan rincian sebagai berikut :

Kode Akun	Uraian Jenis Beban/Belanja	Laporan Operasional (Rp)	Laporan Realisasi Anggaran (Rp)	Selisih LO dan LRA (Rp)
Beban/Belanja Persediaan		3.724.064.943,00	4.283.935.849,00	(559.870.906,00)
593111	Beban Persediaan konsumsi	3.694.520.513,00	0,00	3.694.520.513,00
593131	Beban Persediaan bahan baku	6.014.100,00	0,00	6.014.100,00
593149	Beban Persediaan Lainnya	23.530.330,00	0,00	23.530.330,00
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	0,00	3.674.524.247,00	(3.674.524.247,00)
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi Covid-19	0,00	609.411.602,00	(609.411.602,00)
Pengembalian Beban/Belanja		-	-	-
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	-	-	-
Jumlah Beban/Belanja Neto		3.724.064.943,00	4.283.935.849,00	(559.870.906,00)

Selisih Beban/Belanja Persediaan sebesar (Rp559.870.906,00) antara Laporan Operasional dengan Laporan Realisasi Anggaran disebabkan adanya perbedaan pengakuan mengenai belanja pada LRA dan beban pada LO.

Telah dilakukan koreksi hasil kesepakatan bersama (Tripartit) atas usulan jurnal koreksi BPK-RI terhadap akun 117111 – Persediaan Barang Konsumsi

sebesar Rp50.000,00 yang merupakan koreksi kurang catat Persediaan berdasarkan hasil *stock opname* pada Satker Pusdiklat Kearsipan. Koreksi tersebut berdampak pada perubahan nilai Beban Persediaan dalam LKKL ANRI TA. 2020 (*Unaudited*) dari semula sebesar Rp3.724.114.943,00 menjadi Rp3.724.064.943,00 atau terjadi penurunan sebesar Rp50.000,00.

*Beban Barang dan Jasa
Rp38.097.836.669,00*

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp38.097.836.669,00 dan Rp48.446.714.781,00 mengalami penurunan sebesar (Rp10.348.878.112,00) atau -21,36 persen dari periode sebelumnya. Beban Barang dan Jasa berdasarkan akun memiliki rincian sebagai berikut :

Rincian Beban Barang dan Jasa Berdasarkan Akun per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Beban Barang dan Jasa		Kenaikan/Penurunan	
	2020 (Rp)	2019 (Rp)	(Rp)	(%)
Beban Barang	24.269.929.797,00	33.383.174.258,00	(9.113.244.461,00)	-27,30
521111 Beban Keperluan Perkantoran	12.202.465.668,00	9.629.596.896,00	2.572.868.772,00	26,72
521113 Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	751.411.021,00	742.984.000,00	8.427.021,00	1,13
521114 Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	80.094.965,00	126.107.425,00	(46.012.460,00)	-36,49
521115 Beban Honor Operasional Satuan Kerja	776.340.000,00	2.049.290.000,00	(1.272.950.000,00)	-62,12
521119 Beban Barang Operasional Lainnya	201.972.650,00	520.851.200,00	(318.878.550,00)	-61,22
521131 Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	2.697.362.599,00	-	2.697.362.599,00	0,00
521211 Beban Bahan	3.280.024.444,00	11.202.648.826,00	(7.922.624.382,00)	-70,72
521213 Beban Honor Output Kegiatan	3.301.020.000,00	6.534.425.000,00	(3.233.405.000,00)	-49,48
521219 Beban Barang Non Operasional Lainnya	829.563.450,00	1.974.270.911,00	(1.144.707.461,00)	-57,98
521231 Beban Barang Pemberian Penghargaan dalam bentuk uang	-	603.000.000,00	(603.000.000,00)	-100,00
521241 Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	149.675.000,00	-	149.675.000,00	0,00
Beban Jasa	13.812.985.272,00	14.951.323.903,00	(1.138.338.631,00)	-7,61
522111 Beban Langganan Listrik	7.625.568.883,00	7.329.520.148,00	296.048.735,00	4,04
522112 Beban Langganan Telepon	60.475.995,00	83.409.127,00	(22.933.132,00)	-27,49
522113 Beban Langganan Air	98.440.630,00	79.148.210,00	19.292.420,00	24,38
522119 Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	3.307.781,00	-	3.307.781,00	0,00
522121 Beban Jasa Pos dan Giro	3.247.000,00	17.098.000,00	(13.851.000,00)	-81,01
522131 Beban Jasa Konsultan	196.000.000,00	158.950.000,00	37.050.000,00	23,31

522141	Beban Sewa	1.320.426.750,00	1.547.560.400,00	(227.133.650,00)	-14,68
522151	Beban Jasa Profesi	1.436.050.000,00	3.480.255.000,00	(2.044.205.000,00)	-58,74
522191	Beban Jasa Lainnya	594.346.500,00	2.255.383.018,00	(1.661.036.518,00)	-73,65
522192	Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	2.475.121.733,00	-	2.475.121.733,00	0,00
Beban Rekalsifikasi Aset		26.639.100,00	139.929.400,00	(113.290.300,00)	-80,96
595112	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	26.639.100,00	139.929.400,00	(113.290.300,00)	-80,96
Pengembalian Beban		(11.717.500,00)	(27.712.780,00)	15.995.280,00	-57,72
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	(4.447.500,00)	(3.979.780,00)	(467.720,00)	11,75
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	-	(2.230.000,00)	2.230.000,00	-100,00
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	(2.935.000,00)	(18.920.500,00)	15.985.500,00	-84,49
522151	Belanja Jasa Profesi	(4.335.000,00)	(2.582.500,00)	(1.752.500,00)	67,86
Jumlah Beban Barang dan Jasa		38.097.836.669,00	48.446.714.781,00	(10.348.878.112,00)	-21,36

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Beban Barang dan jasa terdiri dari :

1. Beban Barang sebesar Rp24.269.929.797,00 secara keseluruhan mengalami penurunan sebesar (Rp9.113.244.461,00) atau -27,30 persen dibanding 31 Desember 2019;
2. Beban Jasa sebesar Rp13.812.985.272,00 secara keseluruhan mengalami penurunan sebesar (Rp1.138.338.631,00) atau -7,61 persen dibanding 31 Desember 2019;
3. Beban Reklasifikasi Aset sebesar Rp26.639.100,00 secara keseluruhan mengalami penurunan sebesar (Rp113.290.300,00) atau -80,96 persen dibanding 31 Desember 2019;
4. Pengembalian Beban sebesar (Rp11.717.500,00) secara keseluruhan mengalami kenaikan sebesar Rp15.995.280,00 atau 57,72 persen dibanding 31 Desember 2019.

*Rincian Beban Barang dan Jasa Berdasarkan Satuan Kerja
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019*

Satuan Kerja	Beban Barang dan Jasa		Kenaikan/Penurunan	
	2020	2019	(Rp)	(%)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat	-	151.540.000,00	(151.540.000,00)	(100,00)
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah	-	152.745.000,00	(152.745.000,00)	(100,00)
Badan Perpustakaan Dan Arsip Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	-	59.935.000,00	(59.935.000,00)	(100,00)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur	-	180.136.000,00	(180.136.000,00)	(100,00)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh	-	113.842.050,00	(113.842.050,00)	(100,00)
Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Provinsi Sumatera Utara	-	191.830.000,00	(191.830.000,00)	(100,00)
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat	-	125.404.000,00	(125.404.000,00)	(100,00)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau	-	105.182.000,00	(105.182.000,00)	(100,00)
Kantor Arsip Provinsi Jambi	-	71.919.000,00	(71.919.000,00)	(100,00)
Kantor Arsip Daerah Provinsi Sumatera Selatan	-	115.393.587,00	(115.393.587,00)	(100,00)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung	-	84.570.000,00	(84.570.000,00)	(100,00)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat	-	95.490.700,00	(95.490.700,00)	(100,00)
Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah	-	98.182.000,00	(98.182.000,00)	(100,00)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan	-	97.589.000,00	(97.589.000,00)	(100,00)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Timur	-	134.576.600,00	(134.576.600,00)	(100,00)
Kantor Kearsipan Provinsi Sulawesi Utara	-	100.344.750,00	(100.344.750,00)	(100,00)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah	-	73.471.000,00	(73.471.000,00)	(100,00)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan	-	124.789.000,00	(124.789.000,00)	(100,00)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tenggara	-	78.286.000,00	(78.286.000,00)	(100,00)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Maluku	-	83.940.000,00	(83.940.000,00)	(100,00)
Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi Bali	-	77.183.000,00	(77.183.000,00)	(100,00)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat	-	75.140.000,00	(75.140.000,00)	(100,00)
Dinas Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Timur	-	120.141.900,00	(120.141.900,00)	(100,00)
Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua	-	159.832.000,00	(159.832.000,00)	(100,00)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu	-	73.962.000,00	(73.962.000,00)	(100,00)
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Maluku Utara	-	91.060.000,00	(91.060.000,00)	(100,00)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten	-	60.070.000,00	(60.070.000,00)	(100,00)
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	-	63.971.000,00	(63.971.000,00)	(100,00)
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo	-	66.048.000,00	(66.048.000,00)	(100,00)

Kantor Arsip Daerah Prov. Kepulauan Riau	-	65.670.000,00	(65.670.000,00)	(100,00)
Kantor Arsip Daerah Provinsi Papua Barat	-	52.424.000,00	(52.424.000,00)	(100,00)
Kantor Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Barat	-	56.523.000,00	(56.523.000,00)	(100,00)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara	-	48.405.400,00	(48.405.400,00)	(100,00)
ANRI Jakarta (KP)	29.575.197.031,00	36.113.133.785,00	(6.537.936.754,00)	(18,10)
BAST Aceh (KD)	1.908.125.401,00	1.441.421.774,00	466.703.627,00	32,38
Pusat Jasa Kearsipan (KP)	4.503.960.326,00	4.440.308.167,00	63.652.159,00	1,43
Pusidklat Kearsipan Bogor (KP)	2.110.553.911,00	3.202.255.068,00	(1.091.701.157,00)	(34,09)
Jumlah	38.097.836.669,00	48.446.714.781,00	(10.348.878.112,00)	(21,36)

Beban Barang dan Jasa (neto) pada Laporan Operasional Tahun 2020 sebesar Rp38.097.836.669,00 sedangkan realisasi Belanja Barang dan Jasa (neto) pada Laporan Realisasi Anggaran tahun 2020 sebesar Rp35.599.744.167,00 sehingga terdapat selisih sebesar (Rp126.704.231,00) dengan rincian sebagai berikut :

Kode Akun	Uraian Jenis Beban/Belanja	Laporan Operasional (Rp)	Laporan Realisasi Anggaran (Rp)	Selisih LO dan LRA (Rp)
Beban/Belanja Barang		24.269.929.797,00	24.269.714.797,00	215.000,00
521111	Beban Keperluan Perkantoran	12.202.465.668,00	12.202.250.668,00	215.000,00
521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	751.411.021,00	751.411.021,00	-
521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	80.094.965,00	80.094.965,00	-
521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	776.340.000,00	776.340.000,00	-
521119	Beban Barang Operasional Lainnya	201.972.650,00	201.972.650,00	-
521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	2.697.362.599,00	2.697.362.599,00	-
521211	Beban Bahan	3.280.024.444,00	3.280.024.444,00	-
521213	Beban Honor Output Kegiatan	3.301.020.000,00	3.301.020.000,00	-
521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	829.563.450,00	829.563.450,00	-
521231	Beban Barang Pemberian Penghargaan dalam bentuk uang	-	-	-
521241	Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	149.675.000,00	149.675.000,00	-
Beban/Belanja Jasa		13.812.985.272,00	13.966.543.603,00	(153.558.331,00)
522111	Beban Langganan Listrik	7.625.568.883,00	7.773.543.904,00	(147.975.021,00)
522112	Beban Langganan Telepon	60.475.995,00	59.677.415,00	798.580,00
522113	Beban Langganan Air	98.440.630,00	105.122.520,00	(6.681.890,00)
522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	3.307.781,00	3.307.781,00	-
522121	Beban Jasa Pos dan Giro	3.247.000,00	3.247.000,00	-
522131	Beban Jasa Konsultan	196.000.000,00	196.000.000,00	-
522141	Beban Sewa	1.320.426.750,00	1.320.426.750,00	-
522151	Beban Jasa Profesi	1.436.050.000,00	1.436.050.000,00	-
522191	Beban Jasa Lainnya	594.346.500,00	594.046.500,00	300.000,00
522192	Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	2.475.121.733,00	2.475.121.733,00	-

Beban/Belanja Rekalsifikasi Aset	26.639.100,00	-	26.639.100,00
595112 Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	26.639.100,00	0,00	26.639.100,00
Pengembalian Beban/Belanja	(11.717.500,00)	(11.717.500,00)	-
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	(4.447.500,00)	(4.447.500,00)	-
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	-	-	-
521213 Belanja Honor Output Kegiatan	(2.935.000,00)	(2.935.000,00)	-
522151 Belanja Jasa Profesi	(4.335.000,00)	(4.335.000,00)	-
Jumlah Beban/Belanja Neto	38.097.836.669,00	38.224.540.900,00	(126.704.231,00)

Selisih Beban/Belanja Barang sebesar Rp215.000,00 antara Laporan Operasional dengan Laporan Realisasi Anggaran disebabkan adanya jurnal penyesuaian dengan penjelasan sebagai berikut :

Nomor Jurnal	Keterangan	Nilai (Rp)
Beban/Belanja Barang Keperluan Perkantoran		
Beban/Belanja Langganan Air (522111)		
202012418934/06	Tagihan langganan koran Pusdiklat Kearsipan bulan Januari 2021 (beban bulan Desember 2020)	215.000,00
Jumlah		215.000,00
Jumlah selisih Beban/Belanja Barang Keperluan Perkantoran antara LRA dengan LO		215.000,00

Selisih Beban/Belanja Jasa sebesar (Rp153.558.331,00) antara Laporan Operasional dengan Laporan Realisasi Anggaran disebabkan adanya jurnal penyesuaian dengan penjelasan sebagai berikut :

ANRI JAKARTA		
Nomor Jurnal	Keterangan	Nilai (Rp)
Beban/Belanja Jasa		
Beban/Belanja Langganan Listrik (522111)		
202001450448001	Tagihan Jasa Langganan Listrik Gd. ANRI Bulan Januari 2020 Pemakaian bulan Desember 2019	(680.628.563,00)
202001450448002	Tagihan Jasa Langganan Listrik Rumah Dinas ANRI bulan Januari 2020 Pemakaian bulan Desember 2019	(5.973.691,00)
202001450448003	Tagihan Jasa Langganan Listrik Gd. Gajah Mada ANRI bulan Januari 2020 Pemakaian bulan Desember 2019	(10.884.453,00)
202001450448004	Tagihan Jasa Langganan Listrik Gd. Gajah Mada ANRI bulan Januari 2020 Pemakaian bulan Desember 2019	(24.102.553,00)
202001450448005	Tagihan Jasa Telekomunikasi bulan Januari 2020 pemakaian Desember 2019 (beban Desember 2018) ID Pel.538310070881 sesuai SPM/SP2D No.00013 /191391303000204	(2.760.639,00)
202001450448008	Tagihan Jasa Langganan Listrik Pusdiklat Bogor ANRI bulan Januari 2020 Pemakaian bulan Desember 2019	(10.933.715,00)
202009450448020	Tagihan Jasa Langganan Listrik ANRI bulan Oktober 2020 Pemakaian bulan September 2020	551.529.416,00
202009450448021	Tagihan Jasa Langganan Listrik Gd Gajah Mada bulan Oktober 2020 Pemakaian bulan September 2020	39.981.750,00
202009450448022	Tagihan Jasa Langganan Listrik Rumah Dinas ANRI bulan Oktober 2020 Pemakaian bulan September 2020	7.052.075,00
202009450448023	Tagihan Jasa Langganan Listrik Gd Gajah Mada bulan Oktober 2020 Pemakaian bulan September 2020	10.364.295,00
202009450448027	Tagihan Jasa Langganan Listrik ANRI bulan Oktober 2020 Pemakaian bulan September 2020	(551.529.416,00)
202009450448028	Tagihan Jasa Langganan Listrik Gd Gajah Mada bulan Oktober 2020 Pemakaian bulan September 2020	(39.981.750,00)

202009450448022	Tagihan Jasa Langganan Listrik Rumah Dinas ANRI bulan Oktober 2020 Pemakaian bulan September 2020	7.052.075,00
202009450448023	Tagihan Jasa Langganan Listrik Gd Gajah Mada bulan Oktober 2020 Pemakaian bulan September 2020	10.364.295,00
202009450448027	Tagihan Jasa Langganan Listrik ANRI bulan Oktober 2020 Pemakaian bulan September 2020	(551.529.416,00)
202009450448028	Tagihan Jasa Langganan Listrik Gd Gajah Mada bulan Oktober 2020 Pemakaian bulan September 2020	(39.981.750,00)
202009450448029	Tagihan Jasa Langganan Listrik Rumah Dinas ANRI bulan Oktober 2020 Pemakaian bulan September 2020	(7.052.075,00)
202009450448030	Tagihan Jasa Langganan Listrik Gd Gajah Mada bulan Oktober 2020 Pemakaian bulan September 2020	(10.364.295,00)
202009450448037	Pembayaran Tagihan Listrik Arsip Nasional ID Pel. 543100226856 dan ID Pel. 543800172044 penggunaan bulan Desember 2020	506.664.165,00
202009450448038	Pembayaran Tagihan Listrik Rumah Dinas Arsip Nasional ID Pel. 543104288535, ID Pel. 543100272725 dan ID Pel. 543100544670	7.116.304,00
202009450448039	Pembayaran Tagihan Listrik Gedung Gajah Mada ID Pel. 542103415633 penggunaan bulan Desember 2020	35.874.678,00
202009450448040	Pembayaran Tagihan Listrik Gedung Gajah Mada ID Pel. 542100101176 penggunaan bulan Desember 2020	10.364.295,00
Jumlah		(175.264.172,00)
Beban/Belanja Langganan Telepon (522112)		
202001450448009	Tagihan Jasa Telekomunikasi Pusklat ANRI Bogor bulan Januari 2020 pemakaian bulan Desember 2019	(208.879,00)
202001450448010	Tagihan jasa telekomunikasi ANRI Warung Buncit bln Juli 2019 sesuai kuitansi no. 129-01 Tgl. 22-07-2019	(1.141.500,00)
202009450448024	Tagihan Jasa Telekomunikasi ANRI bulan Oktober 2020 Pemakaian bulan September 2020	1.949.468,00
202009450448031	Tagihan Jasa Telekomunikasi ANRI bulan Oktober 2020 Pemakaian bulan September 2020	(1.949.468,00)
202009450448042	Tagihan Jasa Telekomunikasi sesuai dengan tagihan bulan Januari 2021 atas penggunaan bulan Desember 2020	2.012.975,00
202012450448044	Pembayaran Tagihan Jasa Telekomunikasi Gedung Warung Buncit Bulan Januari 2021 untuk penggunaan bulan Desember 2020	1.154.679,00
Jumlah		1.817.275,00
Beban/Belanja Langganan Air (522113)		
202001450448006	Tagihan Jasa Langganan Air PAM Gd. Gajah Mada bulan Januari 2020 Pemakaian bulan Desember 2019	(10.582.520,00)
202001450448007	Tagihan Jasa Langganan Air PAM Pusklat Bogor bulan Januari 2020 Pemakaian bulan Desember 2019	(1.363.600,00)
202009450448025	Tagihan Jasa Langganan Air Gd Gajah Mada bulan Oktober 2020 Pemakaian bulan September 2020	3.438.320,00
202009450448032	Tagihan Jasa Langganan Air Gd Gajah Mada bulan Oktober 2020 Pemakaian bulan September 2020	(3.438.320,00)
202009450448041	Pembayaran Tagihan PDAM Gedung Gajah Mada No. Meter 18735398 penggunaan bulan Desember 2020	2.820.920,00
Jumlah		(9.125.200,00)
Jumlah selisih Beban/Belanja Jasa antara LRA dengan LO		(182.572.097,00)

BALAI ARSIP STATIS DAN TSUNAMI

Nomor Jurnal	Keterangan	Nilai (Rp)
Beban/Belanja Jasa		
Beban/Belanja Langganan Listrik (522111)		
202001681464001	Pencatatan pembayaran pemakaian listrik bulan Desember 2019	(23.000.316,00)
202009681464004	Untuk menyesuaikan tagihan listrik beban September 2020	40.164.833,00
202009681464010	Untuk menyesuaikan tagihan listrik beban September 2020	(40.164.833,00)
202009681464007	Untuk menyesuaikan tagihan listrik beban Desember 2020	40.164.833,00
Jumlah		17.164.517,00
Beban/Belanja Langganan Telepon (522112)		
202002681464002	Pencatatan pembayaran pemakaian telepon bulan Desember 2019.	(2.196.530,00)
202009681464005	Untuk menyesuaikan tagihan telepon beban September 2020	1.091.635,00
202009681464008	Untuk menyesuaikan tagihan telepon beban September 2020	(1.091.635,00)
202009681464011	Untuk menyesuaikan tagihan telepon beban Desember 2020	1.047.903,00
Jumlah		(1.148.627,00)

Beban/Belanja Langganan Air (522113)		
202002681464003	Pencatatan pembayaran pemakaian air bulan Desember 2019.	(230.400,00)
202009681464006	Untuk menyesuaikan tagihan air beban September 2020	78.960,00
202009681464009	Untuk menyesuaikan tagihan air beban September 2020	(78.960,00)
202009681464012	Untuk menyesuaikan tagihan PDAM beban Desember 2020	173.610,00
Jumlah		(56.790,00)
Jumlah selisih Beban/Belanja Jasa antara LRA dengan LO		15.959.100,00

PUSDIKLAT KEARSIPAN BOGOR		
Nomor Jurnal	Keterangan	Nilai (Rp)
Beban/Belanja Jasa		
Beban/Belanja Langganan Listrik (522111)		
202012418934/03	Tagihan Jasa langganan Listrik Pusdiklat Kearsipan bulan Januari 2021	10.124.634,00
Jumlah		10.124.634,00
Beban/Belanja Langganan Telepon (522112)		
202012418934/04	Tagihan jasa langganan telekomunikasi Pusdiklat Kearsipan bulan Januari	129.932,00
Jumlah		129.932,00
Beban/Belanja Langganan Air (522113)		
202012418934/05	Tagihan jasa langganan Air Pusdiklat Kearsipan bulan Januari 2021 (beban	2.500.100,00
Jumlah		2.500.100,00
Beban/Belanja Jasa Lainnya (522191)		
202012418934/07	Tagihan jasa langganan pembuangan sampah Pusdiklat Kearsipan bulan	300.000,00
Jumlah		300.000,00
Jumlah selisih Beban/Belanja Jasa antara LRA dengan LO		13.054.666,00

*Beban Pemeliharaan
Rp8.981.402.239,00*

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp8.981.402.239,00 dan Rp9.110.528.492,00 mengalami penurunan sebesar Rp129.126.253,00 atau -1,42 persen dari periode sebelumnya. Beban Pemeliharaan berdasarkan akun memiliki rincian sebagai berikut :

Rincian Beban Pemeliharaan Berdasarkan Akun per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Beban Pemeliharaan		Kenaikan/Penurunan	
	2020 (Rp)	2019 (Rp)	(Rp)	(%)
Beban Pemeliharaan	8.981.402.239,00	9.110.528.492,00	(129.126.253,00)	-1,42
523111 Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.998.695.541,00	5.075.408.088,00	(1.076.712.547,00)	-21,21
523119 Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	126.346.780,00	255.841.800,00	(129.495.020,00)	-50,62
523121 Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.716.042.697,00	1.461.287.704,00	254.754.993,00	17,43
523129 Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.706.135.541,00	1.464.971.100,00	241.164.441,00	16,46
523199 Beban Pemeliharaan Lainnya	220.213.800,00	449.954.450,00	(229.740.650,00)	-51,06
593113 Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	1.154.762.980,00	399.355.350,00	755.407.630,00	189,16
593114 Beban Persediaan suku cadang	-	3.710.000,00	(3.710.000,00)	-100,00
595113 Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	59.204.900,00	-	59.204.900,00	0,00
Pengembalian Beban	-	-	0,00	0,00
Jumlah Beban Pemeliharaan	8.981.402.239,00	9.110.528.492,00	(129.126.253,00)	-1,42

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban pemeliharaan terdiri atas Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya, Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Beban Pemeliharaan Lainnya, Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan dan Beban Persediaan Suku Cadang. Beban Pemeliharaan berdasarkan satuan kerja memiliki rincian sebagai berikut :

*Rincian Beban Pemeliharaan Berdasarkan Satuan Kerja
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019*

Satuan Kerja	Beban Pemeliharaan		Kenaikan/Penurunan	
	2020	2019	(Rp)	(%)
ANRI Jakarta (KP)	8.177.537.997,00	8.907.122.900,00	(729.584.903,00)	(8,19)
BAST Aceh (KD)	195.112.842,00	175.740.092,00	19.372.750,00	11,02
Pusat Jasa Kearsipan (KP)	174.963.400,00	27.665.500,00	147.297.900,00	532,42
Pusidklat Kearsipan Bogor (KP)	433.788.000,00	0,00	433.788.000,00	0,00
Jumlah	8.981.402.239,00	9.110.528.492,00	(129.126.253,00)	(1,42)

Beban Pemeeliharaan (neto) pada Laporan Operasional Tahun 2020 sebesar Rp8.981.402.239,00 sedangkan realisasi Belanja Pemeliharaan (neto) pada Laporan Realisasi Anggaran tahun 2020 sebesar Rp9.237.859.489,00 sehingga terdapat selisih sebesar (Rp256.457.250,00) dengan rincian sebagai berikut :

Kode Akun	Uraian Jenis Beban/Belanja	Laporan Operasional (Rp)	Laporan Realisasi Anggaran (Rp)	Selisih LO dan LRA (Rp)
Belanja/Beban Pemeliharaan		8.981.402.239,00	9.237.859.489,00	(256.457.250,00)
523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.998.695.541,00	4.245.188.921,00	(246.493.380,00)
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	497.696.750,00	(497.696.750,00)
523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	126.346.780,00	126.346.780,00	-
523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.716.042.697,00	1.716.042.697,00	-
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0,00	711.550.000,00	(711.550.000,00)
523129	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.706.135.541,00	1.720.820.541,00	(14.685.000,00)
523199	Beban Pemeliharaan Lainnya	220.213.800,00	220.213.800,00	-
593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	1.154.762.980,00	0,00	1.154.762.980,00

595113	Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	59.204.900,00	0,00	59.204.900,00
Pengembalian Beban/Belanja		-	-	-
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	-	-	-
Jumlah Beban/Belanja Neto		8.981.402.239,00	9.237.859.489,00	(256.457.250,00)

Selisih Beban/Belanja Pemeliharaan sebesar Rp256.457.250,00 dapat dirinci sebagai berikut :

- Selisih Beban/Belanja Pemeliharaan sebesar (Rp54.483.770,00) antara Laporan Operasional dengan Laporan Realisasi Anggaran disebabkan adanya perbedaan selisih Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar (Rp497.696.750,00), Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar (Rp711.550.000,00), dan Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan sebesar Rp1.154.762.980,00 yang telah dijelaskan sebelumnya pada CaLK Neraca mengenai Persediaan.
- Selisih Beban/Belanja Pemeliharaan sebesar Rp201.973.480,00 disebabkan adanya jurnal penyesuaian sebagai berikut :

Nomor Jurnal	Keterangan	Nilai (Rp)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (523111)		
202012450448046	Reklasifikasi Beban menjadi aset atas sarana pendukung pemeliharaan Gedung dan Bangunan sesuai dengan SPM/SP2D No. 00756/201391304020896 tgl. 10/07/2020	49.341.380,00
JRNBMN	Koreksi atas Kapitalisasi Aset dari Belanja Pemeliharaan - Revitalisasi Selasar di Satker ANRI Jakarta	197.152.000,00
Jumlah		246.493.380,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (523129)		
202012450448045	Reklasifikasi Beban menjadi aset atas sarana pendukung pemeliharaan peralatan dan mesin sesuai dengan SPM/SP2D No. 00729/201391304019553 tgl. 29/06/2020	3.850.000,00
202006450448016	Reklasifikasi Beban menjadi aset atas sarana pendukung pemeliharaan sesuai dengan SPM/SP2D No. 00745/201391302017585 tgl. 25/06/2020	2.695.000,00
202006450448017	Reklasifikasi Beban menjadi aset atas sarana pendukung pemeliharaan sesuai dengan SPM/SP2D No. 00730/201391304019347 tgl. 25/06/2020	8.140.000,00
Jumlah		14.685.000,00
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan (595113)		
202012450448049	Koreksi atas Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan yang berasal dari Hibah (masuk) Pemerintah Provinsi Riau	(59.204.900,00)
Jumlah		(59.204.900,00)
Jumlah selisih Beban/Belanja Barang Keperluan Perkantoran antara LRA dengan LO		201.973.480,00

Telah dilakukan koreksi hasil kesepakatan bersama (Tripartit) atas usulan jurnal koreksi BPK-RI berupa Koreksi atas Kapitalisasi Aset dari Belanja Pemeliharaan dalam rangka Revitalisasi Selasar di Satker ANRI Jakarta sebesar Rp197.152.000,00 dan Koreksi atas Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan yang berasal dari Hibah (masuk) Pemerintah Provinsi Riau

sebesar Rp59.204.900,00. Koreksi tersebut berdampak pada perubahan nilai Beban Pemeliharaan dalam LKKL ANRI TA. 2020 (*Unaudited*) dari semula sebesar Rp9.119.349.339,00 menjadi Rp8.981.402.239,00 atau terjadi penurunan sebesar Rp137.947.100,00.

*Beban Perjalanan Dinas
Rp6.335.944.967,00*

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp6.335.944.967,00 dan Rp42.140.628.136,00 mengalami penurunan sebesar (Rp35.804.683.169,00) atau -84,96 persen dari periode sebelumnya. Beban Perjalanan Dinas berdasarkan akun memiliki rincian sebagai berikut :

*Rincian Beban Perjalanan Dinas Berdasarkan Akun
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019*

Uraian	Beban Perjalanan Dinas		Kenaikan/Penurunan	
	2020 (Rp)	2019 (Rp)	(Rp)	(%)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri	6.505.646.299,00	39.845.943.001,00	(33.340.296.702,00)	-83,67
524111 Beban Perjalanan Biasa	2.829.978.299,00	22.309.020.001,00	(19.479.041.702,00)	-87,31
524113 Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	262.275.000,00	1.421.498.000,00	(1.159.223.000,00)	-81,55
524114 Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	934.019.000,00	5.970.928.000,00	(5.036.909.000,00)	-84,36
524115 Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi Covid-19	192.300.000,00	-	192.300.000,00	0,00
524119 Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	2.287.074.000,00	10.144.497.000,00	(7.857.423.000,00)	-77,46
Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	-	3.285.973.137,00	(3.285.973.137,00)	-100,00
524211 Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	-	2.249.152.682,00	(2.249.152.682,00)	-100,00
524219 Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	-	1.036.820.455,00	(1.036.820.455,00)	-100,00
Pengembalian Beban	(169.701.332,00)	(991.288.002,00)	821.586.670,00	-82,88
524111 Belanja Perjalanan Biasa	(144.826.632,00)	(783.275.762,00)	638.449.130,00	-81,51
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	(2.396.400,00)	(3.000.000,00)	603.600,00	-20,12
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	(2.977.500,00)	(26.915.000,00)	23.937.500,00	-88,94
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	(19.500.800,00)	(35.740.000,00)	16.239.200,00	-45,44
524211 Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri	-	(132.587.440,00)	132.587.440,00	-100,00
524219 Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	-	(9.769.800,00)	9.769.800,00	-100,00
Jumlah Beban Perjalanan Dinas	6.335.944.967,00	42.140.628.136,00	(35.804.683.169,00)	-84,96

Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

Beban Perjalanan Dinas terdiri atas :

1. Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebesar Rp6.505.646.299,00 secara keseluruhan mengalami penurunan sebesar (Rp33.340.296.702,00) atau -83,67 persen dibanding 31 Desember 2019;
2. Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri sebesar Rp0,00 secara keseluruhan mengalami penurunan sebesar (Rp3.285.973.137,00) atau -100,00 persen dibanding 31 Desember 2019;
3. Pengembalian Beban sebesar (Rp169.701.332,00) secara keseluruhan mengalami kenaikan sebesar Rp821.586.670,00 atau -82,88 persen dibanding 31 Desember 2019.

*Rincian Beban Perjalanan Dinas Berdasarkan Satuan Kerja
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019*

Satuan Kerja	Beban Perjalanan Dinas		Kenaikan/Penurunan	
	2020	2019	(Rp)	(%)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat	-	276.402.000,00	(276.402.000,00)	(100,00)
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah	-	401.462.300,00	(401.462.300,00)	(100,00)
Badan Perpustakaan Dan Arsip Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	-	83.070.180,00	(83.070.180,00)	(100,00)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur	-	584.730.000,00	(584.730.000,00)	(100,00)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh	-	322.294.600,00	(322.294.600,00)	(100,00)
Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Provinsi Sumatera Utara	-	366.448.600,00	(366.448.600,00)	(100,00)
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat	-	246.388.354,00	(246.388.354,00)	(100,00)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau	-	185.128.000,00	(185.128.000,00)	(100,00)
Kantor Arsip Provinsi Jambi	-	202.445.800,00	(202.445.800,00)	(100,00)
Kantor Arsip Daerah Provinsi Sumatera Selatan	-	229.749.500,00	(229.749.500,00)	(100,00)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung	-	192.281.900,00	(192.281.900,00)	(100,00)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat	-	241.950.053,00	(241.950.053,00)	(100,00)
Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah	-	287.335.000,00	(287.335.000,00)	(100,00)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan	-	194.900.600,00	(194.900.600,00)	(100,00)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Timur	-	202.000.240,00	(202.000.240,00)	(100,00)
Kantor Kearsipan Provinsi Sulawesi Utara	-	200.745.700,00	(200.745.700,00)	(100,00)

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah	-	251.505.600,00	(251.505.600,00)	(100,00)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan	-	350.285.400,00	(350.285.400,00)	(100,00)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tenggara	-	277.119.006,00	(277.119.006,00)	(100,00)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Maluku	-	269.218.300,00	(269.218.300,00)	(100,00)
Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi Bali	-	192.608.978,00	(192.608.978,00)	(100,00)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat	-	193.100.224,00	(193.100.224,00)	(100,00)
Dinas Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Timur	-	350.528.300,00	(350.528.300,00)	(100,00)
Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua	-	644.749.800,00	(644.749.800,00)	(100,00)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu	-	181.358.000,00	(181.358.000,00)	(100,00)
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Maluku Utara	-	230.983.300,00	(230.983.300,00)	(100,00)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten	-	111.340.200,00	(111.340.200,00)	(100,00)
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	-	112.633.300,00	(112.633.300,00)	(100,00)
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo	-	122.881.000,00	(122.881.000,00)	(100,00)
Kantor Arsip Daerah Prov. Kepulauan Riau	-	99.476.489,00	(99.476.489,00)	(100,00)
Kantor Arsip Daerah Provinsi Papua Barat	-	352.000.800,00	(352.000.800,00)	(100,00)
Kantor Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Barat	-	116.926.506,00	(116.926.506,00)	(100,00)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara	-	125.998.067,00	(125.998.067,00)	(100,00)
ANRI Jakarta (KP)	5.445.899.125,00	30.752.859.045,00	(25.306.959.920,00)	(82,29)
BAST Aceh (KD)	154.189.642,00	520.502.917,00	(366.313.275,00)	(70,38)
Pusat Jasa Kearsipan (KP)	683.956.200,00	764.399.715,00	(80.443.515,00)	(10,52)
Pusidklat Kearsipan Bogor (KP)	51.900.000,00	1.902.820.362,00	(1.850.920.362,00)	(97,27)
Jumlah	6.335.944.967,00	42.140.628.136,00	(35.804.683.169,00)	(84,96)

Beban Perjalanan Dinas (neto) pada Laporan Operasional Tahun 2020 sebesar Rp6.335.944.967,00 sedangkan realisasi Belanja Perjalanan Dinas (neto) pada Laporan Realisasi Anggaran tahun 2020 sebesar Rp6.335.944.967,00 sehingga tidak terdapat selisih sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :

Kode Akun	Uraian Jenis Beban/Belanja	Laporan Operasional (Rp)	Laporan Realisasi Anggaran (Rp)	Selisih LO dan LRA (Rp)
Beban/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		6.505.646.299,00	6.505.646.299,00	0,00
524111	Beban Perjalanan Biasa	2.829.978.299,00	2.829.978.299,00	0,00
524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	262.275.000,00	262.275.000,00	0,00
524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	934.019.000,00	934.019.000,00	0,00
524115	Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi Covid-19	192.300.000,00	192.300.000,00	0,00
524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	2.287.074.000,00	2.287.074.000,00	0,00

Beban/Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri		-	-	0,00
524211	Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	-	-	0,00
524219	Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	-	-	0,00
Pengembalian Beban/Belanja		(169.701.332,00)	(169.701.332,00)	0,00
524111	Belanja Perjalanan Biasa	(144.826.632,00)	(144.826.632,00)	0,00
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	(2.396.400,00)	(2.396.400,00)	0,00
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	(2.977.500,00)	(2.977.500,00)	0,00
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	(19.500.800,00)	(19.500.800,00)	0,00
524211	Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri	-	-	0,00
524219	Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	-	-	0,00
Jumlah Beban Perjalanan Dinas		6.335.944.967,00	6.335.944.967,00	0,00

Beban Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda Rp4.438.023,00

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

Beban Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp4.438.023,00 dan Rp4.334.256.173,00 mengalami penurunan sebesar (Rp4.329.818.150,00) atau -99,90 persen dari periode sebelumnya. Beban Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda berdasarkan akun memiliki rincian sebagai berikut :

Rincian Beban Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda Berdasarkan Akun per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Beban Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda		Kenaikan/Penurunan	
	2020 (Rp)	2019 (Rp)	(Rp)	(%)
Beban Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	4.438.023,00	4.334.256.173,00	(4.329.818.150,00)	-99,90
Beban Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	-	6.576.735,00	(6.576.735,00)	-100,00
Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	4.438.023,00	4.327.679.438,00	(4.323.241.415,00)	-99,90
Pengembalian Beban	-	-	0,00	0,00
Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	-	-	0,00	0,00
Jumlah Beban Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	4.438.023,00	4.334.256.173,00	(4.329.818.150,00)	-99,90

Beban Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat pada satker ANRI Jakarta merupakan buku-buku koleksi layanan arsip dan paket pengembangan aplikasi SIKD pada satker ANRI Jakarta.

Beban Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (neto) pada Laporan Operasional Tahun 2020 sebesar Rp4.438.023,00 sedangkan realisasi Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (neto) pada Laporan Realisasi Anggaran tahun 2020 sebesar Rp0,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp4.438.023,00 dengan rincian sebagai berikut:

Kode Akun	Uraian Jenis Beban/Belanja	Laporan Operasional (Rp)	Laporan Realisasi Anggaran (Rp)	Selisih LRA dan LO (Rp)
	Beban/Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	4.438.023,00	-	4.438.023,00
526112	Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	-	-	-
526311	Beban Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	-	0,00	-
593128	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	4.438.023,00	0,00	4.438.023,00
	Pengembalian Beban/Belanja	-	-	-
526112	Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	-	-	-
	Jumlah Beban/Belanja Neto	4.438.023,00	-	4.438.023,00

Selisih Beban/Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda sebesar Rp4.438.023,00 antara Laporan Operasional dengan Laporan Realisasi Anggaran disebabkan adanya perbedaan pengakuan mengenai belanja pada LRA dan beban pada LO. Beban Barang tersebut adalah buku-buku koleksi layanan arsip di satker ANRI Jakarta sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya pada CaLK Neraca mengenai Persediaan.

Telah dilakukan koreksi hasil kesepakatan bersama (Tripartit) atas usulan jurnal koreksi BPK-RI berupa Koreksi lebih catat persediaan berdasarkan hasil *stock opname* pada Satker ANRI Jakarta sebesar Rp143.667,00 dan

Koreksi kurang catat persediaan berdasarkan hasil *stock opname* pada Satker ANRI Jakarta sebesar Rp104.900,00. Koreksi tersebut berdampak pada perubahan nilai Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam LKKL ANRI TA. 2020 (*Unaudited*) dari semula sebesar Rp4.399.256,00 menjadi Rp4.438.023,00 atau terjadi kenaikan sebesar Rp38.767,00.

*Beban Bantuan Sosial
Rp0,00*

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Tahun 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

*Beban Penyusutan dan
Amortisasi
Rp36.797.183.311,00*

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp36.797.183.311,00 dan Rp35.663.831.947,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.133.351.364,00 atau 3,18 persen dari periode sebelumnya. Beban Penyusutan dan Amortisasi berdasarkan akun memiliki rincian sebagai berikut :

*Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Berdasarkan Akun
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019*

Uraian	Beban Penyusutan dan Amortisasi		Kenaikan/Penurunan	
	2020 (Rp)	2019 (Rp)	(Rp)	(%)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	36.797.183.311,00	35.663.831.947,00	1.133.351.364,00	3,18
591111 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	12.925.738.450,00	12.850.709.903,00	75.028.547,00	0,58
591211 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	13.830.578.037,00	12.919.262.666,00	911.315.371,00	7,05
591311 Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	8.090.830.288,00	8.133.599.956,00	(42.769.668,00)	-0,53
591312 Beban Penyusutan Irigasi	5.796.916,00	9.566.897,00	(3.769.981,00)	-39,41
591313 Beban Penyusutan Jaringan	202.868.914,00	202.868.912,00	2,00	0,00
592222 Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	8.209.961,00	112.961.620,00	(104.751.659,00)	-92,73
Jumlah Penyusutan	35.064.022.566,00	34.228.969.954,00	835.052.612,00	2,44
592115 Beban Amortisasi Software	1.733.160.745,00	1.434.861.993,00	298.298.752,00	20,79
Jumlah Amortisasi	1.733.160.745,00	1.434.861.993,00	298.298.752,00	20,79
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	36.797.183.311,00	35.663.831.947,00	1.133.351.364,00	3,18

Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi berdasarkan satuan kerja memiliki rincian sebagai berikut :

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Berdasarkan Satuan Kerja per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Satuan Kerja	Beban Penyusutan dan Amortisasi		Kenaikan/Penurunan	
	2020	2019	(Rp)	(%)
ANRI Jakarta (KP)	33.536.038.453,00	33.661.996.579,00	(125.958.126,00)	(0,37)
BAST Aceh (KD)	2.131.526.471,00	1.372.389.330,00	759.137.141,00	55,31
Pusat Jasa Kearsipan (KP)	876.781.748,00	618.374.788,00	258.406.960,00	41,79
Pusidklat Kearsipan Bogor (KP)	252.836.639,00	11.071.250,00	241.765.389,00	2.183,72
Jumlah	36.797.183.311,00	35.663.831.947,00	1.133.351.364,00	3,18

Telah dilakukan koreksi hasil kesepakatan bersama (Tripartit) atas usulan jurnal koreksi BPK-RI yang berdampak pada penambahan Beban Penyusutan di antaranya berupa Koreksi atas Kapitalisasi Aset dari Belanja Pemeliharaan dalam rangka Revitalisasi Selasar di Satker ANRI Jakarta sebesar Rp8.961.456,00 dan Koreksi atas Penyusutan Gedung dan Bangunan (Intrakomptabel) yang berasal dari Hibah Pemerintah Provinsi Riau sebesar Rp1.610.288,00 serta penurunan Beban Penyusutan yang berasal dari Koreksi atas Rekalkulasi Revaluasi pada Satker ANRI Jakarta sebesar Rp5.319.612,00. Koreksi tersebut berdampak pada perubahan nilai Beban Penyusutan secara keseluruhan dalam LKKL ANRI TA. 2020 (*Unaudited*) dari semula sebesar Rp36.791.931.179,00 menjadi Rp36.797.183.311,00 atau terjadi kenaikan sebesar Rp5.252.132,00.

*Beban Penyisihan
Piutang Tak Tertagih
Rp0,00*

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidakterttagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Surplus dari Kegiatan
Non Operasional
Rp1.365.642.323,00

D.11 Kegiatan Non Operasional

Surplus dari Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp1.365.642.323,00 dan Rp366.398.781,00 mengalami kenaikan sebesar Rp999.243.542,00 atau 272,72 persen dari periode sebelumnya. Surplus dari Kegiatan Non Operasional memiliki rincian sebagai berikut :

Uraian	2020	2019	Kenaikan/Penurunan	
			(Rp)	(%)
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional				
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	185.921.000,00	94.999.999,00	90.921.001,00	95,71
Arsip Nasional RI Jakarta (KP)	185.921.000,00	94.999.999,00	90.921.001,00	95,71
BAST Aceh (KD)	0,00	0,00	0,00	0,00
Pusat Jasa Kearsipan (KP)	0,00	0,00	0,00	0,00
Pusdiklat Kearsipan Bogor (KD)	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	112.253.572,00	111.369.903,00	883.669,00	0,79
Arsip Nasional RI Jakarta (KP)	112.253.572,00	111.369.903,00	883.669,00	0,79
BAST Aceh (KD)	0,00	0,00	0,00	0,00
Pusat Jasa Kearsipan (KP)	0,00	0,00	0,00	0,00
Pusdiklat Kearsipan Bogor (KD)	0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus (Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	73.667.428,00	(16.369.904,00)	90.037.332,00	(550,02)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	1.403.507.702,00	412.360.234,00	991.147.468,00	240,36
Arsip Nasional RI Jakarta (KP)	1.125.703.128,00	382.906.109,00	742.797.019,00	193,99
BAST Aceh (KD)	270.076.274,00	17.379.525,00	252.696.749,00	1.453,99
Pusat Jasa Kearsipan (KP)	1.570.000,00	11.851.500,00	(10.281.500,00)	(86,75)
Pusdiklat Kearsipan Bogor (KD)	6.158.300,00	223.100,00	5.935.200,00	2.660,33
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	111.532.807,00	29.591.549,00	81.941.258,00	276,91
Arsip Nasional RI Jakarta (KP)	108.777.857,00	21.572.909,00	87.204.948,00	404,23
BAST Aceh (KD)	539.950,00	643.640,00	(103.690,00)	(16,11)
Pusat Jasa Kearsipan (KD)	1.950.000,00	7.375.000,00	(5.425.000,00)	(73,56)
Pusdiklat Kearsipan Bogor (KD)	265.000,00	0,00	265.000,00	0,00
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	1.291.974.895,00	382.768.685,00	909.206.210,00	237,53
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	1.365.642.323,00	366.398.781,00	999.243.542,00	272,72

D.11.1 Surplus/(Defisit) dari Pelepasan Aset Non Lancar

Surplus dari Pelepasan Aset Non Lancar pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp73.667.428,00 dan (Rp16.369.904,00). Jumlah pada 31 Desember 2020 merupakan selisih

antara Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp185.921.000,00 dikurangi Beban Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp112.253.572,00 dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar berasal dari satker ANRI Jakarta atas Pendapatan Pemindahtanganan BMN Lainnya sebesar Rp185.291.000,00;
2. Beban Pelepasan Aset Non Lancar berasal dari satker ANRI Jakarta atas Beban Kerugian Pelepasan Aset sebesar Rp112.253.572,00 yakni berupa penghapusan Barang Milik Negara (BMN) dari Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan (166112) berupa Sedan dengan kode kelompok barang 3.02.01.01.001 yang memiliki nilai perolehan sebesar Rp523.850.000,00 dan akumulasi penyusutan sebesar Rp411.596.428,00 per tanggal penghapusan barang sehingga terdapat nilai buku sebesar Rp112.253.572,00 yang diakui sebagai Beban Kerugian Pelepasan Aset.

D.11.3 Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp1.291.974.895,00 dan Rp382.768.685,00. Jumlah pada 31 Desember 2020 merupakan selisih antara Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp1.403.507.702,00 dikurangi Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp111.532.807,00 dengan penjelasan sebagai berikut :

D.11.3.1 Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya senilai Rp1.403.507.702,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Penyesuaian Nilai Persediaan (491511) yang disebabkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat menggunakan metode penilaian persediaan harga perolehan terakhir yaitu sebesar Rp147.215.038,00 yang berasal dari satker ANRI Jakarta sebesar Rp142.430.398,00, satker Balai Arsip Tsunami Aceh

- sebesar Rp2.909.640,00, satker Pusat Jasa Kearsipan sebesar Rp1.570.000,00, dan satker Pusdiklat Kearsipan sebesar Rp305.000,00;
2. Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL (425912) sebesar Rp26.852.475,00 yang berasal dari satker ANRI Jakarta sebesar Rp20.999.175,0 dan satker Pusdiklat Kearsipan sebesar Rp5.853.300,00;
 3. Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL (425913) sebesar Rp1.226.440.189,00 yang berasal dari satker ANRI Jakarta sebesar Rp959.273.555,00 dan satker BAST Aceh sebesar Rp267.166.634,00;
 4. Pendapatan Penyelesaian Ganti/Kerugian Negara Terhadap Pegawai (425791) sebesar Rp3.000.000,00 berasal dari satker ANRI Jakarta;

Telah dilakukan koreksi hasil kesepakatan bersama (Tripartit) atas usulan jurnal koreksi BPK-RI berupa Koreksi atas pengembalian kelebihan pembayaran Belanja Pegawai sebesar Rp24.000.000,00. Koreksi tersebut berdampak pada perubahan nilai Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya dalam LKKL ANRI TA. 2020 (*Unaudited*) dari semula sebesar Rp1.427.507.702,00 menjadi Rp1.403.507.702,00 atau terjadi penurunan sebesar Rp24.000.000,00.

D.11.3.2 Beban dari Kegiatan Non Operasional lainnya

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya senilai Rp111.532.807,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Penyesuaian Nilai Persediaan (593311) yang disebabkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat menggunakan metode penilaian persediaan harga prolehan terakhir yaitu sebesar Rp101.927.166,00 yang berasal dari satker ANRI Jakarta sebesar Rp99.172.216,00, satker Pusdiklat Kearsipan sebesar Rp265.000,00, satker BAST Aceh sebesar Rp539.950,00, dan

- satker Pusat Jasa Kearsipan sebesar Rp1.950.000,00;
2. Beban Persediaan Rusak/Usang (596121) sebesar Rp9.605.641,00 yang berasal dari satker ANRI Jakarta.

Telah dilakukan koreksi hasil kesepakatan bersama (Tripartit) atas usulan jurnal koreksi BPK-RI berupa Koreksi Penghapusan Persediaan Usang/Rusak Satker ANRI Jakarta sebesar Rp9.011.789,00. Koreksi tersebut berdampak pada perubahan nilai Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya dalam LKKL ANRI TA. 2020 (*Unaudited*) dari semula sebesar Rp102.521.018,00 menjadi Rp111.532.807,00 atau terjadi kenaikan sebesar Rp9.011.789,00.

Pos Luar Biasa Rp0,00 **D.12 Pos Luar Biasa**

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas.

Beban Penanganan COVID-19

Catatan Lainnya atas Laporan Operasional

KODE AKUN	URAIAN BEBAN	ARSIP NASIONAL RI				TOTAL
		ANRI Jakarta	Pusat Jasa Kearsipan	BAST	Pusdiklat Kearsipan	
		(450448)	(418929)	(681464)	(418934)	
521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	2.540.249.621	18.923.953	117.815.000	20.374.025	2.697.362.599
522192	Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	1.618.341.733	9.280.000	44.100.000	803.400.000	2.475.121.733
524115	Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	168.300.000	24.000.000	-	-	192.300.000
521241	Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-	149.675.000	149.675.000
TOTAL BEBAN		4.326.891.354	52.203.953	161.915.000	973.449.025	5.514.459.332

Beban Penanganan COVID-19 di lingkungan Arsip Nasional RI Tahun Anggaran 2020 terdiri atas Beban Barang Operasional, Beban Jasa, Beban Perjalanan Dinas, dan Beban Barang Non Operasional dengan total nilai sebesar Rp5.514.459.332,00. Penyajian nilai Beban Penanganan Pandemi COVID-19 tidak memiliki perbedaan dengan nilai Belanja Penanganan Pandemi COVID-19 pada LRA sehingga tidak terdapat selisih Rp0,00.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

Rp1.245.699.800.421,00

E.1 Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas Awal pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp1.245.699.800.421,00 dan Rp469.273.762.570,00.

Surplus (Defisit) LO

(Rp174.158.879.102,00)

E.2 Surplus (Defisit) LO

Defisit LO pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar (Rp174.158.879.102,00) dan (Rp229.408.646.266,00). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, sampai dengan pos luar biasa.

*Dampak Kumulatif
Perubahan Kebijakan
Akuntansi/Kesalahan
Mendasar Rp0,00*

E.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Tidak terdapat transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.

*Selisih Revaluasi Aset
Tetap Rp0,00*

E.4 Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

E.4.1 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Nilai pada Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp724.611.109.018,00.

*Koreksi Nilai Aset Tetap
Non Revaluasi
Rp136.182.093,00*

E.4.2 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp136.182.093,00 dan (Rp39.836.299.654,00).

Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Telah dilakukan koreksi hasil kesepakatan bersama (Tripartit) atas usulan jurnal koreksi BPK-RI berupa Koreksi atas Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan yang berasal dari Hibah Pemerintah Provinsi Riau senilai Rp220.233.700 dan Koreksi atas Rekalkulasi Revaluasi pada Satker ANRI Jakarta sebesar Rp42.556.907,00. Koreksi tersebut berdampak pada perubahan nilai Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi dalam LKKL ANRI TA. 2020 (*Unaudited*) dari semula sebesar (Rp41.494.700,00) menjadi Rp136.182.093,00 atau terjadi kenaikan sebesar sebesar Rp177.676.793,00.

*Koreksi Nilai Aset
Lainnya Non Revaluasi
Rp0,00*

E.4.3 Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan (Rp62.398.591,00). Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

*Ekuitas Transaksi
Lainnya Rp0,00*

E.4.4 Ekuitas Transaksi Lainnya

Ekuitas Transaksi Lainnya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp16.241.500,00. Ekuitas Transaksi Lainnya adalah koreksi lain-lain yang merupakan koreksi selain terkait dengan Barang Milik Negara, antara lain yaitu koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

Koreksi atas
Reklasifikasi
Persediaan/Aset
Tetap/Aset Lainnya
Rp0,00

E.4.5 Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya

Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp25.519.398.478,00. Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya merupakan koreksi atas nilai reklasifikasi yang terjadi.

Transaksi Antar Entitas
Rp145.945.410.864,00

E.5 Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp145.945.410.864,00 dan Rp295.586.633.366,00. Transaksi Antar Entitas merupakan transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antara BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Kode Akun	Transaksi Antar Entitas	2020	2019
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	156.632.536.842,00	309.389.633.258,00
313121	Diterima dari Entitas Lain	(13.664.271.146,00)	(13.802.999.892,00)
313211	Transfer Keluar	(60.122.517.402,00)	(3.226.400,00)
313221	Transfer Masuk	60.122.517.402,00	3.226.400,00
391131	Pengesahan Hibah Langsung	2.977.145.168,00	-
	Jumlah	145.945.410.864,00	295.586.633.366,00

Rincian transaksi antar entitas terdiri dari:

E.5.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2020, DDEL sebesar (Rp13.664.271.146,00) sedangkan DKEL sebesar Rp156.632.536.842,00.

Kode Satker	Uraian Satker	DDEL	DKEL
087.01.450448	ANRI Jakarta (KP)	(2.072.591.912,00)	144.508.763.726,00
087.01.681464	BAST Aceh (KD)	(269.712.134,00)	2.460.174.585,00
087.01.418929	Pusat Jasa Kearsipan (KP)	(8.194.463.800,00)	6.594.031.926,00
087.01.418934	Pusidklat Kearsipan Bogor (KP)	(3.127.503.300,00)	3.069.566.605,00
Jumlah		(13.664.271.146,00)	156.632.536.842,00

Telah dilakukan koreksi hasil kesepakatan bersama (Tripartit) atas usulan jurnal koreksi BPK-RI berupa Koreksi atas pengembalian kelebihan pembayaran Belanja Pegawai sebesar Rp24.000.000,00. Koreksi tersebut berdampak pada perubahan nilai DDEL/DKEL dalam LKKL ANRI TA. 2020 (*Unaudited*) dari semula sebesar Rp13.688.271.146,00 (DDEL) dan Rp156.656.536.842 (DKEL) menjadi Rp13.664.271.146,00 (DDEL) dan Rp156.632.536.842,00 (DKEL) atau terjadi penurunan sebesar Rp24.000.000,00 (DDEL/DKEL).

E.5.2 Transfer Masuk dan Transfer Keluar

Transfer Keluar dan Transfer Masuk untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Transfer Keluar dan Transfer Masuk merupakan perpindahan aset antar entitas, baik antar entitas akuntansi dalam satu entitas pelaporan maupun antar entitas akuntansi pada entitas pelaporan yang berbeda. Transfer Keluar dan Transfer Masuk Tahun 2020 berasal dari :

Kode Akun	Transaksi Antar Entitas	2020	2019
313211	Transfer Keluar	(60.122.517.402,00)	(3.226.400,00)
313221	Transfer Masuk	60.122.517.402,00	3.226.400,00
Jumlah		0,00	0,00

E.5.3 Pengesahan Hibah Langsung

- a) Telah diterima hibah tanah bangunan gedung yang berasal dari Pemerintah Daerah Provinsi Riau kepada Arsip Nasional Republik Indonesia senilai Rp2.636.945.168,00 sesuai BAST Hibah Nomor: 221/BA/2020 dan BA.16.A/BU/VII/2020 pada tanggal 6 Juli 2020. Atas hal tersebut dilakukan pencatatan dan pengajuan penerbitan nomor register kepada Direktorat Jenderal

Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko, Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Surat Kepala Biro Umum Nomor: PL.01.02/2673/2020, Hal: Pengajuan Permohonan Nomor Register Hibah pada tanggal 28 Desember 2020.

Nomor Register Hibah diterbitkan melalui Surat DJPB Nomor: S-6421/WB/2020, Hal: Hibah untuk Satker Arsip Nasional RI Jakarta (450448) pada tanggal 30 Desember 2020 dengan Nomor 24SMNH3A. Atas hal tersebut dilakukan pengesahan hibah langsung atas hibah Tanah (131111) senilai Rp2.416.711.468,00 dan Gedung dan Bangunan (133111) senilai Rp220.233.700,00 sesuai MPHL-BJS Nomor: 01802/450448/2020 tanggal 30 Desember 2020 dan Persetujuan MPHL-BJS dari KPPN Jakarta V Nomor: 1018746301.

- b) Telah diterima hibah tanah milik/dikuasai yang berasal dari Pemerintah Daerah Jawa Barat kepada Arsip Nasional Republik Indonesia senilai Rp340.200,00 sesuai BAST Hibah Nomor: 032/32/BPKAD dan PL.01.02/104/2020 pada tanggal 27 Mei 2020. Atas hal tersebut dilakukan pencatatan dan pengajuan penerbitan nomor register kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko, Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Surat Kepala Biro Umum Nomor: PL.01.02/2673/2020, Hal: Pengajuan Permohonan Nomor Register Hibah pada tanggal 28 Desember 2020.

Nomor Register Hibah diterbitkan melalui Surat DJPB Nomor: S-6421/WB/2020, Hal: Hibah untuk Satker Arsip Nasional RI Jakarta (450448) pada tanggal 30 Desember 2020 dengan Nomor 2HSQ286A. Atas hal tersebut dilakukan pengesahan hibah langsung atas hibah Tanah (131111) senilai Rp340.200,00 sesuai MPHL-BJS Nomor: 01801/450448/2020 tanggal 30 Desember

2020 dan Persetujuan MPHL-BJS dari KPPN Jakarta V Nomor:
118746297.

*Kenaikan/Penurunan
Ekuitas*

(Rp28.077.286.145,00)

E.6 Kenaikan/Penurunan Ekuitas

Nilai penurunan ekuitas pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar (Rp28.077.286.145,00) dan Rp776.426.037.851,00.

Ekuitas Akhir

Rp1.217.622.514.276,00

E.6 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp1.217.622.514.276,00 dan Rp1.245.699.800.421,00.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Satker ANRI Jakarta melakukan jurnal akrual beban listrik untuk pemakaian bulan Desember 2020 menggunakan dasar tagihan yang terbit di bulan Januari 2021, sehingga angka biaya menjadi akurat karena tidak menggunakan estimasi. Hal ini dilakukan untuk menjaga kualitas Laporan Keuangan yang akurat dan memadai sepanjang belum disampaikan kepada Kementerian Keuangan. Berikut daftar tagihan listrik pemakaian bulan Desember 2020 satker ANRI Jakarta, BAST Aceh, dan Pusdiklat Kearsipan :

No.	Tanggal Jurnal	Uraian	Nomor Dokumen	Tgl. Invoice	Nominal (Rp)
ANRI Jakarta					
1	31/12/2020	Pembayaran Tagihan Listrik Arsip Nasional ID Pel. 543100226856 dan ID Pel. 543800172044 penggunaan bulan Desember 2020	202012450448037	11/01/2021	506.664.165,00
2	31/12/2020	Pembayaran Tagihan Listrik Rumah Dinas Arsip Nasional ID Pel. 543104288535, ID Pel. 543100272725 dan ID Pel. 543100544670 penggunaan bulan Desember 2020	202012450448038	11/01/2021	7.116.304,00
3	31/12/2020	Pembayaran Tagihan Listrik Rumah Dinas Arsip Nasional ID Pel. 543104288535, ID Pel. 543100272725	202012450448039	11/01/2021	35.874.678,00
4	31/12/2020	Pembayaran Tagihan Listrik Gedung Gajah Mada ID Pel. 542100101176 penggunaan bulan Desember 2020	202012450448040	11/01/2021	10.364.295,00
5	31/12/2020	Pembayaran Tagihan PDAM Gedung Gajah Mada No. Meter 18735398 penggunaan bulan Desember 2020	202012450448041	08/01/2021	2.820.920,00
6	31/12/2020	Tagihan Jasa Telekomunikasi sesuai dengan tagihan bulan Januari 2021 atas penggunaan bulan Desember 2020	202012450448042	10/01/2021	2.012.975,00
7	31/12/2020	Tagihan Jasa Telekomunikasi sesuai dengan tagihan bulan Januari 2021 atas penggunaan bulan Desember 2020	202012450448044	20/01/2021	1.154.679,00
Jumlah					566.008.016,00

BAST Aceh					
1	31/12/2020	Tagihan Listrik Gd BASR bulan Januari 2021 atas Pemakaian bulan Desember 2020	202012681464010	Jan-21	40.164.833,00
2	31/12/2020	Tagihan Telepon Gd BAST bulan Januari 2021 atas Pemakaian bulan Desember 2020	202012681464011	Jan-21	1.047.903,00
3	31/12/2020	Tagihan PDAM BAST bulan Januari 2021 atas Pemakaian bulan Desember 2020	202012681464012	Jan-21	173.610,00
Jumlah					41.386.346,00

Pusdiklat Kearsipan					
1	31/12/2020	Tagihan jasa langganan listrik Pusdiklat Kearsipan bulan Januari 2021 (beban bulan Desember 2020)		Jan-21	10.124.634,00
2	31/12/2020	Tagihan jasa telekomunikasi Pusdiklat Kearsipan bulan Januari 2021 (beban bulan Desember 2020)		Jan-21	129.932,00
3	31/12/2020	Tagihan jasa langganan air Pusdiklat Kearsipan bulan Januari 2021 (beban bulan Desember 2020)		Jan-21	2.500.100,00
2	31/12/2020	Tagihan jasa langganan pembuangan sampah Pusdiklat Kearsipan bulan Januari 2021 (beban bulan Desember 2020)		Jan-21	300.000,00
3	31/12/2020	Tagihan langganan koran Pusdiklat Kearsipan bulan Januari 2021 (beban bulan Desember 2020)		Jan-21	215.000,00
Jumlah					13.269.666,00

Terdapat Penghapusan Persediaan Usang/Rusak dalam **Barang Lainnya untuk Dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat** pada Satker ANRI Jakarta berdasarkan Berita Acara No. BA-28/BU/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 dengan rincian sebagai berikut :

DAFTAR PENGHAPUSAN PERSEDIAAN USANG/RUSAK

KODE	URAIAN	KUANTITAS	RUPIAH
117128	BARANG LAINNYA UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT		
1010501008	Barang Persediaan	177	9.011.789
000016	- Ambonsche Landsbeschrijving	2	87.934
000020	- Biro Perjalanan Haji di Indonesia Masa Kolonial	2	90.266
000026	- Ikhtisar Keadaan Politik Hindia Belanda 839-1848	2	121.600
000029	- Inventaris Arsip Perkebunan 1816-1900	2	40.534
000038	- Laporan-laporan Desa (Desa Rapporten)	2	47.534
000039	- Laporan-Laporan tentang Gerakan protes di Jawa pada Abad	2	101.066
000042	- Memori Serah Jabatan Jawa Barat 1921-1930	9	399.897
000043	- Memori Serah Jabatan Jawa Barat I 1931-1940	10	467.000
000044	- Memori Serah Jabatan Jawa Barat Tengah 1921-1930	1	47.133
000045	- Memori Serah Jabatan Jawa Timur dan Tanah Kerajaan	5	237.665
000049	- Otonomi Daerah hindia belanda 1903-1940	2	45.600
000051	- PDRI (pemerintah Darurat RI) dikaji ulang MSI	1	44.067
000057	- Perdagangan Canda 1930- Perang Kemerdekaan RI	1	24.000
000059	- Perjuangan Mempertahankan Jakarta Masa Awal Proklamasi	1	24.467
000062	- Sarekat Islam Lokal	19	1.095.027
000065	- Surat-surat perjanjian antara kesultanan Riau dengan VOC	3	170.199
000066	- Surat-Surat perjanjian antara kesultanan Banjarmasin dengan	93	4.715.100
000067	- Surat-surat perjanjian antara kerajaan Bali/Lombok dengan	19	1.202.700
000072	- Laporan Politik 1837	1	50.000
JUMLAH		177	9.011.789

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

F.2.1 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

Selama periode berjalan terkait Pendapatan tidak terdapat perubahan estimasi, sementara terkait dengan belanja telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada tanggal 28 April 2020 dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kebijakan sebagai antisipasi terhadap perubahan kondisi dan prioritas kebutuhan belanja, mempercepat pencapaian kinerja ANRI Tahun Anggaran 2020, dan meningkatkan efektifitas serta kualitas belanja. Revisi Anggaran dilakukan karena pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran berubah. Pergeseran pagu anggaran antar fungsi, dan/atau antar program

dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan. Perubahan anggaran peruntukan pada level program. Revisi DIPA per tanggal 28 April 2020 sudah termasuk dalam kegiatan *refocusing* belanja Kementerian/Lembaga dalam rangka penanggulangan dampak *Covid-19*.

Terhitung Januari s.d. September 2020, ANRI telah melaksanakan revisi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu berupa 2 (dua) kali revisi anggaran dan 1 (satu) kali revisi rumusan informasi kinerja ANRI TA 2020. Revisi Anggaran I menyebabkan pengurangan Pagu Anggaran sebesar Rp25.339.212.000,00 pada satker berikut, di antaranya :

- Satker ANRI Jakarta (450448) sebesar Rp22.949.289.000,00. Semula Rp176.334.206.000,00 menjadi Rp153.384.917.000,00;
- Satker Pusat Jasa Kearsipan (418929) sebesar Rp316.871.000,00. Semula Rp7.168.072.000,00 menjadi Rp6.851.201.000,00;
- Satker Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan (418934) sebesar Rp2.073.052.000,00. Semula Rp5.509.131.000,00 menjadi Rp3.436.079.000,00.

Revisi Anggaran ke-II ANRI merupakan revisi penyesuaian target dan anggaran unit kerja di lingkup Arsip Nasional Republik Indonesia atas revisi anggaran penyesuaian APBN-P yang menyebabkan penyesuaian volume pada keluaran dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kode	Keluaran	Volume	
			Semula	Menjadi
1	3620.001	Penyelematan Arsip Statis	465 berkas/lbr/reel/roll	70 berkas/lbr/reel/roll
2	3620.002	Persetujuan/Pertimbangan Usul Musnah	35 persetujuan/pertimbangan	5 persetujuan/pertimbangan
3	3620.003	Wawancara Sejarah Lisan	16 kaset/CD	2 kaset/CD
4	3622.006	Instansi Pemerintah Pusat yang Menerapkan E-Arsip Terintegrasi di Pemerintah Pusat	36 instansi	5 instansi
5	3622.007	Instansi Pemerintah yang Menerima Pendampingan Pengelolaan Arsip Terjaga dan Arsip Aset	10 instansi	2 instansi
6	3622.009	Rekomendasi Hasil Pengawasan Kearsipan yang Ditindaklanjuti	25 rekomendasi	4 rekomendasi
7	3623.016	Pelayanan Pengguna Arsip Sebagai Meori Kolektif dan Jati Diri Bangsa	254.650 pengguna	38.198 pengguna
8	3624.005	Sarana Bantu Temu Balik Arsip Terjaga dan Arsip Statis Nasional	7 inventaris/daftar arsip	2 inventaris/daftar arsip
9	3625.001	Preservasi Arsip Terjaga dan Arsip Statis Sebagai Warisan Budaya	122.851 reel/roll/lbr/kst/fs	81.472 reel/roll/lbr/kst/fs
10	3629.005	Rekomendasi Kebijakan yang Digunakan dan atau Ditetapkan	4 rekomendasi	1 rekomendasi
11	5356.002	Pencipta Arsip dan Lembaga Kearsipan yang Diawasi	127 instansi	41 instansi
12	5357.002	SDM Kearsipan yang Mendapat Pembinaan, Pengembangan, dan Pemberdayaan	270 orang	100 orang
13	5357.003	SDM Kearsipan yang Mendapat Sertifikasi Penilaian Kinerja	250 orang	209 orang
14	5357.004	Kader Kearsipan yang Mendapat Pembinaan, Pengembangan, dan Pemberdayaan	125 orang	-
15	5358.009	Pemerintah Provinsi yang Menerima Pendampingan Pengelolaan Arsip Terjaga dan Arsip Aset	7 provinsi	1 provinsi
16	5358.010	Pemerintah Provinsi/Kab/Kota yang Menerapkan E-Arsip Terintegrasi	18 prov/kab/kota	3 prov/kab/kota
17	5358.012	Rekomendasi Hasil Pengawasan Kearsipan yang Ditindaklanjuti	50 rekomendasi	7 rekomendasi
18	5359.006	Pemerintah Provinsi/Kab/Kota yang Menerima Pengelolaan Arsip Terjaga dan Arsip Aset	8 prov/kab/kota	2 prov/kab/kota
19	5359.007	Pemerintah Provinsi/Kab/Kota yang Menerapkan E-Arsip Terintegrasi	21 kab/kota	3 kab/kota
20	5360.007	Pemanfaatan Arsip Sebagai Memori Kolektif dan Jati Diri Bangsa Melalui Jaringan Informasi Kearsipan Nasional	10.120 arsip	2.327 arsip

Revisi Anggaran ke-III merupakan Revisi Administratif berupa Revisi Rumusan Informasi Kinerja ANRI TA 2020 sebagai tindak lanjut adanya Surat Dirjen Anggaran No.S-451/AG/2020 Hal: hasil evaluasi

kinerja dan anggaran aspek konteks sebagai upaya optimalisasi pelaksanaan evaluasi kinerja anggaran TA 2020.

Revisi Anggaran ke-IV merupakan Revisi Realokasi Anggaran Belanja Pegawai (51) untuk keperluan penanganan COVID-19. Revisi Anggaran ke-V merupakan pemuktahiran ADK atas perubahan lembar ketiga DIPA terkait RPD dan sebagainya yang diusulkan oleh unit kerja Biro Umum.

Berikut disajikan data historis perubahan dan/atau pergeseran pagu anggaran selama Tahun Anggaran 2020 :

(1/2)					
Kode Akun	Uraian	Pagu Anggaran Semula	Pagu Anggaran Setelah Revisi		
			Apr-20	Jun-20	Jul-20
51	BELANJA PEGAWAI	102.269.147.000	105.934.216.000	105.934.216.000	105.934.216.000
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	49.606.785.000	53.271.854.000	53.271.854.000	51.482.268.000
5122	Belanja Lembur	140.325.000	140.325.000	140.325.000	228.575.000
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito	52.522.037.000	52.522.037.000	52.522.037.000	54.223.373.000
52	BELANJA BARANG	85.536.767.000	57.449.716.000	57.449.716.000	57.144.728.000
5211	Belanja Barang Operasional	13.811.235.000	8.300.052.000	8.295.212.000	16.055.383.000
5212	Belanja Barang Non Operasional	17.277.799.000	8.589.597.000	8.589.597.000	8.105.417.000
5218	Belanja Barang Persediaan	4.328.772.000	4.197.904.000	4.205.244.000	4.084.634.000
5221	Belanja Jasa	17.964.320.000	18.990.676.000	18.990.676.000	13.329.260.000
5231	Belanja Pemeliharaan	9.238.730.000	9.317.682.000	9.315.182.000	8.024.359.000
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	20.489.465.000	6.418.224.000	6.418.224.000	5.910.094.000
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri	2.152.906.000	1.635.581.000	1.635.581.000	1.635.581.000
5261	Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	273.540.000	0	0	0
53	BELANJA MODAL	2.951.302.000	2.034.072.000	2.034.072.000	2.339.060.000
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.002.071.000	1.537.467.000	1.537.467.000	1.809.110.000
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	125.000.000	0	0	0
5361	Belanja Modal Lainnya	824.231.000	496.605.000	496.605.000	529.950.000
TOTAL BELANJA (51 + 52 + 53)		190.757.216.000	165.418.004.000	165.418.004.000	165.418.004.000

(2/2)						
Kode Akun	Uraian	Pagu Anggaran Semula	Pagu Anggaran Setelah Revisi			
			Agu-20	Okt-20	Nov-20	Des-20
51	BELANJA PEGAWAI	102.269.147.000	105.934.216.000	105.934.216.000	100.000.295.000	100.000.295.000
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	49.606.785.000	51.482.268.000	51.482.268.000	49.151.781.000	49.151.781.000
5122	Belanja Lembur	140.325.000	228.575.000	228.575.000	119.208.000	222.000.000
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito	52.522.037.000	54.223.373.000	54.223.373.000	50.729.306.000	50.626.514.000
52	BELANJA BARANG	85.536.767.000	57.144.728.000	57.158.274.000	60.504.900.000	60.504.900.000
5211	Belanja Barang Operasional	13.811.235.000	16.096.433.000	14.864.033.000	17.244.090.000	17.277.698.000
5212	Belanja Barang Non Operasional	17.277.799.000	8.759.981.000	8.495.761.000	8.409.922.000	8.200.935.000
5218	Belanja Barang Persediaan	4.328.772.000	4.270.123.000	3.932.384.000	4.337.186.000	4.317.751.000
5221	Belanja Jasa	17.964.320.000	13.425.468.000	14.143.791.000	14.506.849.000	14.537.140.000
5231	Belanja Pemeliharaan	9.238.730.000	8.024.959.000	9.087.641.000	9.250.301.000	9.414.101.000
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	20.489.465.000	6.413.729.000	6.480.629.000	6.647.417.000	6.648.140.000
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri	2.152.906.000	154.035.000	154.035.000	109.135.000	109.135.000
5261	Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	273.540.000	0	0	0	0
53	BELANJA MODAL	2.951.302.000	2.339.060.000	2.325.514.000	4.912.809.000	4.912.809.000
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.002.071.000	1.809.110.000	1.795.564.000	4.112.859.000	4.112.859.000
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	125.000.000	0	0	195.000.000	195.000.000
5361	Belanja Modal Lainnya	824.231.000	529.950.000	529.950.000	604.950.000	604.950.000
TOTAL BELANJA (51 + 52 + 53)		190.757.216.000	165.418.004.000	165.418.004.000	165.418.004.000	165.418.004.000

F.2.2 Pelaksana/Pengelola APBN ANRI

Pengelola APBN ANRI Tahun 2020 telah ditetapkan tanggal 26 Maret 2020 melalui Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 443 Tahun 2019 tentang Pelaksana/Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Pada Arsip Nasional Republik Indonesia. (Terlampir).

F.2.3 Khasanah Arsip

Berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Internal Data Khasanah Arsip Statis Arsip Nasional RI Nomor KN.03.00/17/2021, bahwa Data Khasanah Arsip Statis kantor ANRI Jakarta (Pusat) adalah arsip yang diserahkan oleh Direktorat Akuisisi dengan Data Khasanah Arsip Statis pada Direktorat Preservasi Per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

DATA KHAZANAH ARSIP STATIS ANRI
Khasanah Arsip Statis ANRI Jakarta (Pusat)

No	Arsip	Satuan	30-Sep-20	31-Des-20	Kenaikan
1	Kertas	M Linier	30.329,70	30.370,70	41,00
2	Poster	Lembar	336,00	336,00	0,00
3	Kartografi/Peta	Lembar	131.072,00	131.072,00	0,00
4	Foto	Lembar	3.472.656,00	3.474.532,00	1.876,00
5	Film	Reel	59.035,00	59.035,00	0,00
6	Mikrofilm	Roll	14.502,00	14.502,00	0,00
7	Mikrofische	Fische	14.262,00	14.262,00	0,00
8	Rekaman Suara	Kaset	54.586,00	54.727,00	141,00
9	Reel to Reel Sound	Reel	946,00	946,00	0,00
10	Video	Kaset	25.708,00	25.774,00	66,00
11	Optical Disc	Keping	16.345,00	16.363,00	18,00
12	Piringan Hitam	Keping	101,00	101,00	0,00
13	Flashdisk	Buah	1	2	1,00
14	Arsip Elektronik	Terrabyte	380	390	10,00

Dan Data Khasanah Arsip Statis Kantor Satuan Kerja BAST adalah arsip yang diserahkan oleh Balai Arsip Statis dan Tsunami Aceh dengan Data Khasanah Arsip Statis Per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

DATA KHAZANAH ARSIP STATIS ANRI
Khasanah Arsip Statis Satuan Kerja BAST

No	Uraian	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
			Masuk	Keluar	
1	Arsip Kertas	8.868,4 Meter Linier	10,8	-	8.879,2 Meter Linier
2	Arsip Kearsitekturan	495 Meter Linier	-	-	495 Meter Linier
3	Arsip Peta	5.536 Lembar	-	-	5.536 Lembar
4	Arsip CD/DVD/VCD	1.226 Keping	2	-	1.228 Keping
5	Arsip Kaset	52 Kaset	-	-	52 Kaset
6	Arsip Foto	1979 Lembar	-	-	1.979 Lembar
7	Arsip Disket	43 Keping	-	-	43 Keping

Keterangan:

- Terdapat penambahan volume arsip kertas dari BPK Perwakilan Provinsi Aceh sebesar 10,4 ML, arsip perseorangan atas nama Tomy Mulia Hasan sebesar 0,2 ML dan arsip perseorangan atas nama Teuku Ahmad Dadek sebesar 0,2 ML;
- Terdapat penambahan volume arsip CV/DVD/VCD sebanyak 2 keping.

F.2.4 Pengembalian Belanja setelah Tanggal Neraca (Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu)

Terdapat Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 pada Satker ANRI Jakarta sebagai akibat belum tepatnya pelaksana kegiatan dalam menghitung rincian anggaran biaya. Berikut rincian Pengembalian Belanja TA 2019 yang disetorkan pada TA 2020 :

No.	Tanggal Setor	Uraian	No. NTPN	MAK	Nominal (Rp)
1	01/06/2020	Pengembalian perjadi an lyos dkk (6org) TA 2019 sesuai SPM 3652	235267QLTJF2NLNI	425912	1.543.775,00
2	01/06/2020	Pengembalian honor an Siti Hasanah dkk (2org) TA 2019 sesuai SPM 2851	25BF861QTUA9T9UK	425912	1.800.000,00
3	01/06/2020	Pengembalian honor an Bambang PW TA 2019 sesuai SPM 2910	3F66A3CIEEJ4M94J	425912	255.000,00
4	01/06/2020	Pengembalian kekurangan volume pekerjaan pemeliharaan	79F292G4UK008MCI	425912	9.544.400,00
5	01/06/2020	Pengembalian akomodasi an Irma Karimatun tgl 23-26 Juli 2019	B499A48VU95H2ITC	425912	200.000,00
6	16/1/2020	Pengembalian honor an Zweta M sesuai SPM 3410 tgl 5/12/2019	7AF8461QTUAJLAFK	425912	1.500.000,00
7	21/1/2020	Pengembalian honor tim an Sumitro sesuai SPM 3424 tgl 10/12/2019	2313A6U8DOT469J1	425912	382.500,00
8	21/1/2020	Pengembalian honor tim an Sumitro sesuai SPM 3441 tgl 6/12/2019	60E2461QTUANPA2A	425912	382.500,00
9	21/1/2020	Pengembalian honor tim an Sumitro sesuai SPM 3440 tgl 9/12/2019	CPSKVUJJO96C4A13CIE	425912	382.500,00
10	16/3/2020	Pengembalian perjadi an TAYL an Tuti dkk (15org) sesuai SPM 2716 tgl 18/10/2019	FA71B48VU9BLR8AO	425912	5.008.500,00
Jumlah					20.999.175,00

No.	Tanggal Setor	Uraian	No. NTPN	MAK	Nominal (Rp)
1	26/03/2020	Pembayaran kekurangan volume pekerjaan pek. pembangunan ged. Arsip Kepresedienan Tahun 2018	E8FF66U8DP36CNE3	425913	178.944.754,00
2	10/07/2020	Kelebihan pembayaran pekerjaan pelaksanaan pembangunan interior gedung arsip kepresidenan di gajah mada	8D14161QTUSA83SG	425913	300.000.000,00
3	10/07/2020	Kekurangan denda keterlambatan pekerjaan pelaksanaan pembangunan interior gedung arsip kepresidenan di Gajah Mada	5B30561QTUSA7V06	425913	129.698.306,00
4	28/12/2020	Kelebihan pembayaran pekerjaan pelaksanaan pembangunan interior gedung arsip kepresidenan di gajah mada thn 2019	E4CC661QTVBO1LD4	425913	350.630.495,00
Jumlah					959.273.555,00

Terdapat Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 pada Satker Balai Arsip Statis dan Tsunami berupa kelebihan pembayaran pembangunan Gedung Depot Arsip Balai Arsip Statis dan Tsunami TA 2019 sesuai dengan Rekomendasi BPK RI yang telah disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp267.166.634,00 dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) 003D16U8DP359BL7 tanggal 24 Maret 2020.

No.	Tanggal Setor	Uraian	No. NTPN	MAK	Nominal (Rp)
1	24/03/2020	Setoran Kelebihan Pembayaran Pembangunan Gedung Depot Arsip Balai Arsip Statis dan Tsunami TA 2019 sesuai dengan Surat Rekomendasi BPK RI Nomor:30/S/V-XVI.I/01/2020 tanggal 20 Januari 2020	003D16U8DP359BL7	425913	267.166.634,00
Jumlah					267.166.634,00

Terdapat Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 pada Satker Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan berupa pengembalian tiket keberangkatan pesawat dari salah satu peserta *Training on Record and Archive Management for Palestina* yang mengundurkan diri sebesar Rp5.853.300,00 dengan NTB 200115199050 dan NTPN F6E7F2G4UK0VRBTE pada tanggal 15 Januari 2020.

No.	Tanggal Setor	Uraian	No. NTPN	MAK	Nominal (Rp)
1	15/01/2020	Pengembalian tiket keberangkatan pesawat dari salah satu peserta kegiatan yang diakibatkan oleh pembatalan keberangkatan yang dilakukan pada hari-H.	F6E7F2G4UK0VRBTE	425912	5.853.300,00
Jumlah					5.853.300,00

F.2.5 Data Rekening Milik Satuan Kerja Arsip Nasional RI

No.	KPPN	BA	Es	Satker	Nama Satker	Nomor Rekening	Nama Rekening	Surat Ijin Pembukaan Rekening	Tgl. Surat Ijin	Kode Status
1	139	087	01	450448	Arsip Nasional RI Jakarta	1270088006182	BPG 139 ARSIP NASIONAL RI	S-1515/WPB.12/KP.05/2015	2015-05-26	10
	139	087	01	450448	Arsip Nasional RI Jakarta	1270004807689	BPN 139 ARSIP NASIONAL RI	S-1515/WPB.11/KP.05/2015	2015-05-26	10
	139	087	01	450448	Arsip Nasional RI Jakarta	1270010352514	RKK ARSIP NASIONAL RI OPS	S-604/WPB.12/KP.05/2020	2020-02-27	04
2	139	087	01	418929	Pusat Jasa Kearsipan	1270007732900	BPG 139 PUSAT JASA KEARSIPAN	S-0052/WPB.12/KP.05/2017	2017-01-09	10
	139	087	01	418929	Pusat Jasa Kearsipan	1270007732868	BPN 139 PUSAT JASA KEARSIPAN	S-0051/WPB.12/KP.05/2017	2017-01-09	10
	139	087	01	418929	Pusat Jasa Kearsipan	042501001031309	RKK ARSIP NASIONAL RI OPS	000029	2020-10-19	10
3	023	087	01	418934	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan	122401000109300	BPG 023 PUSDIKLAT KEARSIPAN	S-200/WPB.13/KP.023/2017	2017-01-12	10
	023	087	01	418934	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan	122401000110301	BPN 023 PUSDIKLAT KEARSIPAN	S-201/WPB.13/KP.023/2017	2017-01-12	10
4	001	087	01	681464	Balai Arsip Statis dan Tsunami	7432009151	BPG 001 BALAI ARSIP STATIS DAN TSUNAMI	S-1708/WPB.12/KP.05/2020	2020-07-03	10

Berdasarkan Surat KPPN Jakarta V Nomor: S-1708/WPB.12/KP.05/2020 Hal: Persetujuan Rekening Satker Lingkup Arsip Nasional Republik Indonesia yang dibuka pada Bank Syariah Mandiri terdapat perubahan rekening satker pada Satuan Kerja Balai Arsip Statis dan Tsunami (BAST) dengan nomor rekening baru 7432009151 dari sebelumnya 7141721849 atas nama BPG 001 Balai Arsip Statis dan Tsunami.

F.2.6 Tindaklanjut atas Hasil Pemeriksaan BPK

Berdasarkan Hasil Pemantauan atas Tindak Lanjut atas Hasil Pemeriksaan BPK RI, Arsip Nasional RI telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan.

F.2.7 Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala ANRI

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 89/TPA Tahun 2019 Tanggal 16 Juli 2019 Tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia menetapkan Deputi Konservasi Arsip Nasional Republik Indonesia Dr. M. Taufik, M.Si. sebagai Pelaksana Tugas Kepala ANRI terhitung mulai tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia.

F.2.8 Kegiatan Penanganan COVID-19 di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia

Dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi ancaman COVID-19 di lingkungan ANRI, ANRI berupaya melaksanakan seluruh kegiatan pencegahan dan penanganan COVID-19 yang berpedoman pada

pedoman pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* (COVID-19) sebagaimana Surat Edaran Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/II/2020 tentang Revisi Ke-3 Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19). Hal-hal yang telah dilakukan oleh ANRI sampai dengan tanggal 1 April 2020 adalah sebagai berikut:

1. Deteksi Dini dan Respon

Deteksi dini dan respon dilakukan di pintu masuk dan wilayah lingkungan kerja ANRI untuk mengidentifikasi ada atau tidaknya pegawai maupun tamu yang berkunjung ke ANRI yang diduga menjadi orang dalam pengawasan maupun yang telah terjangkit COVID-19 namun tidak terdeteksi secara jasmani. Deteksi dini dan respon tersebut berupa upaya detect, prevent, dan respon terhadap seluruh pegawai dan tamu yang datang dilingkungan ANRI dengan cara melakukan pengecekan suhu tubuh setiap pegawai dan tamu yang hadir di ANRI dan pembatasan akses masuk ke setiap gedung dilingkungan ANRI. Selain itu dilakukan pembagian multivitamin penambah daya tahan tubuh dan masker bagi seluruh pegawai di ANRI.

Gambar 1
Pengecekan Suhu Tubuh Pegawai dan Tamu



Gambar 2
Pembatasan Akses Masuk Gedung di ANRI



2. Kesiapsiagaan

Dalam pencegahan dan penanganan COVID-19, ANRI telah melaksanakan kegiatan kesiapsiagaan terhadap bencana dimaksud. Kegiatan kesiapsiagaan yang telah dipersiapkan oleh ANRI adalah sebagai berikut:

a. Sumber Daya Manusia

Untuk mencegah meluasnya penularan COVID-19 dilingkungan ANRI, maka telah diberlakukan *Work From Home* (WFH) bagi seluruh pegawai ASN maupun Non ASN dilingkungan ANRI melalui Instruksi Kepala ANRI Nomor 2 Tahun 2020 sebagaimana terakhir diubah menjadi Instruksi Kepala ANRI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan *Work From Home* (WFH) Di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia. Disamping itu diberlakukan sistem piket bagi pegawai dengan jumlah terbatas diseluruh unit kerja Eselon II ANRI untuk menjaga kesinambungan operasional perkantoran maupun pelayanan terhadap masyarakat yang membutuhkan. ANRI juga menyiagakan ASN yang menjabat sebagai fungsional tenaga kesehatan dan dokter diklinik yang dimiliki oleh ANRI.

b. Sarana dan Prasarana

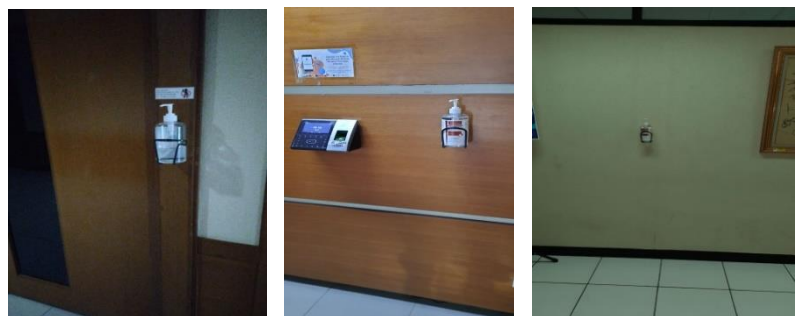
Dalam rangka pencegahan dan penanganan COVID-19, ANRI telah melengkapi sarana prasarana untuk mendukung penanggulangan penyebaran COVID-19 dimaksud, seperti pemasangan *hand*

sanitizer di beberapa titik strategis, pemasangan bilik sterilisasi, pengadaan alat kesehatan (alat pengukur suhu tubuh, perlengkapan klinik, masker, dan lain-lain), dan *wastafel portable* sebagai tempat pencucian tangan, serta alat peraga *physical distancing* di lift. Selain itu dalam rangka menjaga persediaan hand sanitizer di ANRI dan program bantuan bagi masyarakat sekitar, maka dilakukan fasilitasi pengadaan bahan baku pembuatan *hand sanitizer* yang dibuat sendiri oleh ANRI.

Gambar 3
Peralatan Pencegahan COVID-19



Gambar 4
Penyediaan *Hand Sanitizer* di Ruang Kerja dan Ruang Publik



Gambar 5
Pembuatan *Hand Sanitizer* di Laboratorium ANRI





c. Pembiayaan

Untuk pembiayaan pencegahan dan penanggulangan COVID-19 dilingkungan ANRI, anggaran yang digunakan baru sebatas anggaran operasional perkantoran untuk membiayai pengadaan bahan-bahan pembuatan hand sanitizer dan perlengkapan kesehatan. Namun karena keterbatasan pagu anggaran dimaksud, maka ANRI mengajukan *refocussing* anggaran yang bersumber dari DIPA ANRI tahun 2020. Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-6/MK.02/2020 tentang *Refocussing* Kegiatan dan Realokasi Anggaran Kementerian/Lembaga dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19). Proses revisi anggaran tersebut sampai hari ini masih dilakukan pembahasan dengan Kementerian Keuangan.

3. Pengawasan Lingkungan

Dalam hal program pemerintah terkait dengan *physical distancing* dan pencegahan COVID-19 dilingkungan ANRI, maka dilakukan kebijakan peniadaan sementara untuk kunjungan ke ANRI dan pembatasan akses masuk gedung ANRI. Disamping itu dilakukan penyemprotan *disinfectant* diruang kerja dan ruang publik dilingkungan ANRI. Untuk operasional dan pemeliharaan perkantoran dilakukan sistem piket bagi pegawai maupun petugas keamanan secara terbatas secara personal.

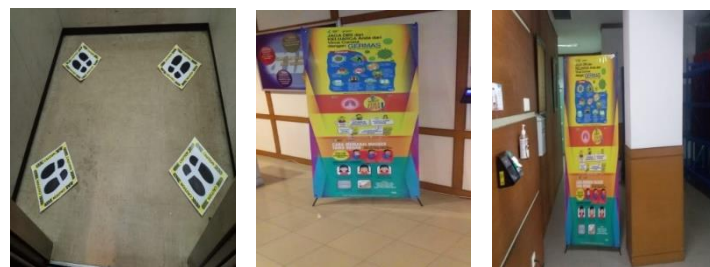
Gambar 6
Kegiatan Penyemprotan *Disinfectant*



4. Kampanye Pencegahan dan Penanganan COVID-19

Komunikasi yang dilakukan dalam rangka pencegahan dan penanganan COVID-19 dilakukan ANRI melalui sosialisasi dalam bentuk alat peraga dan pemasangan stiker peraga *physical distancing* di lift. Selain itu, sebagai upaya mensosialisasikan pencegahan COVID-19, ANRI membagikan *hand sanitizer* yang dibuat oleh ANRI kepada masyarakat sekitar maupun yang melalui kantor ANRI. Hal ini sebagai wujud partisipasi ANRI ikut bagian kesuksesan penanggulangan COVID-19.

Gambar 7
Sosialisasi Alat Peraga Pencegahan COVID-19 Dilingkungan ANRI



Hambatan dan Solusi

Pencegahan dan penanganan COVID-19 di lingkungan ANRI masih bisa berjalan dengan baik. Namun dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa

hambatan baik saat pelaksanaan maupun yang akan dihadapi nantinya.

Hambatan tersebut antara lain:

1. Penyediaan bahan - bahan yang diperlukan dalam pencegahan dan penanganan COVID-19 yang langka dan harga yang berfluktuatif;
2. Dalam hal pengadaan barang dan jasa, banyak penyedia yang tutup dan mobilitas yang terbatas;
3. Resiko terdampak COVID-19 yang besar bagi para pegawai yang bertugas piket di kantor;
4. Keterbatasan anggaran operasional perkantoran untuk mendukung kegiatan pencegahan dan penanganan COVID-19 yang tidak diketahui kapan pandemi ini akan berakhir;
5. Operasional perkantoran menjadi terganggu apabila karantina wilayah, khususnya DKI Jakarta sudah diberlakukan.

Tentunya beberapa hambatan tersebut masih dapat ditemukan solusinya, kecuali apabila diberlakukan karantina wilayah yang mengakibatkan berhentinya operasional perkantoran dan pelayanan kepada masyarakat.

Solusi tersebut antara lain:

1. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa yang cepat dan akuntabel dalam rangka penyediaan bahan dan perlengkapan penanggulangan COVID-19;
2. Melakukan komunikasi dengan para penyedia terkait dengan ketersediaan barang dan jasa yang dibutuhkan selama penanggulangan COVID-19;
3. Pemberian multivitamin penambah daya tambahan tubuh, APD, dan insentif yang memadai bagi pegawai yang bertugas piket di kantor;
4. Melakukan *refocussing* anggaran DIPA ANRI untuk mendukung program pencegahan dan penanganan COVID-19.

Jakarta, Mei 2021
Pengguna Anggaran,

M. Taufik
NIP 19600427 198103 1 001

DAFTAR ASET AKUN COVID-19 PER 31 DESEMBER 2020

NO.	Tanggal Pembukuan	UNIT BARANG			T / K	PENGADAAN / PEROLEHAN dan PENYALURAN / PENGELUARAN								Tgl.No.Kontrak/SPK/SK	NUP	Dicatat dalam KIB/DIR/BI	Keterangan	Nilai SPM	Akun
		Nama	Merk/Type	Kode Barang		Diterima dari/diserahkan	Kondisi	Jumlah Barang	Satuan Barang	Satuan (Rp)		Jumlah (Rp)							
										tax	VAT								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	07/12/20	AIR PURIFIER	DAIKIN AIR PURIFIER	3080602046	T	PT MEGAH GUMILANG CHEMIKATA MA	B	20	UNIT	5.454.545	545.455	6.000.000	120.000.000	FAKTUR No. INVS0.001.2011.00003 TGL 17/11/2020 SP2D No. 20139130203 8753 TGL 7/12/2020	8-27	DBR	R. PLT KEPALA ANRI, R. DEBIN, R. DEKON, R. DEPUTI IPSK, R. SESTAMA	120.000.000	532119
2	07/12/20	AIR PURIFIER	DAIKIN AIR PURIFIER	3080602046	T	PT MITSINDO VISUAL PRATAMA	B	19	UNIT	5.454.545	545.455	6.000.000	114.000.000	FAKTUR No. INV-MVP/V/20/11/19 TGL 18/11/2020 SP2D No. 20139130304 8904 TGL 7/12/2020	28-46	DBR	PEMELIHARAAN	173.510.000	532119
		SCANNER	IMAGE SCANNER SCANSNAP S13001	3100203004	T		B	1	UNIT	3.900.000	390.000	4.290.000	4.290.000		215	DBR	HUMAS (LAYANAN VIRTUAL)		
		EXTERNAL	PASSPORT HDD 1 TB	3100203007	T		B	3	UNIT	1.309.091	130.909	1.440.000	4.320.000		448-450	DBR			
		NOTE BOOK	INSPIRON 15 7590	3100102003	T		B	2	UNIT	23.136.364	2.313.636	25.450.000	50.900.000		813-814	DBR			
3	10/12/20	SERVER	HPE PROLIANT MICROSERVE R GEN 10	3100204001	T	PT MITSINDO VISUAL PRATAMA	B	1	UNIT	66.363.636	6.636.364	73.000.000	73.000.000	FAKTUR No. INV-MVP/V/20/11/13 TGL 25/11/2020 SP2D No. 20139130304	90	DBR	KLINIK	77.985.000	532119
		HARD DISK	MEMORY SERVER HPE 16GB	3100201012	T		B	1	UNIT	4.531.818	453.182	4.985.000	4.985.000		56	DBR	KLINIK		
4	10/12/20	P.C UNIT	HP AIO 200 G4	3100102001	T	PT AIRMAS PERKASA EKSPRES	B	2	UNIT	13.627.273	1.362.727	14.990.000	29.980.000	FAKTUR No. FAK/0614/0615/XI/2020 TGL 27/11/2020 SP2D No. 20139130304	913-914	DBR	KLINIK	56.680.000	532119
		LCD PROJECTOR/INFOCUS	PROJECTOR BENQ SHORT THROW SMART	3050105048	T		B	1	UNIT	22.181.818	2.218.182	24.400.000	24.400.000		71	DBR	KLINIK		
		SCREEN PROJECTOR	IBRIGHT BTR96	3050105058	T		B	1	UNIT	2.090.909	209.091	2.300.000	2.300.000		9664 TGL 10/12/2020	45	DBR		
5	10/12/20	TEMPERATURE SENSOR SET THERMAL	FACE RECOGNITION TEMPERATURE SET THERMAL	3080404013	T	PT KRISBOW INDONESIA	B	5	UNIT	12.272.727	1.227.273	13.500.000	67.500.000	FAKTUR No. 1341072001 TGL 01/12/2020 SP2D No. 20139130203 9954 TGL 10/12/2020	1-5	DBR	PEMELIHARAAN	67.500.000	532119
6	14/12/20	PRINTER	HP LASER 107W	3100203003	T	PT MITSINDO VISUAL PRATAMA	B	1	UNIT	1.768.182	176.818	1.945.000	1.945.000	FAKTUR No. INV-MVP/V/20/11/134 TGL 25/11/2020	653	DBR	KEPEGAWAIAN	14.920.000	532119
		LCD PROJECTOR/INFOCUS	MAXELL MC-EX4551	3050105048	T		B	1	UNIT	11.795.455	1.179.545	12.975.000	12.975.000		72	DBR	KARO UMUM		
7	14/12/20	NOTE BOOK	HP PROBOOK 440 G7	3100102003	T	PT AIRMAS PERKASA EKSPRES	B	9	UNIT	18.636.364	1.863.636	20.500.000	184.500.000	FAKTUR No. FAK/0554/XI1/2020 TGL 08/12/2020 SP2D No. 20139130305 1971 TGL 14/12/2020	815-823	DBR	BIRO UMUM 5; OKH 4	184.500.000	532119

8	16/12/20	NOTE BOOK	DELL LATITUDE 3400	3100102003	T	PT MITSINDO VISUAL PRATAMA	B	1	UNIT	14.352.273	1.435.227	15.787.500	15.787.500	FAKTUR No. INV- MVP/V/20/1 2/156 TGL 14/12/2020 SP2D No.	824	DBR	KEUANGAN	45.000.000	532119	
		SCANNER	PLUSTEK SMARTOFFICE PS3060U	3100203004	T		B	3	UNIT	8.852.273	885.227	9.737.500	29.212.500	216-218	DBR					
9	16/12/20	NOTE BOOK	SAMSUNG GALAXY TAB S20+ 8GB/128GB- CLOUD BLUE	3100102003	T	PT BHINNEKA MENTARIDI MENSI	B	2	UNIT	12.453.636	1.245.364	13.699.000	27.398.000	FAKTUR No. S0122011239 70982/PKM- PL-651- SP/2D2D TGL 23/11/2020 SP2D No. 20139130204 2305 TGL 16/12/2020	825-826	DBR	HUMAS (LAYANAN VIRTUAL)	33.045.000	532119	
		BRACKET HOLDER	DJI OSMO MOBILE 3 SINGLE	3070102032	T		B	2	UNIT	1.226.364	122.636	1.349.000	2.698.000		8-9	DBR				HUMAS (LAYANAN VIRTUAL)
		NOTE BOOK	XIOMI REDMI NOTE 9 6GB/128GB FOREST GREEN	3100102003	T		B	1	UNIT	2.680.909	268.091	2.949.000	2.949.000		9	DBR				KEPEGAWAIAN
10	16/12/20	UNINTERRUPTED POWER SUPPLY	SMART UPS C 2000VA LCD 230V	3060101048	T	PT MITSINDO VISUAL PRATAMA	B	1	UNIT	10.818.182	1.081.818	11.900.000	11.900.000	FAKTUR No. INV- MVP/V/20/1 1/138 TGL 30/11/2020 SP2D No. 20139130305 3419 TGL 16/12/2020	25	DBR	KLINIK	11.900.000	532119	
11	16/12/20	LEMARI OBAT	LEMARI OBAT 2 + 2 PINTU	3070101097	T	PT MEGAH GUMILANG CHEMIKATAMA	B	1	UNIT	3.409.091	340.909	3.750.000	3.750.000	FAKTUR No. INVS0.001.20 04.00014 TGL 03/12/2020 SP2D No. 20139130204 2303 TGL 16/12/2020	6	DBR	KLINIK	3.750.000	532119	
12	17/12/20	MEJA RAPAT	MEJA RAPAT 360X160CM	3050201008	T	CV TUJUH SAMUDRA	B	1	UNIT	10.000.000	1.000.000	11.000.000	11.000.000	FAKTUR No.1220 TGL 10/12/2020 SP2D No. 20139130204 3224 TGL 17/12/2020	157	DBR	CRISIS CENTER & KLINIK	87.950.000	532119	
		KURSI BESI/METAL	DONATI	3050201003	T		B	10	UNIT	1.500.000	150.000	1.650.000	16.500.000		3232-3241	DBR				
		A.C SPLIT	PANASONIC 1,5 PK	3050204004	T		B	3	UNIT	6.818.182	681.818	7.500.000	22.500.000		383-385	DBR				
13	17/12/20	TENSIMETER	STANDING TENSIMETER ANZON	3070101005	T	PT MEGAH GUMILANG CHEMIKATAMA	B	1	UNIT	995.000		995.000	995.000	FAKTUR No.INVS0.001 .2011.00013 TGL 02/12/2020 SP2D No. 20139130204 3156 TGL 17/12/2020	11	DBR	KLINIK	95.235.000	532119	
		BRANCARD	GEA BRANCARD	3070101042	T		B	3	UNIT	19.954.545	1.995.455	21.950.000	65.850.000		3-5	DBR				
		TABUNG O2	TABUNG OKSIGEN CUSTOM	3070101026	T		B	1	UNIT	2.681.818	268.182	2.950.000	2.950.000		2	DBR				
		INSTRUMENT TROLLEY	TROLY DRESSING	3070105094	T		B	1	UNIT	2.704.545	270.455	2.975.000	2.975.000		1	DBR				
		LEMARI OBAT (KACA)	LEMARI 2 PINTU	3070101097	T		B	1	UNIT	3.250.000	325.000	3.575.000	3.575.000		5	DBR				
		PATIENT MONITOR	PATIENT MONITOR JERRY	3070113005	T		B	1	UNIT	17.172.727	1.717.273	18.890.000	18.890.000		1	DBR				
		MOBIL AMBULANCE	TOYOTA HIACE	3020105001	T		B	1	UNIT	461.000.000	46.100.000	507.100.000	507.100.000		2	KIB				
			LANDASAN/B ASE STRETCHER		T		B	1	UNIT	8.000.000	800.000	8.800.000	8.800.000			DBR				

	LAMPU SOROT BELAKANG		T
	LANTAI PLYWOOD		T
	LOGO & TULISAN STANDARD 3M		T
	KACA FILM 60-80%		T
	LEMARI PERALATAN		T
	PELINDUNG BEMPER		T
	MODIFIKASI PLAFON		T
ROTATOR	LED FLASH LIGHT BAR OVAL	3080114024	T
SIRINE	SIRINE DENGAN MICROPHONE	3050105088	T
KURSI BESI/METAL	JOK DOKTER	3050201003	T
SICE	JOK PARAMEDIS PERALATAN	3050201005	T
TABUNG PEMADAM API	TABUNG PEMADAM 1 KG	3050105001	T
EXAMINATION LAMP	LAMPU PERIKSA	3070101064	T
INFUS STANDARD MAC HIGH 2M	GANTUNGAN INFUS GESER	3070102108	T
POWER SUPPLY	POWER INVERTER DC AC 1000 W+DC 3 OUTLET 1 USB AC 2	3080804009	T
CENTRAL OXYGEN	CENTRAL OXYGEN BSS	3070125002	T
PATIENT STRETCHER	AUTOMATIC STRETCHER ROLL CHAIR	3070121042	T
MERCURIAL SPHYGMOMETER WITH BABY CUFF	ANEROID SPHYGMOMETER	3070110079	T
STETOSCOPE (ALAT KEDOKTERAN UMUM)	ABN	3070101004	T
PATIENT STRETCHER	FOLDING SCOOP STRETCHER	3070121042	T
HEAD RESTRAINER	GEA HD01 HEAD IMMOBILIZATION	3040106036	T

CV SATU JUARA

B	1	UNIT	3.500.000	350.000	3.850.000	3.850.000
B	1	UNIT	10.000.000	1.000.000	11.000.000	11.000.000
B	1	UNIT	5.000.000	500.000	5.500.000	5.500.000
B	1	UNIT	4.000.000	400.000	4.400.000	4.400.000
B	1	UNIT	12.000.000	1.200.000	13.200.000	13.200.000
B	1	UNIT	3.000.000	300.000	3.300.000	3.300.000
B	1	UNIT	8.000.000	800.000	8.800.000	8.800.000
B	1	UNIT	8.000.000	800.000	8.800.000	8.800.000
B	1	UNIT	5.000.000	500.000	5.500.000	5.500.000
B	2	UNIT	5.000.000	500.000	5.500.000	11.000.000
B	1	UNIT	6.000.000	600.000	6.600.000	6.600.000
B	1	UNIT	2.500.000	250.000	2.750.000	2.750.000
B	2	UNIT	1.750.000	175.000	1.925.000	3.850.000
B	1	UNIT	3.500.000	350.000	3.850.000	3.850.000
B	1	UNIT	12.000.000	1.200.000	13.200.000	13.200.000
B	1	UNIT	15.000.000	1.500.000	16.500.000	16.500.000
B	1	UNIT	43.000.000	4.300.000	47.300.000	47.300.000
B	1	UNIT	7.000.000	700.000	7.700.000	7.700.000
B	1	UNIT	2.000.000	200.000	2.200.000	2.200.000
B	1	UNIT	8.000.000	800.000	8.800.000	8.800.000
B	1	UNIT	7.000.000	700.000	7.700.000	7.700.000

BAST No.
PL.01/652.08
/2020 TGL
10/12/2020
SP2D No.
20139130305
5004 TGL
17/12/2020

	DBR
	DBR
	DBR
	DBR
	DBR
	DBR
	DBR
1	DBR
1	DBR
3245-3246	DBR
204	DBR
295	DBR
1-2	DBR
1	DBR
1	DBR
1	DBR
1	DBR
2	DBR
1	DBR
10	DBR
1	DBR
1	DBR

KLINIK

750.200.000

532119

		EMERGENCY KIT	EXTRICATION DEVICE KED	3070121022	T		B	1	UNIT	7.000.000	700.000	7.700.000	7.700.000		2	DBR			
		EMERGENCY KIT	TAS JINJING	3070121022	T		B	1	UNIT	6.500.000	650.000	7.150.000	7.150.000		3	DBR			
		KOPER/TAS	EMERGENCY BAG JUMBO	3050104026	T		B	1	UNIT	1.500.000	150.000	1.650.000	1.650.000		3	DBR			
		PATIENT MONITOR	PATIENT MONITOR PORTABLE	3070113005	T		B	1	UNIT	20.000.000	2.000.000	22.000.000	22.000.000		2	DBR			
15	10/12/20	GEDUNG POS JAGA PERMANEN	POS JAGA RUMAH NEGARA	4010113001	T	CV SINAR CIKUDA	B	1	PAKET	115.019.000	11.501.900	126.520.900	126.520.900	BAST No.PL.03.00/676.07/2020 TGL 27/11/2020 SP2D No. 20139130404 3926 TGL 10/12/2020	2	KIB	PEMELIHARAAN	126.520.900	533119
16	17/12/20	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN	GEDUNG I	4010101001	T	CV TUNGGAL MANDIRI	B	1	PAKET	15.162.000	1.516.200	16.678.200	16.678.200	FAKTUR No. 030/F-TM/XII/2020 TGL 10/12/2020 SP2D No. 20139130404 6807 TGL 17/12/2020	12	KIB	CRISIS CENTER	16.678.200	533119
17	17/12/20	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN	GEDUNG I	4010101001	T	PT PRO UTAMA JAYA	B	1	PAKET	44.238.700	4.423.870	48.662.570	48.662.570	BAST No.PL.03.00/775.07/2020 TGL 10/12/2020 SP2D No. 20139130305 4747 TGL 17/12/2020	12	KIB	CRISIS CENTER	48.662.570	533119
18	17/12/20	SOFTWARE KOMPUTER	APLIKASI MONITORING KESEHATAN	8010101001	T	CV MITRA INDOKOMP SEJAHTERA	B	1	PAKET	67.272.727	6.727.273	74.000.000	74.000.000	BAST NO PL.01/634.08/2020 TGL 07/12/2020 SP2D NO 20139130204 3264 TGL 16/12/2020	982	DBR	KEPEGAWAIAN	74.000.000	536118

DAFTAR BARANG PERSEDIAAN AKUN KHUSUS COVID-19 PER 31 DESEMBER 2020

KODE	URAIAN	PEMBELIAN	PEMAKAIAN	NILAI S/D 31 DESEMBER 2020
117111	Barang Konsumsi	595.891.602	271.187.875	324.703.727
450448	Arsip Nasional RI Jakarta	559.627.602	234.923.875	324.703.727
418929	Pusat Jasa Kearsipan	36.264.000	36.264.000	0
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	13.520.000	5.165.000	8.355.000
681464	BAST Aceh	13.520.000	5.165.000	8.355.000
Jumlah		609.411.602	276.352.875	333.058.727

Catatan :

- Terdapat persediaan akun khusus covid di Arsip Nasional RI Jakarta terdiri dari pembelian sebesar Rp.559.627.608 dan pemakaian sebesar Rp.234.923.875 pada barang konsumsi dengan rincian sebagai berikut :

KODE	URAIAN	HARGA SATUAN	MUTASI				NILAI S/D 31 DESEMBER 2020	
			PEMBELIAN		PEMAKAIAN			
	PERLENGKAPAN PENUNJANG KEGIATAN KANTOR		104.810.000		61.781.600		43.028.400	
000005	- Life Mask (Logo ANRI dan Logo Garuda)	115.500	200	23.100.000	200	23.100.000	0	0
000006	- Paket Handsanitizier	109.000	100	10.900.000	100	10.900.000	0	0
000006	- Paket Handsanitizier	108.900	400	43.560.000	164	17.859.600	236	25.700.400
000007	- Masker Antivirus Premium 3 Ply (Covid)	61.000	50	3.050.000	0	0	50	3.050.000
000008	- Goodie Bag	60.500	400	24.200.000	164	9.922.000	236	14.278.000
	PERSEDIAAN BERUPA ALAT PENUNJANG KEDOKTERAN		26.400.000		10.824.000		15.576.000	
000001	- Digital Thermometer Omron	66.000	400	26.400.000	164	10.824.000	236	15.576.000
	BAHAN PENUNJANG KEGIATAN KANTOR LAINNYA		151.929.394		66.589.194		85.340.200	
000004	- Coveral Hazmat Suit Reusable	230.000	12	2.760.000	1	230.000	11	2.530.000
000008	- Jubah Operasi	230.000	9	2.070.000	9	2.070.000	0	0
000009	- Pakaian Bedah	279.500	15	4.192.500	15	4.192.500	0	0
000010	- Bergo Jilbab APD	61.500	15	922.500	15	922.500	0	0
000011	- Kacamata Anti Fog	115.000	3	345.000	0	0	3	345.000
000012	- Masker 3M 950	84.500	6	507.000	2	169.000	4	338.000
000013	- Masker Diapro 50	2.201	50	110.050	50	110.050	0	0
000014	- Kantong Belanja	2.344	1	2.344	1	2.344	0	0
000016	- Masker Bedah	270.000	22	5.940.000	13	3.510.000	9	2.430.000
000017	- Masker Surgical Mask 4 Ply Multione Headloop	115.500	400	46.200.000	164	18.942.000	236	27.258.000
000018	- Masker Surgical Mask 4 Ply Multione Earloop	102.300	400	40.920.000	164	16.777.200	236	24.142.800
000019	- Masker Filter Udara Tomo Lifemask N-95	119.900	400	47.960.000	164	19.663.600	236	28.296.400
	OBAT CAIR (BARANG KONSUMSI)		104.246.970		32.978.980		71.267.990	
000003	- bethadine cair 60 ml	31.626	5	158.130	0	0	5	158.130
000004	- OBH Syrup	13.338	30	400.140	29	386.802	1	13.338
000005	- Minyak Kayu Putih	15.813	10	158.130	0	0	10	158.130
000006	- Neurobion 5000 Inj	13.925	15	208.875	2	27.850	13	181.025

000007	- Alkohol Swab	24.200	3	72.600	1	24.200	2	48.400
000008	- Cendo Cytrol Tetes Mata	37.469	10	374.690	6	224.814	4	149.876
000009	- Vitamin C Inj 200 Mg	15.125	30	453.750	5	75.625	25	378.125
000010	- Plantacyd Syrup	13.063	60	783.780	53	692.339	7	91.441
000011	- Handscrub	52.250	10	522.500	6	313.500	4	209.000
000017	- Minosep Gargle 0,2% 60 ml (Covid)	31.625	35	1.106.875	0	0	35	1.106.875
000018	- OBH 100 ml (Covid)	15.125	60	907.500	0	0	60	907.500
000019	- Extrace 1000mg/5ml@5 (Covid)	45.375	1.000	45.375.000	206	9.347.250	794	36.027.750
000020	- Alkohol Swab Onemed @100 (Covid)	19.400	25	485.000	3	58.200	22	426.800
000021	- Madu Al shifa	133.100	400	53.240.000	164	21.828.400	236	31.411.600
	OBAT PADAT (BARANG KONSUMSI)			115.275.038		47.514.622		67.760.416
000001	- Farneltik Tab (Bahan Konsumsi)	20.800	30	624.000	30	624.000	0	0
000002	- Fluvir 75 Mg (Bahan Konsumsi)	25.350	20	507.000	20	507.000	0	0
000003	- Natur E (Bahan Konsumsi)	38.450	2	76.900	2	76.900	0	0
000004	- Prove D3 1000	3.600	20	72.000	20	72.000	0	0
000005	- Treelain C-1000	7.850	20	157.000	20	157.000	0	0
000009	- Caviplex Caplet	1.000	4.000	4.000.000	2.000	2.000.000	2.000	2.000.000
000010	- Dexametason	170	4.000	680.000	1.071	182.070	2.929	497.930
000011	- Metformin 500 Mg	241	500	120.500	271	65.311	229	55.189
000012	- Mylanta Tablet	801	500	400.500	0	0	500	400.500
000013	- Neuralgin	1.031	1.000	1.031.000	630	649.530	370	381.470
000014	- Neurobion 500 Mg	4.071	500	2.035.500	500	2.035.500	0	0
000015	- Paracetamol	359	1.000	359.000	440	157.960	560	201.040
000016	- Sinvastatin	641	300	192.300	25	16.025	275	176.275
000017	- Surbex Z	2.383	270	643.410	225	536.175	45	107.235
000018	- Amoxicilin 500 Mg	4.400	200	880.000	60	264.000	140	616.000
000019	- Intunal Forte	990	200	198.000	200	198.000	0	0
000020	- Cefixime	5.043	1.000	5.043.000	478	2.410.554	522	2.632.446
000021	- Nalgestan	2.256	400	902.400	128	288.768	272	613.632
000022	- Amlodipine 10 Mg	2.116	600	1.269.600	360	761.760	240	507.840
000023	- Cetirizine	578	200	115.600	203	117.334	-3	-1.734
000024	- Meloxicam	1.721	400	688.400	190	326.990	210	361.410
000025	- Mertigo	4.675	100	467.500	0	0	100	467.500
000026	- Mefinal	1.836	800	1.468.800	246	451.656	554	1.017.144
000027	- Caflam 25 Mg	2.520	510	1.285.200	308	776.160	202	509.040
000028	- Ambroxol	246	1.500	369.000	670	164.820	830	204.180
000029	- Lopamid	330	100	33.000	0	0	100	33.000
000030	- Dexteem Plus	550	500	275.000	412	226.600	88	48.400
000031	- MethykPrednisolon	551	2.500	1.377.500	939	517.389	1.561	860.111
000032	- Loratadine	416	500	208.000	105	43.680	395	164.320
000033	- Atorvastatin	3.668	300	1.100.400	170	623.560	130	476.840
000034	- Domperidone	505	500	252.500	0	0	500	252.500
000035	- Rhinos	7.563	500	3.781.500	436	3.297.468	64	484.032
000036	- Buscopan	4.294	300	1.288.200	169	725.686	131	562.514
000037	- Eperisone	2.118	700	1.482.600	526	1.114.068	174	368.532
000038	- Polysilane	1.204	256	308.224	49	58.996	207	249.228
000039	- Ester C Holsticare	1.840	1.008	1.854.720	640	1.177.600	368	677.120
000040	- Maltover	3.644	510	1.858.440	603	2.197.332	-93	-338.892

000041	- Molexflu	540	300	162.000	276	149.040	24	12.960
000042	- Primadex Forte	688	100	68.800	6	4.128	94	64.672
000043	- Pronalgex Supp	19.250	6	115.500	0	0	6	115.500
000044	- Mucohexin	695	1.000	695.000	732	508.740	268	186.260
000045	- Amplodipine 5 Mg	1.200	600	720.000	515	618.000	85	102.000
000046	- Stimuno F	3.094	500	1.547.000	412	1.274.728	88	272.272
000053	- Acetylcystein 200 Mg (Covid)	1.375	3.002	4.127.750	0	0	3.002	4.127.750
000054	- Cavit-D3 (Covid)	2.585	3.000	7.755.000	0	0	3.000	7.755.000
000055	- Paracetamol 500 Mg (Covid)	359	1.000	359.000	0	0	1.000	359.000
000056	- Rhinos (Covid)	7.563	500	3.781.500	0	0	500	3.781.500
000057	- Super Ester C (Covid)	1.891	2.500	4.727.500	0	0	2.500	4.727.500
000058	- Redoxon Double Action	43.098	3	129.294	3	129.294	0	0
000059	- Multivitamin Enervon C	49.500	400	19.800.000	164	8.118.000	236	11.682.000
000060	- Vitamin E Natur E 300	84.700	400	33.880.000	164	13.890.800	236	19.989.200
	OBAT GEL/ SALEP (BARANG KONSUMSI)			2.656.183		1.577.469		1.078.714
000001	- Salsil Talk	8.033	20	160.660	6	48.198	14	112.462
000002	- Burnazin Zalf	73.563	1	73.563	0	0	1	73.563
000003	- Kenalog	71.500	5	357.500	5	357.500	0	0
000004	- Counterpain 15 Mg	28.325	30	849.750	28	793.100	2	56.650
000005	- Hidrocortison Zalf	4.810	36	173.160	3	14.430	33	158.730
000006	- Acyclovir Zalf	5.429	10	54.290	0	0	10	54.290
000007	- Thrombophop	68.063	10	680.630	4	272.252	6	408.378
000008	- Hot In Cream	30.663	10	306.630	3	91.989	7	214.641
	OBAT LAINNYA (BARANG KONSUMSI)			54.310.017		13.658.010		40.652.007
000001	- Azythromicin 500mg	13.750	400	5.500.000	361	4.963.750	39	536.250
000002	- Infus Set Makro	13.750	5	68.750	0	0	5	68.750
000003	- Spuit 3 cc	4.386	50	219.300	0	0	50	219.300
000004	- Spuit 5 cc	7.700	20	154.000	0	0	20	154.000
000005	- Wing Needle No. 25	15.125	50	756.250	0	0	50	756.250
000006	- Handscoon Disposable	825	500	412.500	300	247.500	200	165.000
000007	- Handsaplast Strip	31.250	2	62.500	1	31.250	1	31.250
000008	- Kassa Hidrofil Steril	13.129	20	262.580	12	157.548	8	105.032
000009	- Strip Gula Darah	158.125	5	790.625	5	790.625	0	0
000010	- Strip Asam Urat	158.125	5	790.625	1	158.125	4	632.500
000011	- Hypafix	221.650	2	443.300	1	221.650	1	221.650
000012	- Vasofix No.22	17.875	5	89.375	0	0	5	89.375
000013	- Transofix	24.750	10	247.500	2	49.500	8	198.000
000018	- Lipid Pro Strip Darah	695.000	1	695.000	0	0	1	695.000
000021	- Natur e (Covid)	2.529	3.000	7.587.000	0	0	3.000	7.587.000
000022	- Natur E Nourishing 300 (Covid)	37.156	2	74.312	2	74.312	0	0
000023	- Wing Needle 25 Trm (Covid)	15.125	1.100	16.637.500	226	3.418.250	874	13.219.250
000024	- Disposable Syringe 5 Cc (Terum) (Covid)	7.700	1.100	8.470.000	207	1.593.900	893	6.876.100
000025	- Hand gloves (Covid)	170.900	21	3.588.900	4	683.600	17	2.905.300
000026	- Plesterin Bulat @200 (Covid)	40.000	6	240.000	2	80.000	4	160.000
000027	- Baju APD Medis Hazmat Suit Disposable	66.000	90	5.940.000	18	1.188.000	72	4.752.000
000028	- Strip Haemoglobin Family Dr	425.000	2	850.000	0	0	2	850.000
000029	- Strp Asam Urat Family Dr	215.000	2	430.000	0	0	2	430.000
	Jumlah			559.627.602		234.923.875		324.703.727

Catatan :

- Terdapat persediaan akun khusus covid di Pusat Jasa Kebersihan terdiri dari pembelian sebesar Rp.36.264.000 dan pemakaian sebesar Rp.36.264.000 pada barang konsumsi dengan rincian sebagai berikut :

KODE	URAIAN	HARGA SATUAN	MUTASI				NILAI S/D 31 DESEMBER 2020	
			PEMBELIAN		PEMAKAIAN			
	BAHAN PENUNJANG KEGIATAN KANTOR LAINNYA		36.264.000		36.264.000		0	
000009	- Masker 3 Ply	583.000	18	10.494.000	18	10.494.000	0	0
000009	- Masker 3 Ply	270.000	35	9.450.000	35	9.450.000	0	0
000010	- Hand Sanitizer	350.000	20	7.000.000	20	7.000.000	0	0
000011	- Sabun Pencuci Piring	40.000	30	1.200.000	30	1.200.000	0	0
000012	- Disinfektan	85.000	20	1.700.000	20	1.700.000	0	0
000013	- Sarung Tangan Karet	250.000	20	5.000.000	20	5.000.000	0	0
000014	- Tissue Basah	41.000	20	820.000	20	820.000	0	0
000015	- Kain Microfiber	30.000	20	600.000	20	600.000	0	0
Jumlah				36.264.000	0	36.264.000	0	0

Catatan :

- Terdapat persediaan akun khusus covid di Balai Arsip Statis Tsunami Aceh terdiri dari pembelian sebesar Rp.13.520.000 dan pemakaian sebesar Rp.5.165.000 pada bahan untuk pemeliharaan dengan rincian sebagai berikut :

KODE	URAIAN	HARGA SATUAN	MUTASI				NILAI S/D 31 DESEMBER 2020	
			PEMBELIAN		PEMAKAIAN			
	ALAT-ALAT PEL DAN LAP		2.200.000		0		2.200.000	
000020	- Tissue Basah	35.000	40	1.400.000	0	0	40	1.400.000
000021	- Kain Lap Microfiber	20.000	40	800.000	0	0	40	800.000
	BAHAN KIMIA UNTUK PEMBERSIH		11.320.000		5.165.000		6.155.000	
000018	- Hand Soap (Pump)	44.000	50	2.200.000	7	308.000	43	1.892.000
000023	- Cairan Antiseptik	87.000	20	1.740.000	1	87.000	19	1.653.000
000027	- Desinfektan	1.580.000	1	1.580.000	1	1.580.000	0	0
000028	- Hand Sanitizer	290.000	20	5.800.000	11	3.190.000	9	2.610.000
Jumlah				13.520.000	0	5.165.000	0	8.355.000

I

LAPORAN KEUANGAN UTAMA

**NOTA KESEPAKATAN ANGKA ASERSI FINAL
LAPORAN KEUANGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (BA 087) TAHUN 2020
YANG DIMASUKKAN DALAM
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2020 (AUDITED)**

Nomor : NKF- / IPB.6/2021

Pada hari ini, Senin tanggal 26 April 2021, para pihak yang bertanda tangan di bawah ini telah melaksanakan Rekonsiliasi Tiga Pihak secara Online untuk menyepakati dan menyetujui angka-angka dalam Laporan Keuangan Arsip Nasional Republik Indonesia (BA 087) Tahun 2020, sebagaimana Lampiran Nota Kesepakatan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini, sebagai bentuk asersi final atas Laporan Keuangan Arsip Nasional Republik Indonesia (BA 087) Tahun 2020 dan untuk dikonsolidasikan dalam LKPP Tahun 2020 (Audited).

Nota Kesepakatan ini dibuat dalam rangka penetapan asersi final Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga (LKKL), Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN), dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Penyesuaian angka-angka pada LKKL/LK BA BUN (Unaudited) dilakukan sesuai hasil rekonsiliasi dengan Kementerian Keuangan, yang diwakili oleh Ditjen Perbendaharaan (dhi. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan) dan Ditjen Kekayaan Negara (dhi. Direktorat Barang Milik Negara). Hasil rekonsiliasi juga telah memasukkan usulan koreksi dari K/L dan koreksi audit Tim Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan yang telah disetujui dan disepakati bersama.

Berdasarkan Nota Kesepakatan ini maka Arsip Nasional Republik Indonesia menyetujui akan memproses angka asersi final untuk selanjutnya menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Tahun 2020 (Audited) beserta rinciannya secara lengkap sesuai dengan angka dalam Lampiran Nota Kesepakatan ini kepada Ditjen Perbendaharaan (dhi. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan) dan menyampaikan Laporan BMN kepada Ditjen Kekayaan Negara (dhi. Direktorat Barang Milik Negara) paling lambat tanggal 5 Mei 2021.

PARA PIHAK YANG MENYEPAKATI

Arsip Nasional Republik Indonesia (BA 087)



Ali Sugeng

Kementerian Keuangan RI,
Ditjen Kekayaan Negara
Selaku Tim Penyusun LBMN

Bambang Sulistyono

Kementerian Keuangan RI,
Ditjen Perbendaharaan
Selaku Tim Penyusun LKPP

Denny Febriano Singawiria

MENGETAHUI
Tim Auditor BPK

Agustina Widyasari

AKUN	UNAUDITED	KOREKSI AUDITED - NON REVAL		KOREKSI AUDITED - REVAL		ASERSI FINAL
		DEBET	KREDIT	DEBET	KREDIT	
ASET LABINYA						
Kemiraaan Dengan Pihak Ketiga						
Aset Tak Berwujud	16.541.087.383					16.541.087.383
Dana yg Dibatasi Penggunaannya						
Dana Penjaminan						
Dana Kelolaan B/LU						
Aset Lain-lain	10.678.350.353					10.678.350.353
Akum Penyusutan Kemiraaan Dig Pihak Ke3						
Akum Penyusutan Aset Lain-lain	(10.629.090.587)					(10.629.090.587)
Akum Amortisasi Aset Tak Berwujud	(11.883.626.778)					(11.883.626.778)
Akum Amortisasi ATB yg TDK digunakan						
Jumlah Aset Lainnya	4.706.720.371					4.706.720.371
JUMLAH ASET	1.218.038.398.615	417.540.600	116.169.395			1.218.309.769.620
KEWAJIBAN						
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK						
Utang kepada Pihak Ketiga	620.664.028					620.664.028
Bagan Lancar Utang Jangka Panjang						
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan						
Utang Jangka Pendek Lainnya						
Hibah Yang Belum Disahkan						
Utang Muka dan KPPN		0	0			
Pendapatan Diterna Dimuka				96.591.516		96.591.516
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	620.664.028		96.591.516			717.255.544
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG						
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya						
Utang Jangka Panjang B/LU kepada BUN						
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang						
JUMLAH KEWAJIBAN	620.664.028		96.591.516			717.255.544
EKUITAS	1.217.417.734.587	(123.694.412)	81.085.277			1.217.822.514.276
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	1.218.038.398.615					1.218.309.769.620

Jakarta, April 2021
Arsip Nasional RI



Ali Sugeng
NIP 197008301988031001

Ditjen Kekayaan Negara

Bambang Sulistyono
NIP 197108091997031001

Badan Pemeriksa Keuangan

Agustina Widyasari
NIP 197708022007082001

Ditjen Perbendaharaan

Denny Febrano Singawina
NIP 196502161986031001

LAPORAN OPERASIONAL
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020

K/L : ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
 BA : 087

KEGIATAN OPERASIONAL	UNAUDITED	KOREKSI AUDITED		KOREKSI REVAL		ASERSI FINAL
		DEBIT	KREDIT	DEBIT	KREDIT	
PENDAPATAN OPERASIONAL						
PENDAPATAN PERPAJAKAN						
Pendapatan Pajak Penghasilan	-					-
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang M	-					-
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	-					-
Pendapatan Cukai	-					-
Pendapatan Pajak Lainnya	-					-
Pendapatan Bea Masuk	-					-
Pendapatan Bea Keluar	-					-
Pendapatan Pajak Lainnya	-					-
Jumlah Pendapatan Pajak	-					-
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK						
Penerimaan Sumber Daya Alam	-					-
Penerimaan Bagian Pemerintah atas Laba BUMI / KND	-					-
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	12.222.057.482	98.691.516				12.125.485.966
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	12.222.057.482	98.691.516				12.125.485.966
PENDAPATAN HIBAH						
Pendapatan Hibah	-					-
Jumlah Pendapatan Hibah	-					-
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL	12.222.057.482	98.691.516				12.125.485.966
BEBAN OPERASIONAL						
Beban Pegawai	93.739.117.239		24.000.000			93.709.117.239
Beban Persediaan	3.724.114.943		50.000			3.724.094.943
Beban Barang dan Jasa	38.097.838.668					38.097.838.668
Beban Pemeliharaan	9.119.349.339	59.204.800	197.152.000			8.961.402.239
Beban Perjalanan Dinas	6.335.944.967					6.335.944.967
Beban Barang Untuk Diterangkan Kepada Masyarakat	4.389.259	143.667	104.900			4.438.023
Beban Bunga	-					-
Beban Subsidi	-					-
Beban Hibah	-					-
Beban Bantuan Sosial	-					-
Beban Transfer	-					-
Beban Lain-lain	-					-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	36.797.183.311	10.671.744	5.319.612			36.797.183.311
Beban Penyesuaian Piutang Tak Tertagih	-					-
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL	187.806.693.692	69.920.311	226.826.512			187.649.897.391
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	176.584.636.110	28.671.205	228.626.512			176.524.671.425

KEGIATAN NON OPERASIONAL	UNAUDITED	KOREKSI AUDITED		KOREKSI REVAL		ASERSI FINAL
		DEBIT	KREDIT	DEBIT	KREDIT	
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR						
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	185.921.000					185.921.000
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	112.253.572					112.253.572
Jumlah Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	73.667.428					73.667.428
SURPLUS/(DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG						
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-					-
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-					-
Jumlah Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-					-
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA						
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	1.427.507.702	24.000.000				1.403.507.702
Beban dan Kegiatan Non Operasional Lainnya	102.521.018	9.011.799				111.532.807
Jumlah Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	1.324.986.684	14.988.211				1.291.974.895
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	1.398.654.112	14.988.211				1.385.642.323
POS LUAR BIASA						
Pendapatan Luar Biasa	-					-
Beban Luar Biasa	-					-
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA						
SURPLUS/(DEFISIT) AKHIR	174.185.981.988	41.659.416	228.628.512	-	-	174.188.879.102


Jakarta, April 2021
 Atsip Nasution


Badan Pemeriksa Keuangan

 Aguslina Widyanan
 NIP. 197708022007082001

Ditjen Kekayaan Negara

 Bambang Sulistyono
 NIP. 197108091997031001

Ditjen Perbendaharaan

 Denny Febrano Singawati
 NIP. 196602161986031001

LPE KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA - LKPP 2020
PER 31 DESEMBER 2020

LAMPIRAN NOTA KESEPAKATAN
Nomor : IPB.6/2021
Tanggal : April 2021

K/I : ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
BA : 087

AKUN	UNAUDITED	KOREKSI AUDITED - NON REVAL		KOREKSI AUDITED REVAL	ASERSI FINAL
		DEBET	KREDIT		
EKUITAS AWAL	1.245.699.800.421				1.245.699.800.421
SURPLUS/DEFISIT LO	(174.185.981.998)	(147.694.412)	(120.591.516)		(174.158.879.102)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS					
Penyesuaian Nilai Aset	-				-
Koreksi Nilai Persediaan	-				-
Selisih Revaluasi Aset	-				-
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	(41.494.700)		177.676.793		136.182.093
Koreksi Atas Reklasifikasi	-				-
Koreksi Lain-lain	-				-
LANGSUNG MENAMBAH/ MENGURANGI EKUITAS	(41.494.700)	-	177.676.793	-	136.182.093
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	145.945.410.864	24.000.000	24.000.000	-	145.945.410.864
Ditagikan ke Entitas Lain	156.656.536.842	24.000.000			156.632.536.842
Diterima dari Entitas Lain	(13.668.271.146)		24.000.000		(13.664.271.146)
Transfer Keluar	(60.122.517.402)				(60.122.517.402)
Transfer Masuk	60.122.517.402				60.122.517.402
Pengesahan Hibah Langsung	2.977.145.168				2.977.145.168
Pengesahan Hibah Langsung TAYL	-				-
Pengesahan Pengembalian Hibah Lar	-				-
Setoran Surplus BLU	-				-
KENAIKAN/PENURUNAN ENTITAS	(28.282.065.834)	(123.694.412)	81.085.277	-	(28.077.286.145)
EKUITAS AKHIR	1.217.417.734.587	(123.694.412)	81.085.277	-	1.217.622.514.276

Jakarta, April 2021
Arsip Nasional RI

Ali Sugeng
NIP 197008301998031001

Ditjen Kekayaan Negara

Bambang Sulistyono
NIP 197108091997031001

Badan Pemeriksa Keuangan

Agustina Widyasari
NIP 197708022007082001

Ditjen Perbendaharaan

Denny Febriano Singawiria
NIP 196502161986031001

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN
A. PENDAPATAN

Kode Bagian Anggaran : 47
Urutan Bagian Anggaran : ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

URAIAN	UNAUDITED		KOREKSI BRUTO		KOREKSI PENGEMBALIAN		AUDITED	
	BRUTO	PENGEMBALIAN	DEBIT	KREDIT	DEBIT	KREDIT	BRUTO	PENGEMBALIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41. Pendapatan Persewaan	13.664.271,146							
42. Pendapatan Negara Bukan Pajak								
421. Pendapatan Sumber Daya Alam								
422. Pendapatan dan RND								
423. Pendapatan PMS/ Lainnya	13.664.271,146		24.000.000				13.664.271,146	
424. Pendapatan BLU								
43. Pendapatan Hibah								
TOTAL PENDAPATAN	13.664.271,146		24.000.000				13.664.271,146	

B. BELANJA

JENIS BELANJA	URAIAN	UNAUDITED		KOREKSI BRUTO		KOREKSI PENGEMBALIAN		AUDITED	
		BRUTO	PENGEMBALIAN	DEBIT	KREDIT	DEBIT	KREDIT	BRUTO	PENGEMBALIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51. Belanja Pegawai		93.740.969.989	1.952						
52. Belanja Barang dan Jasa		59.233.700.037	10.418.032		24.000.000				
53. Belanja Modal		4.833.287.340							
54. Belanja Pembayaran Kewajiban Di									
55. Belanja Subsidi									
56. Belanja Hibah									
57. Belanja Bantuan Sosial									
58. Belanja Belanja Lain-lain									
TOTAL BELANJA		156.807.957.366	101.420.984		24.000.000			156.807.957.366	205.420.984

KEMENTERIAN KEUANGAN
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



KEMENTERIAN RELIGIAN
Denny Febrino Singawana
NP 1465216198031001

SACIA PEMERIKSA KEUANGAN
Agudina Wahyuni
NP 15770522007002001

**USULAN KOREKSI ATAS PENYALJIAN LAPORAN KEUANGAN
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020**

No	Uraian	KOREKSI		Keterangan
		Debet	Kredit	
1	425131 Pendapatan Sewa Ruang (LO) 219211 Pendapatan Sewa Dilerima Di Muka Koreksi penyusutan atas Penunmanan PNBP Sewa Ruang di Gedung ANRI Jalan Gajahmada Tahun 2021 yang telah diterima kas negara pada tanggal 24 Maret 2020	66.591.516	66.591.516	Seluju
2	117111 Persediaan - Barang Konsumsi 593111 Bahan Persediaan - Barang Konsumsi	50.000	50.000	Seluju
3	596121 Bahan Persediaan Rusak/Usang 117128 Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat Koreksi Penghapusan Persediaan Usang/Rusak Saliker ANRI Jakarta	9.011.789	9.011.789	Seluju
4	117128 Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat 593128 Bahan Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat Koreksi kurang catat persediaan berdasarkan hasil stock opname pada Saliker ANRI Jakarta	104.900	104.900	Seluju
5	593128 Bahan Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat 117128 Persediaan - Dijual/Diserahkan ke Masyarakat Koreksi lebih catat persediaan berdasarkan hasil stock opname pada Saliker ANRI Jakarta	143.667	143.667	Seluju
6	133111 Gedung dan Bangunan 523111 Bahan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 591211 Beban Penyututan Gedung dan Bangunan 137211 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan Koreksi atas Kapitalisasi Aset dari Belanja Pemeliharaan - Revitalisasi Salasar di Saliker ANRI Jakarta	197.152.000 8.961.456	197.152.000 8.961.456	Seluju
7	425931 Pendapatan Sekoran dari Sisa Uang Non TP/GR Penunman PNS (LO) 31312 Ekuitas - Dikrima dari Entitas Lain 31311 Ekuitas - Diagihkan ke Entitas Lain 511111 Beban Gaji Pokok PNS 425931 Pendapatan Sekoran dari Sisa Uang Non TP/GR Penunman PNS (LRA) 611111 Belanja Gaji Pokok PNS	24.000.000 24.000.000 24.000.000	24.000.000 24.000.000 24.000.000	ANRI menyampaikan ralat dokumen SSPB menjadi SSPB kepada KPPN, dan memastikan pada KPPN apakah koreksi tersebut ditunjukkan

No	Uraian	KOREKSI		Keerangan
		Debet	Kredit	
	<i>Koreksi atas pengembalian kelebihan pembayaran Bunga Pegawai a.n. Nurwahy dan Sidap Fauzi pada</i>			
8	565113 Bahan Asat Ekstrakomplek Gedung dan Bangunan 133111 Gedung dan Bangunan <i>Koreksi atas Asat Ekstrakomplek Gedung dan Bangunan yang berasal dari Hibah (masuk) Pemerintah Provinsi Riau</i>	59.204.900	59.204.900	
9	137211 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan 591116 Koreksi Nilai Asat Tetap Non Revaluasi <i>Koreksi atas Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan yang berasal dari Hibah Pemerintah Provinsi Riau senilai Rp220.233.700</i>	220.233.700	220.233.700	Jurnal hasil Simulasi
10	591211 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan 137211 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan <i>Koreksi atas Revaluasi Revaluasi pada Saliter AURI Jakarta</i>	1.610.286	1.610.286	
11	591116 Koreksi Nilai Asat Tetap Non Revaluasi 591211 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan 137211 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan <i>Koreksi atas Revaluasi Revaluasi pada Saliter AURI Jakarta</i>	42.566.907	5.219.612 37.297.295	Seluruh

Jakarta, April 2021
Ditandatangani



Asip Nasional RI
Ketua Tim Tindakan Keuang

Asip Nasional RI
Ketua Tim Bangun BMM

Asip Nasional RI
AURI

BPK RI
Ketua Tim Pemeriksaan

Al Sugeng

Dipo Winanto

Dary Qurnis P

Agustina Widayanti

I.1

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN / LEMBAGA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN/LEMBAGA : 087 ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Kode Lap : LRA.F.W.1
Tanggal : 23/04/21 4:04 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_face_kl_komparatif --

NO	URAIAN	2020				2019			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH)	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				0				0
	PENERIMAAN PERPAJAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0
	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	11,876,134,000	13,664,271,146	(1,788,137,146)	115	12,157,936,000	13,802,999,892	(1,645,063,892)	114
	PENERIMAAN HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	11,876,134,000	13,664,271,146	(1,788,137,146)	115	12,157,936,000	13,802,999,892	(1,645,063,892)	114
B	BELANJA				0				0
	BELANJA PEGAWAI	100,000,295,000	93,716,968,297	6,283,326,703	94	100,299,579,000	100,092,865,098	206,713,902	100
	BELANJA BARANG	60,504,900,000	58,082,281,205	2,422,618,795	96	112,176,482,000	107,935,972,063	4,240,509,937	96
	BELANJA MODAL	4,912,809,000	4,833,287,340	79,521,660	98	105,606,903,000	101,360,796,097	4,246,106,903	96
	BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN UTANG	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA SUBSIDI	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA BANTUAN SOSIAL	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA LAIN-LAIN	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA (B I + B II)	165,418,004,000	156,632,536,842	8,785,467,158	95	318,082,964,000	309,389,633,258	8,693,330,742	97
C	PEMBIAYAAN				0				0

I.2
NERACA

NERACA
TINGKAT KEMENTERIAN / LEMBAGA
PER DESEMBER 2020 DAN 2019
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 087

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Tgl. Cetak 23/04/2021 4:05 AM
lap_neraca_kl_komparatif --rekon17

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2020	2019	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	2,720,000	(2,720,000)	(100.00)
Persediaan	2,450,555,292	1,804,956,408	645,598,884	35.77
JUMLAH ASET LANCAR	2,450,555,292	1,807,676,408	642,878,884	35.56
ASET TETAP				
Tanah	805,323,718,068	802,566,806,600	2,756,911,468	0.34
Peralatan dan Mesin	219,324,401,371	221,057,763,568	(1,733,362,197)	(0.78)
Gedung dan Bangunan	365,362,212,486	364,584,089,636	778,122,850	0.21
Jalan, Irigasi dan Jaringan	62,881,974,526	62,881,974,526	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	26,865,394,160	26,865,394,160	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(268,575,206,454)	(239,264,549,709)	(29,310,656,745)	12.25
JUMLAH ASET TETAP	1,211,182,494,157	1,238,691,478,781	(27,508,984,624)	(2.22)
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	16,541,087,383	15,970,656,383	570,431,000	3.57
Aset Lain-lain	10,678,350,353	5,719,311,911	4,959,038,442	86.71
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(22,512,717,365)	(15,704,744,645)	(6,807,972,720)	43.35
JUMLAH ASET LAINNYA	4,706,720,371	5,985,223,649	(1,278,503,278)	(21.36)
JUMLAH ASET	1,218,339,769,820	1,246,484,378,838	(28,144,609,018)	(2.26)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	620,664,028	781,858,417	(161,194,389)	(20.62)
Pendapatan Diterima Dimuka	96,591,516	0	96,591,516	0.00
Uang Muka dari KPPN	0	2,720,000	(2,720,000)	(100.00)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	717,255,544	784,578,417	(67,322,873)	(8.58)
JUMLAH KEWAJIBAN	717,255,544	784,578,417	(67,322,873)	(8.58)
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	1,217,622,514,276	1,245,699,800,421	(28,077,286,145)	(2.25)
JUMLAH EKUITAS	1,217,622,514,276	1,245,699,800,421	(28,077,286,145)	(2.25)
JUMLAH EKUITAS	1,217,622,514,276	1,245,699,800,421	(28,077,286,145)	(2.25)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	1,218,339,769,820	1,246,484,378,838	(28,144,609,018)	(2.26)

I.3

LAPORAN OPERASIONAL

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 087 ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Kode Lap : LO.KL
Tanggal : 23/04/21 3:17 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lo_kl --
Tgl Data : 20/05/19 12:00

URAIAN	2020	2019	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	12,125,465,966	13,366,513,594	(1,241,047,628)	(9.285)
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	12,125,465,966	13,366,513,594	(1,241,047,628)	(9.285)
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	12,125,465,966	13,366,513,594	(1,241,047,628)	(9.285)
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	93,709,117,239	98,235,109,047	(4,525,991,808)	(4.607)
Beban Persediaan	3,724,064,943	5,210,490,065	(1,486,425,122)	(28.528)
Beban Barang dan Jasa	38,097,836,669	48,446,714,781	(10,348,878,112)	(21.361)
Beban Pemeliharaan	8,981,402,239	9,110,528,492	(129,126,253)	(1.417)
Beban Perjalanan Dinas	6,335,944,967	42,140,628,136	(35,804,683,169)	(84.965)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	4,438,023	4,334,256,173	(4,329,818,150)	(99.898)
Beban Bunga	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 087 ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Kode Lap : LO.KL
Tanggal : 23/04/21 3:17 PM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lo_kl --
Tgl Data : 20/05/19 12:00

URAIAN	2020	2019	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	36,797,183,311	35,663,831,947	1,133,351,364	3.178
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	187,649,987,391	243,141,558,641	(55,491,571,250)	(22.823)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(175,524,521,425)	(229,775,045,047)	54,250,523,622	(23.61)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	73,667,428	(16,369,904)	90,037,332	(550.017)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	185,921,000	94,999,999	90,921,001	95.706
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	112,253,572	111,369,903	883,669	0.793
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	1,291,974,895	382,768,685	909,206,210	237.534
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	1,403,507,702	412,360,234	991,147,468	240.36
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	111,532,807	29,591,549	81,941,258	276.908
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	1,365,642,323	366,398,781	999,243,542	272.72
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(174,158,879,102)	(229,408,646,266)	55,249,767,164	(24.084)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(174,158,879,102)	(229,408,646,266)	55,249,767,164	(24.084)

I.4

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT KEMENTERIAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

: 087

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Kode Lap : LPE.KL

Tanggal : 23/04/21 4:05 AM

Halaman : 1

Prg ID : lap_lpe_kl --

URAIAN	2020	2019	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	1,245,699,800,421	469,273,762,570	776,426,037,851	165.453
SURPLUS/DEFISIT-LO	(174,158,879,102)	(229,408,646,266)	55,249,767,164	(24.084)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	0	0	0	
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	136,182,093	710,248,050,751	(710,111,868,658)	(99.981)
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0	0	
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	25,519,398,478	(25,519,398,478)	(100)
SELISIH REVALUASI ASET	0	724,611,109,018	(724,611,109,018)	(100)
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	136,182,093	(39,898,698,245)	40,034,880,338	(100.34 1)
LAIN-LAIN	0	16,241,500	(16,241,500)	(100)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	145,945,410,864	295,586,633,366	(149,641,222,502)	(50.625)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(28,077,286,145)	776,426,037,851	(804,503,323,996)	(103.61 6)
EKUITAS AKHIR	1,217,622,514,276	1,245,699,800,421	(28,077,286,145)	(2.254)

II

LAPORAN KEUANGAN TAMBAHAN

II.1

LRA BELANJA MENURUT AKUN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020

Kode Lap : LRA.B.KL.1
Tanggal : 23/04/21 3:17 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 087

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	31,350,442,000	30,176,007,000	30,000,904,900	16,127,071	29,984,777,829	99.42	191,229,171
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	510,000	439,000	433,469	1,788	431,681	98.74	7,319
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1,991,866,000	2,074,856,000	2,036,392,738	1,612,707	2,034,780,031	98.15	40,075,969
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	532,918,000	547,566,000	521,264,402	303,103	520,961,299	95.2	26,604,701
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	2,255,199,000	2,039,900,000	2,020,840,000	0	2,020,840,000	99.07	19,060,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	3,031,042,000	3,417,452,000	3,399,122,000	3,006,068	3,396,115,932	99.46	21,336,068
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	207,952,000	323,023,000	309,790,267	242,382	309,547,885	95.9	13,475,115
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	1,366,420,000	1,365,836,000	1,359,830,340	629,877	1,359,200,463	99.56	6,635,537
511129	Belanja Uang Makan PNS	4,958,968,000	5,317,402,000	5,115,243,000	0	5,115,243,000	96.2	202,159,000
511134	Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS	3,310,369,000	3,416,300,000	3,404,480,000	2,078,696	3,402,401,304	99.65	13,898,696
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	601,099,000	473,000,000	456,470,000	0	456,470,000	96.51	16,530,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	49,606,785,000	49,151,781,000	48,624,771,116	24,001,692	48,600,769,424	98.93	551,011,576
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	140,325,000	222,000,000	172,680,000	0	172,680,000	77.78	49,320,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	140,325,000	222,000,000	172,680,000	0	172,680,000	77.78	49,320,000
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito							
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	52,522,037,000	50,626,514,000	44,943,518,873	0	44,943,518,873	88.77	5,682,995,127
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124	52,522,037,000	50,626,514,000	44,943,518,873	0	44,943,518,873	88.77	5,682,995,127
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	102,269,147,000	100,000,295,000	93,740,969,989	24,001,692	93,716,968,297	93.74	6,283,326,703
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	10,817,710,000	12,344,677,000	12,202,250,668	4,447,500	12,197,803,168	98.85	146,873,832
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	1,099,035,000	777,758,000	751,411,021	0	751,411,021	96.61	26,346,979
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	140,140,000	152,450,000	80,094,965	0	80,094,965	52.54	72,355,035
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	742,200,000	829,940,000	776,340,000	0	776,340,000	93.54	53,600,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	1,012,150,000	211,881,000	201,972,650	0	201,972,650	95.32	9,908,350
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0	2,960,992,000	2,697,362,599	0	2,697,362,599	91.1	263,629,401
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	13,811,235,000	17,277,698,000	16,709,431,903	4,447,500	16,704,984,403	96.71	572,713,597
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	9,999,972,000	3,696,925,000	3,280,024,444	0	3,280,024,444	88.72	416,900,556
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	5,342,970,000	3,378,130,000	3,301,020,000	2,935,000	3,298,085,000	97.72	80,045,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1,844,857,000	871,770,000	829,563,450	0	829,563,450	95.16	42,206,550
521231	Belanja Barang Pemberian Penghargaan dalam bentuk uang	58,000,000	0	0	0	0	0	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020

Kode Lap : LRA.B.KL.1
Tanggal : 23/04/21 3:17 PM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 087

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
521234	Belanja Barang Pemberian Penghargaan dalam bentuk barang	32,000,000	0	0	0	0		0
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0	254,110,000	149,675,000	0	149,675,000	58.9	104,435,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	17,277,799,000	8,200,935,000	7,560,282,894	2,935,000	7,557,347,894	92.19	643,587,106
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	4,328,772,000	3,705,754,000	3,674,524,247	0	3,674,524,247	99.16	31,229,753
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	0	611,997,000	609,411,602	0	609,411,602	99.58	2,585,398
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	4,328,772,000	4,317,751,000	4,283,935,849	0	4,283,935,849	99.22	33,815,151
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	8,209,079,000	7,804,621,000	7,773,543,904	0	7,773,543,904	99.6	31,077,096
522112	Belanja Langganan Telepon	102,000,000	63,200,000	59,677,415	0	59,677,415	94.43	3,522,585
522113	Belanja Langganan Air	39,600,000	108,260,000	105,122,520	0	105,122,520	97.1	3,137,480
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	3,450,000	3,308,000	3,307,781	0	3,307,781	99.99	219
522121	Belanja Jasa Pos dan Giro	7,000,000	3,247,000	3,247,000	0	3,247,000	100	0
522131	Belanja Jasa Konsultan	200,000,000	196,000,000	196,000,000	0	196,000,000	100	0
522141	Belanja Sewa	1,349,266,000	1,329,762,000	1,320,426,750	0	1,320,426,750	99.3	9,335,250
522151	Belanja Jasa Profesi	2,884,314,000	1,474,428,000	1,436,050,000	4,335,000	1,431,715,000	97.4	42,713,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	5,169,611,000	680,668,000	594,046,500	0	594,046,500	87.27	86,621,500
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0	2,873,646,000	2,475,121,733	0	2,475,121,733	86.13	398,524,267
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	17,964,320,000	14,537,140,000	13,966,543,603	4,335,000	13,962,208,603	96.07	574,931,397
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4,882,740,000	4,276,566,000	4,245,188,921	0	4,245,188,921	99.27	31,377,079
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	350,000,000	523,444,000	497,696,750	0	497,696,750	95.08	25,747,250
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	234,500,000	143,660,000	126,346,780	0	126,346,780	87.95	17,313,220
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,583,860,000	1,732,779,000	1,716,042,697	0	1,716,042,697	99.03	16,736,303
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	700,000,000	711,800,000	711,550,000	0	711,550,000	99.96	250,000
523129	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1,315,700,000	1,773,582,000	1,720,820,541	0	1,720,820,541	97.03	52,761,459
523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya	171,930,000	252,270,000	220,213,800	0	220,213,800	87.29	32,056,200
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	9,238,730,000	9,414,101,000	9,237,859,489	0	9,237,859,489	98.13	176,241,511
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Biasa	9,501,838,000	2,862,531,000	2,829,978,299	144,826,632	2,685,151,667	98.86	177,379,333
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,577,565,000	266,925,000	262,275,000	2,396,400	259,878,600	98.26	7,046,400
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	3,484,796,000	944,758,000	934,019,000	2,977,500	931,041,500	98.86	13,716,500
524115	Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	0	245,850,000	192,300,000	0	192,300,000	78.22	53,550,000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	5,925,266,000	2,328,076,000	2,287,074,000	19,500,800	2,267,573,200	98.24	60,502,800
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	20,489,465,000	6,648,140,000	6,505,646,299	169,701,332	6,335,944,967	97.86	312,195,033

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020

Kode Lap : LRA.B.KL.1
Tanggal : 23/04/21 3:17 PM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_bel_akun_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 087

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri							
524211	Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri	1,181,500,000	109,135,000	0	0	0	0	109,135,000
524219	Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	971,406,000	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5242	2,152,906,000	109,135,000	0	0	0	0	109,135,000
5261	Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda							
526112	Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada	273,540,000	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5261	273,540,000	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	85,536,767,000	60,504,900,000	58,263,700,037	181,418,832	58,082,281,205	96.3	2,422,618,795
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,993,071,000	2,147,565,000	2,108,112,170	0	2,108,112,170	98.16	39,452,830
532119	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi COVID-	0	1,965,294,000	1,962,882,500	0	1,962,882,500	99.88	2,411,500
532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	9,000,000	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	2,002,071,000	4,112,859,000	4,070,994,670	0	4,070,994,670	98.98	41,864,330
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan							
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	125,000,000	0	0	0	0	0	0
533119	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi	0	195,000,000	191,861,670	0	191,861,670	98.39	3,138,330
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331	125,000,000	195,000,000	191,861,670	0	191,861,670	98.39	3,138,330
5361	Belanja Modal Lainnya							
536111	Belanja Modal Lainnya	824,231,000	484,950,000	451,435,500	0	451,435,500	93.09	33,514,500
536118	Belanja Modal Lainnya - Penanganan Pandemi COVID-19	0	75,000,000	74,000,000	0	74,000,000	98.67	1,000,000
536121	Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset	0	45,000,000	44,995,500	0	44,995,500	99.99	4,500
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5361	824,231,000	604,950,000	570,431,000	0	570,431,000	94.29	34,519,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	2,951,302,000	4,912,809,000	4,833,287,340	0	4,833,287,340	98.38	79,521,660
	JUMLAH BELANJA	190,757,216,000	165,418,004,000	156,837,957,366	205,420,524	156,632,536,842	94.81	8,785,467,158

II.2

LRA PENDAPATAN MENURUT AKUN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 087

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Kode Lap : LRA.P.KL.1

Tanggal : 23/04/21 3:17 PM

Halaman : 1

Prg ID : lap_lra_pen_akun_kl --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha					
425119	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	355,810,000	4,895,000	0	4,895,000	1.38
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	185,921,000	0	185,921,000	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	716,057,032	0	716,057,032	0
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	33,900,000	0	33,900,000	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	355,810,000	940,773,032	0	940,773,032	264.4
4254	Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi					
425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	3,191,484,000	3,087,750,000	0	3,087,750,000	96.75
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4254	3,191,484,000	3,087,750,000	0	3,087,750,000	96.75
4256	Pendapatan Jasa Lainnya					
425692	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi	8,328,840,000	8,379,455,450	0	8,379,455,450	100.61
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4256	8,328,840,000	8,379,455,450	0	8,379,455,450	100.61
4257	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan					
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai	0	3,000,000	0	3,000,000	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4257	0	3,000,000	0	3,000,000	0
4259	Pendapatan Lain-Lain					
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	26,852,475	0	26,852,475	0
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	1,226,440,189	0	1,226,440,189	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0	1,253,292,664	0	1,253,292,664	0
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	11,876,134,000	13,664,271,146	0	13,664,271,146	115.06
	JUMLAH PENDAPATAN	11,876,134,000	13,664,271,146	0	13,664,271,146	115.06

II.3

NERACA PERCOBAAN KAS

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER DESEMBER 2020
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 087

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Tgl. Cetak 23/04/2021 3:17 PM
lap_neraca_percobaan_kas_kl --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	115612	Piutang dari KPPN	8,785,467,158	0
0.0	219711	Utang Kepada KUN	1,788,137,146	0
2.0	425119	Estimasi Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang	355,810,000	0
2.0	425421	Estimasi Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	3,191,484,000	0
2.0	425692	Estimasi Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi	8,328,840,000	0
2.0	511111	Allotment Belanja Gaji Pokok PNS	0	30,176,007,000
2.0	511119	Allotment Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	439,000
2.0	511121	Allotment Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	0	2,074,856,000
2.0	511122	Allotment Belanja Tunj. Anak PNS	0	547,566,000
2.0	511123	Allotment Belanja Tunj. Struktural PNS	0	2,039,900,000
2.0	511124	Allotment Belanja Tunj. Fungsional PNS	0	3,417,452,000
2.0	511125	Allotment Belanja Tunj. PPh PNS	0	323,023,000
2.0	511126	Allotment Belanja Tunj. Beras PNS	0	1,365,836,000
2.0	511129	Allotment Belanja Uang Makan PNS	0	5,317,402,000
2.0	511134	Allotment Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS	0	3,416,300,000
2.0	511151	Allotment Belanja Tunjangan Umum PNS	0	473,000,000
2.0	512211	Allotment Belanja Uang Lembur	0	222,000,000
2.0	512411	Allotment Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	0	50,626,514,000
2.0	521111	Allotment Belanja Keperluan Perkantoran	0	12,344,677,000
2.0	521113	Allotment Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	0	777,758,000
2.0	521114	Allotment Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	0	152,450,000
2.0	521115	Allotment Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	0	829,940,000
2.0	521119	Allotment Belanja Barang Operasional Lainnya	0	211,881,000
2.0	521131	Allotment Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi	0	2,960,992,000
2.0	521211	Allotment Belanja Bahan	0	3,696,925,000
2.0	521213	Allotment Belanja Honor Output Kegiatan	0	3,378,130,000
2.0	521219	Allotment Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0	871,770,000
2.0	521231	Allotment Belanja Barang Pemberian Penghargaan dalam	0	0
2.0	521234	Allotment Belanja Barang Pemberian Penghargaan dalam	0	0
2.0	521241	Allotment Belanja Barang Non Operasional - Penanganan	0	254,110,000
2.0	521811	Allotment Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	0	3,705,754,000
2.0	521841	Allotment Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi	0	611,997,000
2.0	522111	Allotment Belanja Langganan Listrik	0	7,804,621,000
2.0	522112	Allotment Belanja Langganan Telepon	0	63,200,000
2.0	522113	Allotment Belanja Langganan Air	0	108,260,000
2.0	522119	Allotment Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	0	3,308,000
2.0	522121	Allotment Belanja Jasa Pos dan Giro	0	3,247,000
2.0	522131	Allotment Belanja Jasa Konsultan	0	196,000,000
2.0	522141	Allotment Belanja Sewa	0	1,329,762,000
2.0	522151	Allotment Belanja Jasa Profesi	0	1,474,428,000
2.0	522191	Allotment Belanja Jasa Lainnya	0	680,668,000
2.0	522192	Allotment Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0	2,873,646,000

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER DESEMBER 2020
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 087

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Tgl. Cetak 23/04/2021 3:17 PM
lap_neraca_percobaan_kas_kl --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
2.0	523111	Allotment Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	4,276,566,000
2.0	523112	Allotment Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung	0	523,444,000
2.0	523119	Allotment Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	143,660,000
2.0	523121	Allotment Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	1,732,779,000
2.0	523123	Allotment Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan	0	711,800,000
2.0	523129	Allotment Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	1,773,582,000
2.0	523199	Allotment Belanja Pemeliharaan Lainnya	0	252,270,000
2.0	524111	Allotment Belanja Perjalanan Biasa	0	2,862,531,000
2.0	524113	Allotment Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	266,925,000
2.0	524114	Allotment Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	944,758,000
2.0	524115	Allotment Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi	0	245,850,000
2.0	524119	Allotment Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	2,328,076,000
2.0	524211	Allotment Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri	0	109,135,000
2.0	524219	Allotment Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	0	0
2.0	526112	Allotment Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan	0	0
2.0	532111	Allotment Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	2,147,565,000
2.0	532119	Allotment Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan	0	1,965,294,000
2.0	532121	Allotment Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	0	0
2.0	533111	Allotment Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0
2.0	533119	Allotment Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Penanganan	0	195,000,000
2.0	536111	Allotment Belanja Modal Lainnya	0	484,950,000
2.0	536118	Allotment Belanja Modal Lainnya - Penanganan Pandemi	0	75,000,000
2.0	536121	Allotment Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya	0	45,000,000
3.0	425119	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	0	4,895,000
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	185,921,000
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	716,057,032
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan	0	33,900,000
3.0	425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	0	3,087,750,000
3.0	425692	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi	0	8,379,455,450
3.0	425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap	0	3,000,000
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang	0	26,852,475
3.0	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	1,226,440,189
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	30,000,904,900	0
3.1	511111	Pengembalian Belanja Gaji Pokok PNS	0	16,127,071
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	433,469	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	1,788
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	2,036,392,738	0
3.1	511121	Pengembalian Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	0	1,612,707
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	521,264,402	0
3.1	511122	Pengembalian Belanja Tunj. Anak PNS	0	303,103
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	2,020,840,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	3,399,122,000	0

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER DESEMBER 2020
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 087

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Tgl. Cetak 23/04/2021 3:17 PM
lap_neraca_percobaan_kas_kl --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.1	511124	Pengembalian Belanja Tunj. Fungsional PNS	0	3,006,068
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	309,790,267	0
3.1	511125	Pengembalian Belanja Tunj. PPh PNS	0	242,382
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	1,359,830,340	0
3.1	511126	Pengembalian Belanja Tunj. Beras PNS	0	629,877
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	5,115,243,000	0
3.0	511134	Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS	3,404,480,000	0
3.1	511134	Pengembalian Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS	0	2,078,696
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	456,470,000	0
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	172,680,000	0
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	44,943,518,873	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	12,202,250,668	0
3.1	521111	Pengembalian Belanja Keperluan Perkantoran	0	4,447,500
3.0	521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	751,411,021	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	80,094,965	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	776,340,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	201,972,650	0
3.0	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	2,697,362,599	0
3.0	521211	Belanja Bahan	3,280,024,444	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	3,301,020,000	0
3.1	521213	Pengembalian Belanja Honor Output Kegiatan	0	2,935,000
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	829,563,450	0
3.0	521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi	149,675,000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	3,674,524,247	0
3.0	521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	609,411,602	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	7,773,543,904	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	59,677,415	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	105,122,520	0
3.0	522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	3,307,781	0
3.0	522121	Belanja Jasa Pos dan Giro	3,247,000	0
3.0	522131	Belanja Jasa Konsultan	196,000,000	0
3.0	522141	Belanja Sewa	1,320,426,750	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	1,436,050,000	0
3.1	522151	Pengembalian Belanja Jasa Profesi	0	4,335,000
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	594,046,500	0
3.0	522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	2,475,121,733	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4,245,188,921	0
3.0	523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan	497,696,750	0
3.0	523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	126,346,780	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,716,042,697	0
3.0	523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	711,550,000	0
3.0	523129	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1,720,820,541	0

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER DESEMBER 2020
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 087

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Tgl. Cetak 23/04/2021 3:17 PM
lap_neraca_percobaan_kas_kl --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya	220,213,800	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Biasa	2,829,978,299	0
3.1	524111	Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa	0	144,826,632
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	262,275,000	0
3.1	524113	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	2,396,400
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	934,019,000	0
3.1	524114	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam	0	2,977,500
3.0	524115	Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	192,300,000	0
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	2,287,074,000	0
3.1	524119	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar	0	19,500,800
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2,108,112,170	0
3.0	532119	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi	1,962,882,500	0
3.0	533119	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi	191,861,670	0
3.0	536111	Belanja Modal Lainnya	451,435,500	0
3.0	536118	Belanja Modal Lainnya - Penanganan Pandemi COVID-19	74,000,000	0
3.0	536121	Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset	44,995,500	0
JUMLAH			179,287,695,670	179,287,695,670

II.4

NERACA PERCOBAAN AKRUAL

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER DESEMBER 2020
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 087

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Tgl. Cetak 23/04/2021 4:05 AM
lap_neraca_percobaan_akrual_kl --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
0.0	111613	Kas di Bendahara Pengeluaran TUP	0	0
0.0	111711	Kas di Bendahara Penerimaan	0	0
0.0	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	0	0
0.0	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	0
0.0	115411	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan	0	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	1,814,072,223	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	170,556,890	0
0.0	117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke	455,641,363	0
0.0	117131	Bahan Baku	288,000	0
0.0	117199	Persediaan Lainnya	9,996,816	0
0.0	117911	Persediaan yang Belum Diregister	0	0
0.0	131111	Tanah	805,323,718,068	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	219,324,401,371	0
0.0	132211	Peralatan dan Mesin Belum Diregister	0	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	365,362,212,486	0
0.0	133211	Gedung dan Bangunan Belum Diregister	0	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	52,918,334,000	0
0.0	134112	Irigasi	158,137,000	0
0.0	134113	Jaringan	9,805,503,526	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	26,865,394,160	0
0.0	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	0	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	189,861,456,321
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	44,859,747,200
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	28,403,977,651
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	20,289,206
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	5,369,252,976
0.0	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	60,483,100
0.0	152111	Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti	0	0
0.0	162151	Software	16,541,087,383	0
0.0	162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	0	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi	10,678,350,353	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan	0	10,629,090,587
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	11,883,626,778
0.0	212111	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	0	0
0.0	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	0	620,664,028
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	0
0.0	218211	Hibah Langsung yang belum disahkan	0	0
0.0	219211	Pendapatan Sewa Diterima Dimuka	0	96,591,516
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	0
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	156,632,536,842
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	13,664,271,146	0

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER DESEMBER 2020
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 087

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Tgl. Cetak 23/04/2021 4:05 AM
lap_neraca_percobaan_akrual_kl --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313211	Transfer Keluar	60,122,517,402	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	60,122,517,402
0.0	391111	Ekuitas	0	1,245,699,800,421
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0	136,182,093
0.0	391131	Pengesahan Hibah Langsung	0	2,977,145,168
3.0	425119	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	0	4,895,000
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	185,921,000
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	619,465,516
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai	0	33,900,000
3.0	425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	0	3,087,750,000
3.0	425692	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi	0	8,379,455,450
3.0	425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap	0	3,000,000
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang	0	26,852,475
3.0	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang	0	1,226,440,189
3.0	491511	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	147,215,038
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	30,000,904,900	0
3.1	511111	Pengembalian Beban Gaji Pokok PNS	0	16,127,071
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	433,469	0
3.1	511119	Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	0	1,788
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	2,036,392,738	0
3.1	511121	Pengembalian Beban Tunj. Suami/Istri PNS	0	1,612,707
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	521,264,402	0
3.1	511122	Pengembalian Beban Tunj. Anak PNS	0	303,103
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	2,020,840,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	3,399,122,000	0
3.1	511124	Pengembalian Beban Tunj. Fungsional PNS	0	3,006,068
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	309,790,267	0
3.1	511125	Pengembalian Beban Tunj. PPh PNS	0	242,382
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	1,359,830,340	0
3.1	511126	Pengembalian Beban Tunj. Beras PNS	0	629,877
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	5,115,243,000	0
3.0	511134	Beban Tunj. Kompensasi Kerja PNS	3,404,480,000	0
3.1	511134	Pengembalian Beban Tunj. Kompensasi Kerja PNS	0	2,078,696
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	456,470,000	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	172,680,000	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	44,935,667,815	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	12,202,465,668	0
3.1	521111	Pengembalian Beban Keperluan Perkantoran	0	4,447,500
3.0	521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	751,411,021	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	80,094,965	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	776,340,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	201,972,650	0

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER DESEMBER 2020
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 087

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Tgl. Cetak 23/04/2021 4:05 AM
lap_neraca_percobaan_akrua1_kl --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-	2,697,362,599	0
3.0	521211	Beban Bahan	3,280,024,444	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	3,301,020,000	0
3.1	521213	Pengembalian Beban Honor Output Kegiatan	0	2,935,000
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	829,563,450	0
3.0	521241	Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi	149,675,000	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	7,625,568,883	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	60,475,995	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	98,440,630	0
3.0	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	3,307,781	0
3.0	522121	Beban Jasa Pos dan Giro	3,247,000	0
3.0	522131	Beban Jasa Konsultan	196,000,000	0
3.0	522141	Beban Sewa	1,320,426,750	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	1,436,050,000	0
3.1	522151	Pengembalian Beban Jasa Profesi	0	4,335,000
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	594,346,500	0
3.0	522192	Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	2,475,121,733	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3,998,695,541	0
3.0	523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	126,346,780	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,716,042,697	0
3.0	523129	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1,706,135,541	0
3.0	523199	Beban Pemeliharaan Lainnya	220,213,800	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Biasa	2,829,978,299	0
3.1	524111	Pengembalian Beban Perjalanan Biasa	0	144,826,632
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	262,275,000	0
3.1	524113	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	2,396,400
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	934,019,000	0
3.1	524114	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting	0	2,977,500
3.0	524115	Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	192,300,000	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	2,287,074,000	0
3.1	524119	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar	0	19,500,800
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	12,925,738,450	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	13,830,578,037	0
3.0	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	8,090,830,288	0
3.0	591312	Beban Penyusutan Irigasi	5,796,916	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	202,868,914	0
3.0	592115	Beban Amortisasi Software	1,733,160,745	0
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak	8,209,961	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	3,694,520,513	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	1,154,762,980	0
3.0	593128	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan	4,438,023	0
3.0	593131	Beban Persediaan bahan baku	6,014,100	0

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER DESEMBER 2020
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 087

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Tgl. Cetak 23/04/2021 4:05 AM
lap_neraca_percobaan_akrua1_kl --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	593149	Beban Persediaan Lainnya	23,530,330	0
3.0	593311	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	101,927,166	0
3.0	595112	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	26,639,100	0
3.0	595113	Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	59,204,900	0
3.0	596111	Beban Kerugian Pelepasan Aset	112,253,572	0
3.0	596121	Beban Persediaan Rusak/Usang	9,605,641	0
JUMLAH			1,771,293,676,481	1,771,293,676,481

III

BERITA ACARA REKONSILIASI INTERNAL BMN

**Berita Acara Rekonsiliasi Internal Data Barang Milik Negara
Pada Arsip Nasional Republik Indonesia
Audited Tahun 2020**

Nomor: BA- 07 /BU/IV/2021

Pada hari ini, Senin tanggal dua puluh enam bulan April tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Arsip Nasional Republik Indonesia Jl. Ampera Raya No 7 Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama : Dipo Winarto
NIP : 19790515 199803 1 001
Jabatan : Kepala Bagian Perlengkapan, Tata Usaha, Kearsipan dan Protokol

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi barang pada Arsip Nasional Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut **Pihak Pertama**;

- II. Nama : Ali Sugeng
NIP : 19700830 199803 1 001
Jabatan : Koordinator Kelompok Keuangan

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi keuangan pada Arsip Nasional Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut **Pihak Kedua**;

menyatakan bahwa telah melakukan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara (BMN) pada lingkup internal Arsip Nasional Republik Indonesia (087) dengan cara membandingkan data BMN pada Laporan Barang Pengguna (LBP) yang disusun oleh unit akuntansi barang dan Laporan Keuangan Pengguna (LKP) yang disusun oleh unit akuntansi keuangan untuk periode Audited Tahun 2020, dengan hasil sebagai berikut :

I. Hasil Rekonsiliasi Data :

No	Akun Neraca	Nilai BMN Periode Tahun 2020		
		Saldo Awal	Mutasi	Saldo Akhir
I	POSISI BMN DI NERACA	1,246,465,417,338	(28,141,889,018)	1,218,323,528,320
A	ASET LANCAR	1,804,956,408	645,598,884	2,450,555,292
1	Persediaan ¹⁾	1,804,956,408	645,598,884	2,450,555,292
B	ASET TETAP	1,238,691,478,781	(27,508,984,624)	1,211,182,494,157
1	Tanah	802,566,806,600	2,756,911,468	805,323,718,068
2	Peralatan dan Mesin	221,057,763,568	(1,733,362,197)	219,324,401,371
3	Gedung dan Bangunan	364,584,089,636	778,122,850	365,362,212,486
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	62,881,974,526	-	62,881,974,526
5	Aset Tetap Lainnya	26,865,394,160	-	26,865,394,160
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-

7	<i>Akum. Penyusutan Aset Tetap</i>	(239,264,549,709)	(29,310,656,745)	(268,575,206,454)
C	ASET LAINNYA	5,968,982,149	(1,278,503,278)	4,690,478,871
1	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga		-	-
2	Aset Tak Berwujud	15,970,656,383	570,431,000	16,541,087,383
3	Aset Lain-lain 2)	5,719,311,911	4,959,038,442	10,678,350,353
4	<i>Akum. Penyusutan Aset Lainnya</i>	(15,720,986,145)	(6,807,972,720)	(22,528,958,865)
II	BMN NON NERACA	165,679,494	39,014,852	204,694,346
A	EKSTRAKOMPTABEL	165,679,494	39,014,852	204,694,346
1	BMN Ekstrakomptabel	391,600,495	85,844,000	477,444,495
2	<i>Akum. Peny. Ekstrakomptabel</i>	(225,921,001)	(46,829,148)	(272,750,149)
B	BPYBDS			
C	BARANG HILANG			
D	BARANG RUSAK BERAT			
E	ASET BMN EKS DK/TP SEBELUM TA 2011			
TOTAL (I + II)		1,246,631,096,832	(28,102,874,166)	1,218,528,222,666

Rincian terlampir.

- II. Hal-hal penting lainnya mengenai data BMN terkait penyusunan LBP dan LKP disajikan dalam Lampiran Berita Acara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan BMN dan LKP periode Audited Tahun 2020, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 26 April 2021

Kepala Bagian Perlengkapan, Tata
Usaha, Kearsipan dan Protokol

Dipo Winarto

NIP 19790515 199803 1 001

Koordinator Kelompok Keuangan

Ali Sugeng

NIP 19700830 199803 1 001

Mengetahui,
Kepala Biro Umum

Sarip Hidayat. S.Kom. M.Si

NIP 19650403 198603 1 001

IV

**BERITA ACARA REKONSILIASI DATA
KHASANAH ARSIP NASIONAL RI
TA. 2020**



ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Jalan Ampera Raya No. 7, Jakarta 12560, Telp. 021-7805851, Fax. 021-7810280, 7805812
http://www.anri.go.id, e-mail : info@anri.go.id

BERITA ACARA DATA KHAZANAH ARSIP
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: KN.03.00/17/2021

Pada hari ini, Jum'at tanggal 8 Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Arsip Nasional RI Jl. Ampera Raya No. 7 Cilandak Timur Jakarta Selatan, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- i. Nama : Dr. Kandar MAP
NIP : 19660209 199303 1 001
Jabatan : Direktur Preservasi

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit Preservasi Arsip pada Arsip Nasional Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama.

- ii. Nama : Sarip Hidayat, S.Kom., M.Si
NIP : 19650403 198603 1 001
Jabatan : Kepala Biro Umum

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit Biro Umum Sekretariat Utama pada Arsip Nasional Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua.

menyatakan bahwa telah melakukan Rekonsiliasi Data Khazanah Arsip pada lingkup internal Arsip Nasional Republik Indonesia berdasarkan berita acara serah terima arsip hasil kinerja Direktorat Preservasi ke Biro Umum Sekretariat Utama setelah melalui verifikasi oleh Koordinator Kelompok Fungsi Penyimpanan Arsip Tahun 2020 dengan hasil sebagai berikut:

I. Hasil Rekonsiliasi Data Khazanah Arsip:

NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH KHASANAH ARSIP TAHUN 2020		
			SALDO AWAL TW 3	MUTASI	SALDO AKHIR TW 4
1	Kertas	Meter	30.329,70	41,00	30.370,70
2	Poster	Lembar	336,00	0,00	336,00
3	Kartografi/Peta	Lembar	131.072,00	0,00	131.072,00
4	Foto	Lembar	3.472.656,00	1.876,00	3.474.532,00
5	Film	Reel	59.035,00	0,00	59.035,00
6	Mikrofilm	Roll	14.502,00	0,00	14.502,00
7	Mikrofische	Fische	14.262,00	0,00	14.262,00
8	Rekaman Suara	Kaset	54.586,00	141,00	54.727,00
9	Reel to Reel Sound	Reel	946,00	0,00	946,00
10	Video	Kaset	25.708,00	66,00	25.774,00
11	Optical Disc	Keping	16.345,00	18,00	16.363,00
12	Piringan Hitam	Keping	101,00	0,00	101,00
13	Flashdisk	Buah	1,00	1,00	2,00
14	Arsip Elektronik	Terabyte	380,00	10,00	390,00

- II. Hal-hal penting lainnya mengenai data khasanah arsip terkait penyusunan LBP/KP dan LKKL disajikan dalam Lampiran Berita Acara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

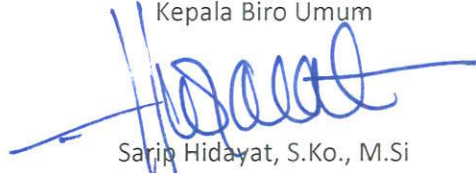
Demikian Berita Acara ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan BMN dan LKKL periode Triwulan IV Tahun 2020 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Direktur Preservasi



Dr. Kandar, MAP
NIP. 19660209 199303 1 001

Kepala Biro Umum



Sarip Hidayat, S.Ko., M.Si
NIP. 19650403 198603 1 001

Mengetahui,
Plt. Deputi Bidang Konservasi Arsip



Dra. Multi Siswati, MM
NIP. 19621115 198703 2 001



ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Jalan Ampera Raya No. 7, Jakarta 12560, Telp. 021-7805851, Fax. 021-7810280, 7805812
http://www.anri.go.id, e-mail : info@anri.go.id

BERITA ACARA DATA KHAZANAH ARSIP ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR: KN.03.00/17/2021

Pada hari ini Jumat tanggal Delapan bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Arsip Nasional RI Jl. Ampera Raya No. 7 Cilandak Timur Jakarta Selatan, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- i. Nama : Muhammad Ihwan, S.Sos, M.Si
NIP : 19710817 199803 1 001
Jabatan : Kepala Balai Arsip Statis dan Tsunami
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit Balai Arsip Statis dan Tsunami Aceh pada Arsip Nasional Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama.
- ii. Nama : Sarip Hidayat, S.Kom, M.Si
NIP : 19650403 198603 1 001
Jabatan : Kepala Biro Umum
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit Biro Umum Sekretariat Utama pada Arsip Nasional Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua.

menyatakan bahwa telah melakukan Rekonsiliasi Data Khazanah Arsip pada lingkup internal Arsip Nasional Republik Indonesia berdasarkan berita acara serah terima arsip hasil kinerja Balai Arsip Statis dan Tsunami Aceh setelah melalui verifikasi oleh Koordinator Kelompok Fungsi Penyimpanan Arsip Tahun 2020 dengan hasil sebagai berikut:

I. Hasil Rekonsiliasi Data Khazanah Arsip:

NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH KHASANAH ARSIP TAHUN 2020		
			SALDO AWAL TW 3	MUTASI	SALDO AKHIR TW 4
1	Arsip Kertas	Meter Linier	8.868,4	10,8	8.879,2
2	Arsip Kearsitekturan	Meter Linier	495		495
3	Arsip Peta	Lembar	5,536		5,536
4	Arsip CD/DVD/VCD	Keping	1,226	2	1,228
5	Arsip Kaset	Kaset	52		52
6	Arsip Foto	Lembar	1979		1979
7	Arsip Disket	Keping	43		43

II. Hal-hal penting lainnya mengenai data khasanah arsip terkait penyusunan LBP/KP dan LKKL disajikan dalam Lampiran Berita Acara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan BMN dan LKKL periode Triwulan IV Tahun 2020 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kepala Balai Arsip Statis
dan Tsunami Aceh


Muhamad Ihwan, S Sos, M.Si
NIP. 19710817 199803 1 001

Kepala Biro Umum


Sarjo Hidayat, S.Kom, M.Si
NIP. 19650403 198603 1 001

Mengetahui,
Plt. Deputi Bidang Konservasi Arsip


Dra. Multi Siswati, MM
NIP. 19621115 198703 2 001

V

MONITORING TINDAK LANJUT HASIL
PEMERIKSAAN

**MATRIKS LAPORAN HASIL PEMANTAUAN ATAS LAPORAN PEMANTAUAN ATAS TINDAK LANJUT
HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PADA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
SAMPAI DENGAN SEMESTER II 2020**

No	Temuan BPK	Nilai Temuan Pemeriksaan (Rp)	Temuan (Tahun)	Rekomendasi BPK	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI	Kesimpulan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut	Tindak Lanjut Penyelesaian ANRI
1	2	4	5	6	7	8	9
Pemantauan TLHP BPK atas Laporan Keuangan ANRI Tahun 2019 Nomor: 37/HP/XVI/05/2020 sampai dengan Semester II Tahun 2020							
Sistem Pengendalian Intern							
1	Kesalahan Penggunaan MAK Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang Digunakan untuk Transport Lokal, Konsumsi Rapat, Uang Saku dan Honor Sebesar Rp663.021.272		2019	BPK merekomendasikan Kepala ANRI agar: a. BPK merekomendasikan Plt. Kepala ANRI agar memerintahkan Kepala Biro Umum supaya lebih cermat mengklasifikasikan jenis belanja dalam penyusunan RKAKL sesuai substansi belanjanya	Semester I Tahun 2020: Belum ditindaklanjuti	Belum sesuai dan dalam proses	a. Semester II Tahun 2020 : Plt. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) telah memerintahkan kepada Kepala Biro Umum melalui Memorandum Plt. Kepala ANRI Nomor PW.06.02/6/2020 tanggal 27 Oktober 2020 untuk lebih cermat mengklasifikasikan jenis belanja dalam penyusunan RKAKL sesuai substansi belanjanya. Kepala Biro umum telah memberikan pernyataan untuk lebih cermat dalam mengklasifikasikan jenis dalam penyusunan RKAKL sesuai substansi belanjanya.
2	Kesalahan Penggunaan MAK Belanja Barang yang Digunakan untuk Perolehan dan Pengembangan Aset Sebesar Rp160.076.290		2019	BPK merekomendasikan Kepala ANRI agar:			

No	Temuan BPK	Nilai Temuan Pemeriksaan (Rp)	Temuan (Tahun)	Rekomendasi BPK	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI	Kesimpulan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut	Tindak Lanjut Penyelesaian ANRI
1	2	4	5	6	7	8	9
				a. BPK merekomendasikan Plt. Kepala ANRI agar memerintahkan Kepala Biro Umum supaya lebih cermat mengklasifikasikan jenis belanja dalam penyusunan RKAKL sesuai substansi belanjanya	Semester I Tahun 2020: Belum ditindaklanjuti	Belum sesuai dan dalam proses	a. Semester II Tahun 2020 : Plt. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) telah memerintahkan kepada Kepala Biro Umum melalui Memorandum Plt. Kepala ANRI Nomor PW.06.02/6/2020 tanggal 27 Oktober 2020 untuk lebih cermat mengklasifikasikan jenis belanja dalam penyusunan RKAKL sesuai substansi belanjanya. Kepala Biro umum telah memberikan pernyataan untuk lebih cermat dalam mengklasifikasikan jenis dalam penyusunan RKAKL sesuai substansi belanjanya.

No	Temuan BPK	Nilai Temuan Pemeriksaan (Rp)	Temuan (Tahun)	Rekomendasi BPK	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI	Kesimpulan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut	Tindak Lanjut Penyelesaian ANRI
1	2	4	5	6	7	8	9
3	Penatausahaan Persediaan pada Kantor Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Tidak Memadai		2019	<p>BPK merekomendasikan Kepala ANRI agar:</p> <p>a. BPK merekomendasikan Plt. Kepala ANRI agar memerintahkan Kepala Biro Umum untuk menyusun SOP pengelolaan persediaan buku</p>	Semester I Tahun 2020: Belum ditindaklanjuti	Belum sesuai dan dalam proses	<p>a. Semester II Tahun 2020 : Plt. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) telah memerintahkan kepada Kepala Biro Umum melalui Memorandum Plt. Kepala ANRI Nomor PW.06.02/7/2020 tanggal 27 Oktober 2020 untuk menginstruksikan Kepala Subbagian Pemeliharaan dan Kepala Subbagian Pengelola BMN agar lebih cermat dalam melakukan pencatatan persediaan. Dan ANRI telah menyusun SOP Pelaporan dan pencatatan buku naskah sumber Nomor 61 Tahun 2020.</p>
				<p>b. BPK merekomendasikan Plt. Kepala ANRI agar menginstruksikan Kepala Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga untuk memperbaiki sistem pencatatan persediaan dan melakukan pengendalian atas pengelolaan barang persediaan</p>	Semester I Tahun 2020: Belum ditindaklanjuti	Belum sesuai dan dalam proses	<p>b. Semester II Tahun 2020 : Plt. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) telah menginstruksikan kepada Kepala Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga melalui Memorandum Plt. Kepala ANRI Nomor PW.06.02/10/2020 tanggal 29 Desember 2020 untuk memperbaiki sistem pencatatan persediaan dan melakukan pengendalian atas pengelolaan barang persediaan. Kepala Bagian Perlengkapan dan rumah tangga telah memberikan pernyataan untuk memperbaiki sistem pencatatan persediaan dan melakukan pengendalian atas pengelolaan barang persediaan</p>

No	Temuan BPK	Nilai Temuan Pemeriksaan (Rp)	Temuan (Tahun)	Rekomendasi BPK	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI	Kesimpulan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut	Tindak Lanjut Penyelesaian ANRI
1	2	4	5	6	7	8	9
				c. BPK merekomendasikan Plt. Kepala ANRI agar menginstruksikan Kepala Subbagian Pemeliharaan dan Kepala Subbagian Pengelola BMN agar lebih cermat dalam melakukan pencatatan persediaan.	Semester I Tahun 2020: Belum ditindaklanjuti	Belum sesuai dan dalam proses	b. Semester II Tahun 2020 : Kepala Biro Umum telah menginstruksikan Kepala Subbagian Pemeliharaan dan Kepala Subbagian Pengelola BMN melalui nota dinas Kepala Biro Umum Nomor PW.06.02/330/2020 tanggal 28 Desember 2020 untuk lebih cermat dalam melakukan pencatatan persediaan.

No	Temuan BPK	Nilai Temuan Pemeriksaan (Rp)	Temuan (Tahun)	Rekomendasi BPK	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI	Kesimpulan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut	Tindak Lanjut Penyelesaian ANRI
1	2	4	5	6	7	8	9
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan							
1	Keterlambatan Penyetoran Pengembalian Sisa Belanja ke Kas Negara Sebesar Rp75.474.865		2019	<p>BPK merekomendasikan Kepala ANRI agar:</p> <p>a. BPK merekomendasikan Plt. Kepala ANRI agar memerintahkan Kepala Satker ANRI Jakarta dan Kepala Satker Pusdiklat Kearsipan untuk menginstruksikan kepada PPK dan Pelaksana Kegiatan untuk mempedomani ketentuan yang berlaku dalam merealisasikan kegiatan dan mempertanggungjawabkan belanja</p>	Semester I Tahun 2020: Belum ditindaklanjuti	Belum sesuai dan dalam proses	<p>a. Semester II Tahun 2020 : Plt. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) telah memerintahkan kepada Sekretaris Utama selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Kepala Pusdiklat Kearsipan melalui Memorandum Plt. Kepala ANRI Nomor PW.06.02/8/2020 tanggal 27 Oktober 2020 untuk menginstruksikan kepada PPK dan Bendahara Pengeluaran untuk mempedomani ketentuan yang berlaku dalam merealisasikan kegiatan dan mempertanggungjawabkan belanja. Kepala Satker ANRI Jakarta telah menginstruksikan kepada PPK dan Pelaksana Kegiatan melalui nota dinas nomor PW.06.02/290/2020 tanggal 28 Desember 2020 dan Kepala Satker Pudsiklat Kearsipan melalui nota dinas nomor PW.06.02/340/2020 tanggal 28 Desember 2020</p>

No	Temuan BPK	Nilai Temuan Pemeriksaan (Rp)	Temuan (Tahun)	Rekomendasi BPK	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI	Kesimpulan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut	Tindak Lanjut Penyelesaian ANRI
1	2	4	5	6	7	8	9
				b. BPK merekomendasikan Plt. Kepala ANRI agar memerintahkan Kepala Satker ANRI Jakarta dan Kepala Satker Pusdiklat Kearsipan untuk menginstruksikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk mempedomani ketentuan terkait batas waktu penyetoran sisa belanja yang dilakukan dengan mekanisme SPM-LS Bendahara Pengeluaran	Semester I Tahun 2020: Belum ditindaklanjuti	Belum sesuai dan dalam proses	b. Semester II Tahun 2020 : Plt. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) telah memerintahkan kepada Sekretaris Utama selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Kepala Pusdiklat Kearsipan melalui Memorandum Plt. Kepala ANRI Nomor PW.06.02/8/2020 tanggal 27 Oktober 2020 untuk menginstruksikan kepada PPK dan Bendahara Pengeluaran untuk mempedomani ketentuan yang berlaku dalam merealisasikan kegiatan dan mempertanggungjawabkan belanja. Kepala Satker ANRI Jakarta telah menginstruksikan kepada Bendahara Pengeluaran melalui nota dinas nomor PW.06.02/291/2020 tanggal 28 Desember 2020 dan Kepala Satker Pudsiklat Kearsipan melalui nota dinas nomor PW.06.02/340/2020 tanggal 28 Desember 2020

**MATRIKS LAPORAN HASIL PEMANTAUAN ATAS LAPORAN PEMANTAUAN ATAS TINDAK LANJUT
HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PADA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
SAMPAI DENGAN SEMESTER II 2020**

No	Temuan BPK	Nilai Temuan Pemeriksaan (Rp)	Temuan (Tahun)	Rekomendasi BPK	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI	Kesimpulan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut	Tindak Lanjut Penyelesaian ANRI
1	2	4	5	6	7	8	9
Pemantauan TLHP BPK atas Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Pendapatan dan Belanja TA. 2018 dan 2019 (s.d.Triwulan III) pada ANRI DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Aceh Nomor: 266/HP/XVI/12/2019 sampai dengan Semester II Tahun 2020							
4	Kekurangan Volume Pekerjaan dan Selisih Harga Satuan Pelapis Lantai/Dinding Granite Tile Polished Sebesar Rp1.449.292.250 serta Denda Keterlambatan Sebesar Rp186.174.093	Rp1.449.292.250 dan Rp186.174.093	2018-2019	<p>BPK merekomendasikan Kepala ANRI agar:</p> <p>a. Memerintahkan PPK dan PPHP lebih cermat dalam melakukan pengawasan dan pengendalian pekerjaan dan memantau pekerjaan yang masih harus dilakukan perbaikan pada masa pemeliharaan.</p> <p>b. BPK merekomendasikan Kepala ANRI agar memerintahkan PPK bersama Inspektorat menagih kelebihan pembayaran kepada pelaksana kegiatan sebesar Rp1.449.292.250 dan menarik denda keterlambatan yang belum dikenakan sebesar Rp186.174.093 serta menyetorkannya ke Kas Negara</p>	<p>Semester I Tahun 2020: Tindak lanjut telah sesuai rekomendasi</p> <p>Semester I Tahun 2020: Belum sesuai rekomendasi, karena: a. Baru terdapat penyetoran sebesar Rp798.661.755 (Rp352.550.367+Rp178.944.754 + Rp267.166.624) b. Berdasarkan bukti SPM Nomor 00249 tanggal 17 Desember 2019 diketahui terdapat 3 potongan untuk kode akun 411128 (PPH Final) sebesar Rp396.766.898, 411211 (PPN) sebesar Rp1.322.556.325 dan 425811 (Pendapatan denda penyelesaian pekerjaan pemerintah) sebesar Rp56.475.787, Kesimpulan: Masih terdapat kekurangan pengembalian ke kas negara sebesar Rp780.328.801</p>		<p>Semester II Tahun 2020: -</p> <p>Semester II Tahun 2020: PPK bersama Inspektorat telah menagih kelebihan pembayaran kepada pelaksana kegiatan sebesar Rp300.000.000 sesuai bukti penerimaan negara NTPN 8D14161QTUSA83S6 tanggal 10 Juli 2020 dan menarik denda keterlambatan sebesar Rp129.698.306 sesuai bukti penerimaan negara NTPN 5B3051QTUSA7V06 tanggal 10 Juli 2020, dan telah menarik kembali pengembalian sebesar Rp350.630.495 sesuai bukti penerimaan negara NTPN E4CC661QTVBO1LD4 tanggal 28 Desember 2020</p>

**MATRIKS LAPORAN HASIL PEMANTAUAN ATAS LAPORAN PEMANTAUAN ATAS TINDAK LANJUT
HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PADA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
SAMPAI DENGAN SEMESTER II 2020**

No	Temuan BPK	Nilai Temuan Pemeriksaan (Rp)	Temuan (Tahun)	Rekomendasi BPK	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI	Kesimpulan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut	Tindak Lanjut Penyelesaian ANRI
1	2	4	5	6	7	8	9
Pemantauan TLHP BPK atas Laporan Keuangan ANRI Tahun 2014 Nomor: 209/HP/XVI/07/2015 tanggal 29 Juli 2015 sampai dengan Semester II Tahun 2020							
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan							
1	Pengelolaan Aset Hasil Hibah Aset Gedung ANRI Gajah Mada Belum Memadai		2014	BPK merekomendasikan Kepala ANRI agar: b. Mendaftarkan aset-aset hibah tersebut sebagai aset bersejarah ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.	Masih dalam proses penilaian Semester I Tahun 2020: Belum ada perkembangan tindak lanjut	Belum sesuai dan dalam proses	b. Semester II Tahun 2020 : Sampai dengan saat ini Sub Bagian Pengelola Barang telah berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata Provinsi DKI Jakarta namun penyelesaian tersebut diusulkan untuk diserahkan kembali pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dikarenakan Dinas tersebut tidak mempunyai tenaga ahli untuk melakukan penilaian terhadap aset bersejarah dalam bentuk BMN bergerak. Dan ANRI telah mengambil langkah-langkah berupa pengajuan pindah status menjadi status tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah melalui surat Plt. Kepala ANRI Nomor B-PW.06.02/1521/2020 tanggal 23 Juli 2020 hal Tindak lanjut atas rekomendasi BPK dengan lampiran kronologi penyelesaian tindak lanjut.

VI
KEPUTUSAN KEPALA ANRI



KEPUTUSAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 136 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 442 TAHUN 2019
KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA BARANG
DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya mutasi pegawai di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia, perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 442 Tahun 2019 Tentang Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 442 Tahun 2019 Tentang Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018;

11. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
12. Keputusan Presiden Nomor 89/TPA Tahun 2019 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia;
13. Keputusan Presiden Nomor 45/TPA Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;
14. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang;
18. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Arsip Statis dan Tsunami;
19. Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penetapan Satuan Kerja Kuasa Pengguna Anggaran Di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA NOMOR 442 TAHUN 2019 TENTANG KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ PENGGUNA BARANG DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2020.

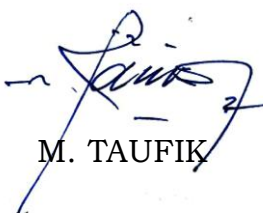
KESATU : Mengangkat pejabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang pada Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Beberapa ketentuan dalam Perubahan atas Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 442 Tahun 2019 Tentang Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun Anggaran 2020, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 April 2020

PLT. KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,



M. TAUFIK

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan R.I;
2. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan R.I;
3. Inspektur Arsip Nasional R.I;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta V.

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 136 TAHUN 2020
TANGGAL 6 APRIL 2020

SUSUNAN NAMA PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ PENGGUNA
BARANG DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA	GOL	JABATAN	JABATAN DALAM KEPUTUSAN INI
1	Drs. Imam Gunarto, M.Hum	IV	Sekretaris Utama	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) / Pengguna Barang (KPB) ANRI Jakarta
2	Dra. Desi Pratiwi, MIMS	IV	Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/ Pengguna Barang (KPB) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan
3	Drs. Bambang Surowo, M.Hum	IV	Kepala Pusat Jasa Kearsipan	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/ Pengguna Barang (KPB) Pusat Jasa Kearsipan
4	Muhammad Ihwan, S.Sos, MSi	IV	Kepala Balai Arsip Statis dan Tsunami	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/ Pengguna Barang (KPB) Balai Arsip Statis dan Tsunami

PLT. KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,



M. TAUFIQ



KEPUTUSAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 443 TAHUN 2019 TENTANG
PELAKSANA/PENGELOLA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)
PADA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya mutasi pegawai di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia, perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 443 Tahun 2019 tentang Pelaksana/Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Nomor 443 Tahun 2019 Tentang Pelaksana/Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5826);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah 4 (empat) kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018;
9. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana telah beberapa kali diubah

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);

10. Keputusan Presiden Nomor 89/TPA Tahun 2019 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia;
12. Keputusan Presiden Nomor 45/TPA Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
14. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia;
15. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Arsip Statis dan Tsunami;
16. Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Satuan Kerja Kuasa Pengguna Anggaran Di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA NOMOR 443 TAHUN 2019 TENTANG PELAKSANA/PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) PADA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2020.

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

- KESATU : Mengangkat Pelaksana/Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala ini.
- KEDUA : Beberapa ketentuan dalam Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 443 Tahun 2019 Tentang Pelaksana/Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun Anggaran 2020 diubah pada susunan keanggotaan Tim, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

PLT. KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,



M.TAUFIK

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan R.I;
2. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan R.I;
3. Inspektur Arsip Nasional R.I;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta V.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR TAHUN 2020

TANGGAL

PELAKSANA/PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

(APBN) PADA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

TAHUN ANGGARAN 2020

A. SUSUNAN ANGGOTA PELAKSANA/PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) PADA SATUAN KERJA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA JAKARTA

NO	NAMA	GOL	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Drs. Imam Gunarto, M.Hum NIP. 19630728 199203 1 001	IV	Sekretaris Utama	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
2.	Sarip Hidayat, S.Kom,M.Si NIP. 19650403 198603 1 001	IV	Kepala Biro Umum	Pejabat Penguji dan Penanda Tangan SPM (PPPSPM)
3.	Ali Sugeng SE., M.Si NIP. 19700830 199803 1 001	IV	Kepala Bagian Keuangan	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sekretariat Utama
4.	Abdullah Shobri, SE, MAB NIP. 19700718 199703 1 001	IV	Kepala Subdirektorat SDM Kearsipan	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kedeputian Bidang Pembinaan Kearsipan
5.	Saptono Putro Edi Nugroho NIP. 19680128 198902 1 001	IV	Kepala Subdirektorat Reproduksi dan Digitalisasi Arsip	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kedeputian Bidang Konservasi Arsip
6.	Irwanto Eko Saputro, ST, MMSI NIP. 19790614 200604 1 001	IV	Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Informasi	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kedeputian Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan
7.	Lili Hudyanto,ST NIP.19760411 200312 1 001	III	Kepala Sub Bagian Perbendaharaan	Atasan Langsung Bendahara Penerimaan (BPn) ANRI Jakarta
8.	Shita Rouli Hadyani, A.Md NIP.19870927 201503 2 002	II	Analisis Sistem Akuntansi Instansi	Bendahara Penerimaan (BPn) ANRI Jakarta
9.	Hendra Lastowo, SE NIP.19800715 200501 1 001	III	Analisis Sistem Akuntansi	Bendahara Pengeluaran (BP) ANRI Jakarta

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

			Instansi	
10.	Gun Gun Mugia Raspati, SE NIP.19820502 201001 1 037	III	Analisis Sistem Akuntansi Instansi	Bendahara Pengeluaran Pembantu(BPP) Sekretariat Utama
11.	Abdul Rachman, ST NIP.19770715 20012 1 001	III	Arsiparis Muda	Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Kedeputian Bidang Pembinaan Kearsipan
12.	Anna Wijayanti, ST NIP. 19731221 199803 2 001	III	Arsiparis Pertama	Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Kedeputian Bidang Konservasi Arsip
13.	Endah Rahayu Wijayanti, S.A.P. NIP.19890218 201403 2 003	III	Analisis Kebijakan Pertama	Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Kedeputian Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan
14.	Gatot Fitriadi NIP. 19771010 200501 1 001	II	Sekretaris	Staf Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Utama
15.	Surti Widayati, A.Md NIP.19860105 200801 2 001	III	Arsiparis Penyelia	Staf Pejabat Pembuat Komitmen Kedeputian Bidang Pembinaan Kearsipan
16.	Seno Utomo Suprianto, A.Md NIP.19820317 200912 1 003	III	Arsiparis Mahir	Staf Pejabat Pembuat Komitmen Kedeputian Bidang Konservasi Arsip
17.	Muji Rahayu, S.Kom NIP. 19861226 201503 2 004	III	Analisis Kearsipan	Staf Pejabat Pembuat Komitmen Kedeputian Bidang Informasi dan Pengembangan Kearsipan
18.	Kurniawan Widjojo, SE NIP.19781203 200801 1 009	III	Pengelola Sistem Akuntansi Instansi	Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai
19.	Suradi, ST NIP.19801214 201012 1 001	III	Analisis Barang dan Jasa	Petugas Penerimaan PNBP Pada Biro Umum
20.	Zullaika Astuti, S.AP NIP. 19840101 200912 2 002	III	Arsiparis Penyelia	Petugas Penerimaan PNBP Pada Layanan Arsip

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

B. SUSUNAN ANGGOTA PELAKSANA/PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) PADA SATUAN KERJA PUSAT JASA KEARSIPAN

NO	NAMA	GOL	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Drs. Bambang Surowo, M.Hum NIP. 19621112 198903 1 001	IV	Kepala Pusat Jasa Kearsipan	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
2.	Wijiyanto, S.Sos, M.Si NIP. 19691102 199103 1 001	III	Kepala Bidang Jasa Penyimpanan dan Perawatan Arsip	Pejabat Penguji dan Penanda Tangan SPM (PPPSPM)
3.	Jumadi, S.AP, MAP NIP. 19720907 199803 1 001	IV	Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Jasa Kearsipan	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Atasan Langsung Bendahara Penerimaan (BPn) Pusat Jasa Kearsipan
4.	Tri Artasari, A.Md NIP. 19860106 200801 2 001	III	Arsiparis Penyelia	Bendahara Penerimaan (BPn) Pusat Jasa Kearsipan
5.	Erma Sulistyoningsih NIP. 19871020 200912 2 001	III	Analisis Sistem Akutansi Instansi	Bendahara Pengeluaran (BP) Pusat Jasa Kearsipan
6	Setia Gumilar, A.Md. M.I.D NIP.19951211 201801 2 001	II	Pranata Arsip	Staf Pejabat Pembuat Komitmen Pusat Jasa Kearsipan

C. SUSUNAN ANGGOTA PELAKSANA/PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) PADA SATUAN KERJA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEARSIPAN

NO	NAMA	GOL.	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Dra. Desi Pratiwi, MIMS NIP. 19641215 198612 2 001	IV	Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
2.	Mukhaira, SH., MH NIP. 19700126 199803 2 001	IV	Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi Diklat	Pejabat Penguji dan Penanda Tangan SPM (PPPSPM)
3.	Rita Yuniati, SH NIP. 19700607 199703 2 001	IV	Kepala Bidang Pelaksanaan dan Kerjasama Diklat	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Atasan Langsung Bendahara Penerimaan (BPn) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

4.	Henny Soraya NIP. 19861107 200912 2 003	III	Pengadministrasi Umum	Bendahara Penerimaan (BPn) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan
5.	Noor Azizah, SE NIP. 19830320 200912 2 002	III	Analisis Sistem Akuntansi Instansi	Bendahara Pengeluaran (BP) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan
6.	Sarnata NIP. 19630415 198512 1 001	III	Pranata Diklat	Staf Pengelola Keuangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan

D. SUSUNAN ANGGOTA PELAKSANA/PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) PADA SATUAN KERJA BALAI ARSIP STATIS DAN TSUNAMI

NO	NAMA	GOL	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Muhammad Ihwan, S.Sos, MSi NIP.19710817 199803 1 001	IV	Kepala Balai Arsip Statis & Tsunami	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Balai Arsip Statis & Tsunami
2.	Lisa Novianty, SE NIP.19830322 200912 2 001	III	Kepala Seksi Akuisisi Balai Arsip Statis & Tsunami	Pejabat Penguji dan Penanda Tangan SPM (PPPSPM) Balai Arsip Statis & Tsunami
3.	Junaidin, SE. NIP. 19750727 199703 1 001	III	Kepala Seksi Pengolahan dan Preservasi	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Atasan Langsung Bendahara Penerimaan (BPn) Balai Arsip Statis & Tsunami
4.	Sri Wahyuni, SE NIP. 19901019 201403 2004	III	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris Balai Arsip Statis & Tsunami	Bendahara Pengeluaran (BP) Balai Arsip Statis & Tsunami
5.	Istihara Simamora, A Md NIP. 199311112018012001	II	Pranata Arsip Balai Arsip Statis & Tsunami	Staf Pengelola Keuangan/Operator SPM & Bendahara Penerimaan (BPn) Balai Arsip Statis & Tsunami

PLT. KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,


M.TAUFIK



KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B-PR.04.02/1063/2020
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu berkas
Hal : Penyesuaian APBN ANRI TA 2020

Jakarta, 22 April 2020

Yth. Menteri Keuangan RI
di
Jakarta

Sehubungan dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020, tanggal 3 April 2020, tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, serta menindaklanjuti Surat Menteri Keuangan RI Nomor: S-302/MK.02/2020, tanggal 15 April 2020, tentang Langkah-Langkah Penyesuaian Belanja Kementerian/Lembaga TA 2020, dapat kami laporkan hal-hal sebagai berikut:

- Arsip Nasional Republik Indonesia telah melakukan penyesuaian anggaran TA 2020, sebesar Rp25.339.212.000,-
- Selanjutnya, hasil penyesuaian ini akan menjadi dasar untuk melakukan revisi APBN ANRI Tahun Anggaran 2020.

Demikian usulan kami, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Plt. Kepala,

M. Taufik

Lampiran II. Form Rekapitulasi Anggaran K/L menurut Organisasi, Fungsi, Subfungsi, Program dan Kegiatan berdasarkan Pagu APBN-P TA 2020

Bagian Anggaran : 087
Kementerian/Lembaga : ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

UNIT ORGANISASI	FUNGSI/ SUBFUNGSI/PROGRAM/ KEGIATAN	JUMLAH
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA		165,418,004,000
	PELAYANAN UMUM	165,418,004,000
	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Arsip Nasional Republik Indonesia	144,966,385,000
	Peningkatan Layanan Hukum, Pembinaan Organisasi dan Ketatalaksanaan, dan Pengelolaan Pegawai di Lingkungan Anri	1,983,471,000
	Pengkoordinasi Perencanaan, Kerja Sama dan Evaluasi, serta Hubungan Masyarakat di Lingkungan ANRI	1,226,891,000
	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Anggaran serta Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas Anri	141,603,724,000
	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Anri	152,299,000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ANRI	531,884,000
	Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana di Lingkungan ANRI	531,884,000
	Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional	19,919,735,000
	Penilaian dan Akuisisi Arsip	374,765,000
	Pembinaan Kearsipan Pusat	540,000,000
	Pemanfaatan Arsip	551,130,000
	Pengolahan Arsip Statis	671,646,000
	Preservasi Kearsipan	1,165,685,000
	Peningkatan Jasa Sistem dan Pembenahan, Penyimpanan, dan Perawatan Arsip	6,851,201,000
	Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan	3,436,079,000
	Peningkatan Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan Nasional	500,000,000
	Pengelolaan Arsip Statis	1,745,807,000
	Pelaksanaan Akreditasi Kearsipan	1,469,784,000
	Pelaksanaan Bimbingan SDM Kearsipan Dan Sertifikasi	357,761,000
	Pembinaan Kearsipan Daerah I	437,500,000
	Pembinaan Kearsipan Daerah II	420,000,000

UNIT ORGANISASI	FUNGSI/ SUBFUNGSI/PROGRAM/ KEGIATAN	JUMLAH
	Penyelenggaraan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional	744,509,000
	Pengelolaan Data Dan TIK ANRI	653,868,000
	JUMLAH RM	165,418,004,000
	JUMLAH PNBP/BLU	
	JUMLAH PHLN/PHDN	
	JUMLAH SBSN	
	JUMLAH TOTAL	165,418,004,000



KEPALA ARSIP NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 159.A TAHUN 2020
TENTANG
BIAYA/BELANJA FASILITASI KERJA YANG DIBEBAHKAN
PADA DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
DALAM MASA DARURAT *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*
DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor: S-308/PB/2020 Hal Penegasan Biaya Yang Dapat Dibebankan Pada DIPA Satker Dalam Masa Darurat COVID-19 tanggal 9 April 2020, dan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: S-369/PB/2020 Hal Pemutahiran Akun Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) tanggal 27 April 2020 perlu menetapkan Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Biaya/Belanja Fasilitasi Kerja yang Dibebankan Pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Arsip Nasional Republik Indonesia Dalam Masa Darurat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5826);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
10. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
11. Keputusan Presiden Nomor 87/TPA Tahun 2020 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia;
12. Keputusan Presiden Nomor 45/TPA Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;

13. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.05/2009 tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur Bagi Pegawai Negeri Sipil;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.05/2016 tentang Uang Makan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan;
19. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia;
20. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Arsip Statis dan Tsunami;
21. Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Satuan Kerja Kuasa Pengguna Anggaran Di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

22. Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Mutasi Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural di Lingkungan ANRI;
23. Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 443 Tahun 2019 tentang Pelaksana/Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Pada Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun Anggaran 2020;
24. Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan Pembentukan Tim/Panitia Yang Dapat Mengakibatkan Pengeluaran Biaya Yang Dibebankan Pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun Anggaran 2020;
25. Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 442 Tahun 2019 tentang Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun Anggaran 2020;
26. Instruksi Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Instruksi Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

27. Instruksi Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Work From Home (WFH) Di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Instruksi Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Instruksi Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Work From Home (WFH) Di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG BIAYA/BELANJA FASILITASI KERJA YANG DIBEBAHKAN PADA DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA DALAM MASA DARURAT *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*.

KESATU : Menetapkan biaya/Belanja dalam rangka Fasilitasi Kerja yang Dibebankan Pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2020 Dalam Masa Darurat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

KEDUA : Biaya/belanja yang dapat dibebankan pada DIPA sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas:

- a. biaya komunikasi dalam bentuk pulsa telepon/paket data internet pegawai;
- b. uang makan pegawai;
- c. uang lembur dan uang makan pegawai;

- d. honorarium nara sumber/pembahas kegiatan/moderator kegiatan melalui sarana *teleconference/video conference*;
- e. biaya konsumsi pegawai yang melaksanakan piket dan pegawai yang ditugaskan ke kantor dalam keadaan mendesak;
- f. biaya transpot pegawai yang melaksanakan piket dan pegawai yang ditugaskan ke kantor dalam keadaan mendesak;
- g. biaya karantina/isolasi mandiri intansi pemerintah untuk penanganan covid-19;
- h. pengadaan masker/*handsanitizer*;
- i. pembelian vitamin dan penambah daya tahan tubuh;
- j. biaya penyemprotan desinfektan;
- k. pengadaan *thermogun/thermometer infrared* yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun dan nilainya memenuhi satuan minimal kapitalisasi peralatan dan mesin;
- l. pengadaan *thermogun/thermometer infrared* yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun dan nilainya tidak memenuhi satuan minimal kapitalisasi peralatan dan mesin;
- m. pengadaan bilik desinfektan permanen/portabel yang dapat dikenali dan memenuhi kriteria sebagai suatu aset tetap;
- n. pengadaan bilik desinfektan non permanen yang tidak memenuhi kriteria sebagai suatu aset tetap;
- o. pengadaan/pembangunan tempat cuci tangan portabel maupun permanen;
- p. pengadaan lisensi aplikasi *video conference*.

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

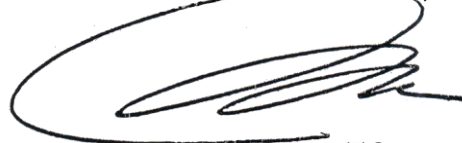
- KETIGA** : Ketentuan lebih lanjut mengenai Biaya/Belanja yang dapat dibebankan pada DIPA sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala ini.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, sampai dengan status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus Corona di Indonesia dicabut.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 20 Mei 2020

a.n. KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

SEKRETARIS UTAMA,



IMAM GUNARTO

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 159.A TAHUN 2020

TANGGAL 20 Mei 2020

BIAYA/BELANJA YANG DAPAT DIBEBANKAN PADA
 DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA)
 ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2020
 DALAM MASA DARURAT COVID-19

NO	URAIAN BELANJA	PENJELASAN	AKUN BELANJA	KETERANGAN
1.	Biaya komunikasi dalam bentuk pulsa telepon/paket data internet	Pembayaran biaya komunikasi untuk pelaksanaan teleconference/video conference dan peserta Diklat e-learning dalam rangka penyesuaian sistem kerja ASN melalui WFH dapat dibebankan pada APBN dengan ketentuan sebagai berikut: a. Dokumentasi atas pelaksanaan teleconference/video conference atau bentuk kegiatan daring lainnya, minimal 4 kali dalam 1 (satu) bulan. b. Penerima biaya pulsa/paket data ditetapkan melalui keputusan KPA/Kepala Satker dengan memperhatikan beban kerja dan frekuensi akses internet/telepon masing-masing penerima. c. Besaran biaya pulsa/paket data untuk setiap: 1) Narasumber/Penceramah/Pengajar setiap pelatihan 1 (satu) JP sebesar Rp 15.000 dan berlaku kelipatannya;	Pegawai ASN: 521111: Belanja Keperluan Perkantoran. 521131: Belanja barang operasional penanganan COVID-19. Peserta Diklat/ Narasumber/Pengajar: 521219: Belanja Non Operasional Lainnya. 521241: Belanja barang non operasional penanganan COVID-19.	Sumber Dana: Rupiah Murni (RM); Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Bagi unit yang telah merealisasikan belanjanya (terbit SP2D) dengan menggunakan akun-akun belanja sebagaimana Surat DJPB Nomor S-308/PB/2020 yaitu: akun belanja 521111 atau 521219, tidak perlu melakukan revisi terhadap realisasi yang telah terbit SP2D, namun wajib melakukan revisi terhadap sisa pagu yang belum direalisasikan dengan menggunakan akun

NO	URAIAN BELANJA	PENJELASAN	AKUN BELANJA	KETERANGAN
		<p>2) Peserta pelatihan teknis kurang/sampai dengan 35 JP maksimal sebesar Rp 75.000 per pelatihan;</p> <p>3) Peserta pelatihan teknis kurang/sampai dengan 50 JP sebesar Rp 100.000 per pelatihan;</p> <p>4) Peserta pelatihan fungsional kurang/sampai dengan 100 JP sebesar Rp 150.000 per pelatihan;</p> <p>5) Peserta pelatihan fungsional kurang/sampai dengan 280 JP sebesar Rp 350.000 per pelatihan;</p> <p>6) PNS mendapatkan biaya pulsa/paket data per bulan dan dapat diperpanjang sesuai ketersediaan anggaran dengan kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pejabat pimpinan tinggi utama , pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat fungsional utama dengan besaran paket data/pulsa maksimal Rp.200.000 ; 2. pejabat administrator, pejabat fungsional madya sebesar maksimal Rp.150.000; 3. pejabat pengawas, pejabat fungsional ahli/terampil dan pelaksana maksimal sebesar Rp 100.000; 4. pejabat/pelaksana yang menjadi tim Distance Learning diklat fungsional ahli/terampil masing-masing anggota tim sebesar maksimal 150.000; 5. pejabat/pelaksana yang menjadi tim Distance Learning diklat fungsional penjenjangan masing-masing anggota tim sebesar maksimal 100.000; 6. pejabat/pelaksana yang menjadi tim Distance Learning diklat teknis masing-masing anggota tim sebesar maksimal 50.000. 		<p>khusus penanganan pandemi COVID-19, yaitu akun belanja 521131 atau 521241.</p> <p>Pembayaran biaya pulsa/paket data ASN yang melaksanakan WFH diberlakukan sejak penetapan WFH oleh Kepala ANRI.</p>

NO	URAIAN BELANJA	PENJELASAN	AKUN BELANJA	KETERANGAN
		<p>d. Pemberian biaya pulsa/paket data ASN memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas dan ketersediaan anggaran pada DIPA.</p> <p>e. KPA/Kepala Satker/Pejabat Berwenang/PPK melakukan penilaian kewajaran dan pengendalian atas biaya pulsa/paket data dimaksud serta memastikan bahwa pegawai yang menerima biaya komunikasi adalah pegawai yang benar-benar berhak menerima.</p>		
2.	Uang Makan ASN	<p>Pembayaran Uang Makan ASN yang melaksanakan Work From Home (WFH) dapat dibebankan pada APBN diatur dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. ASN yang ditugaskan melaksanakan WFH ditetapkan melalui Instruksi Kepala.</p> <p>b. ASN wajib mengisi daftar presensi online selama melaksanakan WFH.</p> <p>c. Mekanisme presensi WFH diatur masing-masing K/L.</p> <p>d. Uang Makan ASN dibayarkan sesuai dengan jumlah kehadiran pegawai sesuai hari kerja.</p> <p>e. Pembayaran Uang Makan ASN memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas dan ketersediaan anggaran pada DIPA Satker.</p> <p>f. Mekanisme pembayaran Uang Makan ASN sesuai PMK Nomor 72/PMK.05/2016 tentang Uang Makan bagi Pegawai ASN.</p> <p>g. Besaran uang makan sesuai PMK tentang Standar Biaya Masukan, PMK Nomor 78/PMK.05/2019 yaitu berdasarkan golongan:</p> <p>Uang Makan/1 kali :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gol I : Rp 35.000 ; 2. Gol II : Rp 35.000; 3. Gol III : Rp 37.000; 4. Gol IV : Rp 41.000; 	511129: Belanja Uang Makan	<p>Sumber Dana: Rupiah Murni (RM);</p> <p>Pembayaran uang makan diberlakukan sejak penetapan WFH oleh Kepala ANRI.</p>

NO	URAIAN BELANJA	PENJELASAN	AKUN BELANJA	KETERANGAN
3.	Uang Lembur dan Uang Makan ASN	<p>a. Pembayaran Uang Lembur dan Uang Makan ASN yang melaksanakan Work From Home (WFH) dapat dibebankan pada APBN diatur dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>b. ASN yang diperintahkan melaksanakan kerja lembur untuk menyelesaikan tugas-tugas kedinasan yang mendesak.</p> <p>c. Surat Perintah Kerja Lembur diterbitkan oleh KPA/Kepala Satker/Pejabat yang berwenang dan ditembuskan ke Bagian Kepegawaian.</p> <p>d. ASN yang melaksanakan lembur pada saat WFH menyampaikan laporan capaian out put kerja lembur kepada penerbit Surat Perintah Kerja Lembur.</p> <p>e. Pembayaran Uang Lembur dan Uang Makan ASN didasarkan pada daftar presensi kerja lembur.</p> <p>f. Bukti kehadiran/presensi kerja lembur berupa daftar hadir manual atau print out aplikasi.</p> <p>g. Pembayaran Uang Lembur dan Uang Makan ASN memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas dan ketersediaan anggaran pada DIPA Satker.</p> <p>h. KPA/PPK/Kepala Satker/Pejabat Berwenang melakukan penilaian kewajaran dan pengendalian atas uang lembur dan uang makan dimaksud serta memastikan bahwa pegawai yang menerima atas uang lembur dan uang makan adalah pegawai yang benar-benar berhak menerimanya.</p> <p>i. Mekanisme pembayaran Uang Lembur ASN sesuai PMK Nomor 125/PMK.05/2009 tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur bagi PNS dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-41/PB/2009 tentang Prosedur dan Tata Cara Permintaan serta Pembayaran Uang Lembur bagi PNS.</p>	512211: Belanja Uang Lembur	<p>Sumber Dana: Rupiah Murni (RM);</p> <p>Pelaksanaan Lembur setelah jam kerja sebagaimana ketentuan jam kerja yang telah ditetapkan dalam Instruksi Kepala ANRI tentang WFH.</p>

NO	URAIAN BELANJA	PENJELASAN	AKUN BELANJA	KETERANGAN
		<p>j. Besaran uang lembur dan uang makan sesuai PMK tentang Standar Biaya Masukan, PMK Nomor 78/PMK.05/2019 yaitu berdasarkan golongan:</p> <p>Uang Lembur /jam :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gol I : Rp 13.000; 2. Gol II : Rp 17.000; 3. Gol III : Rp 20.000; 4. Gol IV : Rp 25.000; 5. Uang Makan/1 kali : 6. Gol I : Rp 35.000 ; 7. Gol II : Rp 35.000; 8. Gol III : Rp 37.000; 9. Gol IV : Rp 41.000; 		
4.	<p>Honorarium Nara Sumber/Pembahas Kegiatan/Moderator Kegiatan melalui Sarana Teleconference/Video Conference</p>	<p>Honorarium dapat dibebankan pada APBN dengan pertimbangan bahwa tidak menutup kemungkinan selama WFH terdapat kegiatan Seminar/Rapat/Sosialisasi/Desiminasi/Bintek/FGD/Kegiatan sejenis lainnya yang dilaksanakan dengan sarana teleconference/video conference dan memerlukan Nara Sumber/Pembahas/Moderator.</p> <p>Pembayaran honorarium dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Nara Sumber/Pembahas/Moderator melalui teleconference/video conference ditetapkan melalui Surat Tugas/SK KPA/Kepala Satker penyelenggara kegiatan. b. Undangan kegiatan melalui sarana teleconference/video conference diterbitkan oleh KPA/Kepala Satker/Pejabat Eselon II/Setara. c. Kegiatan teleconference/video conference tersebut dilaksanakan secara live dan bukan rekaman/hasil tapping. d. Daftar hadir elektronik dapat berupa <i>sreenshot kegiatan</i> atau menggunakan <i>google from</i>. 	<p>522151: Belanja Jasa Profesi</p> <p>522192: Belanja jasa penanganan COVID-19.</p>	<p>Sumber Dana: Rupiah Murni (RM); Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).</p> <p>Satuan jam yang digunakan pembayaran honorarium adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.</p> <p>Kegiatan melibatkan paling banyak 4 (empat) orang Narasumber/Pembahas /Moderator Kegiatan dan masing-masing diberikan honorarium paling banyak sebesar 4 (empat) OJ per hari;</p>

NO	URAIAN BELANJA	PENJELASAN	AKUN BELANJA	KETERANGAN
		<p>e. Terdapat laporan/bukti dokumentasi pelaksanaan kegiatan melalui sarana teleconference/video conference.</p> <p>f. Honorarium diberikan sepanjang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nara Sumber/Pembahas/Moderator berasal dari luar unit organisasi es I penyelenggara; 2. Nara Sumber/Pembahas/Moderator berasal dari dalam unit organisasi es I penyelenggaraan sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar unit organisasi es I penyelenggara/masyarakat. 3. Nara Sumber/Pembahas/Moderator berasal dari dalam unit es I penyelenggaraan diberikan honor sebesar 50% dari honorarium Nara Sumber/Pembahas/Moderator. <p>g. Pembayaran honorarium memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas dan ketersediaan anggaran pada DIPA.</p> <p>h. KPA/PPK/Kepala Satker/Pejabat Berwenang/PPK melakukan penilaian kewajaran dan pengendalian atas honorarium dimaksud serta memastikan bahwa pegawai yang menerima honor adalah pegawai yang benar-benar berhak menerimanya.</p> <p>i. Besaran honorarium sesuai pada PMK Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan TA 2020, yaitu: Nara Sumber/Pembahas/Moderator:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Es I ; Rp.1.400.000/jam 2. Es II : Rp.1.000.000/jam 3. Es III kebawah: Rp.900.000/jam 4. Moderator: Rp.700.000/kegiatan. 		<p>dan apabila jumlah Narasumber/Pembahas /Moderator Kegiatan lebih dari 4 (empat) orang harus melampirkan surat persetujuan dari KPA.</p> <p>Bagi unit yang telah merealisasikan belanjanya (terbit SP2D) dengan menggunakan akun-akun belanja sebagaimana Surat DJPB Nomor S-308/PB/2020 yaitu: akun belanja 522151, tidak perlu melakukan revisi terhadap realisasi yang telah terbit SP2D, namun wajib melakukan revisi terhadap sisa pagu yang belum direalisasikan dengan menggunakan akun khusus penanganan pandemi COVID-19, yaitu akun belanja 522192.</p> <p>Pembayaran honorarium Nara Sumber/Pembahas Kegiatan/Moderator Kegiatan diberlakukan sejak penetapan WFH oleh Kepala ANRI.</p>

NO	URAIAN BELANJA	PENJELASAN	AKUN BELANJA	KETERANGAN
5.	Honorarium Pengajar/Penceramah Menggunakan Metode Distance Learning	<p>Honorarium Pengajar/Penceramah Menggunakan Metode Distance Learning dapat dibebankan pada APBN dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Honorarium pengajar/penceramah yang dilaksanakan dengan menggunakan metode pembelajaran <i>distance learning</i> dapat dibayarkan kepada pengajar/penceramah yang diberi tugas mengampu mata pelatihan. Jam pelajaran (JP) yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit. Pertanggungjawaban pembayaran honorarium sebagaimana dimaksud pada huruf a harus dilengkapi dengan bukti yang menunjukkan kegiatan dilaksanakan secara live dan bukan rekaman/ taping. Daftar hadir elektronik dapat berupa <i>screenshot kegiatan</i> atau menggunakan <i>google from</i>. Bukti pembelajaran, baik berupa bahan ceramah, bahan tayang, bahan pembelajaran, <i>learning journal</i>, maupun foto aktivitas kelas, yang diunggah ke dalam media penyimpanan online atau google drive yang dapat diakses oleh pengelola keuangan (link file diinformasikan). Bukti berlangsungnya kegiatan sesuai dengan jadwal kegiatan yang diunggah ke dalam media penyimpanan online atau google drive yang dapat diakses oleh pengelola keuangan (link file diinformasikan). Pembayaran honorarium memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas dan ketersediaan anggaran pada DIPA. KPA/PPK/Kepala Satker/Pejabat Berwenang/PPK melakukan penilaian kewajaran dan pengendalian atas honorarium dimaksud serta memastikan bahwa pegawai yang menerima honor adalah pegawai yang benar-benar berhak menerimanya. 	<p>522151: Belanja Jasa Profesi</p> <p>522192: Belanja jasa penanganan COVID-19.</p>	<p>Sumber Dana: Rupiah Murni (RM); Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).</p> <p>Pembayaran honorarium Pengajar/Penceramah diberlakukan sejak penetapan WFH oleh Kepala ANRI.</p> <p>Bagi unit yang telah merealisasikan belanjanya (terbit SP2D) dengan menggunakan akun-akun belanja sebagaimana Surat DJPB Nomor S-308/PB/2020 yaitu: akun belanja 522151, tidak perlu melakukan revisi terhadap realisasi yang telah terbit SP2D, namun wajib melakukan revisi terhadap sisa pagu yang belum direalisasikan dengan menggunakan akun khusus penanganan pandemi COVID-19, yaitu akun belanja 522192.</p>

NO	URAIAN BELANJA	PENJELASAN	AKUN BELANJA	KETERANGAN
6.	Biaya Konsumsi untuk ASN yang melaksanakan Work Form Office (WFO)	<p>Pemberian biaya konsumsi ASN yang melaksanakan Work Form Office (WFO) merupakan kompensasi kepada pegawai karena mengalami kesulitan pemenuhan pangan selama melaksanakan tugas WFO.</p> <p>Diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> ASN yang ditugaskan melaksanakan WFO ditetapkan melalui Surat Tugas yang diterbitkan oleh KPA/PPK/Kepala Satker. Pembayaran biaya konsumsi dan transpot ASN yang melaksanakan WFO memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas dan ketersediaan anggaran pada DIPA. KPA/PPK/Kepala Satker/Pejabat Berwenang melakukan penilaian kewajaran dan pengendalian atas biaya konsumsi dimaksud serta memastikan bahwa pegawai yang menerima konsumsi adalah pegawai yang benar-benar berhak menerimanya. Besaran konsumsi ASN yang melaksanakan WFO sesuai pada PMK Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan TA 2020, Biaya konsumsi rapat yaitu: Rp 69.000,- (Orang/Kali) dan biaya transpot kegiatan dalam Kabupaten/Kota pergi pulang (PP) sebesar Rp.150.000,- (Orang/Kali). 	<p>521211 : Belanja Bahan</p> <p>521241: Belanja Barang Non Operasional Penanganan Pandemi COVID-19</p>	<p>Sumber Dana: Rupiah Murni (RM); Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).</p> <p>Pembayaran biaya konsumsi dan transpot diberlakukan sejak penetapan WFH oleh Kepala ANRI.</p> <p>Bagi unit yang telah merealisasikan belanjanya (terbit SP2D) dengan menggunakan akun-akun belanja sebagaimana Surat DJPB Nomor S-308/PB/2020 yaitu: akun belanja 521211 atau 524113, tidak perlu melakukan revisi terhadap realisasi yang telah terbit SP2D, namun wajib melakukan revisi terhadap sisa pagu yang belum direalisasikan dengan menggunakan akun khusus penanganan pandemi COVID-19, yaitu akun belanja 521241 atau 524115.</p>
7.	Biaya Transpot ASN yang Melaksanakan WFO	<p>Kompensasi kepada pegawai karena mengalami kesulitan transportasi/membutuhkan biaya lebih besar selama melaksanakan tugas WFO.</p> <p>Diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> ASN yang ditugaskan melaksanakan WFO ditetapkan melalui Surat Tugas yang diterbitkan oleh KPA/PPK/Kepala Satker. Pembayaran biaya transpot ASN yang melaksanakan WFO memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas dan ketersediaan anggaran pada DIPA. 	<p>524113 : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</p> <p>524115: Belanja Perjalanan Dinas Penanganan Pandemi COVID-19</p>	

NO	URAIAN BELANJA	PENJELASAN	AKUN BELANJA	KETERANGAN
		<p>c. KPA/PPK/Kepala Satker/Pejabat Berwenang melakukan penilaian kewajaran dan pengendalian atas biaya transpot dimaksud serta memastikan bahwa pegawai yang menerima tarnspot adalah pegawai yang benar-benar berhak menerimanya.</p> <p>Besaran biaya transpot ASN yang melaksanakan WFO sesuai pada PMK Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan TA 2020, Biaya transpot kegiatan dalam Kabupaten/Kota pergi pulang (PP) sebesar Rp.150.000,- (Orang/Kali)</p>		
8.	Biaya Karantina/Isolasi Mandiri Intansi Pemerintah untuk Penanganan COVID-19	<p>Sesuai Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/202/2020 tentang Protokol Isolasi Diri Sendiri Dalam Penanganan COVID-19, Pegawai Instansi Pemerintah yang memenuhi kriteria sebagai Orang Dalam Pemantauan (ODP) harus melakukan protokol isolasi diri sendir dirumah.</p> <p>Dalam hal rumah pegawai yang bersangkutan tidak memadai untuk pelaksanaan karantina/isolasi mandiri, K/L atau Satker dapat menyediakan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan karantina/isolasi mandiri tersebut, dengan biaya yang dapat dibebankan pada APBN.</p> <p>Pembayaran biaya Karantina/Isolasi Mandiri tersebut diatur dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. ASN yang berstatus sebagai OPD tidak dapat melakukan isolasi mandiri secara optimal dirumah/tempat tinggalnya karena pertimbangan sarana dan prasarana. b. Karantina/isolasi mandiri dapat diselenggarakan dengan memanfaatkan mess/asrama/wisma atau sejenisnya yang dimiliki oleh K/L atau Satker 	521119 : Belanja Barang Operasional Lainnya	

NO	URAIAN BELANJA	PENJELASAN	AKUN BELANJA	KETERANGAN
		<p>c. Dalam hal tidak tersedia mess/asrama/wisma atau sejenisnya dapat menggunakan penginapan atau sejenisnya dengan mempertimbangkan efisiensi, efektifitas dan ketersediaan dana</p> <p>d. ASN yang diwajibkan melaksanakan protokol isolasi diri sendiri ditetapkan dengan Surat Keputusan KPA/Kepala Satker.</p> <p>e. KPA/PPK/Kepala Satker/Pejabat Berwenang melakukan penilaian kewajaran dan pengendalian atas biaya karantina/isolasi mandiri dimaksud serta memastikan bahwa pegawai yang menerima biaya karantina/isolasi mandiri adalah pegawai yang benar-benar berhak menerimanya.</p>		
9.	Pengadaan Masker/Handsantizer	Pengadaan Masker/Handsantizer diperuntukan bagi kegiatan tertentu, termasuk yang dilaksanakan dalam rangka mendukung operasional kantor agar dapat berjalan dengan baik dan dalam rangka mendukung pelayanan dan tidak memenuhi kriteria Aset Tetap Peralatan dan Mesin	<p>521111 : Belanja Keperluan Perkantoran.</p> <p>521131: Belanja Barang Operasional Penanganan Pandemi COVID-19</p>	<p>Sumber Dana: Rupiah Murni (RM); Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).</p> <p>Pembayaran pengadaan masker/handsantizer diberlakukan sejak penetapan WFH oleh Kepala ANRI.</p> <p>Bagi unit yang telah merealisasikan belanjanya (terbit SP2D) dengan menggunakan akun-akun belanja sebagaimana Surat DJPB Nomor S-308/PB/2020 yaitu: akun belanja 521111, tidak perlu melakukan revisi terhadap</p>

NO	URAIAN BELANJA	PENJELASAN	AKUN BELANJA	KETERANGAN
				realisasi yang telah terbit SP2D, namun wajib melakukan revisi terhadap sisa pagu yang belum direalisasikan dengan menggunakan akun khusus penanganan pandemi COVID-19, yaitu akun belanja 521131.
10.	Pengadaan Masker/Handsantizer	Pengadaan Masker/Handsantizer diniatkan untuk persediaan	<p>521811: Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</p> <p>521841: Belanja Barang Persediaan Penanganan Pandemi COVID-19</p>	<p>Sumber Dana: Rupiah Murni (RM); Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).</p> <p>Pembayaran pengadaan masker/handsantizer yang diperuntukan sebagai persediaan diberlakukan sejak penetapan WFH oleh Kepala ANRI.</p> <p>Bagi unit yang telah merealisasikan belanjanya (terbit SP2D) dengan menggunakan akun-akun belanja sebagaimana Surat DJPB Nomor S-308/PB/2020 yaitu: akun belanja 521811, tidak perlu melakukan revisi terhadap realisasi yang telah terbit SP2D, namun wajib melakukan revisi terhadap sisa pagu yang belum direalisasikan dengan menggunakan akun khusus</p>

NO	URAIAN BELANJA	PENJELASAN	AKUN BELANJA	KETERANGAN
				penanganan pandemi COVID-19, yaitu akun belanja 521841.
11.	Pembelian Vitamin dan Penambah Daya Tahan Tubuh	<p>Pembelian Vitamin dan Penambah Daya Tahan Tubuh yang diperuntukan bagi pegawai yang melaksanakan Work Form Office (WFO) dalam bentuk barang yang besaran pembayarannya mengacu pada ketentuan dalam PMK 78/2019 tentang SBM TA 2020, dan diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) adanya Surat Tugas yang ditetapkan oleh KPA/PPK/Kepala Satker/Pejabat yang berwenang; dan 2) pembayaran didasarkan pada presensi kerja. 	<p>521113: Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh</p> <p>521131: Belanja Barang Operasional Penanganan Pandemi COVID-19</p>	<p>Sumber Dana: Rupiah Murni (RM); Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).</p> <p>Pemberian vitamin dan penambah daya tahan tubuh diberlakukan sejak ditetapkannya Surat Edaran ini.</p> <p>Bagi unit yang telah merealisasikan belanjanya (terbit SP2D) dengan menggunakan akun-akun belanja sebagaimana Surat DJPB Nomor S-308/PB/2020 yaitu: akun belanja 521113, tidak perlu melakukan revisi terhadap realisasi yang telah terbit SP2D, namun wajib melakukan revisi terhadap sisa pagu yang belum direalisasikan dengan menggunakan akun khusus penanganan pandemi COVID-19, yaitu akun belanja 521131.</p>

NO	URAIAN BELANJA	PENJELASAN	AKUN BELANJA	KETERANGAN
12.	Biaya Penyemprotan Desinfektan	Pengeluaran Biaya Penyemprotan Desinfektan diarea kantor dan sekitarnya yang dilaksanakan swakelola	521119: Belanja Barang Operasional Lainnya 521131: Belanja Barang Operasional Penanganan Pandemi COVID-19	Sumber Dana: Rupiah Murni (RM); Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pembayaran pengadaan masker/handsanitizer yang diperuntukan sebagai persediaan diberlakukan sejak penetapan WFH oleh Kepala ANRI.
		Pengeluaran Biaya Penyemprotan Desinfektan dengan menggunakan jasa pihak ketiga (pihak yang berkompeten dalam jasa penyemprotan desinfektan)	522191: Belanja Jasa Lainnya 522192: Belanja Barang Jasa Penanganan Pandemi COVID-19	Bagi unit yang telah merealisasikan belanjanya (terbit SP2D) dengan menggunakan akun-akun belanja sebagaimana Surat DJPB Nomor S-308/PB/2020 yaitu: akun belanja 521119 atau 522191, tidak perlu melakukan revisi terhadap realisasi yang telah terbit SP2D, namun wajib melakukan revisi terhadap sisa pagu yang belum direalisasikan dengan menggunakan akun khusus penanganan pandemi COVID-19, yaitu akun belanja 521131 atau 522191.
13.	Pengadaan Thermogun/Thermometer Infrared yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 Tahun dan	a. Thermogun pada kodefikasi BMN ada dikelompok peralatan dan mesin yaitu dapat dimasukkan sebagai Thermometer Infrared dengan masa manfaat lebih dari 8 Tahun. b. Apabila harga perolehannya sama dengan atau diatas Rp 1 juta dan dimasukkan untuk digunakan dalam operasional	532111: Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Sumber Dana: Rupiah Murni (RM); Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

NO	URAIAN BELANJA	PENJELASAN	AKUN BELANJA	KETERANGAN
	<p>nilainya memenuhi satuan minimal kapitalisasi peralatan dan mesin.</p>	<p>kantor, maka telah memenuhi kriteria sebagai peralatan dan mesin, sehingga belanjanya menggunakan akun 532111 (belanja peralatan dan mesin).</p>	<p>532119: Belanja Modal Peralatan dan Mesin Penanganan Pandemi COVID-19.</p>	<p>Pembayaran pengadaan Thermogun/Thermometer Infrared diberlakukan sejak penetapan WFH oleh Kepala ANRI.</p>
	<p>Pengadaan Thermogun/ Thermometer Infrared yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 Tahun dan nilainya tidak memenuhi satuan minimal kapitalisasi peralatan dan mesin</p>	<p>Pembelian/Pengadaan Thermogun/Thermometer Infrared yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 Tahun namun harganya dibawah nilai satuan minimal kapitalisasi peralatan dan mesin (dibawah Rp 1Jt) agar tetap diinput dalam aplikasi SIMAK-BMN sehingga menghasilkan aset ekstrakomptabel</p>	<p>521111: Belanja Keperluan Perkantoran Atau 521119: Belanja Barang Operasional Lainnya 521131: Belanja Barang Operasional Penanganan Pandemi COVID-19.</p>	<p>Bagi unit yang telah merealisasikan belanjanya (terbit SP2D) dengan menggunakan akun-akun belanja sebagaimana Surat DJPB Nomor S-308/PB/2020 yaitu: akun belanja 521111/521119/532111, tidak perlu melakukan revisi terhadap realisasi yang telah terbit SP2D, namun wajib melakukan revisi terhadap sisa pagu yang belum direalisasikan dengan menggunakan akun khusus penanganan pandemi COVID-19, yaitu akun belanja 521131 atau 532119.</p>

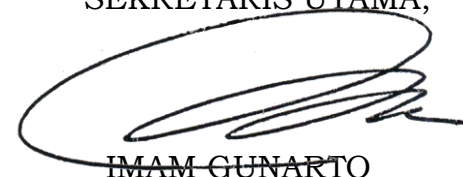
NO	URAIAN BELANJA	PENJELASAN	AKUN BELANJA	KETERANGAN
14.	<p>Pengadaan Bilik Desinfektan Permanen/Portabel yang dapat dikenali dan memenuhi kriteria sebagai suatu Aset Tetap</p> <p>Pengadaan Bilik Desinfektan Non Permanen yang tidak memenuhi kriteria sebagai suatu Aset Tetap</p>	<p>a. Bilik Desinfektan dalam kodifikasi BMN dimasukkan (dipersamakan) sebagai tenda dengan masa manfaat 2 Tahun atau kodifikasi lainnya sesuai dengan pengadaannya.</p> <p>b. Apabila harga perolehannya sama dengan atau diatas Rp 1 Jt dan dimaksudkan digunakan dalam operasional kantor, maka telah memenuhi kriteria sebagai peralatan dan mesin.</p> <p>Pengadaan Bilik Desinfektan yang masa manfaatnya lebih dari 1 Tahun namun harganya dibawah nilai satuan minimal kapitalisasi peralatan dan mesin (dibawah Rp 1 Jt) agar tetap diinput dalam aplikasi SIMAK-BMN sehingga menghasilkan aset ekstrakomptabel.</p>	<p>532111: Belanja Modal Peralatan dan Mesin</p> <p>532119: Belanja Modal Peralatan dan Mesin Penanganan Pandemi COVID-19.</p> <p>521111: Belanja Keperluan Perkantoran Atau</p> <p>521119: Belanja Barang Operasional Lainnya</p> <p>521131: Belanja Belanja Barang Operasional Penanganan Pandemi COVID-19.</p>	<p>Sumber Dana: Rupiah Murni (RM); Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).</p> <p>Pembayaran pengadaan Bilik Desinfektan Permanen/Portabel diberlakukan sejak penetapan WFH oleh Kepala ANRI.</p> <p>Bagi unit yang telah merealisasikan belanjanya (terbit SP2D) dengan menggunakan akun-akun belanja sebagaimana Surat DJPB Nomor S-308/PB/2020 yaitu: akun belanja 521111/521119 atau 532111, tidak perlu melakukan revisi terhadap realisasi yang telah terbit SP2D, namun wajib melakukan revisi terhadap sisa pagu yang belum direalisasikan dengan menggunakan akun khusus penanganan pandemi COVID-19, yaitu akun belanja 521131 atau 532119.</p>
15.	Pengadaan/Pembangunan tempat cuci tangan portabel maupun permanen	Pembelian/Pengadaan tempat cuci tangan portabel maupun permanen dapat diidentifikasi sebagai kodefikasi BMN tersendiri dalam kelompok peralatan dan mesin, dan harga perolehannya diatas nilai satuan minimal kapitalisasi peralatan dan mesin (Rp 1 Jt), maka menggunakan akun 532111	523111: Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Sumber Dana: Rupiah Murni (RM); Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

NO	URAIAN BELANJA	PENJELASAN	AKUN BELANJA	KETERANGAN
		(Belanja modal peralatan dan mesin) dan perlakuannya sebagaimana pengadaan thermogun dan bilik desinfektan.	523114: Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Penanganan Pandemi COVID-19.	<p>Pembayaran pengadaan Pengadaan/Pembangunan tempat cuci tangan portabel maupun permanen diberlakukan sejak penetapan WFH oleh Kepala ANRI.</p> <p>Bagi unit yang telah merealisasikan belanjanya (terbit SP2D) dengan menggunakan akun-akun belanja sebagaimana Surat DJPB Nomor S-308/PB/2020 yaitu: akun belanja 523111, tidak perlu melakukan revisi terhadap realisasi yang telah terbit SP2D, namun wajib melakukan revisi terhadap sisa pagu yang belum direalisasikan dengan menggunakan akun khusus penanganan pandemi COVID-19, yaitu akun belanja 523114.</p>
16.	Pengadaan Lisensi Aplikasi Video Conference	<p>Pengadaan Lisensi Aplikasi untuk penyelenggaraan rapat secara online/Video Conference berbayar (masa hak penggunaan kurang dari satu atau sampai dengan 1 tahun), dapat diberikan/dibayarkan dengan ketentuan:</p> <p>a. Pengadaan lisensi aplikasi sebagaimana dimaksud yang bersumber dari non-PNBP dibebankan pada anggaran operasional Satker.</p> <p>b. Pembebanan sebagaimana dimaksud pada huruf a</p>	<p>521111: Belanja Keperluan Perkantoran Atau</p> <p>521119: Belanja Barang Operasional Lainnya</p>	<p>Sumber Dana: Rupiah Murni (RM); Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).</p> <p>Pembayaran pengadaan lisensi aplikasi video conference diberlakukan sejak penetapan WFH oleh Kepala ANRI.</p>

NO	URAIAN BELANJA	PENJELASAN	AKUN BELANJA	KETERANGAN
		<p>dikecualikan untuk kegiatan:</p> <p>1) pelatihan dan bimbingan teknis yang melibatkan sebagian besar peserta dari luar instansi, dibebankan pada anggaran kegiatan tersebut; dan</p> <p>2) rapat yang bersumber dari PNBP, dibebankan pada anggaran PNBP.</p> <p>3) Pertanggungjawaban pengadaan lisensi aplikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dilengkapi dengan:</p> <p>a) bukti invoice /tagihan dari penyedia aplikasi; dan</p> <p>b) informasi nilai tukar rupiah terhadap mata uang yang ditagihkan melalui aplikasi pada hari transaksi (untuk tagihan dengan mata uang asing).</p>	<p>521131: Belanja Barang Operasional Penanganan Pandemi COVID-19</p>	<p>Bagi unit yang telah merealisasikan belanjanya (terbit SP2D) dengan menggunakan akun-akun belanja sebagaimana Surat DJPB Nomor S-308/PB/2020 yaitu: akun belanja 521111 atau 521119, tidak perlu melakukan revisi terhadap realisasi yang telah terbit SP2D, namun wajib melakukan revisi terhadap sisa pagu yang belum direalisasikan dengan menggunakan akun khusus penanganan pandemi COVID-19, yaitu akun belanja 521131.</p>

a.n. KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

SEKRETARIS UTAMA,



IMAM GUNARTO



KEPALA ARSIP NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 277 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 159 A TAHUN 2020

TENTANG

BIAYA/BELANJA FASILITASI KERJA YANG DIBEBAHKAN PADA DAFTAR
ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
DALAM MASA DARURAT *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)
DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas kedinasan dan kegiatan operasional perkantoran dalam rangka pencapaian kinerja dan pelayanan pada masa penerapan Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam tatanan normal baru sesuai Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020, perlu dilakukan beberapa perubahan atas Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Biaya/Belanja Fasilitas Kerja yang Dibebankan Pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Arsip Nasional Republik Indonesia Dalam Masa Darurat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 159.A. Tahun 2020 tentang Biaya/Belanja Fasilitas Kerja yang Dibebankan Pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Arsip Nasional Republik Indonesia Dalam Masa Darurat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5826);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19;
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah 4 (empat) kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018;

10. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
11. Keputusan Presiden Nomor 45/TPA Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;
12. Keputusan Presiden Nomor 87/TPA Tahun 2020 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia;
13. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.05/2009 tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur Bagi Pegawai Negeri Sipil;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.05/2016 tentang Uang Makan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan;

19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dalam Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019;
20. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 394/KMK.02/2020 tentang Biaya Paket Data dan Komunikasi Tahun Anggaran 2020;
21. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia;
22. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Arsip Statis dan Tsunami;
23. Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Satuan Kerja Kuasa Pengguna Anggaran Di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;
24. Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Jabatan Administrator Ke Dalam Jabatan Fungsional Melalui Mekanisme Penyetaraan di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;
25. Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Jabatan Pengawas Ke Dalam Jabatan Fungsional Melalui Mekanisme Penyetaraan di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;
26. Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Ke Dalam Jabatan Administrator dan Pengawas di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;
27. Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 206 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2020 tentang Pelaksana/Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Pada Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun Anggaran 2020;

28. Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan Pembentukan Tim/Panitia Yang Dapat Mengakibatkan Pengeluaran Biaya Yang Dibebankan Pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun Anggaran 2020;
29. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-135/PB/2020 tentang Pemutahiran Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar;
30. Instruksi Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Instruksi Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Dalam Protokol Tatanan Normal Baru Produktif Dan Aman COVID-19 Di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 159 A TENTANG BIAYA/BELANJA FASILITASI KERJA YANG DIBEBANKAN PADA DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA DALAM MASA DARURAT *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*.

KESATU : Menetapkan Biaya/Belanja Fasilitasi Kerja Yang Dibebankan Pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Arsip Nasional Republik Indonesia Dalam Masa Darurat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

KEDUA : Biaya/belanja yang dapat dibebankan pada DIPA sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas:
a. biaya komunikasi dalam bentuk pulsa telepon dan/atau paket data internet pegawai;

- b. uang makan pegawai;
- c. uang lembur dan uang makan pegawai;
- d. honorarium nara sumber/pembahas kegiatan/moderator kegiatan melalui sarana *teleconference/video conference*;
- e. pengadaan masker/*handsanitizer*;
- f. pembelian vitamin dan penambah daya tahan tubuh;
- g. biaya penyemprotan desinfektan;
- h. pengadaan *thermogun/thermometer infrared* yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun dan nilainya memenuhi satuan minimal kapitalisasi peralatan dan mesin;
- i. pengadaan *thermogun/thermometer infrared* yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun dan nilainya tidak memenuhi satuan minimal kapitalisasi peralatan dan mesin;
- j. pengadaan/pembangunan tempat cuci tangan portabel maupun permanen;
- k. pengadaan lisensi aplikasi *teleconference /video conference*.

KETIGA : Ketentuan lebih lanjut mengenai Biaya/Belanja yang dapat dibebankan pada DIPA sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku selama masa darurat COVID-19 sebagaimana ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 September 2020

a.n. KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,
SEKRETARIS UTAMA,



IMAM GUNARTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 277 TAHUN 2020
TANGGAL 3 SEPTEMBER 2020

BIAYA/BELANJA FASILITASI KERJA YANG DIBEBANKAN PADA DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN ARSIP
NASIONAL REPUBLIK INDONESIA DALAM MASA DARURAT *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)

NO	URAIAN BELANJA	PENJELASAN	AKUN BELANJA	KETERANGAN
1.	Biaya komunikasi dalam bentuk pulsa telepon dan/atau paket data internet	<p>Pembayaran biaya komunikasi untuk pelaksanaan teleconference/video conference bagi ASN dan peserta Diklat e-learning dalam rangka penyesuaian sistem kerja ASN dalam tatanan normal baru dapat dibebankan pada APBN dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Dokumentasi atas pelaksanaan teleconference/video conference atau bentuk kegiatan daring lainnya dalam 1 (satu) bulan atau kegiatan. Penerima biaya pulsa telepon dan/atau paket data internet ditetapkan melalui keputusan KPA/Kepala Satker dengan memperhatikan beban kerja dan frekuensi akses internet/telepon masing-masing penerima. Besaran biaya pulsa/paket data untuk setiap: <ol style="list-style-type: none"> Narasumber/Penceramah/Pengajar setiap pelatihan 1 (satu) JP sebesar Rp 15.000 dan berlaku kelipatannya; Peserta pelatihan kurang/sampai dengan 10 (sepuluh) hari maksimal sebesar Rp 100.000 per pelatihan; Peserta pelatihan 11 (sebelas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari maksimal sebesar Rp 150.000 per pelatihan; 	<p>Pegawai ASN: 521131: Belanja barang operasional penanganan COVID-19.</p> <p>Peserta Diklat/ Narasumber/Pengajar: 521241: Belanja barang non operasional penanganan COVID-19.</p>	<p>Sumber Dana: Rupiah Murni (RM) Untuk Satker ANRI Jakarta (kegiatan layanan perkantoran).</p> <p>Rupiah Murni (RM)/ Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Selain Satker ANRI Jakarta (Satker Pusat Jasa Kearsipan, Satker Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan dan BAST).</p> <p>Pembayaran biaya pulsa/paket data ASN diberlakukan sejak Instruksi Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Instruksi Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia</p>

NO	URAIAN BELANJA	PENJELASAN	AKUN BELANJA	KETERANGAN
		<p>4) Peserta pelatihan lebih dari 21 (dua puluh satu) hari maksimal sebesar Rp 300.000 per peltihan.</p> <p>5) Pegawai ASN mendapatkan biaya pulsa telepon dan/paket data internet per bulan berupa pulsa/paket data dengan kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pejabat pimpinan tinggi utama , pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat fungsional utama dengan besaran paket data/pulsa sebesar Rp.300.000 ; 2. pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional madya/ahli/terampil dan pelaksana sebesar Rp.150.000; <p>d. Pemberian biaya pulsa telepon dan/atau paket data internet ASN memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, transparan, bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta ketersediaan anggaran pada DIPA.</p> <p>e. KPA/Kepala Satker/Pejabat Berwenang/PPK melakukan penilaian kewajaran dan pengendalian atas biaya pulsa/paket data dimaksud serta memastikan bahwa pegawai yang menerima biaya komunikasi adalah pegawai yang benar-benar berhak menerima.</p>		<p>Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Dalam Protokol Tatanan Normal Baru Produktif Dan Aman COVID-19 Di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia.</p> <p>Dalam hal KL/Satker telah mengalokasikan anggaran dan telah merealisasikan belanja penanganan pandemi COVID-19 (telah terbit SP2D) dengan tidak menggunakan akun-akun khusus COVID-19, maka harus dilakukan revisi anggaran (DIPA/POK) dan /atau ralat dokumen realisasi belanja (SPM/SP2D) dengan menggunakan akun khusus penanganan COVID-19, sebagaimana yang telah diatur dalam Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-628/PB/2020 tanggal 23 Juli 2020.</p>
2.	Uang Makan ASN	<p>Pembayaran Uang Makan ASN yang melaksanakan Work From Home (WFH)/Work From Office (WFO) dapat dibebankan pada APBN diatur dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. ASN yang ditugaskan melaksanakan WFH/WFO ditetapkan melalui Surat Perintah. 	511129: Belanja Uang Makan	Sumber Dana: Rupiah Murni (RM) Satker ANRI Jakarta.

NO	URAIAN BELANJA	PENJELASAN	AKUN BELANJA	KETERANGAN
		<ul style="list-style-type: none"> b. ASN wajib mengisi daftar presensi online selama melaksanakan WFH/WFO. c. Uang Makan ASN dibayarkan sesuai dengan jumlah kehadiran pegawai sesuai hari kerja. d. Pembayaran Uang Makan ASN memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas dan ketersediaan anggaran pada DIPA Satker. e. Mekanisme pembayaran Uang Makan ASN sesuai PMK Nomor 72/PMK.05/2016 tentang Uang Makan bagi Pegawai ASN. f. Besaran uang makan sesuai PMK tentang Standar Biaya Masukan, PMK Nomor 78/PMK.05/2019 yaitu berdasarkan golongan: Uang Makan/1 kali : <ul style="list-style-type: none"> 1. Gol I : Rp 35.000 ; 2. Gol II : Rp 35.000; 3. Gol III : Rp 37.000; 4. Gol IV : Rp 41.000; 		<p>Pembayaran uang makan diberlakukan sejak Penetapan WFH oleh Kepala ANRI.</p>
3.	Uang Lembur dan Uang Makan ASN	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembayaran Uang Lembur dan Uang Makan ASN yang melaksanakan Work From Home (WFH)/Work From Office (WFO) dapat dibebankan pada APBN diatur dengan ketentuan sebagai berikut: b. ASN yang diperintahkan melaksanakan kerja lembur untuk menyelesaikan tugas-tugas kedinasan yang mendesak. c. Surat Perintah Kerja Lembur diterbitkan oleh KPA/Kepala Satker/Pejabat yang berwenang dan ditembuskan ke Bagian Kepegawaian. d. ASN yang melaksanakan lembur pada saat WFH/WFO menyampaikan laporan capaian out put kerja lembur kepada penerbit Surat Perintah Kerja Lembur. e. Pembayaran Uang Lembur dan Uang Makan ASN didasarkan pada daftar presensi kerja lembur. 	512211: Belanja Uang Lembur	<p>Sumber Dana: Rupiah Murni (RM) Satker ANRI Jakarta.</p> <p>Pelaksanaan Lembur setelah jam kerja atau hari libur sebagaimana ketentuan jam kerja.</p>

NO	URAIAN BELANJA	PENJELASAN	AKUN BELANJA	KETERANGAN
		<p>f. Bukti kehadiran/presensi kerja lembur berupa daftar hadir online dari aplikasi dan/atau manual.</p> <p>g. Pembayaran Uang Lembur dan Uang Makan ASN memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas dan ketersediaan anggaran pada DIPA Satker.</p> <p>h. KPA/PPK/Kepala Satker/Pejabat Berwenang melakukan penilaian kewajaran dan pengendalian atas uang lembur dan uang makan dimaksud serta memastikan bahwa pegawai yang menerima atas uang lembur dan uang makan adalah pegawai yang benar-benar berhak menerimanya.</p> <p>i. Mekanisme pembayaran Uang Lembur ASN sesuai PMK Nomor 125/PMK.05/2009 tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur bagi PNS dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-41/PB/2009 tentang Prosedur dan Tata Cara Permintaan serta Pembayaran Uang Lembur bagi PNS.</p> <p>j. Besaran uang lembur dan uang makan sesuai PMK tentang Standar Biaya Masukan, PMK Nomor 78/PMK.05/2019 yaitu berdasarkan golongan:</p> <p>Uang Lembur /jam :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gol I : Rp 13.000; 2. Gol II : Rp 17.000; 3. Gol III : Rp 20.000; 4. Gol IV : Rp 25.000; <p>Uang Makan/1 kali :</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Gol I : Rp 35.000 ; 7. Gol II : Rp 35.000; 8. Gol III : Rp 37.000; 9. Gol IV : Rp 41.000; 		

NO	URAIAN BELANJA	PENJELASAN	AKUN BELANJA	KETERANGAN
4.	Honorarium Nara Sumber/Pembahas Kegiatan/Moderator Kegiatan melalui Sarana Teleconference/Video Conference	<p>Honorarium dapat dibebankan pada APBN untuk kegiatan Seminar/Rapat/Sosialisasi/Desiminasi/Bintek/FGD/Kegiatan sejenis lainnya yang dilaksanakan dengan sarana teleconference/video conference dan memerlukan Nara Sumber/Pembahas/Moderator.</p> <p>Pembayaran honorarium dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Nara Sumber/Pembahas/Moderator melalui teleconference/video conference ditetapkan melalui Surat Tugas/SK KPA/Kepala Satker penyelenggara kegiatan. b. Undangan kegiatan melalui sarana teleconference/video conference diterbitkan oleh KPA/Kepala Satker/Pejabat Eselon II/Setara. c. Kegiatan teleconference/video conference tersebut dilaksanakan secara live dan bukan rekaman/hasil tapping. d. Daftar hadir elektronik dapat berupa <i>sreenshot kegiatan</i> atau menggunakan <i>google from/zoho</i>. e. Terdapat laporan/bukti dokumentasi pelaksanaan kegiatan melalui sarana teleconference/video conference. f. Honorarium diberikan sepanjang: <ol style="list-style-type: none"> 1. Nara Sumber/Pembahas/Moderator berasal dari luar unit organisasi Es I penyelenggara; 2. Nara Sumber/Pembahas/Moderator berasal dari dalam unit organisasi Es I penyelenggaran sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar unit organisasi Es I penyelenggara/masyarakat; 3. Nara Sumber/Pembahas/Moderator berasal dari dalam unit es I penyelenggaran diberikan honor sebesar 50% dari honorarium Nara Sumber/Pembahas/Moderator. g. Pembayaran honorarium memperhatikan prinsip efisensi, efektifitas,transparan,bertanggungjawab dengan 	522192: Belanja jasa penanganan COVID-19.	<p>Sumber Dana: Rupiah Murni (RM); Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).</p> <p>Satuan jam yang digunakan pembayaran honorarium adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.</p> <p>Kegiatan melibatkan paling banyak 4 (empat) orang Narasumber/Pembahas /Moderator Kegiatan dan masing-masing diberikan honorarium paling banyak sebesar 4 (empat) OJ per hari; dan apabila jumlah Narasumber/Pembahas /Moderator Kegiatan lebih dari 4 (empat) orang harus melampirkan surat persetujuan dari KPA.</p> <p>Pembayaran honorarium Nara Sumber/Pembahas Kegiatan/Moderator Kegiatan diberlakukan sejak penetapan WFH oleh Kepala ANRI.</p>

NO	URAIAN BELANJA	PENJELASAN	AKUN BELANJA	KETERANGAN
		<p>memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta ketersediaan anggaran pada DIPA.</p> <p>h. KPA/PPK/Kepala Satker/Pejabat Berwenang/PPK melakukan penilaian kewajaran dan pengendalian atas honorarium dimaksud serta memastikan bahwa pegawai yang menerima honor adalah pegawai yang benar-benar berhak menerimanya.</p> <p>i. Besaran honorarium sesuai pada PMK Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan TA 2020, yaitu: Nara Sumber/Pembahas/Moderator:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Es I : Rp.1.400.000/jam; 2. Es II : Rp.1.000.000/jam; 3. Es III kebawah: Rp.900.000/jam; 4. Moderator: Rp.700.000/kegiatan. 		<p>Bagi unit yang telah merealisasikan belanjanya (terbit SP2D) dengan menggunakan akun-akun belanja sebagaimana Surat DJPB Nomor S-308/PB/2020 yaitu: akun belanja 522151, maka perlu melakukan revisi terhadap realisasi yang telah terbit SP2D, dengan menggunakan akun khusus penanganan pandemi COVID-19, yaitu akun belanja 522192, sebagaimana yang telah diatur dalam Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-628/PB/2020 tanggal 23 Juli 2020.</p>
5.	Honorarium Pengajar/Penceramah Menggunakan Metode Distance Learning	<p>Honorarium Pengajar/Penceramah Menggunakan Metode Distance Learning dapat dibebankan pada APBN dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Honorarium pengajar/penceramah yang dilaksanakan dengan menggunakan metode pembelajaran <i>d i s t a n c e l e a r n i n g</i> dapat dibayarkan kepada pengajar/penceramah yang diberi tugas mengampu mata pelatihan. b. Jam pelajaran (JP) yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit. c. Pertanggungjawaban pembayaran honorarium sebagaimana dimaksud pada huruf a harus dilengkapi dengan bukti yang menunjukkan kegiatan dilaksanakan secara live dan bukan rekaman/ taping. 	522192: Belanja jasa penanganan COVID-19.	<p>Sumber Dana: Rupiah Murni (RM); Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).</p> <p>Pembayaran honorarium Pengajar/Penceramah diberlakukan sejak penetapan WFH oleh Kepala ANRI.</p> <p>Bagi unit yang telah merealisasikan belanjanya (terbit SP2D) dengan menggunakan akun-akun belanja sebagaimana</p>

NO	URAIAN BELANJA	PENJELASAN	AKUN BELANJA	KETERANGAN
		<p>d. Daftar hadir elektronik dapat berupa <i>screenshot kegiatan</i> atau menggunakan <i>google from/Zoho</i>.</p> <p>e. Bukti pembelajaran, baik berupa bahan ceramah, bahan tayang, bahan pembelajaran, <i>l e a r n i n g j o u r n a l</i>, maupun foto aktivitas kelas, yang diunggah ke dalam media penyimpanan online atau google drive yang dapat diakses oleh pengelola keuangan (link file diinformasikan).</p> <p>f. Bukti berlangsungnya kegiatan sesuai dengan jadwal kegiatan yang diunggah ke dalam media penyimpanan online atau google drive yang dapat diakses oleh pengelola keuangan (link file diinformasikan).</p> <p>g. Pembayaran honorarium memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, transparan, bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta ketersediaan anggaran pada DIPA.</p> <p>g. KPA/PPK/Kepala Satker/Pejabat Berwenang/PPK melakukan penilaian kewajaran dan pengendalian atas honorarium dimaksud serta memastikan bahwa pegawai yang menerima honor adalah pegawai yang benar-benar berhak menerimanya.</p>		<p>Surat DJPB Nomor S-308/PB/2020 yaitu: akun belanja 522151, maka perlu melakukan revisi terhadap realisasi yang telah terbit SP2D, dengan menggunakan akun khusus penanganan pandemi COVID-19, yaitu akun belanja 522192, sebagaimana yang telah diatur dalam Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-628/PB/2020 tanggal 23 Juli 2020.</p>
9.	Pengadaan Masker/Handsantizer	Pengadaan Masker/Handsantizer diperuntukan bagi kegiatan tertentu, termasuk yang dilaksanakan dalam rangka mendukung operasional kantor agar dapat berjalan dengan baik dan dalam rangka mendukung pelayanan dan tidak memenuhi kriteria Aset Tetap Peralatan dan Mesin	521131: Belanja Barang Operasional Penanganan Pandemi COVID-19	<p>Sumber Dana: Rupiah Murni (RM); Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).</p> <p>Pembayaran pengadaan masker/handsantizer diberlakukan sejak penetapan WFH oleh Kepala ANRI.</p> <p>Bagi unit yang telah merealisasikan belanjanya (terbit</p>

NO	URAIAN BELANJA	PENJELASAN	AKUN BELANJA	KETERANGAN
				<p>SP2D) dengan menggunakan akun-akun belanja sebagaimana Surat DJPB Nomor S-308/PB/2020 yaitu: akun belanja 521111, maka perlu melakukan revisi terhadap realisasi yang telah terbit SP2D, dengan menggunakan akun khusus penanganan pandemi COVID-19, yaitu akun belanja 521131, sebagaimana yang telah diatur dalam Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-628/PB/2020 tanggal 23 Juli 2020.</p>
10.	Pengadaan Masker/Handsantizer	Pengadaan Masker/Handsantizer diniatkan untuk persediaan	521841: Belanja Barang Persediaan Penanganan Pandemi COVID-19	<p>Sumber Dana: Rupiah Murni (RM); Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).</p> <p>Pembayaran pengadaan masker/handsantizer yang diperuntukan sebagai persediaan diberlakukan sejak penetapan WFH oleh Kepala ANRI.</p> <p>Bagi unit yang telah merealisasikan belanjanya (terbit SP2D) dengan menggunakan akun-akun belanja sebagaimana Surat DJPB Nomor S-</p>

NO	URAIAN BELANJA	PENJELASAN	AKUN BELANJA	KETERANGAN
				308/PB/2020 yaitu: akun belanja 521811, maka perlu melakukan revisi terhadap realisasi yang telah terbit SP2D, dengan menggunakan akun khusus penanganan pandemi COVID-19, yaitu akun belanja 521841, sebagaimana yang telah diatur dalam Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-628/PB/2020 tanggal 23 Juli 2020.
11.	Pembelian Vitamin dan Penambah Daya Tahan Tubuh	<p>Pembelian Vitamin (obat-obatan) sebagai Penambah Daya Tahan Tubuh yang diperuntukan bagi pegawai yang melaksanakan Work Form Office (WFO) dalam bentuk barang yang besaran pembayarannya mengacu pada ketentuan dalam PMK 78/2019 tentang SBM TA 2020, dan diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) adanya Surat Tugas yang ditetapkan oleh KPA/PPK/Kepala Satker/Pejabat yang berwenang; dan 2) pembayaran didasarkan pada presensi kerja. 	521131: Belanja Barang Operasional Penanganan Pandemi COVID-19;	<p>Sumber Dana: Rupiah Murni (RM); Untuk Satker ANRI Jakarta (kegiatan layanan perkantoran).</p> <p>Rupiah Murni (RM); Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); Untuk selain Satker ANRI Jakarta.</p> <p>Bagi unit yang telah merealisasikan belanjanya (terbit SP2D) dengan menggunakan akun-akun belanja sebagaimana Surat DJPB Nomor S-308/PB/2020 yaitu: akun belanja 521113 (Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh),</p>

NO	URAIAN BELANJA	PENJELASAN	AKUN BELANJA	KETERANGAN
				maka perlu melakukan revisi terhadap realisasi yang telah terbit SP2D, dengan menggunakan akun khusus penanganan pandemi COVID-19, yaitu akun belanja 521131 sebagaimana yang telah diatur dalam Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-628/PB/2020 tanggal 23 Juli 2020.
		Pemberian Vitamin dan Penambah Daya Tahan Tubuh yang diperuntukan bagi pegawai yang melaksanakan pengelolaan arsip statis pada Kedeputian Konservasi dan Bagian Arsip dalam bentuk barang yang besaran pembayarannya mengacu pada ketentuan dalam PMK 78/2019 tentang SBM TA 2020.	521113: Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	Sumber Dana: Rupiah Murni (RM); Untuk Satker ANRI Jakarta (kegiatan layanan perkantoran). Pemberiannya (ekstrafooding) dalam rangka implementasi PP 38 Tahun 2012 pasal 160 ayat (3) dan Keputusan Kepala ANRI Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pengeadaan/Penyediaan Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh Bagi Pegawai Di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun Anggaran 2020.
12.	Biaya Penyemprotan Desinfektan	Pengeluaran Biaya Penyemprotan Desinfektan di area kantor dan sekitarnya yang dilaksanakan swakelola	521131: Belanja Barang Operasional	Sumber Dana: Rupiah Murni (RM);

NO	URAIAN BELANJA	PENJELASAN	AKUN BELANJA	KETERANGAN
		<p>Pengeluaran Biaya Penyemprotan Desinfektan dengan menggunakan jasa pihak ketiga (pihak yang berkompeten dalam jasa penyemprotan desinfektan)</p>	<p>Penanganan Pandemi COVID-19</p> <p>522192: Belanja Barang Jasa Penanganan Pandemi COVID-19</p>	<p>Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).</p> <p>Pembayaran pengadaan masker/handsanitizer yang diperuntukan sebagai persediaan diberlakukan sejak penetapan WFH oleh Kepala ANRI.</p> <p>Bagi unit yang telah merealisasikan belanjanya (terbit SP2D) dengan menggunakan akun-akun belanja sebagaimana Surat DJPB Nomor S-308/PB/2020 yaitu: akun belanja 521119 atau 522191, maka perlu melakukan revisi terhadap realisasi yang telah terbit SP2D, dengan menggunakan akun khusus penanganan pandemi COVID-19, yaitu akun belanja 521131 atau 522191, sebagaimana yang telah diatur dalam Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-628/PB/2020 tanggal 23 Juli 2020.</p>
13.	Pengadaan Thermogun/Thermometer Infrared yang memiliki masa manfaat	a. Thermogun pada kodefikasi BMN ada dikelompok peralatan dan mesin yaitu dapat dimasukkan sebagai Thermometer Infrared dengan masa manfaat lebih dari 8 Tahun.	532119: Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Sumber Dana: Rupiah Murni (RM); Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

NO	URAIAN BELANJA	PENJELASAN	AKUN BELANJA	KETERANGAN
	lebih dari 1 Tahun dan nilainya memenuhi satuan minimal kapitalisasi peralatan dan mesin	b. Apabila harga perolehannya sama dengan atau diatas Rp 1 juta dan dimasukkan untuk digunakan dalam operasional kantor, maka telah memenuhi kriteria sebagai peralatan dan mesin, sehingga belanjanya menggunakan akun 532111 (belanja peralatan dan mesin).	Penanganan Pandemi COVID-19.	Pembayaran pengadaan Thermogun/Thermometer Infrared diberlakukan sejak penetapan WFH oleh Kepala ANRI.
	Pengadaan Thermogun/Thermometer Infrared yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 Tahun dan nilainya tidak memenuhi satuan minimal kapitalisasi peralatan dan mesin	Pembelian/Pengadaan Thermogun/Thermometer Infrared yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 Tahun namun harganya dibawah nilai satuan minimal kapitalisasi peralatan dan mesin (dibawah Rp 1Jt) agar tetap diinput dalam aplikasi SIMAK-BMN sehingga menghasilkan aset ekstrakomptabel	521131: Belanja Barang Operasional Penanganan Pandemi COVID-19.	Bagi unit yang telah merealisasikan belanjanya (terbit SP2D) dengan menggunakan akun-akun belanja sebagaimana Surat DJPB Nomor S-308/PB/2020 yaitu: akun belanja 521111/521119/532111, maka perlu melakukan revisi terhadap realisasi yang telah terbit SP2D, dengan menggunakan akun khusus penanganan pandemi COVID-19, yaitu akun belanja 521131 atau 532119, sebagaimana yang telah diatur dalam Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-628/PB/2020 tanggal 23 Juli 2020.
15.	Pengadaan/Pembangunan tempat cuci tangan portabel maupun permanen	Pembelian/Pengadaan tempat cuci tangan portabel maupun permanen dapat diidentifikasi sebagai kodefikasi BMN tersendiri dalam kelompok peralatan dan mesin , dan harga perolehannya diatas nilai satuan minimal kapitalisasi peralatan dan mesin (Rp 1 Jt), maka menggunakan akun 532111 (Belanja	523114: Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Penanganan Pandemi COVID-19.	Sumber Dana: Rupiah Murni (RM); Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

NO	URAIAN BELANJA	PENJELASAN	AKUN BELANJA	KETERANGAN
		<p>modal peralatan dan mesin) dan perlakuannya sebagaimana pengadaan thermogun dan bilik desinfektan.</p>		<p>Pembayaran pengadaan Pengadaan/Pembangunan tempat cuci tangan portabel maupun permanen diberlakukan sejak penetapan WFH oleh Kepala ANRI.</p> <p>Bagi unit yang telah merealisasikan belanjanya (terbit SP2D) dengan menggunakan akun-akun belanja sebagaimana Surat DJPB Nomor S-308/PB/2020 yaitu: akun belanja 523111, maka perlu melakukan revisi terhadap realisasi yang telah terbit SP2D, dengan menggunakan akun khusus penanganan pandemi COVID-19, yaitu akun belanja 523114, sebagaimana yang telah diatur dalam Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-628/PB/2020 tanggal 23 Juli 2020.</p>
16.	<p>Pengadaan Lisensi Aplikasi Teleconference/Video Conference</p>	<p>Pengadaan Lisensi Aplikasi untuk penyelenggaraan rapat secara online/Video Conference berbayar (masa hak penggunaan kurang dari satu atau sampai dengan 1 tahun), dapat diberikan/dibayarkan dengan ketentuan:</p>	<p>521131: Belanja Barang Operasional Penanganan Pandemi COVID-19</p>	<p>Sumber Dana: Rupiah Murni (RM) Untuk Satker ANRI Jakarta (kegiatan layanan perkantoran). Rupiah Murni (RM)/ Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)</p>

NO	URAIAN BELANJA	PENJELASAN	AKUN BELANJA	KETERANGAN
		<p>a. Pengadaan lisensi aplikasi sebagaimana dimaksud yang bersumber dari non-PNBP dibebankan pada anggaran operasional Satker.</p> <p>b. Pembebanan sebagaimana dimaksud pada huruf a dikecualikan untuk kegiatan:</p> <p>1) pelatihan dan bimbingan teknis yang melibatkan sebagian besar peserta dari luar instansi, dibebankan pada anggaran kegiatan tersebut; dan</p> <p>2) rapat yang bersumber dari PNBPN, dibebankan pada anggaran PNBPN.</p> <p>3) Pertanggungjawaban pengadaan lisensi aplikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dilengkapi dengan:</p> <p>a) bukti invoice /tagihan dari penyedia aplikasi; dan</p> <p>b) informasi nilai tukar rupiah terhadap mata uang yang ditagihkan melalui aplikasi pada hari transaksi (untuk tagihan dengan mata uang asing).</p>		<p>Untuk Satker Pusat Jasa Kearsipan, Satker Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan dan BAST.</p> <p>Pembayaran pengadaan lisensi aplikasi video conference diberlakukan sejak penetapan WFH oleh Kepala ANRI.</p> <p>Bagi unit yang telah merealisasikan belanjanya (terbit SP2D) dengan menggunakan akun-akun belanja sebagaimana Surat DJPB Nomor S-308/PB/2020 yaitu: akun belanja 521111 atau 521119, maka perlu melakukan revisi terhadap realisasi yang telah terbit SP2D, dengan menggunakan akun khusus penanganan pandemi COVID-19, yaitu akun belanja 521131, sebagaimana yang telah diatur dalam Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-628/PB/2020 tanggal 23 Juli 2020.</p>



KEPUTUSAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 336 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN BIAYA PAKET DATA DAN KOMUNIKASI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
DALAM TATANAN NORMAL BARU

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya penerapan sistem kerja pegawai Aparatur Sipil Negara dalam tatanan normal baru, tugas kedinasan dan kegiatan operasional perkantoran dilingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia dapat dilaksanakan secara fleksibilitas dengan pelaksanaan tugas kedinasan di kantor (*work from office*) dan/atau pelaksanaan tugas kedinasan di rumah (*work from home*) sebagaimana Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru;
 - b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia perlu difasilitasi dengan pemberian biaya paket data dan komunikasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Pemberian Biaya Paket Data dan Komunikasi Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia Dalam Tatanan Normal Baru;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
6. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19;
7. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Nonkementerian sebagaimana telah delapan kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
8. Keputusan Presiden Nomor 45/TPA Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;
9. Keputusan Presiden Nomor 87/TPA Tahun 2020 tentang Penunjukkan Pelaksana Tugas Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 394/KMK.02/2020 tentang Biaya Paket Data dan Komunikasi Tahun Anggaran 2020;

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

12. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia;
13. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Arsip Statis dan Tsunami;
14. Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Penanda Tangan Keputusan Pembentukan Tim/Panitia yang Dapat Mengakibatkan Pengeluaran Biaya yang Dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun Anggaran 2020;
14. Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 159 A tentang Biaya/Belanja Fasilitasi Kerja Yang Dibebankan Pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Arsip Nasional Republik Indonesia Dalam Masa Darurat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 277 Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN BIAYA PAKET DATA DAN KOMUNIKASI BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA DALAM TATANAN NORMAL BARU.

KESATU : Pemberian biaya paket data dan komunikasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia sebagai fasilitas pelaksanaan sistem kerja dalam tatanan normal baru.

KEDUA : Pemberian biaya paket data dan komunikasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan dan operasional perkantoran secara daring (*online*).

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun Anggaran 2020.

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

KEEMPAT : Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia diberikan biaya paket data dan komunikasi dengan nilai sebagai berikut:

Pejabat setingkat Eselon I/yang setara :Rp300.000,-/orang/bulan;

Pejabat setingkat Eselon II/yang setara :Rp300.000,-/orang/bulan;

Pejabat setingkat Eselon III/
yang setara ke bawah :Rp150.000,-/orang/bulan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Oktober 2020

a.n. KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS UTAMA



IMAM GUNARTO

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI;
2. Kepala Arsip Nasional RI;
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan RI;
4. Inspektur Arsip Nasional RI;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta V.

VII
BERITA ACARA LAINNYA

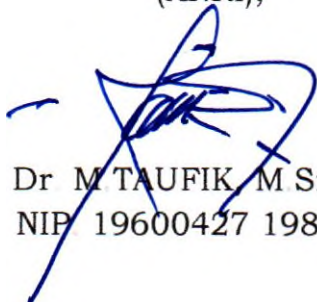
VII.1

BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH

Demikian berita acara serah terima hibah ini dibuat dan ditandatangani rangkap 3 (tiga), 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, rangkap pertama dan rangkap ketiga disimpan oleh PIHAK KESATU, sedangkan rangkap kedua disimpan oleh PIHAK KEDUA, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya

PIHAK KEDUA,

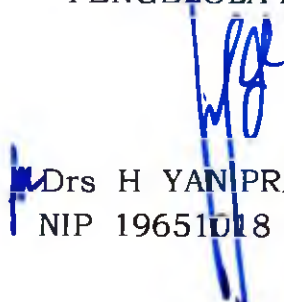
Plt Kepala
Arsip Nasional Republik Indonesia
(ANRI),



Dr. M. TAUFIK, M.Si
NIP. 19600427 198103 1 001

PIHAK PERTAMA,

SEKRETARIS DAERAH
Selaku
PENGELOLA BARANG,



Drs. H. YAN PRANA JAYA, M.Si
NIP. 19651018 199503 1 001

Demikian berita acara serah terima hibah ini dibuat dan ditandatangani rangkap 3 (tiga), 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, rangkap pertama dan rangkap ketiga disimpan oleh PIHAK KESATU, sedangkan rangkap kedua disimpan oleh PIHAK KEDUA, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya

PIHAK KEDUA,

Plt Kepala
Arsip Nasional Republik Indonesia
(ANRI),



Dr MTAUFIK, M Si
NIP 19600427 198103 1 001

PIHAK PERTAMA,

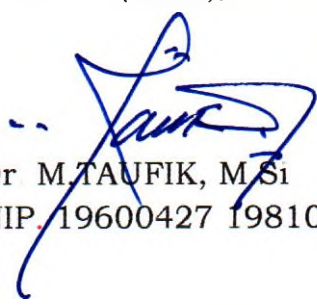
SEKRETARIS DAERAH
Selaku
PENGELOLA BARANG,

Drs H YAN PRANA JAYA, M Si
NIP 19651018 199503 1 001

Demikian berita acara serah terima hibah ini dibuat dan ditandatangani rangkap 3 (tiga), 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, rangkap pertama dan rangkap ketiga disimpan oleh PIHAK KESATU, sedangkan rangkap kedua disimpan oleh PIHAK KEDUA, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya

PIHAK KEDUA,

Plt Kepala
Arsip Nasional Republik Indonesia
(ANRI),


Dr. M. TAUFIK, M Si
NIP. 19600427 198103 1 001

PIHAK PERTAMA,

SEKRETARIS DAERAH
Selaku
DIREKTUR DAERAH BARANG,


Drs. H. YAN PRANA JAYA, M Si
NIP. 19651018 199503 1 001



NOMOR _____

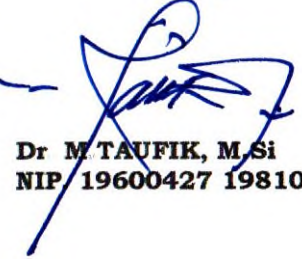
TANGGAL _____

**DAFTAR BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH PROVINSI RIAU
BERUPA TANAH YANG DIHIBAHKAN KEPADA
ARSIP NEGARA REPUBLIK INDONESIA**


NO Urut	Jenis Barang/ Nama Barang	NOMOR		Luas (M ²)	Tahun Pengadaan	Letak/Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga (Rp)	Ket
		Kode Barang	Register				Status Tanah	Sertifikat/Tanggal	Nomor				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Tanah Bangunan Gedung	01 01 11 02 03	0001	8,125	1963	Jl Adi Sucipto No 283 Pekanbaru	Hak Pakai	2-5-1963	P 19		Pembelian	2,416,711,468	Untuk Pembangunan Depo Penyimpanan Arsip Statis Lembaga Negara Tingkat Pusat di Wilayah Provinsi Riau
JUMLAH												2,416,711,468	

PIHAK KEDUA,

Pit KEPALA
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(ANRI),


Dr. M. TAUFIK, M.Si
NIP. 19600427 198103 1 001

PIHAK PERTAMA,


SEKRETARIS DAERAH
Selaku
PENGELOLA BARANG,

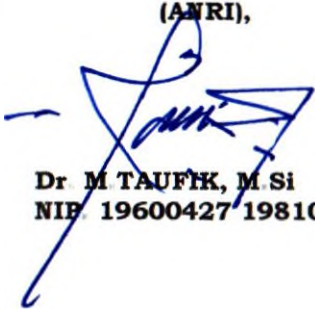

Drs. H. YAN PRANA JAYA, M.Si
NIP. 19651018 199503 1 001

**DAFTAR BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH PROVINSI RIAU
BERUPA TANAH YANG DIHIBAHKAN KEPADA
ARSIP NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

NO Urut	Jenis Barang/ Nama Barang	NOMOR		Luas (M ²)	Tahun Pengada- aan	Letak/Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga (Rp)	Ket
		Kode Barang	Regis- ter				Status Tanah	Sertifikat/ Tanggal	Nomor				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Tanah Bangunan Gedung	01 01 11 02 03	0001	8,125	1963	Jl Adi Sucipto No 283 Pekanbaru	Hak Pakai	2-5-1963	P 19		Pembelian	2,416,711,468	Untuk Pembangunan Depo Penyimpanan Arsip Statis Lembaga Negara Tingkat Pusat di Wilayah Provinsi Riau
JUMLAH												2,416,711,468	

PIHAK KEDUA,

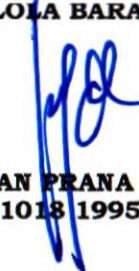
**Pit. KEPALA
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(ANRI),**



**Dr. M. TAUFIK, M. Si
NIP. 19600427 198103 1 001**

PIHAK PERTAMA,

**SEKRETARIS DAERAH
Selaku
PENGELOLA BARANG,**



**Drs. H. YAN PRANA JAYA, M. Si
NIP. 19651018 199503 1 001**

NOMOR _____

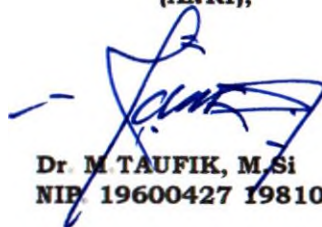
TANGGAL _____

**DAFTAR BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH PROVINSI RIAU
BERUPA TANAH YANG DIHIBAHKAN KEPADA
ARSIP NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

NO Urut	Jenis Barang/ Nama Barang	NOMOR		Luas (M ²)	Tahun Penga- daan	Letak/Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga (Rp)	Ket
		Kode Barang	Regis- ter				Status Tanah	Sertifikat/ Tanggal	Nomor				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Tanah Bangunan Gedung	01 01 11 02 03	0001	8,125	1963	Jl Adi Sucipto No 283 Pekanbaru	Hak Pakai	2-5-1963	P 19		Pembelian	2,416,711,468	Untuk Pembangunan Depo Penyimpanan Arsip Statis Lembaga Negara Tingkat Pusat di Wilayah Provinsi Riau
JUMLAH												2,416,711,468	

PIHAK KEDUA,

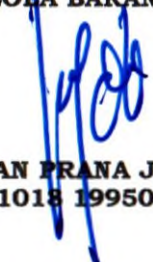
**Plt KEPALA
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(ANRI),**



**Dr. M. TAUFIK, M.Si
NIP. 19600427 198103 1 001**

PIHAK PERTAMA,

**SEKRETARIS DAERAH
Selaku
PENGELOLA BARANG,**



**Drs. H. YAN PRANA JAYA, M.Si
NIP. 19651018 199503 1 001**

**DAFTAR BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH PROVINSI RIAU
BERUPA BANGUNAN YANG DIHIBAHKAN KEPADA
ARSIP NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Nomor		Kondisi Kontruksi Bangunan			Luas Lantai (M2)	Letak / Lokasi	Dokumen Gedung		Luas (M2)	Status Tanah	Asal Usul	Harga (Rp)	Ket
		Kode Barang	Register	Bangunan (B KB RB)	Bertingkat Tidak	Beton Tidak		Alamat	Tanggal	Nomor					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03 11 01 01 01	0010	KB	Tidak	Beton	200	Jl Adi Sucipto	31/12/1963			Tanah Milik Pemda	Pembelian	23,667,400	
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03 11 01 01 01	0011	KB	Tidak	Beton	200	Jl Adi Sucipto	31/12/1963			Tanah Milik Pemda	Pembelian	23,659,500	
3	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03 11 01 01 01	0012	KB	Tidak	Beton	260	Jl Adi Sucipto	31/12/1963			Tanah Milik Pemda	Pembelian	54,313,800	
4	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03 11 01 01 01	0013	KB	Tidak	Beton	400	Jl Adi Sucipto	31/12/1963			Tanah Milik Pemda	Pembelian	46 915 000	
5	Bangunan Kesehatan Lain-lain	03 11 01 06 12	0001	KB	Tidak	Beton	200	Jl Adi Sucipto	31/12/1963			Tanah Milik Pemda	Pembelian	6,293,000	
6	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	03 11 01 08 01	0001	KB	Tidak	Beton	200	Jl Adi Sucipto	31/12/1963			Tanah Milik Pemda	Pembelian	5,585,000	
7	Asrama Permanen	03 11 02 05 01	0001	KB	Tidak	Beton	8093	Jl Adi Sucipto	31/12/1963			Tanah Milik Pemda	Pembelian	59,800,000	
JUMLAH													220 233 700		

PIHAK KEDUA,
Plt. KEPALA
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(ANRI),

Dr. M. TAUFIK, M.Si
NIP. 19600427 198103 1 001

PIHAK PERTAMA,
SEKRETARIS DAERAH
Selaku
PENGELOLA BARANG,

Drs. H. YAN PRANA JAYA, M.Si
NIP. 19651018 199503 1 001

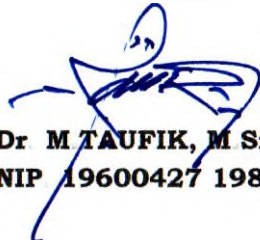
**DAFTAR BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH PROVINSI RIAU
BERUPA BANGUNAN YANG DIHIBAHKAN KEPADA
ARSIP NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Nomor		Kondisi Kontruksi Bangunan			Luas Lantai (M2)	Letak / Lokasi	Dokumen Gedung		Luas (M2)	Status Tanah	Asal Usul	Harga (Rp)	Ket
		Kode Barang	Register	Bangunan (B,KB,RB)	Bertingkat Tidak	Beton Tidak		Alamat	Tanggal	Nomor					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03 11 01 01 01	0010	KB	Tidak	Beton	200	Jl Adi Sucipto	31/12/1963			Tanah Milik Pemda	Pembelian	23 667 400	
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03 11 01 01 01	0011	KB	Tidak	Beton	200	Jl Adi Sucipto	31/12/1963			Tanah Milik Pemda	Pembelian	23 659 500	
3	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03 11 01 01 01	0012	KB	Tidak	Beton	260	Jl Adi Sucipto	31/12/1963			Tanah Milik Pemda	Pembelian	54,313 800	
4	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03 11 01 01 01	0013	KB	Tidak	Beton	400	Jl Adi Sucipto	31/12/1963			Tanah Milik Pemda	Pembelian	46,915,000	
5	Bangunan Kesehatan Lain-lain	03 11 01 06 12	0001	KB	Tidak	Beton	200	Jl Adi Sucipto	31/12/1963			Tanah Milik Pemda	Pembelian	6,293,000	
6	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	03 11 01 08 01	0001	KB	Tidak	Beton	200	Jl Adi Sucipto	31/12/1963			Tanah Milik Pemda	Pembelian	5,585,000	
7	Asrama Permanen	03 11 02 05 01	0001	KB	Tidak	Beton	8093	Jl Adi Sucipto	31/12/1963			Tanah Milik Pemda	Pembelian	59,800,000	
JUMLAH													220,233,700		

PIHAK KEDUA,

**Plt KEPALA
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(ANRI),**


**Dr. M TAUFIK, M Si
NIP. 19600427 198103 1 001**



PIHAK PERTAMA,

**SEKRETARIS DAERAH
Selaku
PENGELOLA BARANG,**

**Drs H YAN PRANA JAYA, M Si
NIP.19651018 199503 1 001**



NOMOR _____

TANGGAL _____

**DAFTAR BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH PROVINSI RIAU
BERUPA BANGUNAN YANG DIHIBAHKAN KEPADA
ARSIP NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Nomor		Kondisi Kontruksi Bangunan			Luas Lantai (M2)	Letak / Lokasi	Dokumen Gedung		Luas (M2)	Status Tanah	Asal Usul	Harga (Rp)	Ket
		Kode Barang	Register	Bangunan (B KB,RB)	Bertingkat Tidak	Beton Tidak		Alamat	Tanggal	Nomor					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03 11 01 01 01	0010	KB	Tidak	Beton	200	Jl Adi Sucipto	31/12/1963			Tanah Milik Pemda	Pembelian	23 667,400	
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03 11 01 01 01	0011	KB	Tidak	Beton	200	Jl Adi Sucipto	31/12/1963			Tanah Milik Pemda	Pembelian	23,659 500	
3	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03 11 01 01 01	0012	KB	Tidak	Beton	260	Jl Adi Sucipto	31/12/1963			Tanah Milik Pemda	Pembelian	54,313,800	
4	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03 11 01 01 01	0013	KB	Tidak	Beton	400	Jl Adi Sucipto	31/12/1963			Tanah Milik Pemda	Pembelian	46,915 000	
5	Bangunan Kesehatan Lain-lain	03 11 01 06 12	0001	KB	Tidak	Beton	200	Jl Adi Sucipto	31/12/1963			Tanah Milik Pemda	Pembelian	6,293,000	
6	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	03 11 01 08 01	0001	KB	Tidak	Beton	200	Jl Adi Sucipto	31/12/1963			Tanah Milik Pemda	Pembelian	5,585,000	
7	Asrama Permanen	03 11 02 05 01	0001	KB	Tidak	Beton	8093	Jl Adi Sucipto	31/12/1963			Tanah Milik Pemda	Pembelian	59,800,000	
JUMLAH													220,233,700		

**PIHAK KEDUA,
Pit KEPALA
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(ANRI),**

**Dr. M TAUFIK, M Si
NIP/ 19600427 198103 1 001**

**PIHAK PERTAMA,
SEKRETARIS DAERAH
Selaku
PENGELOLA BARANG,**

**Drs H YAN PRANA JAYA, M Si
NIP.19651018 199503 1 001**



SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Diponegoro Nomor 22 Telepon (022) 4232448 - 4233347 - 4230963
Faksimil (022) 4203450 Website : www.jabarprov.go.id e-mail : info@jabarprov.go.id
BANDUNG - 40115

BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH TANAH MILIK/DIKUASAI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TERLETAK DI JALAN DERWATI KELURAHAN MARGASARI KECAMATAN BUAHBATU KOTA BANDUNG KEPADA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 032/32/BPKAD
PL 01.02/104/2020

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Dua puluh tujuh** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh** (27-05-2020), kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. a. Nama : Dr. Ir. SETIAWAN WANGSAATMAJA, Dipl.,SE.,M.Eng.
b. Jabatan : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat
c. Kedudukan : Jalan Diponegoro Nomor 22 Bandung

Yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. a. Nama : Dr. MOHAMAD TAUFIK, M.Si
b. Jabatan : Plt. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
c. Kedudukan : Jalan Ampera Raya No. 7 Jakarta

Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK PERTAMA tanah yang terletak di Jln. Derwati Kelurahan Margasari Kecamatan Buahbatu Kota Bandung seluas 1.400 m² (*seribu empat ratus meter persegi*) dengan total nilai Rp 340.200.000,- (*Tiga ratus empat puluh juta dua ratus ribu rupiah*).

Pasal 2

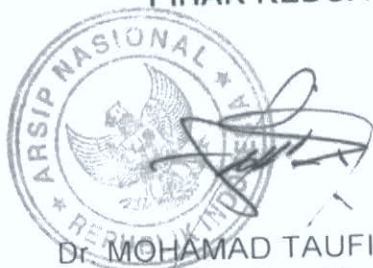
Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan Hibah PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dalam rangka untuk kepentingan sarana kegiatan Arsip Nasional Republik Indonesia, sesuai dengan Perjanjian Hibah Nomor 032/91/BPKAD tanggal 27 Mei 2020 tentang Hibah Tanah Milik/Dikuasai Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Terletak di Jalan Derwati Kelurahan Margasari Kecamatan Buahbatu Kota Bandung Kepada Arsip Nasional Republik Indonesia.

Pasal 3

Dengan dilaksanakan serah terima tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, hak, wewenang dan tanggung jawab atas penggunaan, pemeliharaan dan pengamanan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 telah beralih dari PIHAK PERTAMA ke PIHAK KEDUA.

Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sesungguhnya dan ditandatangani di atas meterai dalam rangkap 5 (lima).

PIHAK KEDUA



Dr. MOHAMAD TAUFIK, M.Si
NIP. Pembina Utama
19600427 198103 1 001

PIHAK PERTAMA



Dr. Ir. SETIAWAN WANGSAATMAJA, Dipl., SE., M.Eng
Pembina Utama
NIP. 19630826 199001 1 001

VII.2

BERITA ACARA PENGHAPUSAN BUKU

BERITA ACARA PEMUSNAHAN BARANG PERSEDIAAN BERUPA BUKU NASKAH SUMBER PADA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020

Nomor : BA-28/BU/XII/2020

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga Puluh bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : **IMAM GUNARTO**
NIP : 196307281992031001
Jabatan : Sekretaris Utama Arsip Nasional RI

Berdasarkan Nota Dinas Penghapusan Barang Persediaan Buku Naskah Sumber Nomor KN.04/108/2020 tanggal 29 Desember 2020 telah melaksanakan Pemusnahan Barang Persediaan Buku Naskah Sumber sebagaimana tercantum dalam Daftar Rincian Barang Persediaan Buku Naskah Sumber dimusnahkan (terlampir), dengan cara di bakar.

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 30 Desember 2020

Saksi-saksi:


1. AFFAN AZHARY SALIM


2. RIDWAN KURNIADI


3. PATI SUNJAYA

Sekretaris Utama,

IMAM GUNARTO

Lampiran Berita Acara Pemusnahan Barang Persediaan Buku Naskah Sumber
 Nomor : BA-28/BU/XII/2020
 Tanggal : 30 Desember 2020

**DAFTAR BARANG PERSEDIAAN
 BERUPA BUKU NASKAH SUMBER YANG DIHAPUS**

KODE	URAIAN	KUANTITAS	RUPIAH
117128	BARANG LAINNYA UNTUK DIJUAL ATAU DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT		
1010501008	Barang Persediaan	177	9.011.789
000016	- Ambonsche Landsbechrijving	2	87.934
000020	- Biro Perjalanan Haji di Indonesia Masa Kolonial	2	90.266
000026	- Ikhtisar Keadaan Politik Hindia Belanda 839-1848	2	121.600
000029	- Inventaris Arsip Perkebunan 1816-1900	2	40.534
000038	- Laporan-laporan Desa (Desa Rapporten)	2	47.534
000039	- Laporan-laporan tentang gerakan protes di Jawa pada Abad XX	2	101.066
000042	- Memori Serah Jabatan Jawa Barat 1921-1930	9	399.897
000043	- Memori Serah Jabatan Jawa Barat I 1931-1940	10	467.000
000044	- Memori Serah Jabatan Jawa Barat Tengah 1921-1930	1	47.133
000045	- Memori Serah Jabatan Jawa Timur dan Tanah Kerajaan 1921-1930	5	237.665
000049	- Otonomi Daerah hindia belanda 1903-1940	2	45.600
000051	- PDRI (pemerintah Darurat RI) dikaji ulang MSI	1	44.067
000057	- Perdagangan Candu 1930- Perang Kemerdekaan RI	1	24.000
000059	- Perjuangan Mempertahankan Jakarta Masa Awal Proklamasi (Kesaksian	1	24.467
000062	- Sarekat Islam Lokal	19	1.095.027
000065	- Surat-surat perjanjian antara kesultanan Riau dengan VOC dan Pemerintah	3	170.199
000066	- Surat-surat perjanjian antara kesultanan Banjarmasin dengan VOC	93	4.715.100
000067	- Surat-surat perjanjian antara kerajaan Bali/Lombok dengan Pemerintah	19	1.202.700
000072	- Laporan Politik 1837	1	50.000
Jumlah		177	9.011.789

Sekretaris Utama,



VII.3

PERSETUJUAN PERUBAHAN REKENING



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI DKI JAKARTA
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A1 JAKARTA
V

JL. T. B. SIMATUPANG KAV. 67, RAGUNAN, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN;
TELEPON (021) 78832427, 78832430-34; FAKSIMILI (021) 78832428-29;
SUREL : kppn139@gmail.com; LAMAN : www.djpb.kemenkeu.go.id/kppn/jakarta5

Nomor : S-1708/WPB.12/KP.05/2020 04 Agustus 2020
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Lampiran
Hal : Persetujuan Rekening Satker Lingkup Arsip Nasional Republik Indonesia yang dibuka pada Bank Syariah Mandiri

Yth. Sekretaris Utama Arsip Nasional Republik Indonesia
Jalan Ampera Raya No.7, Jakarta 12560

Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/ Lembaga dan surat Sekretaris Utama Arsip Nasional Arsip Nasional Republik Indonesia tanggal 30 Juli 2020 Nomor KU.00/1570/2020 hal Permohonan Persetujuan Perubahan Rekening Satker, dengan ini disampaikan bahwa kami memberikan persetujuan sejumlah 1 Rekening Satker lingkup Arsip Nasional Arsip Nasional Republik Indonesia yang dibuka pada Bank Syariah Mandiri.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara Tipe A1
Jakarta V



Ditandatangani secara elektronik
Dewi Yanti

Tembusan:

1. Direktur Pengelolaan Kas Negara
2. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta



**DAFTAR PERUBAHAN REKENING SATKER
DIBUKA PADA BANK SYARIAH MANDIRI**

No	Satuan Kerja				Kuasa Pengguna Anggaran				Bendahara Pengeluaran				Rekening Satker		Rekening Induk		
	Kode	Nama	Alamat	Telp.	Nama	NIP	email	No. telp. Seluler	Nama	NIP	email	No. telp. Seluler	Keterangan	Unsur	Nama	Nomor	Nama
1	681464	BALAI ARSIP STATIS DAN TSUNAMI	Jalan T. Nyak Arief No.122 Banda Aceh	0816-1626-818	Muhammad Ihwan,S.Sos, M.Si	19710817199803101	muhammad.ihwan@anri.go.id	0816-1626-818	Sri Wahyuni, SE	199010192014032000	arsiptsunami@gmail.com	0852-7768-1172	BPG	6814641000	BPG 001 BALAI ARSIP STATIS DAN TSUNAMI	7432009151	RKK ARSIP NASIONAL RI



VIII
TELAAH LAPORAN KEUANGAN

KERTAS KERJA TELAHAH LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT KL
PERIODE TA. 2020 AUDITED

Kode BA dan Nama BA : 087 Arsip Nasional Republik Indonesia

Objek Penelaahan	Kondisi LK	Seharusnya	
<i>Beri tanda centang (✓) sesuai Laporan Keuangan. Jika tidak ada data, isi dengan N/A</i>			
<i>Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran</i>			
KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN			
Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok (Hardcopy)	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Pernyataan telah di reviu oleh APIP	✓		Ada
1. Pernyataan Tanggung Jawab	✓		Ada
2. LRA, Neraca, LO dan LPE face	✓		Ada
3. Catatan atas Laporan Keuangan	✓		Ada
Laporan Keuangan Tambahan	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Neraca Percobaan Akrua	✓		Ada
2. Neraca Percobaan Kas	✓		Ada
3. Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja	✓		Ada
KESESUAIAN LAPORAN HARDCOPY DENGAN E-REKON&LK			
	Sama	Tidak	Seharusnya
1. Apakah semua face laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan e-Rekon&LK termasuk perbandingan dengan tahun 2019?	✓		Sama
<i>Laporan Keuangan disusun menggunakan e-Rekon&LK sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.</i>			
KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI			
Neraca Balance	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah Satker Neracanya tidak balance? Cek di e-Rekon&LK melalui menu "Daftar >> Neraca Tidak Balance"		✓	Tidak
Saldo antar Laporan	Sama	Tidak	Seharusnya
2. Apakah Nilai "Surplus/(Defisit)-LO" di LO = Nilai "Surplus/(Defisit) - LO" di LPE	✓		Sama
3. Apakah Saldo "Ekuitas Akhir" di LPE = "Saldo Ekuitas" di Neraca	✓		Sama
<i>Apabila terjadi, biasanya karena ada akun-akun yang tidak ada dalam Referensi sehingga tidak terkalkulasi</i>			
NERACA PERCOBAAN AKRUAL			
PENGECEKAN SALDO YANG TIDAK NORMAL DAN TIDAK ADA REFERENSINYA	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun dengan uraian "null" atau "uraian tidak ada"? (Cek di e-Rekon&LK, menu Daftar >> Akun Non Ref)		✓	Tidak
2. Adakah "Saldo Tidak normal"? (Cek e-Rekon&LK, menu "Daftar >> Saldo Tidak Normal"), kecuali akun "Beban Penyisihan Piutang" dan "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan"	✓		Tidak
TELAHAH PER AKUN PADA NERACA PERCOBAAN			
AKUN ASET (1xxxxx)	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun Aset (1xxxxx) yang semestinya tidak terdapat di K/L tersebut, misal Persediaan Amunisi yang ada di Kementerian Kesehatan, atau persediaan Bansos di LIPI, atau Piutang BLU layanan Kesehatan di Kemenristek Dikti.		✓	Tidak
2. Adakah Akun 1111xx hingga 1115xx? (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari 1116xx hingga 1119xx, selainnya adalah akun BUN)		✓	Tidak

Akun Dibayar dimuka (prepaid) dan Uang Muka Belanja Khusus BUN (Transaksi Hibah, Bunga, Subsidi, Lain-lain, dan Transfer merupakan Transaksi BUN)		Ada	Tidak	Seharusnya	
1.	Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka (prepaid)		√	Tidak	
2.	Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain		√	Tidak	
AKUN KEWAJIBAN (2xxxxx)		Ada	Tidak	Seharusnya	
1.	Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar		√	Tidak	
Telaah Akun Hibah Langsung Yang Belum Disahkan (akun 218211)		Ya	Tidak	Seharusnya	
1.	Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (<i>Cek di Neraca Percobaan saldo awal</i>)		√	Ya/Tidak	
2.	Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya sama dengan Akun 391133-Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada 30 Desember 2020? (<i>untuk mengecek akun 391133, Cetak di Neraca Percobaan Desember 2020</i>)		√	Ya	
3.	Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 30 September 2020, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?		√	Tidak	
<i>Sehubungan terbitnya Surat S-876/PB/2020 ttg Penyelesaian Hibah Langsung Bentuk Uang/Barang/Jasa/ Surat Berharga Tahun Anggaran Yang Lalu, satker yang memiliki hibah langsung TAYL diwajibkan untuk mengesahkan pendapatan hibahnya sehingga saldo akun hibah langsung yang belum disahkan pada laporan keuangan Tahunan adalah Hibah Tahun Anggaran Berjalan yang belum disahkan.</i>					
4.	Jika ada akun 111827-Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan, apakah nilainya ≤ akun 218211 ?	-	-	Ya	
AKUN EKUITAS (3xxxxx)		Ada	Tidak	Seharusnya	
1.	Adakah akun 391117-Penyesuaian Nilai Persediaan		√	Tidak	
2.	Adakah akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kec. Di RRI, TVRI dan POLRI		√	Tidak	
3.	Adakah Saldo akun 391114-Revaluasi Aset Tetap		√	Ya	
4.	Adakah Saldo akun 391151-Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya		√	Ada/Tidak	
5.	Jika ada, Apakah Saldo akun 391151-Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya berasal dari transaksi reklasifikasi Aset Tetap /Aset Lainnya dengan masa manfaat yang berbeda dan/atau reklasifikasi persediaan menjadi aset ekstrakomptabel atau sebaliknya	-	-	Ya	
6.	Apakah Saldo akun 391131-Pengesahan Hibah Langsung ≥ akun 111822-Kas Lainnya di Kementerian Negara/ Lembaga dari Hibah	√		Ya	
<i>saldo akun 391151 hanya berasal dari selisih akumulasi penyusutan aset yang dilakukan reklas keluar dan reklas masuk. Nilai aset yang direklas keluar dan direklas masuk semestinya sama. Selisih transaksi reklas keluar dan reklas masuk aset tetap/persediaan bisa ditelusuri dari menu jurnal penyesuaian di Aplikasi E-rekon</i>					
Akun 313221-Transfer Masuk (TM) dan akun 313211-Transfer Keluar (TK)					
1.	Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada excel Monitoring TK/TM e-Rekon&LK				0
<i>Selisih secara absolut diperoleh dari e-rekon&LK (menu monitoring >> Transfer Masuk/Keluar), dengan mengurangi kolom TK dengan kolom TM, kemudian hasilnya diabsolutkan (yang hasilnya negatif, dibuat positif). Apakah ada penjelasan secara manajemen penyebab selisih TKTM secara absolut tsb ?</i>					
2.	Nilai selisih TK/TM secara Neto/Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan				0
AKUN PENDAPATAN (4xxxxx)					
Akun Pendapatan Perpajakan (41xxxx)		Ada	Tidak	Seharusnya	
1.	Adakah akun 41xxxx-Pendapatan Perpajakan <i>kecuali BA.015.04 ?</i>		√	Tidak	

Ketepatan penggunaan Akun PNPB Baru (Kepdirjen 211/PB/2018 BAS)	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun 423xxx		√	Tidak
2. Adakah akun 421xxx khusus BUN? Yaitu 421111, 421211, 421621		√	Tidak
3. Adakah akun 422xxx khusus BUN? Yaitu 4221xx		√	Tidak
4. Adakah akun 425xxx khusus BUN? Antara lain 425143, 425144, 425161, 425162, 425745, 425772, 425773, 425774, 425815, 425816, 425998		√	Tidak
Akun Penerimaan Kembali Belanja Khusus BUN	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah Akun 425914/5/6/8/9 Penerimaan kembali belanja Kewajiban Utang/Subsidi/hibah/ lain-lain/transfer TAYL		√	Tidak
Pengecekan akun yang tidak sesuai karakteristik tupoksi entitas	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun yang tidak normal keberadaannya?, misalnya pendapatan SIM/STNK/ Kejaksaan terdapat pada Kementerian Kesehatan		√	Tidak
2. Adakah akun 425719-Pendapatan Bunga Lainnya Di KL? seharusnya 425764-Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)		√	Tidak
Akun Pendapatan Hibah (43xxxx)	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun 43xxxx-Pendapatan Hibah		√	Tidak
Telaah Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah ada akun 491429-Pendapatan Perolehan Aset Lainnya?		√	Ya/Tidak
2. Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat menjurnal?)		√	Ya/Tidak
AKUN BELANJA (5xxxxx)	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun 54/55/56/57xxxx (Beban Bunga, Subsidi, Hibah, lain-lain) ?		√	Tidak
TELAH TERKAIT BLU	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan"		√	Tidak
2. Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada Aplikasi e-rekon? (cek pada Aplikasi e-Rekon pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)		√	Tidak
Jika TIDAK Memiliki Satker BLU	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun 424xxx-Pendapatan BLU		√	Tidak
2. Adakah akun 525xxx (Belanja Barang dan Jasa BLU)		√	Tidak
3. Adakah akun 527xxx (Belanja Modal BLU)		√	Tidak
Telaah Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Isi kolom di sebelah kanan saldo akun 491511			147.215.038
2. Isi kolom di sebelah kanan saldo akun 593311			101.927.166
3. Isi kolom di sebelah kanan hasil dari akun 491511 dikurangi akun 593311			45.287.872
4. Apakah nilai angka 1, 2, dan 3 diatas normal ? Tidak terlalu besar atau terlalu kecil?		√	Tidak
<i>Untuk mengetahui apakah selisih tsb. Wajar, dapat dengan cara: membandingkan dengan tahun lalu, men-sort ascending per satker dan menelaah apakah normal (misalnya satker kecil namun nilainya lebih besar dari Satker Besar), atau membuat benchmark per Satker kecil/satker besar dan cara2 lainnya.</i>			

5	Adakah akun 491511/593311 yang berasal dari transaksi Reklas Keluar (K10)/Reklas Masuk(M07)		√	Tidak
<i>Jenis Transaksi K10-Reklas Keluar dan M07-Reklas Masuk seharusnya menghasilkan akun "391151-Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya". Jika masih terdapat Jenis transaksi tersebut yang menghasilkan 491511/593311, satker tersebut belum melakukan update Aplikasi persediaan dan melakukan pengiriman ulang dari bulan januari. Untuk menelusuri dapat dilakukan dengan mencetak excel "Jurnal Umum Penyesuaian" di menu "daftar" di Aplikasi e-Rekon kemudian filter Jenis Transaksi K10/M07</i>				
6..	Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19?		√	Ya/Tidak
7.	Apabila terdapat pengeluaran belanja dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, apakah belanja tersebut sudah menggunakan kode akun khusus untuk Penanganan Pandemi Covid-19?		√	Ya
LAPORAN OPERASIONAL				
Pengecekan Pos/Akun yang tidak boleh ada		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah pendapatan Perpajakan (Kecuali BA.015)		√	Tidak
2.	Adakah pendapatan Hibah		√	Tidak
3.	Adakah beban bunga		√	Tidak
4.	Adakah beban subsidi		√	Tidak
5.	Adakah beban hibah		√	Tidak
6.	Adakah beban transfer		√	Tidak
7.	Adakah beban lain-lain		√	Tidak
Pengecekan saldo Normal		Ada	Tidak	Seharusnya
8.	Adakah akun "null" atau tidak ada uraiannya (<i>saldo akun "null" biasanya disebabkan karena belum dilakukan update aplikasi</i>)		√	Tidak
9.	Apakah seluruh akun bernilai positif, kecuali Beban Penyisihan Piutang	√		Ya
<i>Seluruh Akun LO Nilai Normalnya adalah Positif (baik pada Kegiatan Operasional, Non Operasional maupun Pos Luar Biasa), kecuali beban penyisihan piutang dapat bernilai negatif. (yang harus positif adalah akunnya, sedangkan penjumlahan/sub penjumlahan pada LO dapat bernilai Negatif).</i>				
Kebenaran Beban Penyisihan Piutang sesuai Perdirjen 43/2015		Ya	Tidak	Seharusnya
10.	Saldo Awal Penyisihan Piutang (<i>Jk.Pendek dan Jk.Panjang</i>) - Saldo Akhir Penyisihan Piutang (<i>Jk.Pendek dan Jk.Panjang</i>) = Beban Penyisihan Piutang LO	-	-	Ya
<i>Jika hasil diatas "tidak", maka cek apakah ada penghapusan piutang dan/atau koreksi piutang senilai selisih diatas. Jika tidak ada, kemungkinan salah dalam menjurnal penyisihan piutang.</i>				
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS				
		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Apakah ada saldo pos "Selisih Revaluasi Aset"		√	Tidak
<i>Jika ada, telusuri saldo tersebut terdapat di satker mana melalui aplikasi e-rekon kemudian pastikan kebenaran dokumen sumbernya.</i>				
2.	Pada LPE, apakah "Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"	√		Sama
<i>Apabila perhitungan no.2 menghasilkan "tidak sama" berarti ada Satker melakukan jurnal menggunakan akun 391111</i>				
Pengecekan akun koreksi		Ya	Tidak	Seharusnya
Cek seluruh akun koreksi yaitu 391113, 391114, 391116, 391118 dan 391119				
1.	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud ?	√		Ya
Contoh 1 : Pengungkapan 391116 (Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi) senilai Rp 151.500.000 disebabkan oleh Transaksi Saldo Awal (100) senilai Rp100.000.000, Transaksi Koreksi Nilai/Kuantitas (204) Rp 51.500.000 dengan dokumen sumber BAST.				

Contoh 2 : Pengungkapan akun 391119-Koreksi lainnya senilai Rp 23.500.000 disebabkan oleh adanya kesalahan pencatatan utang senilai Rp23.000.000 dan pencatatan piutang senilai 500.000 di tahun anggaran yang lalu sehingga dilakukan dikoreksi di tahun berjalan.

NERACA

	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN	√		Ya
2. Apakah ada Penjurnalan akun "Belum Diregister" yang dipasangkan dengan beban ?	√		Tidak

Pastikan tidak terdapat jurnal manual yang dilakukan oleh operator dalam rangka menghilangkan Akun belum diregister dengan memasangkannya dengan akun beban yang disebabkan karena kesalahan akun belanja. Jurnal tersebut dapat ditelusuri dengan mencetak excel "Jurnal Umum Penyesuaian" di menu "daftar" di Aplikasi e-Rekon kemudian memilih jenis jurnal "ALL" atau "JRNADJ" dan "JRNUMUM", kemudian filter kode akun register (D/K) dan Akun Beban (D/K)

Dari kolom perbandingan antara 31 Desember 2020 dengan 31 Desember 2019 adakah			
3. Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar (terlalu tinggi/rendah) tanpa penjelasan?		√	Tidak
4. Normalnya total ASET akan naik dibanding Audited 2019, Apakah demikian?	√		Ya

TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN

Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya, bila jawaban awal "TIDAK", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya juga "TIDAK"

Pengecekan Saldo Kas di Bendahra Pengeluaran	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah Saldo Kas di Bendhara Pengeluaran = LPJ Bendahara dan Aplikasi Silabi ?	√		Ya
Pengecekan telah melakukan penyisihan piutang	Ada	Tidak	Seharusnya
2. Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun:		√	Ada/Tidak
- Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/Penyisihan TP/TGR (Neraca)		√	Ada
- Beban Penyisihan Piutang (di LO)		√	Ada
Pengecekan telah melakukan reklasifikasi piutang jk. Panjang	Ada	Tidak	Seharusnya
3. Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun:		√	Ada/Tidak
- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang		√	Ada
Pengecekan persediaan	Ada	Tidak	Seharusnya
4. Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun:	√		Ada/Tidak
- Beban Persediaan (di LO)	√		Ada
- 491511-Pendapatan Penyesuaian Persediaan di Neraca Percobaan	√		Ada/Tidak
- 593311-Beban Penyesuaian Persediaan di Neraca Percobaan	√		Ada/Tidak
Pengecekan penyusutan aset tetap	Ada	Tidak	Seharusnya
5. Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun:	√		Ada/Tidak
- Akumulasi AT/AL (Neraca)	√		Ada
- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)	√		Ada
<i>Mulai tahun 2018 dengan e-Rekon&LK G2 dimungkinkan ada Satker yang lupa melakukan penyusutan/amortisasi Semester II</i>			
Pengecekan Beban Diserahkan ke Masyarakat & Beban Bansos	Ada	Tidak	Seharusnya
6. Adakah beban barang diserahkan ke Masyarakat?		√	Ya/Tidak
Jika Ya, adakah realisasi akun 526xxx pada neraca percobaan kas ?		√	Ya
7. Adakah beban bansos?		√	Ya/Tidak
Jika Ya, adakah realisasi akun 57xxxx pada neraca percobaan kas ?		√	Ya
Pengecekan Jurnal Akrua	Ada	Tidak	Seharusnya
8. Adakah realisasi pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492x)?	√		Ada/Tidak
- Adakah akun 219211-Pendapatan sewa diterima Dimuka pada Neraca ?	√		Ada/Tidak
9. Adakah realisasi 522141-Belanja Sewa di Neraca Percobaan Kas () ?	√		Ada/Tidak
- Adakah belanja Barang dibayar dimuka pada Neraca		√	Ada/Tidak
10. Adakah realisasi belanja Jasa Listrik/telepon/air di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9) ?	√		Ada/Tidak
- Ada Belanja Barang yang masih harus dibayar pada Neraca	√		Ada

KESESUAIAN DENGAN L-BMN

Rekon Internal LKKL dengan L-BMN	Ya/Ada	Tidak	Seharusnya
1. Apakah ada selisih Saldo pada Rekon Internal Sawal di e-Rekon&LK?	√		Tidak
2. Apakah ada selisih Saldo pada Rekon Internal Bulan Desember 2020 di e-Rekon&LK?	√		Tidak
<i>Pada e-Rekon&LK G2 lihat menu "Monitoring BMN>> Rekap Rekon Internal dan Rekap Rekon Internal Sawal"</i>			
3. Apakah menurut e-Rekon-lk terdapat Jurnal Tidak lazim (menu Daftar >> Jurnal Tidak Lazim) yaitu jurnal dengan akun Persediaan/Aset yang seharusnya hanya kiriman dari Aplikasi SIMAK ?	√		Tidak
4. Jika ada, apakah jurnal tersebut telah benar?	√		Ya
Validasi Transaksi BMN Pada Aplikasi e-Rekon	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Apakah terdapat transaksi BMN yang terkena validasi pada Aplikasi e-Rekon&LK yang meliputi , 1. Nilai Perolehan Minus, Nilai Buku Minus dll. (<i>Masuk ke Aplikasi e-Rekon&LK, kemudian pilih "daftar BMN"</i>)	√		
MENU DAFTAR BMN			
	Seharusnya	Ya	Tidak
1 Adakah Nilai Perolehan Minus (Intrakomptabel)?	Tidak		√
2 Berapa NUP BMN dengan Nilai Perolehan Minus? (diisi jumlah NUP)		-	
3 Berapa Total Nilai BMN dengan Nilai Perolehan Minus? (diisi nilai rupiahnya)		-	
4 Adakah Nilai Buku Minus (Intrakomptabel)?	Tidak	√	
5 Berapa NUP BMN dengan Nilai Perolehan Minus? (diisi jumlah NUP)		1 s.d. 2	
6 Berapa Total Nilai BMN dengan Nilai Perolehan Minus? (diisi nilai rupiahnya)			16.241.500
LAPORAN REALISASI ANGGARAN			
	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah Pagu Minus? (<i>Cek melalui e-Rekon-lk menu daftar >> pagu minus"</i>)		√	Tidak
2. Adakah uraian jenis belanja " <i>tidak ada"</i> pada Neraca Percobaan Kas?		√	Tidak
Pengecekan TDK			
1. Adakah TDK Belanja Netto baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo		√	Tidak
2. Adakah TDK Pendapatan Netto di Satker Aktif, Tidak Aktif dan tidak aktif bersaldo ?		√	Tidak
3. Adakah TDK Pendapatan MPHL-BJS		√	Tidak
4. Adakah TDK Kas di Bendahara BLU baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo		√	Tidak
5. Adakah TDK Kas di Bendahara Pengeluaran baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo		√	Tidak
6. Adakah TDK Kas Hibah baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo		√	Tidak
<i>e-Rekon&LK Menu Monitoring >> Transaksi Dalam Konfirmasi" atas seluruh jenis TDK baik pada Satker DIPA Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo</i>			
SATKONS dan PENGAWASAN TEMUAN BPK TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA			
Telaah ini bertujuan meminimalisir adanya temuan tahun lalu yang belum diselesaikan dan terjadinya temuan yang berulang. Dibawah ini adalah contoh-contoh telaahnya.			
Satker Konsolidasian	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah Jurnal tahun 2019 telah diselesaikan (Dinihilkan) ?	√		
2. Apakah telah dilakukan Jurnal Take-In Reval dengan benar ?	√		
<i>Cek kebenaran apabila ada Jurnal baru di Tahun 2020</i>			
Pertanyaan berdasarkan temuan-temuan BPK tahun-tahun lalu (Disesuaikan dengan kondisi masing-masing satker)	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah sudah dibuat Berita Acara Stock Opname Persediaan ?	√		Ya
2. Apakah semua jurnal manual di SAIBA telah dibuatkan Memo Penyesuaian beserta dokumen pendukung terkait?	√		Ya

3. Masih adakah kesalahan akun belanja Persediaan	√		Tidak
4. Apakah PNBPN telah disetor tepat pada waktunya (tidak terlambat)	√		Ya
5. Adakah PNBPN digunakan langsung?		√	Tidak
6. Apakah seluruh pendapatan dan Belanja BLU telah disahkan (di-SP3B-BLUkan)?	-	-	Ya
7. Apakah seluruh hibah langsung telah disahkan (di-SP2HL-kan)?	-	-	Ya
8.	-	-	Ya

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Kesesuaian antara Face Laporan dan CaLK	Sama	Tidak	Seharusnya
1. Rincian yang ada di CaLK sama dengan LKLL (Neraca Percobaan)	√		Sama

Masih sering ditemukan kesalahan ketik nilai2 yang seharusnya dituliskan di CaLK.

Kecukupan pengungkapan pada CaLK (Bila akun tsb ada)	Ya/Ada	Tidak	Seharusnya
2. Apakah pengungkapan Revaluasi BMN telah sesuai baik pada Penjelasan Umum, LO, LPE dan Neraca ?	-	-	Ya
3. Apakah pengungkapan dan ikhtisar Transaksi yang bersumber dari PHLN telah secara memadai sesuai format ?	-	-	Ya
4. Apakah pengungkapan KDP telah sesuai?	-	-	Ya
5. Apakah ada penjelasan akun "Dana Yang Dibatasi Penggunaannya" ?	-	√	Ada

Akun Kas dan Akun lainnya yang substansinya merupakan Kas adalah akun yang "sensitif", pastikan kebenaran seluruh akun tsb., bila perlu bandingkan dengan LPJ Bendahara dan Rekening Koran.

7. Apakah terdapat penjelasan akun Hibah Langsung yang Belum Disahkan ?	√		Ya
8. Apakah format dan penjelasan akun-akun LPE telah sesuai? Terutama penjelasan akun Koreksi?	√		Ya
9. Apakah belanja dalam rangka penanganan Pandemi Covid-19 telah dijelaskan dalam CaLK?	√		Ya

ANALISIS LAINNYA

Analisis Laporan Keuangan Lainnya	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah Realisasi Belanja 51 + 525111 = Beban Pegawai pada Laporan Operasional	√		Ya
2. Apakah realisasi belanja 53 = (Pembelian Aset Tetap+Perolehan KDP+Pengembangan KDP)-Hibah Langsung Barang	√		Ya
3. Apakah Beban Penyusutan/Amortisasi = Akumulasi Penyusutan/Amortisasi 2020 - Saldo Awal Penyusutan/Amortisasi 2020	√		Ya
4. Apakah Beban Persediaan = Saldo Awal + Pembelian - Saldo Akhir (<i>rumus perhitungan beban persediaan terlampir</i>)	√		Ya

Pengungkapan Dampak dan Penanganan Pandemi COVID-19

Kecukupan pengungkapan pada CaLK - LRA	Ada	Tidak
1. Apakah terdapat pengungkapan atas <i>Refocussing</i> kegiatan/Realokasi anggaran/Revisi DIPA terkait penanganan Pandemi Covid-19	√	
2. Jika terdapat <i>Refocussing</i> kegiatan/Realokasi anggaran/Revisi DIPA terkait penanganan Pandemi Covid-19, berapa nominal perubahannya (kenaikan/penurunan) pada total anggaran K/L	(25.339.212.000)	
3. Apakah terdapat pengungkapan atas perubahan Estimasi Pendapatan (Pajak dan/atau PNBPN) sebagai dampak Pandemi Covid-19	√	
4. Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Pendapatan (Pajak dan/atau PNBPN) khususnya sebagai dampak Pandemi Covid-19	√	
5. Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Belanja dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dengan menggunakan akun Non penanganan pandemi Covid-19	√	
6. Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Belanja dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dengan menggunakan akun penanganan pandemi Covid-19	√	
Kecukupan pengungkapan pada CaLK - Laporan Operasional	Ada	Tidak

7.	Apakah terdapat pengungkapan atas perubahan Realisasi Pendapatan - LO (Pajak dan/atau PNBPN) sebagai dampak Pandemi Covid-19	√	
8.	Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Beban dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dengan menggunakan akun Non penanganan pandemi Covid-19	√	
9.	Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Beban dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dengan menggunakan akun penanganan pandemi Covid-19	√	
Kecukupan pengungkapan pada CaLK - Laporan Perubahan Ekuitas		Ada	Tidak
10.	Apakah terdapat pengungkapan atas Transaksi Antar Entitas berupa Transfer Masuk – Transfer Keluar, dapat berupa pengiriman barang persediaan, peralatan dan mesin berupa alat kesehatan, dan/atau jenis-jenis BMN lainnya yang spesifik untuk penanganan pandemi COVID-19.	-	-
11.	Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi pengesahan hibah langsung baik berupa uang, barang, maupun jasa yang diterima oleh K/L dalam rangka penanganan pandemi COVID-19	-	-
Kecukupan pengungkapan pada CaLK - Neraca		Ada	Tidak
12.	Apakah terdapat pengungkapan atas Pos Aset, antara lain :		
	a. Kenaikan/penurunan Piutang sebagai dampak pandemi Covid-19	-	-
	b. Kenaikan/penurunan Persediaan sebagai dampak pandemi Covid-19	√	
	c. Kenaikan/penurunan KDP sebagai dampak pandemi Covid-19	-	-
	d. Kenaikan/penurunan pos Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya	√	
13.	Apakah terdapat pengungkapan atas Pos Kewajiban, antara lain :		
	a. Kenaikan/penurunan Utang kepada pihak ketiga sebagai dampak pandemi Covid-19	-	-
	b. Kenaikan/penurunan Hibah yang belum disahkan sebagai dampak pandemi Covid-19	-	-

Analisis Laporan Keuangan Lainnya dimungkinkan menghasilkan perhitungan yang tidak sama dengan rumus. Namun perlu dianalisis penyebab selisihnya. Analisis dapat dilakukan dengan bantuan ayat Jurnal Penyesuaian (excel) yang tersedia pada Aplikasi e-Rekon&LK.

LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN

"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA, serta hal-hal lainnya yang diperlukan, termasuk perbedaan dengan e-Rekon&LK"

TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN

Pengecekan Beban Diserahkan ke Masyarakat & Beban Bansos

- | | |
|----|---|
| 1. | Terdapat beban barang yg diserahkan kepada Masyarakat/Pemda Tahun 2019 yang baru diselesaikan pada tahun 2020 berupa seperangkat Komputer |
|----|---|

KESESUAIAN DENGAN L-BMN

Penjelasan Perbedaan Rekon Internal LKLL dengan L-BMN

- | | |
|----|---|
| 1. | Adanya selisih Saldo pada Rekon Internal Sawal di e-Rekon & LK dikarenakan Koreksi Pencatatan Hasil Penilaian Kembali Barang Milik Negara dalam Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2018 pada Satker Konsolidasi Arsip Nasional RI |
|----|---|

2.	Terdapat Jurnal Tidak Lazim pada e-rekon&LK dikarenakan Koreksi Pencatatan Reklasifikasi Belanja Pemeliharaan dan Belanja Bahan menjadi Aset/Persediaan pada Satker ANRI Jakarta
3.	Terdapat nilai buku aset minus sebesar Rp16.241.500,00 yang merupakan selisih amortisasi software yang berasal dari satker BAST. Hal tersebut disebabkan karena pada bulan Juli 2019, satker BAST melakukan jurnal penyesuaian pada aplikasi SAIBA sebesar Rp16.241.500,00 yang digunakan untuk menyelesaikan nilai rekonsiliasi amortisasi Aset Tak Berwujud yang pada saat itu tidak mendapat amortisasi. Hal ini dilakukan oleh operator SAIBA BAST atas rekomendasi dari KPPN Banda Aceh agar nilai amortisasi antara SIMAK dan SAIBA seimbang. Namun pada akhirnya e-Rekon menganggap hal ini sebagai nilai yang tidak dapat dijelaskan karena tidak terdapat jurnal tersebut pada aplikasi SIMAK BAST.
SATKONS dan PENGAWASAN TEMUAN BPK TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA	
Pertanyaan berdasarkan temuan-temuan BPK tahun-tahun lalu (Disesuaikan dengan kondisi masing-masing KL)	
1.	-

Mengetahui

Pejabat Penyusun LKKL,

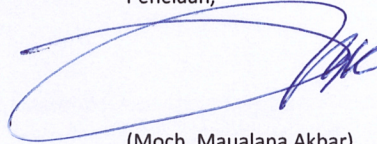


(Ali Sugeng)

NIP.197008301998031001

Jakarta, April 2021

Penelaah,



(Moch. Maulana Akbar)

NIP.197911022001121001

L A P O R A N
K E U A N G A N

2020



ARSIP NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA